2025

PEMERINTAH KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH



Tugu Burung Sulangking - Barabai

AUDITED

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Jalan Perwira Nomor 13 BARABAI - 71311

bpkpd.hstkab.go.id *bpkpd@hstkab.go.id*

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB xiv

LAPORAN KEUANGAN
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1
B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 3
C. NERACA 4
D. LAPORAN OPERASIONAL 6
F. LAPORAN ARUS KAS 8
E. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 10
F. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 11

1. PENDAHULUAN 11
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 11
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 11
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan 13

2. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 14
2.1. Ekonomi Makro 14
2.1.1. Tingkat Kemiskinan 14
2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka 15
2.1.3. Indeks Gini (Gini Ratio) 16
2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 17
2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (Tahun 2023-2025) 18
2.1.6. Inflasi 18
2.1.7. Struktur Perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Tahun 2023-2025) 19
2.2. Kebijakan Keuangan Daerah 20
2.2.1. Kebijakan Pendapatan 20
2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah 22
2.2.3. Kebijakan Pembiayaan 24
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 24
2.4. Kinerja Stunting dan Mandatory Spending. 25
2.4.1. Kinerja Stunting 25
2.4.2. Mandatory Spending 32

3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 38
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 38
3.1.1. Pendapatan Daerah 38
3.1.2. Belanja Daerah 40
3.1.3. Belanja Transfer 41
3.1.4. Pembiayaan Daerah 42
3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan 43

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI 45
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 45
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 46
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 46
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah 47

5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 82
5.1. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 82
5.1.1. Pendapatan 82
5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah 83
5. 1.1.1. Penda Rincian realisasi Belanja Pegawai Per SKPD TA 2025 84
5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daera 86
5.1.1.2.2.1. Dana Insentif Daerah (DID) 97
5.1.1.2.1.2. Dana Alokasi Umum 98
5.1.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusu (DAK) Non Fisik 100
5.1.1.2.2.2. Dana Desa 101
5.1.1.2.3. Pendapatan Transfer Antar Daerah 101
5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 103
5.1.2. Belanja 104
5.1.2.1.1. Belanja Pegawai 107
5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial 112
5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah 113
5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 114
5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 115
5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 117
5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya 117
5.1.2.3. Belanja Tak Terduga 118
5.1.2.3. Belanja Tak Terduga 118
5.1.2.4. Belanja Transfer 118
5.1.2.4.1. Belanja bagi Hasil 119
5.1.2.4.1.1. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa 120
5.1.2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan 120

5.1.4. Pembiayaan Netto 122
5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan 123
5.1.4.1.1. SiLPA Tahun Sebelumnya 123
5.1.4.1.2. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya 124
5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan 124
5.1.4.2.1. Penyertaan Modal Daerah 124
5.1.4.2.1. Penyertaan Modal Daerah 124
5.1.5. SiLPA 125

5.2. Penjelasan Atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 128
5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal 128
5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan 128
5.2.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 128
5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 128
5.2.5. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir 128

5.3. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca 130
5.3.1. Aset 130
5.3.1.1. Aset Lancar 130
5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah 131
5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran 133
5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Penerimaan 133
5.3.1.1.5. Kas Dana Kapitasi pada FKTP 134
5.3.1.1.6. Kas Dana BOK 136
5.3.1.1.7. Kas Dana BOS 136
5.3.1.1.10. Piutang Pajak 137
5.3.1.1.10.1. Penyisihan Piutang Pajak 139
5.3.1.1.10.2. Piutang Pajak (Netto) 141
5.3.1.1.11. Piutang Retribusi 141
5.3.1.1.11.1. Penyisihan Piutang Retribusi 143
5.3.1.1.11.2. Piutang Retribusi Netto 144
5.3.1.1.12. Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah 145
5.3.1.1.12.1. Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah 147
5.3.1.1.12.2. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Netto 148
5.3.1.1.13. Piutang Transfer Antar Daerah 148
5.3.1.1.14. Piutang Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan 151
5.3.1.1.16. Beban Dibayar Di Muka 151
5.3.1.1.17. Persediaan 152
5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang 155

5.3.1.2.1. Investasi Non Permanen 155
5.3.1.2.1.1. Investasi Dana Bergulir 155
5.3.1.2.1.2. Penyisihan Dana Bergulir 157
5.3.1.2.2. Investasi Permanen 158
5.3.1.2.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 158
5.3.1.3. Aset Tetap 161
5.3.1.3.1. Tanah 162
5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin 163
5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan 166
5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 168
5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya 170
5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan 172
5.3.1.3.7 . Akumulasi Penyusutan 173
5.3.1.4. Aset Lainnya 174
5.3.1.4.1. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 175
5.3.1.4.2. Aset Tidak Berwujud 175
5.3.1.4.3. Aset Lain-Lain 177
5.3.1.4.4. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) 178
5.3.2. Kewajiban 179
5.3.2.1. Pendapatan Diterima Dimuka 180
5.3.2.2. Utang Belanja 181
5.3.2.3. Utang Jangka Pendek Lainnya 183
5.3.3. Ekuitas 184

5.4. Penjelasan Atas Laporan Operasional 185
5.4.1. Pendapatan-LO 185
5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah - LO 185
5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah – LO 185
5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah–LO 186
5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO 188
5.4.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah – LO 188
5.4.1.2. Pendapatan Transfer – LO 189
5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO 189
5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO 190
5.4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO 190
5.4.1.3.1. Pendapatan Hibah–LO 191
5.4.1.3.2. Pendapatan Lainnya–LO 191
5.4.1.3.3. Lain-lain Pendapatan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan–LO 192
5.4.2. Beban 192

5.4.2.1. Beban Operasi 192
5.4.2.1.1. Beban Pegawai 192
5.4.2.1.2. Beban Barang dan Jasa 193
5.4.2.1.3. Beban Subsidi 196
5.4.2.1.4. Beban Hibah 196
5.4.2.1.5. Beban Bantuan Sosial 197
5.4.2.1.6. Beban Penyisihan Piutang 197
5.4.2.2. Beban Penyusutan dan Amortisasi 198
5.4.2.3. Beban Transfer - LO 198
5.4.2.4. Beban Tak Terduga 199
5.4.4. Surplus/Defisit 199
5.4.4.1. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional 199
5.4.4.2. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 199
5.4.5. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa 200
5.4.6. Pos Luar Biasa 200

5.5. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas 201
5.5.1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 201
5.5.1.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi 201
5.5.1.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi 202
5.5.2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi 203
5.5.2.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi 203
5.5.2.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi 204
5.5.3. Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 204
5.5.3.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan 205
5.5.3.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan 205
5.5.4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris 205
5.5.4.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris 206
5.5.4.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris 207
5.5.5.1. Keniakan/(Penurunan) Kas 207
5.5.5.2. Saldo Awal Kas 208
5.5.5.3. Saldo Akhir Kas lainnya 208
5.5.5.4. Saldo Akhir Kas 208

5.6. Penjelasan Atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 210
5.6.1 Ekuitas Awal 210
5.6.2 Surplus/(Defisit)-LO TA 20 210
5.6.3 Koreksi Ekuitas Lainnya 210
5.6.4 Ekuitas Akhir 211

6. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN 213
6.1. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Hulu Sugai Tengah 213

6.2. Transisi Kepemimpinan Kepala Daerah 214
6.3. Perubahan Kelembagaan Pemerintah Daerah 214
6.4. Perubahan Aplikasi Barang Milik Daerah 216
6.5. Pemberlakuan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perjalanan Dinas 216
6.6. Optimalisasi Kerja Sama Daerah 216

7 PENUTUP 219

H. LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1.1	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Hulu Sungai Tengah	15
Tabel 2.1.1.1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah	15
Tabel.2.1.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Hulu Sungai Tengah	16
Tabel 2.1.3	Gini Ratio Kabupaten Hulu Sungai Tengah	16
Tabel.2.1.4	Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru: Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020)	17
Tabel 2.1.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah	18
Tabel 2.1.6	Tingkat Inflasi	19
Tabel 2.1.7	PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha dalam Miliaran Rupiah	19
Tabel 2.4.5	Alokasi Fungsi Pendidikan Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Hulu Sungai Tengah	33
Tabel 2.4.6	Alokasi Fungsi Kesehatan Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Hulu Sungai Tengah.	34
Tabel 2.4.7	Alokasi Dana Transfer Umum (DTU) Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Hulu Sungai Tengah	35
Tabel 2.4.8	Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Hulu Sungai Tengah	36
Tabel 3.1.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	38
Tabel 3.1.2	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	38
Tabel 3.1.3	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah	39
Tabel 3.1.4	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah	40
Tabel 3.1.5	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi	40
Tabel 3.1.6	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal	40
Tabel 3.1.7	Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga	41
Tabel 3.1.8	Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil	41
Tabel 3.1.9	Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan	41
Tabel 3.1.10	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah	42
Tabel 4.1	Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025	45
Tabel 4.2	Masa Manfaat untuk Menghitung Tarif Penyusutan Aset Tetap	53
Tabel 5.1.1	Realisasi Pendapatan TA 2025 dan 2024	83
Tabel 5.1.2	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2025 dan 2024	84
Tabel 5.1.3	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 dan 2024	85
Tabel 5.1.4	Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 dan 2024	87
Tabel 5.1.5	Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2025 dan 2024	87
Tabel 5.1.6	Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2025 dan 2024	89
Tabel 5.1.7	Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu	91
Tabel 5.1.8	Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 dan 2024	92
Tabel 5.1.9	Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2025 dan 2024	92

Tabel 5.1.10 Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 dan 2024 95
Tabel 5.1.11 Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2025 dan 2024 97
Tabel 5.1.12 Realisasi DAK Fisik TA 2025 dan 2024 99
Tabel 5.1.14 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil TA 2025 dan 2024 102
Tabel 5.1.15 Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan TA 2025 dan 2024 104
Tabel 5.1.16 Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024 105
Tabel 5.1.17 Realisasi Belanja Operasi TA 2025 dan 2024 106
Tabel 5.1.18 Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 107
Tabel 5.1.19 Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024 109
Tabel 5.1.20 Belanja Hibah TA 2025 111
Tabel 5.1.21 Belanja Bantuan Sosial TA 2025 112
Tabel 5.1.22 Belanja Modal TA 2025 dan 2024 113
Tabel 5.1.23 Belanja Modal Tanah TA 2025 dan TA 2024 114
Tabel 5.1.24 Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan TA 2024 114
Tabel 5.1.25 Belanja Gedung dan Bangunan TA 2025 dan TA 2024 116
Tabel 5.1.26 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 dan TA 2024 116
Tabel 5.1.27 Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan TA 2024 117
Tabel 5.1.29 Belanja Transfer TA 2025 dan 2024 118
Tabel 5.1.30 Belanja Bagi Hasil TA 2025 dan 2024 119
Tabel 5.1.31 Belanja Bantuan Keuangan TA 2025 dan 2024 120
Tabel 5.1.32 Surplus/Defisit TA 2025 dan 2024 122
Tabel 5.1.33 Rincian Pembiayaan TA 2025 dan 2024 122
Tabel 5.1.34 Rincian Penerimaan Pembiayaan TA 2025 dan 2024 123
Tabel 5.1.35 Rincian SiLPA sampai dengan 31 Desember 2025 125
Tabel 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Akhir 129
Tabel 5.3.1 Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024 130
Tabel 5.3.2 Rincian Rekening Kas Daerah Per 31 Desember 2025 dan 2024 131
Tabel 5.3.3 Rincian Sisa Dana Transfer dan Dana Lainnya. 131
Tabel 5.3.4 Rincian Kas di BLUD RSUD Per 31 Desember 2025 dan 2024 133
Tabel 5.3.5 Rincian Kas Di BLUD 19 Puskesmas Per 31 Desember 2025 dan 2024 134
Tabel 5.3.6 Rincian Kas Dana Kapitasi pada FKTP Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Per 31 Desember 2025 dan 2024 135
Tabel 5.3.7 Rincian Kas Dana Kapitasi pada FKTP dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 19 Puskesmas Tahun 2025 dan 2024 135
Tabel 5.3.8 Rincian Kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 19 Puskesmas Tahun 2025 dan 2024 136
Tabel 5.3.9 Rincian Kas Dana BOS Per 31 Desember 2025 dan 2024 137
Tabel 5.3.10 Piutang Pajak Per 31 Desember 2025 dan 2024 137
Tabel 5.3.11 Mutasi Piutang PBB-P2 138
Tabel 5.3.12 Penyisihan Piutang PBB-P2 140

Tabel 5.3.13 Piutang Retribusi Per 31 Desember 2025 dan 2024 141
Tabel 5.3.14 Mutasi Piutang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan 143
Tabel 5.3.15 Penyisihan Piutang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan 144
Tabel 5.3.14 Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2025 dan 2024 146
Tabel 5.3.15 Rincian Piutang Kekurangan Volume Pekerjaan Aset Tetap, Atribusi Jasa Konsultan Pengawas, Belanja Bahan Bakar dan Pelumas yang tidak didukung bukti yang lengkap dan sah dan Kekurangan Volume Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Per 31 Desember 2025 146
Tabel 5.3.16 Piutang Transfer Antar Daerah Per 31 Desember 2025 dan 2024 149
Tabel 5.3.17 Piutang PBB-KB Tahun 2025 per 31 Desember 2025 149
Tabel 5.3.18 Piutang PKB-BBNKB Tahun 2024 dan 2025 150
Tabel 5.3.19 Piutang Pajak Air Permukaan Tahun 2025 per 31 Desember 2025 150
Tabel 5.3.20 Piutang Pajak Rokok Tahun 2025 per 31 Desember 2025 150
Tabel 5.3.21 Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 151
Tabel 5.3.22 Beban Dibayar Di Muka per 31 Desember 2025 dan 2024 152
Tabel 5.3.23 Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 20245 153
Tabel 5.3.24 Rincian Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2025 dan 2024 155
Tabel 5.3.25 Rincian Investasi Non Permanen Per 31 Desember 2025 dan 2024 156
Tabel 5.3.26 Penyisihan Dana Bergulir 157
Tabel 5.4.27 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Per 31 Desember 2025 dan 2024 158
Tabel 5.4.28 Sertifikat Kolektif Saham PD BPR Labuan Amas Selatan 159
Tabel 5.3.29 Rincian Kepemilikan Modal pada PT Air Minum Murakata Lestari (Perseroda) Per 31 Desember 2025 dan 2024 160
Tabel 5.3.30 Perhitungan Penyertaan Modal pada PT Air Minum Murakata Lestari (Perseroda) Per 31 Desember 2025 dan 2024 160
Tabel 5.3.31 Penyertaan Modal pada PT Air Minum Murakata Lestari (Perseroda) Per 31 Desember 2025 dan 2024 161
Tabel 5.3.34 Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2025 dan 2024 162
Tabel 5.3.33 Rincian Mutasi Aset Tanah Per 31 Desember 2025 dan 2024 162
Tabel 5.3.34 Rincian Mutasi Aset Peralatan dan Mesin 163
Tabel 5.3.35 Rincian Mutasi Aset Gedung dan Bangunan 166
Tabel 5.3.36 Rincian Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan 168
Tabel 5.3.37 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya 170
Tabel 5.3.40 Rincian Mutasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan 172
Tabel 5.3.39 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2025 dan 2024 173
Tabel 5.3.40 Rincian Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024 174
Tabel 5.3.41 Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud 175
Tabel 5.3.42 Daftar Aset Tidak Berwujud 176
Tabel 5.3.43 Rincian Mutasi Aset Lain-lain Per 31 Desember 2025 dan 2024 177
Tabel 5.3.45 Rincian Kewajiban / Utang Per 31 Desember 2025 dan 2024. 179
Tabel 5.3.46 Utang Belanja per 31 Desember 2025 dan 2024 181
Tabel 5.3.47 Rincian Utang Kelebihan Transfer Pemerintah Pusat dan

	Utang Jangka Pendeknya Lainnya TA 2025 dan 2024	183
Tabel 5.4.1	Pendapatan-LO Tahun 2025 dan 2024	185
Tabel 5.4.2	Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2025 dan 2024	185
Tabel 5.4.3	Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2025 dan 2024	186
Tabel 5.4.4	Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2025 dan 2024	186
Tabel 5.4.5	Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024	188
Tabel 5.4.6	Pendapatan Transfer Tahun 2025 dan 2024	189
Tabel 5.4.7	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2025 dan 2024	189
Tabel 5.4.8	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024	190
Tabel 5.4.9	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun - LO 2025 dan 2024	191
Tabel 5.4.10	Pendapatan Hibah-LO Tahun 2025 dan 2024	191
Tabel 5.4.11	Realisasi Beban Tahun 2025 dan 2024	192
Tabel 5.4.12	Realisasi Beban Operasi Tahun 2025 dan 2024	192
Tabel 5.4.13	Realisasi Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024	193
Tabel 5.4.14	Realisasi Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024	193
Tabel 5.4.15	Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024	196
Tabel 5.4.16	Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024	197
Tabel 5.4.17	Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 dan TA 2024	198
Tabel 5.4.18	Beban Transfer Tahun 2025 dan 2024	198
Tabel 5.5.1	Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	201
Tabel 5.5.2	Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	202
Tabel 5.5.3	Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	202
Tabel 5.5.4	Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	203
Tabel 5.5.6	Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	204
Tabel 5.5.7	Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	205
Tabel 5.5.10	Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	206
Tabel 5.5.12	Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	207
Tabel 5.5.13	Perhitungan Kenaikan/(Penurunan) Kas	207
Tabel 5.5.14	Perhitungan Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2025 dan 2024	208
Tabel 5.6.1	Penambahan dan Pengurangan Koreksi Ekuitas	210

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.1 Perkembangan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.....43
Gambar 5.1.1 Grafik Komposisi Pendapatan Daerah TA 2025 82
Gambar 5.1.2 Grafik Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah TA 2025.....83
Gambar 5.1.3 Grafik Komposisi Realisasi Belanja Operasi TA 2025 107

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1	Rincian Realisasi Pendapatan Per SKPD TA 2025
Lampiran 1.2	Rincian Realisasi Belanja Pegawai, Barang Jasa dan Modal Per SKPD TA 2025
Lampiran 2	Belanja Hibah TA 2025
Lampiran 3	Belanja Bantuan Sosial TA 2025
Lampiran 4	Rincian Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2025
Lampiran 5	Rincian Saldo Kas BLUD PKM per 31 Desember 2025
Lampiran 5.1	Rincian Saldo Kas Dana BOK PKM per 31 Desember 2025
Lampiran 6	Rincian Saldo Kas BOS per 31 Desember 2025
Lampiran 7	Daftar Piutang Retribusi dan Perhitungan Penyisihan Piutang Berdasarkan Umur Piutang Tahun 2025
Lampiran 8	Rekapitulsai Saldo Akhir Aset Tetap dan Aset Lainnya Per 31 Desember 2025
Lampiran 9	Rekapitulsai Mutasi Aset Tetap Per 31 Desember 2025
Lampiran 9.a	Rekapitulsai Mutasi Aset Tetap - Tanah Per 31 Desember 2025
Lampiran 9.b	Rekapitulsai Mutasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025
Lampiran 9.c	Rekapitulsai Mutasi Aset Tetap - Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025
Lampiran 9.d	Rekapitulsai Mutasi Aset Tetap - Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2025
Lampiran 9.e	Rekapitulsai Mutasi Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2025
Lampiran 9.f	Rekapitulsai Mutasi Aset Tetap - Konsruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2025
Lampiran 10	Rekapitulsai Mutasi Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2025
Lampiran 11	Rekapitulsai Mutasi Aset Lainnya - Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2025
Lampiran 12	Rekapitulasi Koreksi Nilai Penambahan - Pengurangan Ekuitas Akhir Per 31 Desember 2025
Lampiran 13	Data Tunggakan Peternak Sapi Program Dana Bergulir Per 31 Desember 2025

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan (g) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Barabai, 22 Mei 2026

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

SAMSUL RIZAL

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	CaLK	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
1	**PENDAPATAN**	5.1.1				
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	30.848.734.000,00	36.868.038.669,00	119,51	16.681.812.765,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	37.351.402.575,00	228.768.959.135,00	612,48	24.390.591.600,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	8.316.087.147,00	8.316.087.147,00	100,00	9.137.692.478,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	186.478.298.089,00	38.319.717.167,66	20,55	199.300.732.999,67
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)**		**262.994.521.811,00**	**312.272.802.118,66**	**118,74**	**249.510.829.842,67**
8	**PENDAPATAN TRANSFER**	5.1.1.2				
9	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT**	5.1.1.2.1				
10	Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.1.1	-	-	-	11.581.993.000,00
11	Dana Desa	5.1.1.2.1.2	126.044.386.000,00	115.959.796.462,00	92,00	129.129.755.200,00
12	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.1.1.2.1.3	661.163.257.287,00	559.357.580.379,00	84,60	509.268.584.713,00
13	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.4	551.962.927.000,00	546.966.063.077,00	99,09	546.064.341.637,00
14	Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.2.1.5	192.365.230.000,00	182.063.223.088,00	94,64	210.096.477.961,00
15	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (10 s/d 14)**		**1.531.535.800.287,00**	**1.404.346.663.006,00**	**91,70**	**1.406.141.152.511,00**
16	**PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH**	5.1.1.2.2				
17	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.2.1	217.106.527.198,66	109.837.269.015,00	50,59	128.645.843.691,00
18	**Jumlah Transfer Antar Daerah (17)**		**217.106.527.198,66**	**109.837.269.015,00**	**50,59**	**128.645.843.691,00**
19	**Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 18)**		**1.748.642.327.485,66**	**1.514.183.932.021,00**	**86,59**	**1.534.786.996.202,00**
20	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	5.1.1.3				
21	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	-	-	-	-
22	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.2	-	-	-	-
23	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.3	45.456.668.315,00	45.456.668.315,00	100,00	13.083.959.532,00
24	**Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (21 s/d 23)**		**45.456.668.315,00**	**45.456.668.315,00**	**100,00**	**13.083.959.532,00**
25	**JUMLAH PENDAPATAN (7 + 19 + 24)**		**2.057.093.517.611,66**	**1.871.913.402.454,66**	**91,00**	**1.797.381.785.576,67**
26	**BELANJA**	5.1.2				
27	**BELANJA OPERASI**	5.1.2.1				
28	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	709.333.333.249,00	605.290.692.945,00	85,33	529.887.769.556,00
29	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	783.538.891.750,00	708.318.667.192,32	90,40	597.206.622.002,25
30	Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	300.000.000,00	62.515.221,24	20,84	388.104.230,75
31	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	72.125.481.192,00	53.667.554.616,00	74,41	64.587.820.635,00
32	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	33.262.000.000,00	32.351.880.000,00	97,26	18.613.150.000,00
33	**Jumlah Belanja Operasi (28 s/d 32)**		**1.598.559.706.191,00**	**1.399.691.309.974,56**	**87,56**	**1.210.683.466.424,00**
34	**BELANJA MODAL**	5.1.2.2				
35	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	10.992.639.013,00	3.381.372.000,00	30,76	1.748.178.600,00
36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	151.897.003.512,00	141.163.477.540,00	92,93	101.305.541.636,00
37	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	5.1.2.2.3	118.745.592.917,00	112.776.401.824,00	94,97	211.553.884.590,49
38	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	199.271.579.997,00	150.098.514.061,00	75,32	97.690.359.646,51
39	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	1.849.990.000,00	1.227.971.791,00	66,38	587.283.591,00
40	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	118.000.000,00	49.300.000,00	41,78	-
41	**Jumlah Belanja Modal (35 s/d 40)**		**482.874.805.439,00**	**408.697.037.216,00**	**84,64**	**412.885.248.064,00**
42	**BELANJA TAK TERDUGA**	5.1.2.3				
43	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.1	13.286.744.252,00	1.410.395.000,00	10,62	593.586.332,00
44	**Jumlah Belanja Tak Terduga (43)**		**13.286.744.252,00**	**1.410.395.000,00**	**10,62**	**593.586.332,00**
45	**JUMLAH BELANJA (33+ 41+ 44)**		**2.094.721.255.882,00**	**1.809.798.742.190,56**	**86,40**	**1.624.162.300.820,00**
46	**BELANJA TRANSFER**	5.1.2.4				
47	**BELANJA BAGI HASIL**	5.1.2.4.1				
48	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.1.2.4.1.1	3.368.982.379,00	2.927.434.531,00	86,89	1.492.521.000,00
49	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	5.1.2.4.1.2	1.406.420.142,00	911.992.267,00	64,84	1.054.787.000,00
50	**Jumlah Belanja Bagi Hasil (48 s/d 49)**		**4.775.402.521,00**	**3.839.426.798,00**	**80,40**	**2.547.308.000,00**
51	**BELANJA BANTUAN KEUANGAN**	5.1.2.4.2				
52	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota Kepada Desa	5.1.2.4.2.1	251.838.492.129,00	210.004.267.004,00	83,39	229.308.813.038,00
53	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	5.1.2.4.2.2	-	-	-	-
54	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.2.4.2.3	2.000.000.000,00	457.476.800,00	22,87	1.600.000.000,00
55	**Jumlah Belanja Bantuan Keuangan (52 s/d 54)**		**253.838.492.129,00**	**210.461.743.804,00**	**82,91**	**230.908.813.038,00**
56	**JUMLAH BELANJA TRANSFER (50 + 55)**		**258.613.894.650,00**	**214.301.170.602,00**	**82,87**	**233.456.121.038,00**
57	**JUMLAH BELANJA DAN BELANJA TRANSFER (45 + 56)**		**2.353.335.150.532,00**	**2.024.099.912.792,56**	**86,01**	**1.857.618.421.858,00**
58	**SURPLUS / DEFISIT (25 - 45 - 56)**	5.1.3	**(296.241.632.920,34)**	**(152.186.510.337,90)**	**51,37**	**(60.236.636.281,33)**
59	**PEMBIAYAAN**	5.1.4				
60	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	5.1.4.1				
61	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.4.1.1	306.241.632.920,34	306.241.632.920,34	100,00	366.477.908.065,67
62	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	5.1.4.1.2	-	-	-	361.136,00
63	**Jumlah Penerimaan Pembiayaan (61 s/d 62)**		**306.241.632.920,34**	**306.241.632.920,34**	**100,00**	**366.478.269.201,67**
64	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	5.1.4.2				
65	Penyertaan Modal Daerah	5.1.4.2.1	10.000.000.000,00	-	-	-
66	Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.4.2.2	-	-	-	-
67	**Jumlah Pengeluaran (65 s/d 66)**		**10.000.000.000,00**	-	-	-

NO.	URAIAN	CaLK	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
68	**PEMBIAYAAN *NETTO* (63 - 67)**		296.241.632.920,34	306.241.632.920,34	103,38	366.478.269.201,67
69	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (58 + 68)**	5.1.5	-	154.055.122.582,44		306.241.632.920,34

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

SAMSUL RIZAL

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	CaLK	2025	2024
1	**Saldo Anggaran Lebih Awal**	**5.2.1**	**306.241.632.920,34**	**366.484.008.061,67**
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	306.241.632.920,34	366.477.908.065,67
3	**Sub Total (1 -2)**		**-**	**6.099.996,00**
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	154.055.122.582,44	306.241.632.920,34
5	**Sub Total (3 + 4)**		**154.055.122.582,44**	**306.247.732.916,34**
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	-	(6.099.996,00)
7	Lain-lain		-	-
8	**Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)**	**5.2.5**	**154.055.122.582,44**	**306.241.632.920,34**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

SAMSUL RIZAL

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	CaLK	2025	2024
1	**ASET**	**5.3.1**		
2	**ASET LANCAR**			
3	Kas dan Setara Kas			
4	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	142.393.631.534,78	296.746.820.536,31
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.2	-	-
6	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.3	-	1.810.000,00
7	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	5.3.1.1.4	3.381.394.356,07	418.615.493,64
8	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.5	-	8.736.606.332,80
9	Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.6	8.067.938.355,00	-
10	Kas Dana BOS	5.3.1.1.7	212.158.336,59	337.780.557,59
11	Kas Lainnya	5.3.1.1.8	-	-
12	Setara Kas	5.3.1.1.9	-	-
11	**Jumlah Kas (3 s/d 10)**		**154.055.122.582,44**	**306.241.632.920,34**
12	Piutang			
13	Piutang Pajak	5.3.1.1.10	8.487.686.609,00	7.024.609.258,00
14	Penyisihan Piutang Pajak	5.3.1.1.10.1	(5.624.343.706,66)	(5.130.379.457,26)
15	**Piutang Pajak *Netto***	**5.3.1.1.10.2**	**2.863.342.902,34**	**1.894.229.800,74**
16	Piutang Retribusi	5.3.1.1.11	12.767.299.305,00	3.159.702.783,00
17	Penyisihan Piutang Retribusi	5.3.1.1.11.1	(2.983.806.160,19)	(2.712.837.350,50)
18	**Piutang Retribusi *Netto***	**5.3.1.1.11.2**	**9.783.493.144,81**	**446.865.432,50**
19	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.12	1.040.358.292,02	4.795.643.473,96
20	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.12.1	(5.201.791,46)	(24.720.717,38)
21	**Piutang Lain-lain PAD yang sah *Netto***	**5.3.1.1.12.2**	**1.035.156.500,56**	**4.770.922.756,58**
22	Piutang Transfer Antar Daerah		38.379.296.665,00	34.331.460.697,00
23	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah		-	-
24	**Piutang Transfer Antar Daerah *Netto***	**5.3.1.1.13**	**38.379.296.665,00**	**34.331.460.697,00**
25	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		146.933.750.000,00	215.324.003.000,00
26	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat		-	-
27	**Piutang Transfer Pemerintah Pusat *Netto***	**5.3.1.1.14**	**146.933.750.000,00**	**215.324.003.000,00**
28	**Jumlah Piutang *Netto* (15 + 18 + 21 + 24 + 27)**		**198.995.039.212,71**	**256.767.481.686,82**
29	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.15	59.968.000,00	48.224.750,00
30	Persediaan	5.3.1.1.16	34.693.172.375,38	31.357.015.553,81
31	**Jumlah Aset Lancar (13 + 33 + 34 + 35)**	**5.3.1.1**	**387.803.302.170,53**	**594.414.354.910,97**
32	**INVESTASI JANGKA PANJANG**			
33	Investasi Non Permanen		-	-
34	Investasi Dana Bergulir	5.3.1.2.1.1	287.624.770,00	287.624.770,00
35	Penyisihan Dana Bergulir	5.3.1.2.1.2	(287.624.770,00)	(287.624.770,00)
36	**Jumlah Investasi Non Permanen (34 - 35)**	**5.3.1.2.1**	**-**	**-**
37	Investasi Permanen			
38	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2.1	200.990.545.646,26	194.617.496.485,75
39	Jumlah Investasi Permanen	5.3.1.2.2	200.990.545.646,26	194.617.496.485,75
40	**Jumlah Investasi Jangka Panjang (36 + 40)**	**5.3.1.2**	**200.990.545.646,26**	**194.617.496.485,75**
41	**ASET TETAP**			
42	Tanah	5.3.1.3.1	345.442.122.680,38	342.000.866.180,38
43	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	897.977.451.227,15	711.539.029.891,71
44	Gedung Dan Bangunan	5.3.1.3.3	1.282.901.507.113,34	1.100.892.316.130,12
45	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.4	2.191.688.488.594,07	2.037.546.694.191,43
46	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	62.668.926.436,68	47.757.685.311,82
47	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	70.221.688.954,79	146.212.229.971,09
48	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(2.251.818.561.926,16)	(2.239.355.642.943,78)
49	**Jumlah Aset Tetap (42 s/d 48)**	**5.3.1.3**	**2.599.081.623.080,25**	**2.146.593.178.732,77**
50	**ASET LAINNYA**			
51	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.1.4.1	1.471.692.064,00	1.471.692.064,00
52	Aset Tidak Berwujud		5.807.567.039,90	4.150.813.784,90

No	Uraian	CaLK	2025	2024
53	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(3.703.007.177,45)	(3.493.344.746,90)
54	Aset Tidak Berwujud *Netto* (52 - 53)	5.3.1.4.2	2.104.559.862,45	657.469.038,00
55	Aset Lain-lain		20.594.659.971,90	23.490.654.956,36
56	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		-	-
57	Aset Lain-Lain *Netto* (55 - 56)	5.3.1.4.3	20.594.659.971,90	23.490.654.956,36
58	Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)	5.3.1.4.4	99.730.245.108,00	220.286.987.287,00
59	**Jumlah Aset Lainnya (51 + 54 + 57 + 58)**	**5.3.1.4**	**123.901.157.006,35**	**245.906.803.345,36**
60	**TOTAL ASET (31 + 40 + 49 + 59)**		**3.311.776.627.903,39**	**3.181.531.833.474,85**
61	**KEWAJIBAN**	**5.3.2**		
62	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**			
63	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1	41.081.933,70	89.348.117,03
64	Utang Belanja	5.3.2.2	80.282.945.622,00	87.281.589.470,97
65	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.3	1.805.684.000,00	-
66	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (63 s/d 65)**		**82.129.711.555,70**	**87.370.937.588,00**
67	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**		-	-
68	**TOTAL KEWAJIBAN (66 + 67)**		**82.129.711.555,70**	**87.370.937.588,00**
69	**EKUITAS**	**5.3.3**	**3.229.646.916.347,69**	**3.094.160.895.886,85**
70	**TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS (68 + 69)**		**3.311.776.627.903,39**	**3.181.531.833.474,85**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

SAMSUL RIZAL

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	CaLK	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL					
1	**PENDAPATAN**	5.4.1				
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	5.4.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.1	37.501.921.383,33	17.238.602.752,72	20.263.318.630,61	117,55
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.2	234.414.179.432,00	24.898.518.100,00	209.515.661.332,00	841,48
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.3	14.689.136.307,51	14.107.785.610,39	581.350.697,12	4,12
6	Lain-lain PAD Yang Sah	5.4.1.1.4	33.713.510.061,32	203.043.880.052,67	(169.330.369.991,35)	(83,40)
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)**		**320.318.747.184,16**	**259.288.786.515,78**	**61.029.960.668,38**	**23,54**
8	**PENDAPATAN TRANSFER**	5.4.1.2				
9	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT**	5.4.1.2.1				
10	Dana Insentif Daerah (DID)		-	11.581.993.000,00	(11.581.993.000,00)	(100,00)
11	Dana Desa		-	-	-	-
12	Dana Bagi Hasil (DBH)		370.410.585.200,00	736.338.070.431,00	(365.927.485.231,00)	(49,70)
13	Dana Alokasi Umum (DAU)		546.966.063.077,00	546.064.341.637,00	901.721.440,00	0,17
14	Dana Alokasi Khusus (DAK)		182.063.223.088,00	210.096.477.961,00	(28.033.254.873,00)	(13,34)
15	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (10 s/d 14)**		**1.099.439.871.365,00**	**1.504.080.883.029,00**	**(404.641.011.664,00)**	**(26,90)**
16	**PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH**	5.4.1.2.2				
17	Pendapatan Bagi Hasil		114.882.916.885,00	127.229.148.167,00	(12.346.231.282,00)	(9,70)
18	**Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (17)**		**114.882.916.885,00**	**127.229.148.167,00**	**(12.346.231.282,00)**	**(9,70)**
19	**Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 18)**		**1.214.322.788.250,00**	**1.631.310.031.196,00**	**(416.987.242.946,00)**	**(25,56)**
20	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	5.4.1.3				
21	Pendapatan Hibah	5.4.1.3.1	801.144.876,00	1.801.290.562,00	(1.000.145.686,00)	(55,52)
22	Pendapatan Lainnya	5.4.1.3.2	-	-	-	-
23	Lain-lain Pendapatan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	5.4.1.3.3	45.456.668.315,00	13.083.959.532,00	32.372.708.783,00	247,42
24	**Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah (21 s/d 23)**		**46.257.813.191,00**	**14.885.250.094,00**	**31.372.563.097,00**	**210,76**
25	**JUMLAH PENDAPATAN (7 + 19 + 24)**		**1.580.899.348.625,16**	**1.905.484.067.805,78**	**(324.584.719.180,62)**	**(17,03)**
26	**BEBAN**	5.4.2				
27	**BEBAN OPERASI**	5.4.2.1				
28	Beban Pegawai	5.4.2.1.1	590.309.727.160,00	545.151.320.021,00	45.158.407.139,00	8,28
29	Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	655.294.963.308,25	612.700.526.617,59	42.594.436.690,66	6,95
30	Beban Subsidi	5.4.2.1.3	62.515.221,24	388.104.230,75	(325.589.009,51)	(83,89)
31	Beban Hibah	5.4.2.1.4	53.423.450.216,00	64.169.552.612,70	(10.746.102.396,70)	(16,75)
32	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.5	32.351.880.000,00	18.613.150.000,00	13.738.730.000,00	73,81
33	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.6	770.134.850,55	983.280.547,37	(213.145.696,82)	(21,68)
34	**Jumlah Beban Operasi (28 s/d 33)**		**1.332.212.670.756,04**	**1.242.005.934.029,41**	**90.206.736.726,63**	**7,26**
35	**BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI**	5.4.2.2				
36	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		69.675.752.828,93	49.769.130.197,72	19.906.622.631,21	40,00
37	Beban Penyusutan Bangunan dan Gedung		22.982.155.868,29	20.600.977.813,08	2.381.178.055,21	11,56
38	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan		45.259.047.202,83	42.129.866.137,03	3.129.181.065,80	7,43
39	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		-	-	-	-
40	Beban Penyusutan Aset Lainnya		-	-	-	-
41	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud		209.662.430,55	77.892.624,00	131.769.806,55	169,17
42	**Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi (36 s/d 41)**		**138.126.618.330,60**	**112.577.866.771,83**	**25.548.751.558,77**	**22,69**
43	**BEBAN TRANSFER**	5.4.2.3				
44	Beban Bagi Hasil		3.677.983.716,00	2.870.731.188,00	807.252.528,00	28,12
45	Beban Bantuan Keuangan		90.032.627.242,00	101.779.057.838,00	(11.746.430.596,00)	(11,54)
46	**Jumlah Beban Transfer (44 s/d 45)**		**93.710.610.958,00**	**104.649.789.026,00**	**(10.939.178.068,00)**	**(10,45)**
47	**BEBAN TAK TERDUGA**	5.4.2.4				
48	Beban Tak Terduga		1.410.395.000,00	593.586.332,00	816.808.668,00	137,61
49	**Jumlah Beban Tak Terduga (48)**		**1.410.395.000,00**	**593.586.332,00**	**816.808.668,00**	**137,61**
50	**JUMLAH BEBAN (34 + 42 + 46 + 49)**	5.4.3	**1.565.460.295.044,64**	**1.459.827.176.159,24**	**105.633.118.885,40**	**7,24**
51	**SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (25 - 50)**	5.4.4.1	**15.439.053.580,52**	**445.656.891.646,54**	**(430.217.838.066,02)**	**(96,54)**
52	**SUPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**					
53	**SURPLUS NON OPERASIONAL**					
54	Surplus Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	-

NO.	URAIAN	CaLK	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
55	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
56	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-	-	-
57	**Jumlah Surplus Non Operasional (54 s.d 56)**		-	-	-	-
58	**DEFISIT NON OPERASIONAL**					
59	Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	-
60	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
61	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-	-	-
62	**Jumlah Defisit Non Operasional (59 s.d 61)**		-	-	-	-
63	**JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (57 + 62)**	5.4.4.2	-	-	-	-
64	**SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (51 + 63)**	5.4.5	**15.439.053.580,52**	**445.656.891.646,54**	**(430.217.838.066,02)**	**(96,54)**
65	**POS LUAR BIASA**	5.4.6				
66	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
67	Beban Luar Biasa		-	-	-	-
68	**POS LUAR BIASA (66-67)**		-	-	-	-
69	**SURPLUS/DEFISIT-LO (64 + 68)**	5.4.4	**15.439.053.580,52**	**445.656.891.646,54**	**(430.217.838.066,02)**	**(96,54)**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

SAMSUL RIZAL

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	CaLK	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**	**5.5.1**		
2	**Arus Masuk Kas :**	**5.5.1.1**		
3	Penerimaan Pajak Daerah		36.868.038.669,00	16.681.812.765,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		228.768.959.135,00	24.390.591.600,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		8.316.087.147,00	9.137.692.478,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		37.829.192.767,66	199.300.732.999,67
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil		559.357.580.379,00	509.268.584.713,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		546.966.063.077,00	546.064.341.637,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		182.063.223.088,00	210.096.477.961,00
10	Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)		-	11.581.993.000,00
11	Penerimaan Dana Desa		115.959.796.462,00	129.129.755.200,00
12	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi		109.837.269.015,00	128.645.843.691,00
13	Penerimaan Hibah		-	-
14	Penerimaan Lainnya		45.456.668.315,00	13.083.959.532,00
15	**Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 14)**		**1.871.422.878.054,66**	**1.797.381.785.576,67**
16	**Arus Keluar Kas :**	**5.5.1.2**		
17	Pembayaran Pegawai		605.290.692.945,00	529.887.769.556,00
18	Pembayaran Barang dan Jasa		708.318.667.192,32	597.206.622.002,25
19	Pembayaran Subsidi		62.515.221,24	388.104.230,75
20	Pembayaran Hibah		53.667.554.616,00	64.587.820.635,00
21	Pembayaran Bantuan Sosial		32.351.880.000,00	18.613.150.000,00
22	Pembayaran Tak Terduga		1.410.395.000,00	593.586.332,00
23	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah		2.927.434.531,00	1.492.521.000,00
24	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Daerah		911.992.267,00	1.054.787.000,00
25	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kepada Desa		210.004.267.004,00	229.308.813.038,00
26	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa		457.476.800,00	1.600.000.000,00
27	**Jumlah Arus Keluar Kas (17 s/d 26)**		**1.615.402.875.576,56**	**1.444.733.173.794,00**
28	**ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI (15 - 27)**		**256.020.002.478,10**	**352.648.611.782,67**
29	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI**	**5.5.2**		
30	**Arus Masuk Kas :**	**5.5.2.1**		
31	Penjualan atas Alat-Alat Berat		-	-
32	Penjualan atas Kendaraan Dinas Roda Dua		-	-
33	Penjualan atas Kendaraan Dinas Roda Empat		490.524.400,00	-
34	**Jumlah Arus Masuk Kas (31 s/d 33)**		**490.524.400,00**	**-**
35	**Arus Keluar Kas :**	**5.5.2.2**		
36	Perolehan Tanah		3.381.372.000,00	1.748.178.600,00
37	Perolehan Peralatan dan Mesin		141.163.477.540,00	101.305.541.636,00
38	Perolehan Gedung dan Bangunan		112.776.401.824,00	211.553.884.590,49
39	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		150.098.514.061,00	97.690.359.646,51
40	Perolehan Aset Tetap Lainnya		1.227.971.791,00	587.283.591,00
41	Perolehan Aset Lainnya		49.300.000,00	-
42	**Jumlah Arus Keluar Kas (36 s/d 41)**		**408.697.037.216,00**	**412.885.248.064,00**
43	**ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI (34 - 42)**		**(408.206.512.816,00)**	**(412.885.248.064,00)**
44	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN**	**5.5.3**		
45	**Arus Masuk Kas :**	**5.5.3.1**		
46	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat		-	361.136,00
47	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**-**	**361.136,00**
48	**Arus Keluar Kas :**	**5.5.3.2**		
49	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
50	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**-**	**-**
51	**ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN (47 - 50)**		**-**	**361.136,00**
52	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS**	**5.5.4**		
53	**Arus Masuk Kas :**	**5.5.4.1**		
54	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		111.248.967.160,50	98.039.912.670,29

No.	Uraian	CaLK	31 Desember 2025	31 Desember 2024
55	Pemindahbukuan Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
56	Pemindahbukuan Kas Lainnya		-	-
57	Penerimaan Pengembalian UP/TU dan TBP UP/TU		155.727.197.241,50	131.099.845.564,02
58	Pengembalian UP/TU Tahun Lalu		-	-
59	**Jumlah Arus Masuk Kas (54 s/d 58)**		**266.976.164.402,00**	**229.139.758.234,31**
60	**Arus Keluar Kas :**	5.5.4.2		
61	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		111.248.967.160,50	98.039.912.670,29
62	Pengeluaran Dana UP/TU		155.727.197.241,50	131.099.845.564,02
63	Koreksi Silpa		-	6.099.996,00
64	**Jumlah Arus Keluar Kas (61 s/d 63)**		**266.976.164.402,00**	**229.145.858.230,31**
65	**ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS (59-64)**		**-**	**(6.099.996,00)**
66	**Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode (28+43+51+65)**	**5.5.5.1**	**(152.186.510.337,90)**	**(60.242.375.141,33)**
67	**Saldo Awal Kas**	**5.5.5.2**	**306.241.632.920,34**	**366.484.008.061,67**
68	**Saldo Akhir Kas Lainnya**	**5.5.5.3**	**-**	**-**
69	**Saldo Akhir Kas (66 s/d 68)**	**5.5.5.4**	**154.055.122.582,44**	**306.241.632.920,34**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

SAMSUL RIZAL

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	CaLK	2025	2024
1	**PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)**	5.6		
2	**EKUITAS AWAL**	5.6.1	**3.094.160.895.886,85**	**2.651.228.682.383,42**
3	**SURPLUS/DEFISIT-LO**	5.6.2	**15.439.053.580,52**	**445.656.891.646,54**
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:			
5	**KOREKSI EKUITAS LAINNYA**	5.6.3	**120.046.966.880,32**	**(2.724.678.143,11)**
6	Koreksi Nilai Kas		-	(6.099.996,00)
7	Koreksi Nilai Piutang		(121.955.364,62)	269.294,62
8	Koreksi Nilai Persediaan		-	69.311.082,27
9	Koreksi Nilai Investasi		-	361.136,00
10	Koreksi Nilai Aset Tetap		131.692.065.494,87	(534.708.238,00)
11	Koreksi Nilai Aset Lainnya		(10.516.572.700,93)	-
12	Koreksi Nilai Utang		(1.006.570.549,00)	(2.253.811.422,00)
13	**EKUITAS AKHIR**	5.6.4	**3.229.646.916.347,69**	**3.094.160.895.886,85**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

SAMSUL RIZAL

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan ini secara umum adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, neraca dan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Sedangkan maksud dan tujuan secara khusus penyusunan laporan keuangan ini adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam hal:

a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana;
b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana;
c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 ini mengacu antara lain pada:

a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
j. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 Nomor 9);
n. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 Nomor 50);
o. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 68 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 68);
p. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 40).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro
2.2 Kebijakan Keuangan
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP Pemerintah Daerah

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

5.1. Rincian dari Penjelasan dari masing-masing pos-pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
5.1.1 Pendapatan – LRA
5.1.2 Belanja
5.1.3 Pembiayaan
5.1.4 Pendapatan - LO
5.1.5 Beban
5.1.6 Aset
5.1.7 Kewajiban
5.1.8 Ekuitas
5.1.9 Arus Kas

BAB VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah

BAB VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 mengacu pada indikator sosial ekonomi serta kebutuhan mendesak (Pemda) Tahun 2025 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah (data kondisi tahun 2025), yaitu :

a. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,03%
b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,12%
c. Gini Ratio dalam rentang 0,239 s/d 0,242
d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,26
e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,01%
f. Tingkat Inflasi sebesar 3,93%
g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar 10.194,43 (dalam miliar rupiah);

2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/turun (%)
1	Kabupaten (%)	5,81	5,03	-0,78
2	Kabupaten (Ribu Orang)	16,03	13,94	-13,03
3	Provinsi (%)	4,11	3,84	-0,27
4	Nasional (%)	9,03	8,47	-0,56

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Persentase penduduk miskin Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Tahun 2025 sebesar 5,03% mengalami penurunan sebesar 0,78% apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 yang sebesar 5,81%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan persentase penduduk miskin di provinsi Kalimantan Selatan yang sebesar 3,84% namun lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat nasional yang sebesar 8,47%. Perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.1.1.1 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten	0,75	0,34	-0,41
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,57	0,47	-0,10
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,46	1,37	-0,09

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Tabel 2.1.1.2 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten	0,14	0,04	-0,10
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,12	0,10	-0,02
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,35	0,32	-0,03

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka**)** adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka**,** terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Berdasarkan data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 adalah sebesar 3,12%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten (%)	3,20	3,12	-0,08
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	4,20	4,16	-0,04
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	4,91	4,85	-0,06

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Berdasarkan data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 sebesar 3,12%, angka ini mengalami penurunan 0,08% apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 yang sebesar 3,20%. TPT Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2025 lebih rendah jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional yang berturut–turut sebesar 4,16% dan 4,85%.

2.1.3. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

a. Indeks Gini sama dengan 0 menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
b. Indeks Gini sama dengan 1 artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Berdasarkan data BPS, Indeks Gini Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Tahun 2025 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.3 Gini Ratio Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/turun
1	Tingkat Kab/Kota	0,251	0,216	-0,035
2	Tingkat Provinsi	0,302	0,287	-0,015
3	Tingkat Nasional	0,379	0,375	-0,004

Sumber Dokumen:BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Pada Tahun 2025, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 0,216 poin, angka ini mengalami penurunan 0,035 poin, apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 yang sebesar 0,251 poin. Tingkat ketimpangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2025 diperkirakan lebih rendah jika dibandingkan dengan Tingkat Ketimpangan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional yang berturut - turut sebesar 0,287 dan 0,375 poin.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan UNDP, Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

a. Rendah, IPM < 60
b. Sedang, 60 ≤ IPM < 70
c. Tinggi, 70 ≤ IPM < 80
d. Sangat Tinggi, IPM ≥ 80

Berdasarkan data BPS, IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 sebesar 74,26 poin, angka ini menunjukkan tingkat pembangunan di Hulu Sungai Tengah berkategori sedang, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Pada tahun 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) mulai menggunakan metode Umur Harapan Hidup (UHH) Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 pada perhitungan IPM. Sebelumnya, BPS menggunakan proyeksi hasil Sensus Penduduk 2020 untuk menghitung UHH. Metode ini mengoreksi angka IPM pada sisi kesehatan dan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kualitas hidup penduduk di suatu wilayah. IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang telah menggunakan metode UHH Tahun 2025 sebesar 74,26 poin, angka ini menunjukkan tingkat pembangunan di Hulu Sungai Tengah berkategori tinggi, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini,

Tabel.2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru: Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020)

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/turun
1	Kabupaten	73,33	74,26	+0,93
2	Provinsi	75,19	76,10	+0,91
3	Indonesia/Nasional	75,02	75,90	+0,88

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah

IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Tahun 2025 sebesar 74,26 poin, angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,93 poin apabila dibandingkan dengan Tahun 2024. Peningkatan/penurunan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (UHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Tingkat pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Tahun 2025 lebih rendah jika dibandingkan dengan Tingkat pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, yang berturut-turut sebesar 76,10 poin dan 75,90 poin.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (Tahun 2023-2025)

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No	Uraian	Kabupaten			Provinsi	Nasional
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2025
1	PDRB (harga konstan 2010)	5.386,03 (Miliar Rupiah)	5.652,87 (Miliar Rupiah)	5.936,02 (Miliar Rupiah)	164.958,31 (Miliar Rupiah)	13.003,2 (Triliun Rupiah)
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,11	4,95	5,01	5,22	5,11

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah diperkirakan mengalami pertumbuhan ekonomi lebih cepat sekitar 5,01 persen pada tahun 2025. Pada tahun 2025, perekonomian Indonesia lebih cepat dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen. sedangkan perekonomian Kalimantan Selatan lebih cepat dengan pertumbuhan ekonomi sekitar sebesar 5,22 persen. Secara umum, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan khususnya di Hulu Sungai Tengah yang lebih cepat karena sektor lapangan usaha utama mengalami kenaikan produksi yang signifikan, seperti di Penyedia akomodasi dan makan minum; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Jasa lainnya; informasi dan komunikasi, dan jasa pendidikan.

2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian suatu daerah dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi empat kategori, yang meliputi (i) inflasi ringan (*creeping inflation*). Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun; (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*). Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun; (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*). Kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit

dikendalikan; dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*), jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Berdasarkan data BPS, Inflasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,93% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1.6 Tingkat Inflasi

No	Uraian[1]	Tahun 2024[2]	Tahun 2025	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kota Banjarmasin (%)	1,98	3,97	+1,99
2	Tingkat Inflasi Kota Tanjung (%)	2,24	3,15	+0,91
3	Tingkat Inflasi Kota Baru (%)	0,26	3,03	+2,77
4	Tingkat Inflasi Kab. Tanah Laut (%)	2,90	2,19	+0,01
5	Tingkat Inflasi Kab. Hulu Sungai Tengah (%)	1,11	3,93	+2,82
6	Tingkat Inflasi Provinsi Kalsel (%)	1,95	3,66	+1,71
7	Tingkat Inflasi Indonesia (%)	1,57	2,92	+1,35

Keterangan : [1] Inflasi Tahun Kalender, Desember untuk kabupaten/kota dan provinsi;
Inflasi Tahun Kalender Gabungan 150 Kota, Desember untuk Nasional

Sumber Dokumen: BPS

Tingkat inflasi provinsi Kalimantan Selatan terbentuk dari Tingkat Inflasi Kota Banjarmasin, Kota Baru, Kota Tanjung, Kab. Tanah Laut, dan Kab. Hulu Sungai Tengah. Pada tahun 2025, Tingkat inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 3,93%, lebih tinggi dari pada tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Selatan dan tingkat Nasional yang berturut - turut sebesar 3,66% dan 2,92%.

2.1.7. Struktur Perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Tahun 2023-2025)

Struktur perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.7 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha dalam Miliaran Rupiah

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.983,0	2.170,81	2.337,63
2	Pertambangan dan Penggalian	63,1	67,19	72,47
3	Industri Pengolahan	1.104,7	1.183,21	1.272,19
4	Pengadaan Listrik Dan Gas	15,9	17,11	18,53
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	42,7	45,31	48,22
6	Konstruksi	745,7	813,01	873,17
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.103,5	1.187,86	1.355,26
8	Transportasi dan Pergudangan	458,5	509,85	549,73
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	344,1	376,08	430,59
10	Informasi dan Komunikasi	430,2	467,97	509,63

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	197,3	211,79	231,17
12	Real Estate	299,2	323,00	351,41
13	Jasa Perusahaan	18,7	20,68	22,89
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	827,7	930,45	979,77
15	Jasa Pendidikan	631,3	681,63	752,77
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	198,3	217,09	234,01
17	Jasa lainnya	129,3	142,98	155,00
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten	8.594,0	9.366,01	10.194,43
	PDRB Provinsi	269.296,4	286.818,8	305.126,93
	PDRB Nasional	20.892.376,7	22.020.549,4	23.821,1

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah

2.2. Kebijakan Keuangan Daerah

2.2.1. Kebijakan Pendapatan

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan baik PAD maupun sumber pendapatan lainnya.

Strategi yang ditempuh untuk peningkatan pendapatan daerah adalah melalui :

1. Peningkatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baik PAD maupun sumber pendapatan lainnya.
2. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi.
3. Peningkatan manajemen pengelolaan pendapatan asli daerah melalui perbaikan administrasi dan pelayanan khususnya pajak daerah dan retribusi daerah.

Dengan memperhitungkan kondisi dan asumsi-asumsi yang mempengaruhi pendapatan, maka pada tahun 2025 pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2.057.093.517.611,66 atau naik 20,95% dari tahun 2024 sebesar Rp1.700.811.043.180,00.

Pendapatan Daerah ini terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp262.994.521.811,00 atau naik 45,57% dari proyeksi tahun 2024 sebesar Rp180.666.581.250,00.
2. Pendapatan Transfer Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp1.748.642.327.485,66 atau naik 16,08% dari proyeksi tahun 2024 sebesar Rp1.506.419.213.000,00.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp45.456.668.315,00 atau naik 231,19% dari tahun 2024 sebesar Rp13.725.248.930,00.

Pada pos Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

1. Pos Pajak Daerah pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp30.848.734.000,00 atau naik 96,69% dari proyeksi tahun 2024 sebesar Rp15.684.304.000,00.

2. Pos Retribusi Daerah pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp37.351.402.575,00 atau naik 174,62% dari proyeksi tahun 2024 sebesar Rp13.600.927.250,00.
3. Pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp8.316.087.147,00 atau naik 10,88% dari proyeksi tahun 2024 sebesar Rp7.500.000.000,00.
4. Pada pos Lain-lain PAD yang Sah pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp186.478.298.089,00 atau naik 29,61% dari proyeksi tahun 2024 sebesar Rp143.881.350.000,00.

Pada pos Pendapatan Transfer terdiri dari :

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

   ✓ Dana Perimbangan :

   a. Dana Bagi Hasil (DBH) pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp661.163.257.287,00 atau naik 45,34% dari proyeksi tahun 2024 sebesar Rp454.904.780.000,00

   b. Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp551.962.927.000,00 atau turun 0,154% dari proyeksi tahun 2024 sebesar Rp552.814.164.000,00

   c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp51.634.120.000,00 atau turun 48,56% dari proyeksi tahun 2024 sebesar Rp100.383.433.000,00

   d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp140.731.110.000,00 atau naik 9,91% dari proyeksi tahun 2024 sebesar Rp128.036.312.000,00

   ✓ Dana Insentif Daerah (DID) pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp0 atau tidak mengalami perubahan dari proyeksi tahun 2024 sebesar Rp0

   ✓ Dana Desa (DD) pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp126.044.386.000,00 atau turun 2,48% dari proyeksi tahun 2024 sebesar Rp129.247.279.000,00

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

   Pendapatan bagi hasil pajak pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp217.106.527.198,66 naik 67,71% dari proyeksi tahun 2024 sebesar Rp129.451.252.000,00

3. Pada pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari :

   Pendapatan Hibah pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp45.456.668.315,00 atau naik 231,19% dari tahun 2024 sebesar Rp13.725.248.930,00

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Dalam Penyusunan APBD TA. 2025 harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru berlaku yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Secara garis besar kebijakan - kebijakan umum belanja daerah yaitu:

1. Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan terkait dengan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. yang terdiri dari :
    a. Belanja Pegawai : merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
    b. Belanja Barang dan Jasa : merupakan belanja untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan.
    c. Belanja Bunga : merupakan belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang (pembayaran bunga utang).
    d. Belanja Subsidi : merupakan belanja untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau masyarakat.
    e. Belanja Hibah : merupakan belanja untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan / atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat / perorangan.
    f. Belanja Bantuan Sosial : merupakan belanja pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
2. Belanja Modal : merupakan belanja untuk pengeluaran pembelian / pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dan aset lainnya yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah dan memenuhi batas minimal kapitalisasi aset yang terdiri dari :
    a. Belanja Modal Tanah : merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
    b. Belanja Peralatan dan Mesin : merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Gedung dan Bangunan, merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Belanja Aset Tetap Lainnya, merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Belanja Aset Lainnya, merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Belanja Tidak Terduga : merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran anggaran untuk beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

4. Belanja Transfer : merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa meliputi :

   a. Belanja Bagi Hasil merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

   b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan belanja yang diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pada tahun 2025 Belanja Daerah diproyeksikan maksimal sebesar Rp2.353.335.150.532,00 yang mengalami kenaikan sebesar Rp276.077.381.667,00 atau naik 13,29% dari proyeksi belanja tahun 2024 sebesar Rp2.077.257.768.865,00.

Secara rinci proyeksi Belanja Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp1.598.559.706.191,00 sebesar atau naik 21,42% dari tahun 2024 sebesar Rp1.316.504.693.709,00

2. Belanja Modal Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp482.874.805.439,00 atau naik 3,85% dari tahun 2024 sebesar Rp464.986.901.127,00.
3. Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp13.286.744.252,00 atau turun 76,72% dari tahun 2024 sebesar Rp57.085.287.204,00.
4. Belanja Transfer Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp258.613.894.650,00 atau naik 8,35% dari tahun 2024 sebesar Rp238.680.886.825,00.

2.2.3. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pertanggungjawaban terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah.

   Adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

   Adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman, dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

Pada sisi Pembiayaan terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2025 dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang diproyeksikan sebesar Rp306.241.632.920,34 atau turun 18,58% dari tahun 2024 sebesar Rp376.146.725.685,00; dan
2. Untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00 atau naik 100% dari tahun 2024 sebesar Rp0.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Rencana untuk mencapai target kinerja tahun 2025 yang memuat uraian tentang program-program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran 2025 yang diuraikan pada setiap bidang pemerintahan dengan menggunakan tolok ukur (indikator) keberhasilan dan target kinerja (tingkat pencapaian) berdasarkan standar pelayanan yang tercantum dalam Arah Kebijakan Umum APBD tahun 2025 serta Strategi dan Prioritas Anggaran Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025. Untuk mengoperasionalkan Arah Kebijakan Umum melalui

strategi dan prioritas anggaran tersebut maka Badan, Dinas dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah menyusun rencana Program/kegiatan dan target kinerja masing-masing.

Pelaksanaan program/kegiatan dan pencapaian kinerja memuat uraian mengenai pelaksanaan program-program dan kegiatan yang telah direncanakan berikut tingkat pencapaian kinerjanya. Pengukuran pencapaian kinerja ini merupakan hal yang sangat penting dan dilakukan secara berkelanjutan yang dapat digunakan sebagai umpan balik *(feed back)* untuk perbaikan dalam rangka mencapai keberhasilan di waktu yang akan datang.

2.4. Kinerja Stunting dan Mandatory Spending.

2.4.1. Kinerja Stunting

Secara ringkas, laporan pelaksanaan percepatan penurunan stunting Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencakup hasil pemantauan, evaluasi TPPS selama 1 Tahun 2025 dan membandingkan dengan laporan pelaksanaan pada tahun 2024.

Gambaran Umum Wilayah

Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan salah satu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak pada 2°27'5.213" -2°46'54.559" Lintang Selatan dan 115°8' 56.965" -115°53' 32.520" Bujur Timur. Adapun batas-batas administratif Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai berikut.

a. Sebelah Utara berbatasan dengan; Kabupaten Balangan
b. Sebelah Barat berbatasan dengan; Kabupaten Hulu Sungai Utara
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan; Kabupaten Hulu Sungai Selatan
d. Sebelah Timur berbatasan dengan; Kabupaten Kotabaru

Kawasan Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga terbagi atas 2 kawasan yaitu kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan lindung di Kabupaten Hulu Sungai Tengah berupa hutan lindung seluas ± 60.622 ha, yang meliputi: kecamatan Batang Alai Timur, Hantakan, Haruyan dan Batang Alai Selatan; kawasan lindung berupa kawasan resapan air seluas 656 ha di Kecamatan Labuan Amas Utara; kawasan perlindungan setempat berupa kawasan sempadan sungai seluas 22.033 ha, kawasan sekitar mata air dan kawasan RTH, kawasan cagar budaya. Luas Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah 1.770,8 Km^2 atau 143,492 Ha, atau 4,57% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan kabupaten terkecil ke-4 dari 13 kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibu kotanya Barabai. Jarak ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan Banjarmasin sejauh ± 165 kilometer. Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempunyai 11 kecamatan Hulu Sungai Tengah terdiri dari 11 wilayah kecamatan, Berdasarkan pada kondisi daerah, potensi, peluang dan tantangan dalam pembangunan daerah dengan mengacu pada visi kepala daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah tahun 2025, maka pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam 5 (lima) tahun ke depan terarah pada visi:

"**Terwujudnya Hulu Sungai Tengah yang Religius Sejahtera Bermartabat"**

Adapun misi pembangunan yang dilaksanakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

a. Mewujudkan perubahan sosial masyarakat menuju masyarakat adaptif, berdaya saing dan berkualitas hidup tinggi yang religius berbudaya.
b. Mewujudkan perubahan perekonomian daerah secara merata dengan pengembangan menyeluruh dari hulu dan hilirisasi pertanian serta sektor potensial pendukung dengan prinsip kerakyatan yang memperhatikan kesinambungan pembangunan.
c. Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dengan prinsip berkelanjutan dalam mendukung pengembangan sektor potensial perekonomian daerah dan pelayanan masyarakat.
d. Mewujudkan Pemerintahan yang tanggap dan santun dengan tata kelola profesional.

Pelaksanaan Penanganan Stunting Tahun 2025

Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Tengah mempunyai 19 Puskesmas diantaranya 6 Puskesmas rawat Inap. Salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan dasar dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia adalah Puskesmas. Berdasarkan Permenkes Nomor 19 tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis terutama pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi ini dapat berdampak terhadap perkembangan fisik, kemampuan kognitif, serta produktivitas anak di masa depan dengan tujuan Indonesia Emas 2045.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus melakukan berbagai upaya percepatan penurunan stunting melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif yang dilaksanakan oleh berbagai sektor dan Puskesmas. Pemantauan pertumbuhan balita melalui indikator **Tinggi Badan menurut Umur (TB/U)** menjadi salah satu metode untuk mengetahui kondisi status gizi balita. Adapun pemantauan pertumbuhan balita dilakukan setiap bulan di Posyandu yang dimiliki oleh setiap Desa dan Kelurahan kemudian dilaporkan secara berjenjang dari Posyandu ke Puskesmas dan Dinas Kesehatan.

Upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan :

a. Melakukan Rujukan Balita Stunting ke Dokter Spesialis
b. Pemberian PMT Lokal untuk balita tidak naik berat badan, balita berat badan kurang dan balita gizi kurang serta PMT untuk ibu hamil kurang energi kronik melalui Dana BOK Puskesmas
c. Komunikasi-Informasi dan Edukasi tentang kesehatan baik dari Dinas Kesehatan ataupun Puskesmas
d. Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap pada Balita

a. Pemberian Tablet Tambah Darah untuk remaja puteri sebagai calon ibu dan pembudayaan membawa bekal ke sekolah
b. Peningkatan kapasitas/Refreshing kader Posyandu
c. Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita di setiap Desa
d. Pemicuan Jamban Sehat
e. Pembudayaan Germas dan PHBS di semua tatanan
f. Pemenuhan tenaga bidan di desa dan kelurahan
g. Jaminan Kesehatan Nasional/UHC

Intervensi Dinas Kesehatan pada Tahun 2025 untuk balita stunting adalah memberikan Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) untuk semua balita stunting. Hasil capaian pelaksanaan penanganan stunting di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai berikut:

Data Tahun 2025									
No	Puskesmas	Jumlah Balita Di ukur	TB/U						
			Sangat Pendek	Pendek	Normal	Tinggi	Outlier	Stunting	%
01.00	HARUYAN	1008	31	99	877	1	0	130	12,9
02.00	BARIKIN	255	18	70	167	0	3	88	34,5
03.00	PAGAT	587	10	37	540	0	5	47	8,0
04.00	KALIBARU	477	23	92	360	2	0	115	24,1
05.00	HANTAKAN	630	40	76	514	0	2	116	18,4
06.00	BIRAYANG	725	39	67	617	2	1	106	14,6
07.00	KUBUR JAWA	465	17	117	330	1	1	134	28,8
08.00	BATU TANGGA	225	16	48	161	0	1	64	28,4
09.00	TANDILANG	148	12	15	120	1	0	27	18,2
10.00	BARABAI	1985	24	76	1878	7	1	100	5,0
11.00	AWANG BESAR	524	25	20	479	0	1	45	8,6
12.00	PANTAI HAMBAWANG	948	34	86	828	0	2	120	12,7
13.00	DURIAN GANTANG	605	24	83	494	4	0	107	17,7
14.00	KASARANGAN	879	35	48	796	0	2	83	9,4
15.00	SUNGAI BULUH	718	19	21	678	0	0	40	5,6
16.00	PANDAWAN	1070	29	105	936	0	4	134	12,5
17.00	KAMBAT UTARA	819	25	51	743	0	0	76	9,3
18.00	ILUNG	983	39	48	894	2	2	87	8,9
19.00	LIMPASU	573	33	158	382	0	4	191	33,3
JUMLAH		13624	493	1317	11794	20	29	1810	13,3

Pada tahun 2025 terdapat **1.810 balita stunting** dari **13.624 balita yang diukur**, dengan prevalensi **13.3%**. Data ini diambil dari sigizkesga Data Tanggal : 2026-01-15 11:15:52 dari tanggal penarikan mendapat arahan dari kemenkes untuk mengambil data bulan Desember 2025. Dari total 15.274 balita yang tercatat, sebanyak 13.624 balita berhasil diukur (*Jumlah Balita Di Ukur*).

Balita Normal: 11.794 balita (86.56% dari yang diukur) memiliki tinggi badan normal sesuai usianya. Balita Stunting: Terdapat 1.810 balita yang dikategorikan sebagai *Pendek* atau *Sangat Pendek*, dengan persentase stunting rata-rata kabupaten sebesar 13.3%.

A. Zona Merah (Prioritas Utama) - Prevalensi > 30%

Puskesmas ini memiliki angka stunting yang sangat tinggi dan membutuhkan intervensi segera.

No	Puskesmas	Prevalensi (%)	Keterangan
1	Barikin	34,5%	Peringkat 1 Tertinggi
2	Limpasu	33,3%	Peringkat 2 Tertinggi

B. Zona Kuning (Prioritas Sedang) - Prevalensi 15% - 30%

Angka di atas rata-rata gabungan (13,3%) dan perlu perhatian serius untuk mencegah kenaikan.

No	Puskesmas	Prevalensi (%)
1	Kubur Jawa	28,8%
2	Batu Tangga	28,4%
3	Kalibaru	24,1%
4	Hantakan	18,4%
5	Tandilang	18,2%
6	Durian Gantang	17,7%
7	Birayang	14,6%
8	Haruyan	12,9%

C. Zona Hijau (Baik) - Prevalensi < 10%

Puskesmas dengan kinerja baik dalam pengendalian stunting.

No	Puskesmas	Prevalensi (%)
1	Pantai Hambawang	12,7%
2	Pandawan	12,5%
3	Pagat	8,0%
4	Awang Besar	8,6%
5	Ilung	8,9%
6	Kasarangan	9,4%
7	Kambat Utara	9,3%
8	Barabai	5,0%
9	Sungai Buluh	5,6%

Meskipun Barabai memiliki persentase terendah (5,0%) – Kinerja Terbaik, karena jumlah balita yang diukur sangat besar (1.985), kontribusi absolut kasus stuntingnya tetap signifikan (100 kasus). Sebaliknya, Haruyan dengan persentase 12,9% menyumbang 130 kasus (terbesar ke-2 secara absolut).

Perbandingan dengan capaian penangan stunting Tahun 2024

Berdasarkan data SSGI Tahun 2024 :

Kabupaten / Kota	Status Gizi Balita									
	Stunting		*Underweight*		*Severe Wasting*		*Wasting*		*Overweight*	
	%	95% CI	%	95% CI	%	95% CI	%	95% CI	%	95% CI
Tanah Laut	22,5	15,1 - 29,8	24,1	17,2 - 31,0	1,5	0,0 - 3,1	6,8	4,5 - 9,1	5,6	3,9 - 7,3
Kotabaru	23,2	19,0 - 28,0	20,8	16,9 - 25,2	2,2	1,3 - 3,7	6,9	5,1 - 9,3	6,3	4,6 - 8,5
Banjar	32,3	28,3 - 36,7	28,8	24,8 - 33,2	2,4	1,4 - 4,0	12,2	9,5 - 15,6	3,1	2,0 - 4,8
Barito Kuala	16,5	13,0 - 20,7	18,8	15,5 - 22,6	1,3	0,6 - 2,5	9,4	6,9 - 12,7	4,6	2,9 - 7,3
Tapin	13,2	9,5 - 18,1	16,8	12,9 - 21,7	2,1	1,3 - 3,6	8,3	5,9 - 11,7	2,8	1,7 - 4,5
Hulu Sungai Selatan	19,8	11,3 - 28,2	19,7	13,6 - 25,8	1,8	0,2 - 3,5	7,7	5,2 - 10,2	2,7	1,6 - 3,8
Hulu Sungai Tengah	19,6	13,1 - 26,1	17,3	11,4 - 23,2	1,3	0,0 - 2,9	6,3	4,1 - 8,6	3,2	1,9 - 4,4
Hulu Sungai Utara	27,6	23,2 - 32,5	30,3	25,5 - 35,5	0,4	0,1 - 1,3	10,6	8,0 - 13,9	2,5	1,5 - 4,3
Tabalong	23,1	15,0 - 31,2	19,4	12,9 - 25,9	1,8	0,2 - 3,4	7,6	5,0 - 10,1	3,7	2,3 - 5,1
Tanah Bumbu	21,6	17,1 - 27,1	17,9	14,0 - 22,6	1,7	0,8 - 3,7	5,6	3,7 - 8,3	6,1	4,4 - 8,4
Balangan	16,0	13,4 – 19,1	16,6	13,8 – 19,8	0,5	0,2 – 1,6	5,9	4,3 - 8,2	3,1	1,9 – 5,0
Kota Banjarmasin	26,5	22,8 - 30,4	25,0	21,3 - 29,1	2,5	1,4 - 4,4	13,3	10,5 - 16,6	4,8	3,2 - 7,2
Kota Banjarbaru	15,4	12,0 - 19,7	17,9	14,2 - 22,2	0,8	0,3 - 2,2	7,1	4,9 - 10,0	4,3	2,4 - 7,5

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia yan dilaksanakan oleh Pusat Kementerian Kesehatan. stunting di kabupaten Hulu Sungai Tengah Sebesar 19,6% berdasarkan SSGI tahun 2024. Prevalensi stunting di Hulu Sungai Tengah tergolong sedang jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan. Angka ini masih di bawah rata-rata provinsi, namun secara umum stunting >20% termasuk tinggi.

Berdasarkan Data Internal Kabupaten (2024 - 2025):

- Tahun 2024 menunjukkan angka stunting (gabungan dari status "Pendek" dan "Sangat Pendek") sebesar 9,6% (1.418 balita) dari total balita yang diukur.
- Tahun 2025 menunjukkan angka stunting yang lebih tinggi, yaitu 13,3% (1.810 balita) dari total balita yang diukur.

Angka 9,6% - 13,3% ini memberikan gambaran awal tentang beban masalah stunting di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2025.

Perbandingan dengan Data Survei Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan (SSGI Tahun 2024):

1) SSGI Tahun 2024 merupakan data resmi tingkat provinsi menempatkan prevalensi stunting di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada angka 19,6% dengan rentang kepercayaan (*Confidence Interval* 95%) antara 13,1% - 26,1%.
2) Angka 19,6% ini adalah estimasi dari survei dengan metodologi sampel, bukan hasil sensus seperti pada data Puskesmas. Data Puskesmas (Tahun 2024 & Tahun 2025) adalah data agregat dari seluruh balita yang diukur di fasilitas kesehatan, sehingga sangat mungkin berbeda dengan hasil survei.
3) Angka dari data internal Puskesmas (9,6% dan 13,3%) berada di bawah batas bawah rentang kepercayaan data Nasional provinsi KalSel (13,1%). Hal ini mengindikasikan

adanya potensi perbedaan signifikan antara hasil pendataan rutin Puskesmas dan hasil survei terstandar di tingkat Nasional. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh cakupan pengukuran, kualitas data, atau metode penghitungan. Data provinsi Kalimantan Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah (19,6%) digunakan sebagai acuan utama untuk perencanaan dan evaluasi di tingkat provinsi dan nasional.

Puskesmas dengan Prevalensi Stunting Terendah

No	Puskesmas	Jumlah Stunting	Prevalensi (%)	Kategori
1	Barabai	100	5,00%	Rendah
2	Sungai Buluh	40	5,60%	Rendah
3	Pagat	47	8,00%	Rendah
4	Awang Besar	45	8,60%	Rendah
5	Ilung	87	8,90%	Rendah
6	Kambat Utara	76	9,30%	Rendah

Puskesmas dengan Kontribusi Kasus Terbesar

No	Puskesmas	Jumlah Kasus Stunting	Prevalensi (%)
1	Limpasu	191	33,30%
2	Pandawan	134	12,50%
3	Kubur Jawa	134	28,80%
4	Haruyan	130	12,90%
5	Pantai Hambawang	120	12,70%
6	Hantakan	116	18,40%

Perbandingan Data Stunting per Puskesmas

No	Puskesmas	Prevalensi 2024	Prevalensi 2025	Selisih	Keterangan
1	Barikin	25,10%	34,50%	9,40%	Meningkat tajam
2	Limpasu	4,80%	33,30%	28,50%	Anomali data
3	Kalibaru	11,70%	24,10%	12,40%	Meningkat signifikan
4	Tandilang	21,80%	18,20%	-3,60%	Menurun
5	Birayang	16,10%	14,60%	-1,50%	Menurun

Puskesmas Limpasu menunjukkan lonjakan prevalensi yang sangat ekstrem dari 4,8% menjadi 33,3%. Puskesmas Barikin dan Kalibaru secara konsisten menunjukkan prevalensi tinggi.

Variasi dan Kontribusi Antar Puskesmas

Analisis berdasarkan Tahun 2024 dan 2025 menunjukkan adanya disparitas yang cukup lebar antar Puskesmas di kabupaten HST.

Puskesmas dengan Beban Stunting Tertinggi (Tahun 2025):

Barikin (34,5%) dan Limpasu (33,3%) menempati posisi tertinggi, diikuti Kubur Jawa (28,8%) dan Batu Tangga (28,4%). Keempat Puskesmas ini memiliki angka stunting yang secara signifikan lebih tinggi dari rata-rata kabupaten (13,3%) maupun estimasi provinsi (19,6%). Hal ini menjadikan mereka sebagai prioritas utama untuk intervensi. Tingginya

angka di Puskesmas Barikin konsisten di kedua tabel (25,1% di Tahun 2024 dan 34,5% di Tahun 2025).

- Puskesmas dengan Beban Stunting Terendah (Tahun 2025):

Barabai (5,0%), Sungai Buluh (5,6%), Pagat (8,0%), Awang Besar (8,6%), dan Ilung (8,9%) mencatatkan prevalensi stunting di bawah 9%. Puskesmas-puskesmas ini bisa menjadi *role model* atau sumber pembelajaran tentang praktik baik yang telah diterapkan di wilayahnya.

- Pembelajaran dari Wilayah dengan Prestasi Baik:

Praktik-praktik baik yang diterapkan di Puskesmas Barabai, Sungai Buluh, dan Pagat perlu direplikasi. Ini bisa mencakup strategi komunikasi perubahan perilaku, pola pendampingan keluarga berisiko stunting, atau inovasi dalam program kesehatan lainnya. Pendekatan Holistik untuk Masalah gizi tidak berdiri sendiri. Angka *underweight* dan *wasting* yang juga signifikan menunjukkan perlunya penguatan intervensi gizi sensitif dan spesifik secara terintegrasi, seperti ketahanan pangan keluarga, akses air bersih dan sanitasi, serta pola asuh yang tepat.

Berdasarkan analisis data dari 19 Puskesmas se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2024 serta perbandingannya dengan data survei provinsi, dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait permasalahan stunting di wilayah ini. Pertama, prevalensi stunting di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan angka yang bervariasi tergantung sumber data yang digunakan. Data internal Puskesmas mencatat prevalensi stunting sebesar 9,6% hingga 13,3%, sementara data survei Nasional Untuk provinsi KalSel menempatkan angka stunting HST pada 19,6% dengan rentang kepercayaan 13,1% hingga 26,1%. Data survei Nasional untuk provinsi Kalsel ini merupakan acuan resmi yang menempatkan HST pada peringkat ke-8 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, dengan posisi lebih baik dibanding Hulu Sungai Utara (27,6%) namun masih perlu upaya keras untuk mengejar ketertinggalan dari kabupaten tetangga seperti Tapin (13,2%) dan Balangan (16,0%).

Berdasarkan hasil pemantauan pertumbuhan balita tahun 2025 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah:

Balita diukur: **13.624 balita**

Balita stunting: **1.810 balita**

Prevalensi stunting: **13,3%**

Empat Puskesmas dengan prevalensi tertinggi yaitu Barikin (34,5%), Limpasu (33,3%), Kubur Jawa (28,8%), dan Batu Tangga (28,4%) telah melampaui rata-rata kabupaten maupun provinsi secara signifikan. Keempat Puskesmas ini menyumbang lebih dari seperempat total kasus stunting di HST meskipun cakupan balitanya relatif kecil. Sebaliknya, Puskesmas Barabai berhasil mencatatkan prevalensi hanya 5,0%, jauh di bawah target nasional 14%, membuktikan bahwa penurunan stunting hingga level rendah sangat mungkin dicapai dengan strategi yang tepat. Dibandingkan tahun 2024 yang memiliki prevalensi **9,6%**, terjadi **peningkatan prevalensi stunting sebesar 3,7%**, sehingga diperlukan upaya yang lebih intensif dan terintegrasi untuk menurunkan angka stunting pada tahun berikutnya.

Permasalahan stunting di HST tidak berdiri sendiri melainkan terkait erat dengan berbagai faktor multidimensi seperti kemiskinan, pola asuh, ketahanan pangan, akses air bersih, dan sanitasi lingkungan. Pendekatan intervensi yang hanya berfokus pada aspek kesehatan saja tidak akan cukup untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas.

2.4.2. Mandatory Spending

1. Belanja Wajib Pendidikan

   Pada hakikatnya, komitmen belanja wajib *(mandatory spending)* pada sektor pendidikan dan kesehatan sangat berpengaruh dengan adanya perubahan total belanja negara maupun belanja daerah. Ketentuan pengalokasian minimal dari persentase tertentu dari belanja pemerintah mengikat kinerja pemerintah dan mengakibatkan kebijakan fiskal menjadi tidak fleksibel.

   Kenaikan atau penurunan anggaran belanja secara otomatis akan mempengaruhi kebijakan penganggaran pemerintah untuk menaikan atau menurunkan belanja pendidikan dan belanja kesehatan. Ketentuan formula anggaran yang sirkular ini menyebabkan penghitungan anggaran pemerintah dilakukan secara iterasi dalam waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu, kedua komitmen anggaran belanja wajib *(mandatory spending)* tersebut berimplikasi pada mekanisme penghitungan anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan pemerintah baru dapat dikalkulasikan setelah seluruh postur komponen belanja dalam APBN maupun APBD selesai disusun secara lengkap.

   Anggaran pendidikan merupakan alokasi anggaran pemerintah pada fungsi pendidikan melalui penganggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sesuai dengan amanat konstitusi hasil amandemen keempat UUD 1945 pada pasal 31 ayat 4 dan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa formula anggaran pendidikan dalam postur anggaran pusat maupun daerah sekurang-kurangnya 20% dari total belanja negara pada APBN maupun APBD.

   Dalam postur UU APBN, alokasi anggaran pendidikan merupakan salah satu komponen belanja yang dianggarkan oleh kementerian/lembaga negara terkait atau melalui mekanisme dana dekonsentrasi dalam ruang lingkup transfer ke daerah dan desa. Di sisi lain, alokasi anggaran pendidikan daerah merupakan penganggaran SKPD yang memiliki kewenangan dalam bidang pelayanan pendidikan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam postur belanja daerah pada APBD.

Tabel 2.4.5 Alokasi Fungsi Pendidikan Tahun Anggaran 2025
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No	Komponen Perhitungan	R.APBD 2025	
		Jumlah	
1	a. Urusan Bidang Pendidikan		472.750.092.360
	1) Belanja Operasi:	427.928.937.460	
	a. Belanja pegawai;	337.740.359.322	
	b. Belanja barang dan jasa;	81.668.292.138	
	c. Belanja hibah	8.520.286.000	
	d. Belanja bantuan sosial	0	
	2) Belanja Modal	44.821.154.900	
	b. Urusan Bidang Kebudayaan		2.036.904.593
	1) Belanja Operasi:	1.615.904.593	
	a. Belanja pegawai;	0	
	b. Belanja barang dan jasa;	1.615.904.593	
	c. Belanja hibah	0	
	d. Belanja bantuan sosial	0	
	2) Belanja Modal	421.000.000	
	c. Urusan Bidang Perpustakaan		9.514.741.267
	1) Belanja Operasi:	6.191.965.467	
	a. Belanja pegawai;	2.106.652.131	
	b. Belanja barang dan jasa;	4.083.313.336	
	c. Belanja hibah	0	
	d. Belanja bantuan sosial	0	
	2) Belanja Modal	3.322.775.800	
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga		21.856.167.449
	1) Belanja Operasi:	16.767.137.049	
	a. Belanja pegawai;	3.950.910.129	
	b. Belanja barang dan jasa;	8.266.226.920	
	c. Belanja hibah	4.550.000.000	
	d. Belanja bantuan sosial	0	
	2) Belanja Modal	5.089.030.400	
	e. Belanja diluar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibida Pendidikan, antara lain:		0
	1) Belanja Transfer:	0	
	Belanja bantuan keuangan...	0	
	2) Sub Kegiatan		
	Belanja ...	0	
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	506.157.905.669	
3	Total Belanja Daerah	2.353.335.150.532	
4	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x100%	21,51%	

Sesuai dengan tabel di atas maka komitmen besaran anggaran pendidikan yang mencapai hampir seperempat bagian dari total belanja daerah memberikan kepastian dukungan pemerintah terhadap pembangunan manusia. Pada hakikatnya, alokasi anggaran pendidikan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan atas penyelenggaraan berbagai aktivitas pendidikan nasional yang meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non-formal dan informal, pendidikan tinggi, pendidikan keagamaan, pendidikan kepemudaan dan olahraga, penelitian dan pengembangan pendidikan, serta pelayanan bantuan terhadap pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan tersebut melingkupi seluruh lini pendidikan, tetapi tidak termasuk anggaran penyelenggaraan pendidikan kedinasan yang juga menjadi tanggung jawab beberapa kementerian/lembaga negara. Dalam prakteknya, alokasi anggaran pendidikan umumnya merupakan sumber pendanaan untuk membiayai setiap program dan kebijakan pemerintah dalam mendukung peningkatan

aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pendidikan. Anggaran pendidikan yang optimal diharapkan dapat mendorong angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah penduduk dewasa sehingga dapat mendorong peningkatan aspek pendidikan sebagai salah satu dimensi dasar dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2. Belanja Wajib Kesehatan

Alokasi anggaran kesehatan yang tersebut pada tabel di bawah ini adalah Dasar Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025 bahwa Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang diukur berdasarkan angka harapan hidup sejak waktu lahir. Peningkatan taraf kesehatan masyarakat berdampak positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menempatkan aspek kesehatan sebagai salah satu dimensi pengukuran. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang optimal menjadi salah satu prioritas pemerintah yang diwujudkan dengan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, pelayanan kesehatan perorangan, pelayanan kesehatan masyarakat, program keluarga berencana, serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu kesehatan. Keberhasilan pelaksanaan program tersebut tidak hanya ditentukan dari seberapa besar anggaran yang digunakan, melainkan juga mempertimbangkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkesinambungan dari tahun ke tahun.

Tabel 2.4.6 Alokasi Fungsi Kesehatan Tahun Anggaran 2025
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No.	Prioritas Bidang Kesehatan	Anggaran
1	Penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit	4.105.726.040
2	Peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan stunting	9.973.474.100
3	Pencegahan dan pengendalian penyakit menular	4.986.514.000
4	Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	1.022.829.063
5	Penguatan jejaring layanan primer	72.802.404.400
6	Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	8.448.985.178
	Alokasi Anggaran Kesehatan	**101.339.932.781**

3. Dana Transfer Umum (DTU).

Dalam mendukung dan memantapkan kebijakan prioritas pembangunan nasional diberbagai bidang pembangunan diperlukan penelitian dan pengkajian yang dapat menilai efektivitas pelaksanaan dari rumusan kebijakan itu sendiri, terutama kebijakan yang ditetapkan Pemerintah yang tentunya akan berdampak bagi masyarakat luas. Salah satu kebijakan Pemerintah yang telah ditetapkan sejak tahun 2016 sampai sekarang adalah kebijakan terkait pengalokasian untuk belanja infrastruktur daerah yang bersumberkan dari Dana Transfer Umum (DTU). Kebijakan ini ditetapkan dalam rangka mendukung dan memantapkan prioritas pembangunan nasional dibidang infrastruktur sekaligus mengarahkan Pemerintah Daerah dalam percepatan pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik dan mengurangi

kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Oleh karena itu, perlu menjadi perhatian bagi para pemangku kepentingan, terutama Pemerintah Pusat sebagai pihak pembuat kebijakan dan DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan, untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

Hal-hal yang perlu diketahui mengenai penilaian atas efektivitas pelaksanaan kebijakan ini adalah tentang kepatuhan pengalokasian belanja infrastruktur dalam APBD di setiap tahun anggaran sesuai persentase yang diamanahkan dalam Undang-undang APBN; bagaimana sistem dan mekanisme evaluasi serta pengawasan terkait penggunaan dan pelaksanaan program belanja infrastruktur tersebut. Begitu juga terkait dengan dampak yang diharapkan, apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh Pemerintah Pusat ketika kebijakan ini telah ditetapkan sejak tahun anggaran 2016

Anggaran Dana Transfer Umum adalah belanja yang sudah diarahkan penggunaannya, seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.4.7 Alokasi Dana Transfer Umum (DTU) Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)
1	Total Belanja Daerah	2.353.335.150.532
2	Belanja bagi hasil dan / atau transfer kepada daerah dan atau desa	
	a) belanja bagi hasil	4.775.402.521
	b) bantuan keuangan	253.838.492.129
	Jumlah (a+b)	258.613.894.650
3	Selisih (1-2)	2.094.721.255.882
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	837.888.502.353

Belanja Infrastruktur Daerah

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)	
1	a) Belanja Modal		482.874.805.439
	1) Tanah	10.992.639.013	
	2) Peralatan dan Mesin	151.897.003.512	
	3) Bangunan dan Gedung	118.745.592.917	
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	199.271.579.997	
	5) Aset tetap lainnya	1.849.990.000	
	6) Aset lainnya	118.000.000	
	b) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan		0
	c) Belanja pemeliharaan	31.913.419.351	31.913.419.351
2	a) Belanja Hibah	72.125.481.192	
	b) Belanja Bantuan Sosial	33.262.000.000	
	c) Belanja Bantuan Keuangan	253.838.492.129	359.225.973.321
3	Jumlah Belanja Infrastruktur daerah (1+2)		874.014.198.111
			37,13

Alokasi anggaran Dana Transfer Umum (DTU) yang tersebut pada tabel di atas adalah merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan percepatan pembangunan (infrastruktur) daerah yang terkait dengan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, Perlindungan Sosial dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).

4. Alokasi Dana Desa (ADD)

Sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dan disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus seperti table di bawah ini:

Tabel 2.4.8 Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No	Nama Kabupaten/Kota	DAU	DBH	Total DAU + DBH	ADD (seharusnya)	ADD (dianggarkan)	Memenuhi/ Tidak Memenuhi	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	551.962.927.000	568.465.010.287	1.120.427.937.287	112.042.793.729	126.044.386.000		

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dengan rincian sebagai berikut :

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa

6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Pendapatan Daerah

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 setelah pergeseran sebesar Rp2.057.093.517.611,66 atau naik 20,95% dari tahun 2024 sebesar Rp1.700.811.043.180,00 dan realisasi pendapatan sebesar Rp1.871.913.402.454,66 yang berarti tingkat capaian secara kumulatif sebesar 90,99%.

Adapun mengenai pos-pos dari target pendapatan Tahun Anggaran 2025, berasal dari masing-masing sumber yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah, meliputi :

Tabel 3.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Daerah	30.848.734.000,00	36.868.038.669,00	119,51
2	Retribusi Daerah	37.351.402.575,00	228.768.959.135,00	612,48
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.316.087.147,00	8.316.087.147,00	100,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	186.478.298.089,00	38.319.717.167,66	20,55
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		**262.994.521.811,00**	**312.272.802.118,66**	**118,74**

2. Pendapatan Transfer, meliputi :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Tabel 3.1.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	Uraian	2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A. Dana Perimbangan				
1	Dana Bagi Hasil Pajak	27.434.397.000,00	25.358.965.200,00	92,43
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	632.562.707.287,00	532.832.462.179,00	84,23
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	551.962.927.000,00	546.966.063.077,00	99,09
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler	51.634.120.000,00	50.742.422.165,00	98,27
5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
6	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	140.731.110.000,00	131.320.800.923,00	93,31
7	Dana Bagi Hasil lainnya (DBH Sawit)	1.166.153.000,00	1.166.153.000,00	100,00
B. Dana Insentif Daerah (DID)				
	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00
C. Dana Desa (DD)				
	Dana Desa (DD)	126.044.386.000,00	115.959.796.462,00	92,00
D. Insentif Fiskal				
	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat		**1.531.535.800.287,00**	**1.404.346.663.006,00**	**91,70**

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Tabel 3.1.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah

No	Uraian	2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	217.106.527.198,66	109.837.269.015,00	50,59
Jumlah Transfer Antar Daerah		**217.106.527.198,66**	**109.837.269.015,00**	**50,59**

3. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah :

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Tabel 3.1.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah

No	Uraian	2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	45.456.668.315,00	45.456.668.315,00	100,00
Jumlah lain-lain Pendapatan daerah yang sah		**45.456.668.315,00**	**45.456.668.315,00**	**100,00**

3.1.2. Belanja Daerah

Untuk Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah dianggarkan setelah Pergeseran sebesar Rp2.353.335.150.532,00 dengan realisasi sebesar Rp2.024.099.912.792,56 atau 86,00% dengan perincian penggunaan belanja daerah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi, dengan jumlah anggaran pergeseran Rp1.598.559.706.191,00 dan terealisasi sebesar Rp1.399.691.309.974,56 atau sebesar 87,56%. yang digunakan untuk Belanja:

Tabel 3.1.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No	Uraian	2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	709.333.333.249,00	605.290.692.945,00	85,33
2	Belanja Barang dan Jasa	783.538.891.750,00	708.318.667.192,32	90,40
3	Belanja Subsidi	300.000.000,00	62.515.221,24	20,84
4	Belanja Hibah	72.125.481.192,00	53.667.554.616,00	74,41
5	Belanja Bantuan Sosial	33.262.000.000,00	32.351.880.000,00	97,26
	Jumlah Belanja Operasi	**1.598.559.706.191,00**	**1.399.691.309.974,56**	**87,56**

2. Belanja Modal, dengan jumlah anggaran setelah pergeseran Rp482.874.805.439,00 dan terealisasi sebesar Rp408.697.037.216,00 atau 84,64% digunakan untuk belanja:

Tabel 3.1.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No	Uraian	2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Modal Tanah	10.992.639.013,00	3.381.372.000,00	30,76
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	151.897.003.512,00	141.163.477.540,00	92,93
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	118.745.592.917,00	112.776.401.824,00	94,97

No	Uraian	2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan	199.271.579.997,00	150.098.514.061,00	75,32
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.849.990.000,00	1.227.971.791,00	66,38
6	Belanja Modal Aset Lainnya	118.000.000,00	49.300.000,00	41,78
	Jumlah Belanja Modal	**482.874.805.439,00**	**408.697.037.216,00**	**84,64**

3. Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp13.286.744.252,00 dengan realisasi sebesar Rp1.410.395.000,00 atau 10,62%.

Tabel 3.1.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga

No	Uraian	2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Tak Terduga	13.286.744.252,00	1.410.395.000,00	10,62
	Jumlah Belanja Tak Terduga	13.286.744.252,00	1.410.395.000,00	10,62

3.1.3. Belanja Transfer

Untuk Belanja Transfer pada Tahun Anggaran 2025 telah dianggarkan setelah pergeseran sebesar Rp258.613.894.650,00 dengan realisasi sebesar Rp214.301.170.602,00 atau 82,87% dengan perincian sebagai berikut:

1. Transfer Bagi Hasil Realisasi sebesar Rp3.839.426.798,00 atau 80,40% dari anggaran setelah pergeseran sebesar Rp4.775.402.521,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil

No	Uraian	2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bagi Hasil Pajak	3.368.982.379,00	2.927.434.531,00	86,89
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi	1.406.420.142,00	911.992.267,00	64,84
	Jumlah Belanja Transfer/Bagi Hasil Ke Desa	**4.775.402.521,00**	**3.839.426.798,00**	**80,40**

2. Transfer Bantuan Keuangan, dengan jumlah anggaran setelah Pergeseran Rp253.838.492.129,00 dan terealisasi sebesar Rp210.461.743.804,00 atau sebesar 82,91% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan

No	Uraian	2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum ke Desa	251.838.492.129,00	210.004.267.004,00	83,39
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kab/Kota ke Provinsi	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa	2.000.000.000,00	457.476.800,00	22,87
	Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	**253.838.492.129,00**	**210.461.743.804,00**	**82,91**

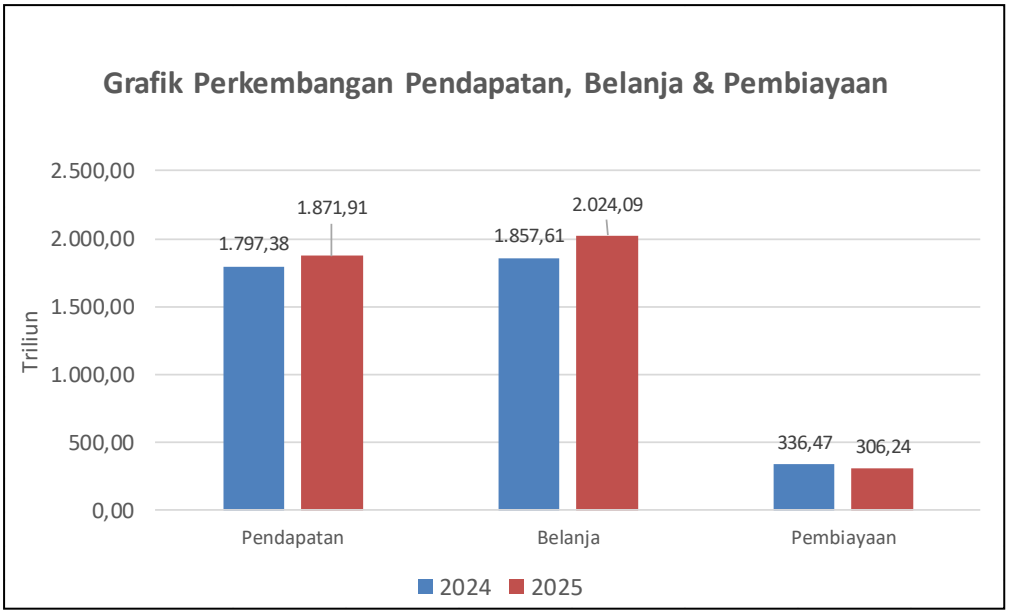
3.1.4. Pembiayaan Daerah

Pada sisi Pembiayaan, Penerimaan Daerah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) realisasi sebesar Rp306.241.632.920,34 yang dianggarkan sebesar Rp306.241.632.920,34 atau 100% sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

Tabel 3.1.10 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah

No	Uraian	2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Penerimaan Pembiayaan				
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	306.241.632.920,34	306.241.632.920,34	100,00
2	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	306.241.632.920,34	306.241.632.920,34	100,00
Pengeluaran Pembiayaan				
	Penyertaan Modal kepada BUMD	10.000.000.000,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto		**296.241.632.920,34**	**306.241.632.920,34**	**103,38**

Gambar 3.1.1 Perkembangan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan



3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam membiayai pembangunan daerah masih sangat tergantung dengan dana Transfer dari Pemerintah Pusat, hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah belum mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah dan berharap melalui Otonomi, PAD dapat meningkat, meskipun kenyataannya sumber-sumber PAD tersebut belum mampu menutupi seluruh pengeluaran APBD. Akan tetapi sumber PAD tetap menjadi indikator pendorong peningkatan kemajuan dan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dalam upaya meningkatkan PAD tersebut perlu usaha-usaha untuk menggali potensi PAD baik yang bersumber dari Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah.

Hambatan dan Kendala dalam upaya meningkatkan Peranan PAD terhadap total Pendapatan Daerah diantaranya adalah :

1. belum optimalnya manajemen pengelolaan pajak maupun retribusi daerah khususnya pada beberapa pos-pos pendapatan tertentu.adanya penetapan target yang diharapkan berlandaskan pada potensi yang faktual di lapangan. Penetapan target penerimaan PAD belum berdasarkan potensi riil yang dimiliki daerah,
2. perlunya upaya ekstensifikasi dalam menggali potensi-potensi PAD dan juga diiringi dengan upaya intensifikasi agar potensi riil yang telah ditetapkan dapat dicapai.
3. Landasan hukum yang menjadi akar pijakan bagi penyelenggaraan pemungutan memerlukan penyesuaian dengan waktu yang cukup cepat, mengingat tingkat perkembangan aktivitas masyarakat dan pembangunan yang sangat dinamis.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola pendapatan daerah.

5. Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi.

Dalam pencapaian serapan anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 memang masih ditemui hambatan dan kendala dalam pelaksanaan APBD sehingga mengakibatkan tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan adalah relatif masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pada masing-masing SKPD dalam membuat perencanaan kegiatan yang baik dan sesuai kebutuhan, serta relatif masih belum optimalnya pelaksanaan sistem pengendalian intern di masing-masing SKPD dalam pelaksanaan anggaran belanja daerah.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Kebijakan akuntansi tersebut disusun oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD dan SKPKD) sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya, untuk dasar penyusunan laporan keuangan yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan. SKPD di Kabupaten Hulu Sungai Tengah meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor dan Kecamatan.

Rincian Entitas Akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025

No	Kode	SKPD
1	1-01.2-22.0-00.1.1.0	Dinas Pendidikan
2	1-02.0-00.0-00.1.1.0	Dinas Kesehatan
3	1-02.0-00.0-00.1.1.1	RSUD H. Damanhuri Barabai
4	1-03.0-00.0-00.1.1.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	1-04.2-10.0-00.1.1.0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6	1-05.0-00.0-00.1.1.0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
7	1-05.1-06.0-00.2.0.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	1-06.2-14.2-08.1.1.0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	2-09.3-25.0-00.1.1.0	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
10	2-11.2-15.0-00.1.1.0	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
11	2-12.0-00.0-00.1.1.0	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12	2-13.0-00.0-00.1.1.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13	2-16.2-21.2-20.1.1.0	Dinas Komunikasi dan Informatika
14	2-18.2-07.3-32.1.1.0	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja

No	Kode	SKPD
15	2-19.3-26.0-00.1.1.0	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
16	2-23.2-24.0-00.1.1.0	Dinas Perpustakaan
17	3-27.0-00.0-00.1.1.0	Dinas Pertanian
18	3-30.3-31.2-17.1.1.0	Dinas Perdagangan
19	4-01.0-00.0-00.1.1.0	Sekretariat Daerah
20	4-02.0-00.0-00.1.1.0	Sekretariat DPRD
21	5.01.5.05.0-00.1.1.0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
22	5-02.0-00.0-00.1.1.0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
23	5-02.0-00.0-00.2.1.0	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
24	5-03.5-04.0-00.1.1.0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
25	6-01.0-00.0-00.1.1.0	Inspektorat
26	7-01.0-00.0-00.1.1.0	Kecamatan Barabai
27	7-01.0-00.0-00.21.0	Kecamatan Pandawan
28	7-01.0-00.0-00.3.1.0	Kecamatan Labuan Amas Selatan
29	7-01.0-00.0-00.4.1.0	Kecamatan Labuan Amas Utara
30	7-01.0-00.0-00.5.1.0	Kecamatan Haruyan
31	7-01.0-00.0-00.6.1.0	Kecamatan Batu Benawa
32	7-01.0-00.0-00.7.1.0	Kecamatan Hantakan
33	7-01.0-00.0-00.8.1.0	Kecamatan Batang Alai Selatan
34	7-01.0-00.0-00.9.1.0	Kecamatan Batang Alai Utara
35	7-01.0-00.0-00.10.1.0	Kecamatan Batang Alai Timur
36	7-01.0-00.0-00.11.1.0	Kecamatan Limpasu
37	8-01.0-00.0-00.1.1.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai. Entitas akuntansi tidak termasuk Perusahaan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 menggunakan basis akrual sesuai dengan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban. Untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah menggunakan nilai perolehan atau historis. Dengan demikian dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, aset dicatat sebesar pengeluaran kas

atau setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, sedangkan kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing, jika ada, dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Dalam rangka penerapan akuntansi basis akrual pada pelaporan keuangan Pemerintah Daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor : 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 68 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Tahun 2020 Nomor 68);

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh entitas pelaporan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Di samping itu, Dalam penyusunan kebijakan akuntansi ini juga telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintah Daerah.

Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPD adalah :

1) Pendapatan

Pendapatan semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

3) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO). Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi yang harus dilakukan.

Beban diukur sesuai dengan:

a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran RKUD yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari RKUD. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan. Belanja disajikan di lembar muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi urusan, organisasi, program dan kegiatan, dan kelompok.

5) Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada RKUD serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

6) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyedia jasa bagi

masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset lainnya.

(1) Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penyisihan Piutang tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar :

a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari piutang Kualitas Kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan Kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan Kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar :

a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan Kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan Kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang tidak Tertagih untuk objek Bukan Pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:

a. 0,5% dari Piutang dengan Kualitas lancar;
b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan Kualitas Kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
c. 50% (lima puluh per seratus) dari Piutang dengan Kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan Kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.

Pencatatan transaksi Penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang ,maka dihitung nilai Penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan Kualitas piutangnya.

Apabila Kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di Dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai Penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Sebaliknya, apabila Kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai Penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

a. Harga pembelian terakhir (FIFO) jika diperoleh dengan pembelian;
b. Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
c. Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

(2) Investasi

Investasi adalah hak yang dimasukkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan dalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Penyajian investasi Non Permanen pada Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 Investasi Jangka Panjang menjadi nihil setelah dilakukan penyisihan investasi.

Investasi Jangka Pendek memiliki karakteristik sebagai berikut :

a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan s.d. 12 bulan;
b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana Pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas;
c. Berisiko rendah.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

a. Investasi Non Permanen

   Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak masuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

b. Investasi Permanen

   Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a. Metode Biaya

   Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode Ekuitas

   Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

(3) Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, ditambah pengeluaran-pengeluaran lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam aset tersebut ke kondisi siap untuk digunakan.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, sebagai berikut:

a. Peralatan dan Mesin dengan nilai di atas Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
b. Gedung dan Bangunan dengan nilai di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
c. Aset Tetap Lainnya:
    1) Hewan dan Tanaman dengan nilai di atas Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah).
    2) Barang Koleksi Non Budaya dengan nilai di atas Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah)
    3) Aset Tetap Dalam Renovasi dengan nilai di atas Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah)

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi di atas diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian serta konstruksi dalam pengerjaan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih ditambahkan pada nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan.

Penyusutan aset tetap diakui, dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam Neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional. Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Untuk penyusutan atas aset tetap lainnya kelompok aset tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan metode garis lurus. Penyusutan dengan garis lurus menggunakan periode bulanan, dengan bulan perolehan aset tetap sebagai periode pertama disusutkan.

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Masa Manfaat untuk Menghitung Tarif Penyusutan Aset Tetap

KODE BARANG				NAMA BARANG	MASA MANFAAT (TAHUN)
1.3.2				**PERALATAN DAN MESIN**	
	1.3.2.1			ALAT BESAR	
		1.3.2.1.1		ALAT BESAR DARAT	
			1.3.2.1.1.1	TRACTOR	10
			1.3.2.1.1.2	GRADER	10
			1.3.2.1.1.3	EXCAVATOR	10
			1.3.2.1.1.4	PILE DRIVER	10
			1.3.2.1.1.5	HAULER	10
			1.3.2.1.1.6	ASPHALT EQUIPMENT	10
			1.3.2.1.1.7	COMPACTING EQUIPMENT	10
			1.3.2.1.1.8	AGGREGATE AND CONCRETE EQUIPMENT	10
			1.3.2.1.1.9	LOADER	10
			1.3.2.1.1.10	ALAT PENGANGKAT	10
			1.3.2.1.1.11	MESIN PROSES	10
			1.3.2.1.1.12	ALAT BESAR DARAT LAINNYA	10
		1.3.2.1.2		ALAT BESAR APUNG	
			1.3.2.1.2.1	DREDGER	8
			1.3.2.1.2.2	FLOATING EXCAVATOR	8
			1.3.2.1.2.3	AMPHIBI DREDGER	8
			1.3.2.1.2.4	KAPAL TARIK	8
			1.3.2.1.2.5	MESIN PROSES APUNG	8
			1.3.2.1.2.6	ALAT BESAR APUNG LAINNYA	8
		1.3.2.1.3		ALAT BANTU	
			1.3.2.1.3.1	ALAT PENARIK	7
			1.3.2.1.3.2	FEEDER	7
			1.3.2.1.3.3	COMPRESSOR	7
			1.3.2.1.3.4	ELECTRIC GENERATING SET	7
			1.3.2.1.3.5	POMPA	7
			1.3.2.1.3.6	MESIN BOR	7

KODE BARANG				NAMA BARANG	MASA MANFAAT (TAHUN)
			1.3.2.1.3.7	UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN	7
			1.3.2.1.3.8	ALAT PENGOLAHAN AIR KOTOR	7
			1.3.2.1.3.9	PEMBANGKIT UAP AIR PANAS/STEAM GENERATOR	7
			1.3.2.1.3.10	AIR PORT MAINTENANCE EQUIPMENT/ALAT BANTU PENERBANGAN	7
			1.3.2.1.3.11	MESIN TATOO	7
			1.3.2.1.3.12	PERLENGKAPAN KEBAKARAN HUTAN	7
			1.3.2.1.3.13	PERALATAN SELAM	7
			1.3.2.1.3.14	PERALATAN SAR MOUNTENERING	7
			1.3.2.1.3.15	PERALATAN INTELIJEN	7
			1.3.2.1.3.16	ALAT BANTU LAINNYA	7
	1.3.2.2			ALAT ANGKUTAN	
		1.3.2.2.1		ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	
			1.3.2.2.1.1	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	7
			1.3.2.2.1.2	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	7
			1.3.2.2.1.3	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	7
			1.3.2.2.1.4	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	7
			1.3.2.2.1.5	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA	7
			1.3.2.2.1.6	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	7
			1.3.2.2.1.7	KENDARAAN TEMPUR	7
			1.3.2.2.1.8	ALAT ANGKUTAN KERETA REL	7
			1.3.2.2.1.9	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA	7
		1.3.2.2.2		ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	
			1.3.2.2.2.1	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	2
			1.3.2.2.2.2	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG	2
			1.3.2.2.2.3	ALAT ANGKUTAN KERETA REL TAK BERMOTOR	2
			1.3.2.2.2.4	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR LAINNYA	2
		1.3.2.2.3		ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	
			1.3.2.2.3.1	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK BARANG	10
			1.3.2.2.3.2	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	10

KODE BARANG				NAMA BARANG	MASA MANFAAT (TAHUN)
			1.3.2.2.3.3	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR KHUSUS	10
			1.3.2.2.3.4	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR MILITER	10
			1.3.2.2.3.5	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR LAINNYA	10
		1.3.2.2.4		ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	
			1.3.2.2.4.1	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK BARANG	3
			1.3.2.2.4.2	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	3
			1.3.2.2.4.3	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR KHUSUS	3
			1.3.2.2.4.4	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR LAINNYA	3
		1.3.2.2.5		ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	
			1.3.2.2.5.1	KAPAL TERBANG	20
			1.3.2.2.5.2	ALAT ANGKUTAN TAK BERMOTOR UDARA LAINNYA	20
	1.3.2.3			ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
		1.3.2.3.1		ALAT BENGKEL BERMESIN	
			1.3.2.3.1.1	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	10
			1.3.2.3.1.2	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH)	10
			1.3.2.3.1.3	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	10
			1.3.2.3.1.4	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	10
			1.3.2.3.1.5	PERKAKAS PENGANGKAT BERMESIN	10
			1.3.2.3.1.6	PERKAKAS BENGKEL KAYU	10
			1.3.2.3.1.7	PERKAKAS BENGKEL KHUSUS	10
			1.3.2.3.1.8	PERALATAN LAS	10
			1.3.2.3.1.9	PERKAKAS PABRIK ES	10
			1.3.2.3.1.10	ALAT BENGKEL BERMESIN LAINNYA	10
		1.3.2.3.2		ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	
			1.3.2.3.2.1	PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKSI LOGAM	5
			1.3.2.3.2.2	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	5
			1.3.2.3.2.3	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	5
			1.3.2.3.2.4	PERKAKAS PENGANGKAT	5
			1.3.2.3.2.5	PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	5
			1.3.2.3.2.6	PERKAKAS KHUSUS (SPECIAL TOOLS)	5

KODE BARANG				NAMA BARANG	MASA MANFAAT (TAHUN)
			1.3.2.3.2.7	PERKAKAS BENGKEL KERJA	5
			1.3.2.3.2.8	PERALATAN TUKANG BESI	5
			1.3.2.3.2.9	PERALATAN TUKANG KAYU	5
			1.3.2.3.2.10	PERALATAN TUKANG KAYU	5
			1.3.2.3.2.11	PERALATAN UKUR, GIP DAN FEETING	5
			1.3.2.3.2.12	PERALATAN BENGKEL KHUSUS PEMADAM	5
			1.3.2.3.2.13	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN LAINNYA	5
		1.3.2.3.3		ALAT UKUR	
			1.3.2.3.3.1	ALAT UKUR UNIVERSAL	5
			1.3.2.3.3.2	ALAT UKUR/TEST INTELEGENSIA	5
			1.3.2.3.3.3	ALAT UKUR/TEST ALAT KEPRIBADIAN	5
			1.3.2.3.3.4	ALAT UKUR/TEST KLINIS LAIN	5
			1.3.2.3.3.5	ALAT KALIBRASI	5
			1.3.2.3.3.6	OSCILLOSCOPE	5
			1.3.2.3.3.7	UNIVERSAL TESTER	5
			1.3.2.3.3.8	ALAT UKUR/PEMBANDING	5
			1.3.2.3.3.9	ALAT UKUR LAIN-LAIN	5
			1.3.2.3.3.10	ALAT TIMBANGAN/BIARA	5
			1.3.2.3.3.11	ANAK TIMBANGAN/BIARA	5
			1.3.2.3.3.12	TAKARAN KERING	5
			1.3.2.3.3.13	TAKARAN BAHAN BANGUNAN	5
			1.3.2.3.3.14	TAKARAN LAINNYA	5
			1.3.2.3.3.15	ALAT PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	5
			1.3.2.3.3.16	SPECIFIC SET	5
			1.3.2.3.3.17	ALAT PENGUKUR KEADAAN ALAM	5
			1.3.2.3.3.18	ALAT PENGUKUR PENGLIHATAN	5
			1.3.2.3.3.19	ALAT PENGUKUR KETEPATAN DAN KOREKSI WAKTU	5
			1.3.2.3.3.20	ALAT UKUR INSTRUMENT WORKSHOP	5
			1.3.2.3.3.21	ALAT UKUR LAINNYA	5
	1.3.2.4			ALAT PERTANIAN	
		1.3.2.4.1		ALAT PENGOLAHAN	
			1.3.2.4.1.1	ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN	4
			1.3.2.4.1.2	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	4
			1.3.2.4.1.3	ALAT PANEN	4
			1.3.2.4.1.4	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN	4
			1.3.2.4.1.5	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	4
			1.3.2.4.1.6	ALAT PROSESING	4
			1.3.2.4.1.7	ALAT PASCA PANEN	4

KODE BARANG				NAMA BARANG	MASA MANFAAT (TAHUN)
			1.3.2.4.1.8	ALAT PRODUKSI PERIKANAN	4
			1.3.2.4.1.9	ALAT-ALAT PETERNAKAN	4
			1.3.2.4.1.10	ALAT PENGOLAHAN LAINNYA	4
	1.3.2.5			ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
		1.3.2.5.1		ALAT KANTOR	
			1.3.2.5.1.1	MESIN KETIK	5
			1.3.2.5.1.2	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	5
			1.3.2.5.1.3	ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)	5
			1.3.2.5.1.4	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	5
			1.3.2.5.1.5	ALAT KANTOR LAINNYA	5
		1.3.2.5.2		ALAT RUMAH TANGGA	
			1.3.2.5.2.1	MEUBELAIR	5
			1.3.2.5.2.2	ALAT PENGUKUR WAKTU	5
			1.3.2.5.2.3	ALAT PEMBERSIH	5
			1.3.2.5.2.4	ALAT PENDINGIN	5
			1.3.2.5.2.5	ALAT DAPUR	5
			1.3.2.5.2.6	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	5
			1.3.2.5.2.7	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	5
		1.3.2.5.3		MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	
			1.3.2.5.3.1	MEJA KERJA PEJABAT	5
			1.3.2.5.3.2	MEJA RAPAT PEJABAT	5
			1.3.2.5.3.3	KURSI KERJA PEJABAT	5
			1.3.2.5.3.4	KURSI RAPAT PEJABAT	5
			1.3.2.5.3.5	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT	5
			1.3.2.5.3.6	KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	5
			1.3.2.5.3.7	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	5
	1.3.2.6			ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
		1.3.2.6.1		ALAT STUDIO	
			1.3.2.6.1.1	PERALATAN STUDIO AUDIO	5
			1.3.2.6.1.2	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	5
			1.3.2.6.1.3	PERALATAN STUDIO GAMBAR	5
			1.3.2.6.1.4	PERALATAN CETAK	5
			1.3.2.6.1.5	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	5
			1.3.2.6.1.6	ALAT STUDIO LAINNYA	5
		1.3.2.6.2		ALAT KOMUNIKASI	
			1.3.2.6.2.1	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	5
			1.3.2.6.2.2	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB	5
			1.3.2.6.2.3	ALAT KOMUNIKASI RADIO HF/FM	5

KODE BARANG				NAMA BARANG	MASA MANFAAT (TAHUN)
			1.3.2.6.2.4	ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF	5
			1.3.2.6.2.5	ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF	5
			1.3.2.6.2.6	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	5
			1.3.2.6.2.7	ALAT-ALAT SANDI	5
			1.3.2.6.2.8	ALAT KOMUNIKASI KHUSUS	5
			1.3.2.6.2.9	ALAT KOMUNIKASI DIGITAL DAN KONVENSIONAL	5
			1.3.2.6.2.10	ALAT KOMUNIKASI SATELIT	5
			1.3.2.6.2.11	ALAT KOMUNIKASI LAINNYA	5
		1.3.2.6.3		PERALATAN PEMANCAR	
			1.3.2.6.3.1	PERALATAN PEMANCAR MF/MW	10
			1.3.2.6.3.2	PERALATAN PEMANCAR HF/SW	10
			1.3.2.6.3.3	PERALATAN PEMANCAR VHF/FM	10
			1.3.2.6.3.4	PERALATAN PEMANCAR UHF	10
			1.3.2.6.3.5	PERALATAN PEMANCAR SHF	10
			1.3.2.6.3.6	PERALATAN ANTENA MF/MW	10
			1.3.2.6.3.7	PERALATAN ANTENA HF/SW	10
			1.3.2.6.3.8	PERALATAN ANTENA VHF/FM	10
			1.3.2.6.3.9	PERALATAN ANTENA UHF	10
			1.3.2.6.3.10	PEERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA	10
			1.3.2.6.3.11	PERALATAN TRANSLATOR VHF/VHF	10
			1.3.2.6.3.12	PERALATAN TRANSLATOR UHF/UHF	10
			1.3.2.6.3.13	PERALATAN TRANSLATOR VHF/UHF	10
			1.3.2.6.3.14	PERALATAN TRANSLATOR UHF/VHF	10
			1.3.2.6.3.15	PERALATAN MICROWAVE F P U	10
			1.3.2.6.3.16	PERALATAN MICROWAVE TERESTRIAL	10
			1.3.2.6.3.17	PERALATAN MICROWAVE TVRO	10
			1.3.2.6.3.18	PERALATAN DUMMY LOAD	10
			1.3.2.6.3.19	SWITCHER ANTENA	10
			1.3.2.6.3.20	SWITCHER/MENARA ANTENA	10
			1.3.2.6.3.21	FEEDER	10
			1.3.2.6.3.22	HUMIDITY CONTROL	10
			1.3.2.6.3.23	PROGRAM INPUT EQUIPMENT	10
			1.3.2.6.3.24	PERALATAN ANTENA PENERIMA VHF	10
			1.3.2.6.3.25	PERALATAN PEMANCAR LF	10
			1.3.2.6.3.26	UNIT PEMANCAR MF+HF	10
			1.3.2.6.3.27	PERALATAN ANTENA PEMANCAR MF+HF	10
			1.3.2.6.3.28	PERALATAN PENERIMA	10
			1.3.2.6.3.29	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA LF	10
			1.3.2.6.3.30	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF	10
			1.3.2.6.3.31	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA HF	10

KODE BARANG				NAMA BARANG	MASA MANFAAT (TAHUN)
			1.3.2.6.3.32	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF	10
			1.3.2.6.3.33	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA VHF	10
			1.3.2.6.3.34	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA UHF	10
			1.3.2.6.3.35	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA SHF	10
			1.3.2.6.3.36	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA LF	10
			1.3.2.6.3.37	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF	10
			1.3.2.6.3.38	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA HF	10
			1.3.2.6.3.39	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF	10
			1.3.2.6.3.40	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA VHF	10
			1.3.2.6.3.41	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA UHF	10
			1.3.2.6.3.42	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMASHF	10
			1.3.2.6.3.43	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI RENDAH	10
			1.3.2.6.3.44	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI TINGGI	10
			1.3.2.6.3.45	PERALATAN PENERIMA DAN PENGIRIM GAMBAR KE PERMUKAAN	10
			1.3.2.6.3.46	PERALATAN PERLENGKAPAN RADIO	10
			1.3.2.6.3.47	SUMBER TENAGA	10
			1.3.2.6.3.48	PERALATAN PEMANCAR LAINNYA	10
		1.3.2.6.4		PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	
			1.3.2.6.4.1	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI INSTRUMEN LANDING SYSTEM	10
			1.3.2.6.4.2	VERY HIGH FREQUENCE OMNI RANGE (VOR)	10
			1.3.2.6.4.3	DISTANCE MEASURING EQUIPMENT (DME)	10
			1.3.2.6.4.4	RADAR	10
			1.3.2.6.4.5	ALAT PANGATUR TELEKOMUNIKASI	10
			1.3.2.6.4.6	PERALATAN KOMUNIKASI UNTUK DOKUMENTASI	10

KODE BARANG				NAMA BARANG	MASA MANFAAT (TAHUN)
			1.3.2.6.4.7	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI LAINNYA	10
	1.3.2.7			ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
		1.3.2.7.1		ALAT KEDOKTERAN	
			1.3.2.7.1.1	ALAT KEDOKTERAN UMUM	5
			1.3.2.7.1.2	ALAT KEDOKTERAN GIGI	5
			1.3.2.7.1.3	ALAT KEDOKTERAN KELUARGA BERENCANA	5
			1.3.2.7.1.4	ALAT KEDOKTERAN BEDAH	5
			1.3.2.7.1.5	ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN	5
			1.3.2.7.1.6	ALAT KEDOKTERAN THT	5
			1.3.2.7.1.7	ALAT KEDOKTERAN MATA	5
			1.3.2.7.1.8	ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM	5
			1.3.2.7.1.9	ALAT KEDOKTERAN KAMAR JENASAH/MORTUARY	5
			1.3.2.7.1.10	ALAT KEDOKTERAN ANAK	5
			1.3.2.7.1.11	ALAT KEDOKTERAN POLIKLINIK	5
			1.3.2.7.1.12	ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS	5
			1.3.2.7.1.13	ALAT KEDOKTERAN NEUROLOGI (SYARAF)	5
			1.3.2.7.1.14	ALAT KEDOKTERAN JANTUNG	5
			1.3.2.7.1.15	ALAT KEDOKTERAN RADIODIAGNOSTIC	5
			1.3.2.7.1.16	ALAT KEDOKTERAN PATALOGI ANATOMY	5
			1.3.2.7.1.17	ALAT KEDOKTERAN TRANSFUSI DARAH	5
			1.3.2.7.1.18	ALAT KEDOKTERAN RADIOTERAPY	5
			1.3.2.7.1.19	ALAT KEDOKTERAN NUKLIR	5
			1.3.2.7.1.20	ALAT KEDOKTERAN KULIT DAN KELAMIN	5
			1.3.2.7.1.21	ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT	5
			1.3.2.7.1.22	ALAT KEDOKTERAN JIWA	5
			1.3.2.7.1.23	ALAT KEDOKTERAN BEDAH ORTHOPEDI	5
			1.3.2.7.1.24	ALAT KEDOKTERAN I C U	5
			1.3.2.7.1.25	ALAT KEDOKTERAN I C C U	5
			1.3.2.7.1.26	ALAT KEDOKTERAN BEDAH JANTUNG	5
			1.3.2.7.1.27	ALAT KEDOKTERAN TRADITIONAL MEDICINE	5
			1.3.2.7.1.28	ALAT KEDOKTERAN ANAESTHESI	5
			1.3.2.7.1.29	ALAT KEDOKTERAN LAINNYA	5

KODE BARANG				NAMA BARANG	MASA MANFAAT (TAHUN)
		1.3.2.7.2		ALAT KESEHATAN UMUM	
			1.3.2.7.2.1	ALAT KESEHATAN MATRA LAUT	5
			1.3.2.7.2.2	ALAT KESEHATAN MATRA UDARA	5
			1.3.2.7.2.3	ALAT KESEHATAN KEPOLISIAN	5
			1.3.2.7.2.4	ALAT KESEHATAN OLAH RAGA	5
			1.3.2.7.2.5	ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA	5
	1.3.2.8			ALAT LABORATORIUM	
		1.3.2.8.1		UNIT ALAT LABORATORIUM	
			1.3.2.8.1.1	ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TEKNIK PENYEHATAN	8
			1.3.2.8.1.2	ALAT LABORATORIUM MICRO BIOLOGI TEKNIK PENYEHATAN	8
			1.3.2.8.1.3	ALAT LABORATORIUM HIDROKIMIA	8
			1.3.2.8.1.4	ALAT LABORATORIUM MODEL HIDROLIKA	8
			1.3.2.8.1.5	ALAT LABORATORIUM BATUAN/GEOLOGI	8
			1.3.2.8.1.6	ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI	8
			1.3.2.8.1.7	ALAT LABORATORIUM ASPAL, CAT DAN KIMIA	8
			1.3.2.8.1.8	ALAT LABORATORIUM MEKANIKA TANAH DAN BATUAN	8
			1.3.2.8.1.9	ALAT LABORATORIUM COCOK TANAM	8
			1.3.2.8.1.10	ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK	8
			1.3.2.8.1.11	ALAT LABORATORIUM UMUM	8
			1.3.2.8.1.12	ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI	8
			1.3.2.8.1.13	ALAT LABORATORIUM KIMIA	8
			1.3.2.8.1.14	ALAT LABORATORIUM PATOLOGI	8
			1.3.2.8.1.15	ALAT LABORATORIUM IMMUNOLOGI	8
			1.3.2.8.1.16	ALAT LABORATORIUM HEMATOLOGI	8
			1.3.2.8.1.17	ALAT LABORATORIUM FILM	8
			1.3.2.8.1.18	ALAT LABORATORIUM MAKANAN	8
			1.3.2.8.1.19	ALAT LABORATORIUM FARMASI	5
			1.3.2.8.1.20	ALAT LABORATORIUM FISIKA	8
			1.3.2.8.1.21	ALAT LABORATORIUM HIDRODINAMIKA	8
			1.3.2.8.1.22	ALAT LABORATORIUM KLIMATOLOGI	8
			1.3.2.8.1.23	ALAT LABORATORIUM PROSES PELEBURAN	8
			1.3.2.8.1.24	ALAT LABORATORIUM PASIR	8

KODE BARANG				NAMA BARANG	MASA MANFAAT (TAHUN)
			1.3.2.8.1.25	ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN CEKATAN	8
			1.3.2.8.1.26	ALAT LABORATORIUM PEMBUATAN POLA	8
			1.3.2.8.1.27	ALAT LABORATORIUM METALOGRAPHY	8
			1.3.2.8.1.28	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGELASAN	8
			1.3.2.8.1.29	ALAT LABORATORIUM UJI PROSES PENGELASAN	8
			1.3.2.8.1.30	ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN LOGAM	8
			1.3.2.8.1.31	ALAT LABORATORIUM METROLOGIE	8
			1.3.2.8.1.32	ALAT LABORATORIUM PELAPISAN LOGAM	8
			1.3.2.8.1.33	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGOLAHAN PANAS	8
			1.3.2.8.1.34	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI TEKSTIL	8
			1.3.2.8.1.35	ALAT LABORATORIUM UJI TEKSTIL	8
			1.3.2.8.1.36	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KERAMIK	8
			1.3.2.8.1.37	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KULIT, KARET DAN PLASTIK	8
			1.3.2.8.1.38	ALAT LABORATORIUM UJI KULIT, KARET DAN PLASTIK	8
			1.3.2.8.1.39	ALAT LABORATORIUM UJI KERAMIK	8
			1.3.2.8.1.40	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI SELULOSA	8
			1.3.2.8.1.41	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	8
			1.3.2.8.1.42	ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN DAYA	8
			1.3.2.8.1.43	ALAT LABORATORIUM ENERGI SURYA	8
			1.3.2.8.1.44	ALAT LABORATORIUM KONVERSI BATUBARA DAN BIOMAS	8
			1.3.2.8.1.45	ALAT LABORATORIUM OCEANOGRAFI	8
			1.3.2.8.1.46	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN PERAIRAN	8
			1.3.2.8.1.47	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI PERAIRAN	8
			1.3.2.8.1.48	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI	8
			1.3.2.8.1.49	ALAT LABORATORIUM GEOFISIKA	8
			1.3.2.8.1.50	ALAT LABORATORIUM TAMBANG	8

KODE BARANG				NAMA BARANG	MASA MANFAAT (TAHUN)
			1.3.2.8.1.51	ALAT LABORATORIUM PROSES/TEKNIK KIMIA	8
			1.3.2.8.1.52	ALAT LABORATORIUM PROSES INDUSTRI	8
			1.3.2.8.1.53	ALAT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA	8
			1.3.2.8.1.54	LABORATORIUM KEARSIPAN	8
			1.3.2.8.1.55	LABORATORIUM HEMATOLOGI DAN URINALISIS	8
			1.3.2.8.1.56	ALAT LABORATORIUM LAIN	8
			1.3.2.8.1.57	ALAT LABORATORIUM HERMODINAMIKA MOTOR DAN SISTEM PROPULASI	8
			1.3.2.8.1.58	ALAT LABORATORIUM PENDIDIKAN	8
			1.3.2.8.1.59	ALAT LABORATORIUM TEKNOLOGI PROSES ENZYM	8
			1.3.2.8.1.60	ALAT LABORATORIUM TEKNIK PANTAI	8
			1.3.2.8.1.61	ALAT LABORATORIUM SUMBER DAYA DAN ENERGI	8
			1.3.2.8.1.62	ALAT LABORATORIUM POPULASI	8
			1.3.2.8.1.63	ALAT PENGUKUR GELOMBANG	8
			1.3.2.8.1.64	UNIT ALAT LABORATORIUM LAINNYA	8
		1.3.2.8.2		UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	
			1.3.2.8.2.1	ANALYTICAL INSTRUMENT	15
			1.3.2.8.2.2	INSTRUMENT PROBE/SENSOR	15
			1.3.2.8.2.3	GENERAL LABORATORY TOOL	15
			1.3.2.8.2.4	GLASSWARE PLASTIC/UTENSILS	15
			1.3.2.8.2.5	LABORATORY SAFETY EQUIPMENT	15
			1.3.2.8.2.6	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR LAINNYA	15
		1.3.2.8.3		ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	
			1.3.2.8.3.1	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : BAHASA INDONESIA	10
			1.3.2.8.3.2	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : MATEMATIKA	10
			1.3.2.8.3.3	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA DASAR	10
			1.3.2.8.3.4	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA LANJUTAN	10
			1.3.2.8.3.5	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA MENENGAH	10
			1.3.2.8.3.6	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA ATAS	10

KODE BARANG				NAMA BARANG	MASA MANFAAT (TAHUN)
			1.3.2.8.3.7	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPS	10
			1.3.2.8.3.8	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : AGAMA	10
			1.3.2.8.3.9	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KETERAMPILAN	10
			1.3.2.8.3.10	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KESENIAN	10
			1.3.2.8.3.11	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : OLAH RAGA	10
			1.3.2.8.3.12	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : PKN	10
			1.3.2.8.3.13	ALAT PERAGA LUAR BIASA (TUNA NETRA, TERAPI FISIK, TUNA DAKSA, TUNA RUNGU)	10
			1.3.2.8.3.14	ALAT PERAGA KEJURUAN	10
			1.3.2.8.3.15	ALAT PERAGA PAUD/TK	10
			1.3.2.8.3.16	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH LAINNYA	10
		1.3.2.8.4		ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	
			1.3.2.8.4.1	RADIATION DETECTOR	15
			1.3.2.8.4.2	MODULAR COUNTING AND SCIENTIFIC ELECTRONIC	15
			1.3.2.8.4.3	ASSEMBLY/COUNTING SYSTEM	15
			1.3.2.8.4.4	RECORDER DISPLAY	15
			1.3.2.8.4.5	SYSTEM/POWER SUPPLY	15
			1.3.2.8.4.6	MEASURING/TESTING DEVICE	15
			1.3.2.8.4.7	OPTO ELECTRONICS	15
			1.3.2.8.4.8	ACCELERATOR	15
			1.3.2.8.4.9	REACTOR EXPERIMENTAL SYSTEM	15
			1.3.2.8.4.10	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA LAINNYA	15
		1.3.2.8.5		ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	
			1.3.2.8.5.1	ALAT UKUR FISIKA KESEHATAN	10
			1.3.2.8.5.2	ALAT KESEHATAN KERJA	10
			1.3.2.8.5.3	PROTEKSI LINGKUNGAN	10
			1.3.2.8.5.4	METEOROLOGICAL EQUIPMENT	10
			1.3.2.8.5.5	SUMBER RADIASI	10
			1.3.2.8.5.6	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN LAINNYA	10
		1.3.2.8.6		RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	
			1.3.2.8.6.1	RADIATION APPLICATION EQUIPMENT	10

KODE BARANG				NAMA BARANG	MASA MANFAAT (TAHUN)
			1.3.2.8.6.2	NON DESTRUCTIVE TEST (NDT) DEVICE	10
			1.3.2.8.6.3	PERALATAN HIDROLOGI	10
			1.3.2.8.6.4	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	10
		1.3.2.8.7		ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	
			1.3.2.8.7.1	ALAT LABORATORIUM KWALITAS AIR DAN TANAH	7
			1.3.2.8.7.2	ALAT LABORATORIUM KWALITAS UDARA	7
			1.3.2.8.7.3	ALAT LABORATORIUM KEBISINGAN DAN GETARAN	7
			1.3.2.8.7.4	LABORATORIUM LINGKUNGAN	7
			1.3.2.8.7.5	ALAT LABORATORIUM PENUNJANG	7
			1.3.2.8.7.6	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA	7
		1.3.2.8.8		PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	
			1.3.2.8.8.1	TOWING CARRIAGE	15
			1.3.2.8.8.2	WAVE GENERATOR AND ABSORBER	15
			1.3.2.8.8.3	DATA ACCQUISITION AND ANALYZING SYSTEM	15
			1.3.2.8.8.4	CAVITATION TUNNEL	15
			1.3.2.8.8.5	OVERHEAD CRANES	15
			1.3.2.8.8.6	PERALATAN UMUM	15
			1.3.2.8.8.7	PEMESINAN : MODEL SHIP WORKSHOP	15
			1.3.2.8.8.8	PEMESINAN : PROPELLER MODEL WORKSHOP	15
			1.3.2.8.8.9	PEMESINAN : MECHANICAL WORKSHOP	15
			1.3.2.8.8.10	PEMESINAN : PRECISION MECHANICAL WORKSHOP	15
			1.3.2.8.8.11	PEMESINAN : PAINTING SHOP	15
			1.3.2.8.8.12	PEMESINAN : SHIP MODEL PREPARATION SHOP	15
			1.3.2.8.8.13	PEMESINAN : ELECTICAL WORKSHOP	15
			1.3.2.8.8.14	MOB	15
			1.3.2.8.8.15	PHOTO AND FILM EQUIPMENT	15
			1.3.2.8.8.16	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA LAINNYA	15
		1.3.2.8.9		ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	

KODE BARANG				NAMA BARANG	MASA MANFAAT (TAHUN)
			1.3.2.8.9.1	ALAT LABORATORIUM KALIBRASI ELECTROMEDIK DAN BIOMEDIK	8
			1.3.2.8.9.2	ALAT LABORATORIUM STANDARD DAN KALIBRATOR	8
			1.3.2.8.9.3	ALAT LABORATORIUM CAHAYA, OPTIK DAN AKUSTIK	8
			1.3.2.8.9.4	ALAT LABORATORIUM LISTRIK DAN MEKANIK	8
			1.3.2.8.9.5	ALAT LABORATORIUM TEKANAN DAN SUHU	8
			1.3.2.8.9.6	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI LAIN	8
			1.3.2.8.9.7	ALAT LABORATORIUM NATIUS	8
			1.3.2.8.9.8	ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN TELEKOMUNIKASI PELAYARAN	8
			1.3.2.8.9.9	ALAT LABORATORIUM SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN	8
			1.3.2.8.9.10	ALAT LABORATORIUM UJI PERANGKAT	8
			1.3.2.8.9.11	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI LAINNYA	8
	1.3.2.9			ALAT PERSENJATAAN	
		1.3.2.9.1		SENJATA API	
			1.3.2.9.1.1	SENJATA GENGGAM	10
			1.3.2.9.1.2	SENJATA PINGGANG	10
			1.3.2.9.1.3	SENJATA BAHU/SENJATA LARAS PANJANG	10
			1.3.2.9.1.4	SENAPAN MESIN	10
			1.3.2.9.1.5	M O R T I R	10
			1.3.2.9.1.6	ANTI LAPIS BAJA	10
			1.3.2.9.1.7	ARTILERI MEDAN (ARMED)	10
			1.3.2.9.1.8	ARTILERI PERTAHANAN UDARA (ARHANUD)	10
			1.3.2.9.1.9	KAVALERI	10
			1.3.2.9.1.10	SENJATA LAIN-LAIN	10
		1.3.2.9.2		PERSENJATAAN NON SENJATA API	
			1.3.2.9.2.1	ALAT KEAMANAN	10
			1.3.2.9.2.2	NON SENJATA API	10
			1.3.2.9.2.3	ALAT PENJINAK BAHAN PELEDAK (ALJIHANDAK)	10
			1.3.2.9.2.4	ALAT NUKLIR, BIOLOGI DAN KIMIA	10
			1.3.2.9.2.5	PERSENJATAAN NON SENJATA API LAINNYA	10
		1.3.2.9.3		SENJATA SINAR	
			1.3.2.9.3.1	LASER	10

KODE BARANG				NAMA BARANG	MASA MANFAAT (TAHUN)
			1.3.2.9.3.2	SENJATA SINAR LAINNYA	10
		1.3.2.9.4		ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	
			1.3.2.9.4.1	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	10
			1.3.2.9.4.2	ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA	10
			1.3.2.9.4.3	ALAT WANTEROR (PERLAWANAN TEROR)	10
			1.3.2.9.4.4	PERALATAN DETEKSI INTEL	10
			1.3.2.9.4.5	ALSUS LANTAS	10
			1.3.2.9.4.6	ALSUS RESERSE	10
			1.3.2.9.4.7	ALSUS FOTOGRAFI KEPOLISIAN	10
			1.3.2.9.4.8	ALSUS DAKTILOSKOPI	10
			1.3.2.9.4.9	INSTRUMEN ANALISIS LABORATORIUM FORENSIK	10
			1.3.2.9.4.10	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN LAINNYA	10
	1.3.2.10			KOMPUTER	
		1.3.2.10.1		KOMPUTER UNIT	
			1.3.2.10.1.1	KOMPUTER JARINGAN	4
			1.3.2.10.1.2	PERSONAL KOMPUTER	4
			1.3.2.10.1.3	KOMPUTER UNIT LAINNYA	4
		1.3.2.10.2		PERALATAN KOMPUTER	
			1.3.2.10.2.1	PERALATAN MAINFRAME	4
			1.3.2.10.2.2	PERALATAN MINI KOMPUTER	4
			1.3.2.10.2.3	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	4
			1.3.2.10.2.4	PERALATAN JARINGAN	4
			1.3.2.10.2.5	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	4
	1.3.2.11			ALAT EKSPLORASI	
		1.3.2.11.1		ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	
			1.3.2.11.1.1	OPTIK	5
			1.3.2.11.1.2	UKUR/INSTRUMENT	5
			1.3.2.11.1.3	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI LAINNYA	5
		1.3.2.11.2		ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	
			1.3.2.11.2.1	MEKANIK	5
			1.3.2.11.2.2	ELEKTRONIK/ELECTRIC	5
			1.3.2.11.2.3	MANUAL	5
			1.3.2.11.2.4	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA LAINNYA	5
	1.3.2.12			ALAT PENGEBORAN	
		1.3.2.12.1		ALAT PENGEBORAN MESIN	
			1.3.2.12.1.1	BOR MESIN TUMBUK	7
			1.3.2.12.1.2	BOR MESIN PUTAR	7
			1.3.2.12.1.3	ALAT PENGEBORAN MESIN LAINNYA	7
		1.3.2.12.2		ALAT PENGEBORAN NON MESIN	
			1.3.2.12.2.1	BANGKA	10
			1.3.2.12.2.2	PANTEK	10
			1.3.2.12.2.3	PUTAR	10

KODE BARANG				NAMA BARANG	MASA MANFAAT (TAHUN)
			1.3.2.12.2.4	PERALATAN BANTU	10
			1.3.2.12.2.5	ALAT PENGEBORAN NON MESIN LAINNYA	10
	1.3.2.13			ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
		1.3.2.13.1		SUMUR	
			1.3.2.13.1.1	PERALATAN SUMUR MINYAK	10
			1.3.2.13.1.2	SUMUR PEMBORAN	10
			1.3.2.13.1.3	SUMUR LAINNYA	10
		1.3.2.13.2		PRODUKSI	
			1.3.2.13.2.1	R I G	10
			1.3.2.13.2.2	PRODUKSI LAINNYA	10
		1.3.2.13.3		PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
			1.3.2.13.3.1	ALAT PENGOLAHAN MINYAK	10
			1.3.2.13.3.2	ALAT PENGOLAHAN AIR	10
			1.3.2.13.3.3	ALAT PENGOLAHAN STEAM	10
			1.3.2.13.3.4	ALAT PENGOLAHAN WAX	10
			1.3.2.13.3.5	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN LAINNYA	10
	1.3.2.14			ALAT BANTU EKSPLORASI	
		1.3.2.14.1		ALAT BANTU EKSPLORASI	
			1.3.2.14.1.1	MEKANIK	10
			1.3.2.14.1.2	EEKTRIC	10
			1.3.2.14.1.3	ALAT BANTU EKPLORASI LAINNYA	10
		1.3.2.14.2		ALAT BANTU PRODUKSI	
			1.3.2.14.2.1	PERAWATAN SUMUR	10
			1.3.2.14.2.2	TEST UNIT	10
			1.3.2.14.2.3	ALAT BANTU PRODUKSI LAINNYA	10
	1.3.2.15			ALAT KESELAMATAN KERJA	
		1.3.2.15.1		ALAT DETEKSI	
			1.3.2.15.1.1	RADIASI	10
			1.3.2.15.1.2	SUARA	10
			1.3.2.15.1.3	ALAT DETEKSI LAINNYA	10
		1.3.2.15.2		ALAT PELINDUNG	
			1.3.2.15.2.1	BAJU PENGAMAN	4
			1.3.2.15.2.2	MASKER	4
			1.3.2.15.2.3	TOPI KERJA	4
			1.3.2.15.2.4	SABUK PENGAMAN	4
			1.3.2.15.2.5	SEPATU LAPANGAN	4
			1.3.2.15.2.6	ALAT PELINDUNG LAINNYA	4
		1.3.2.15.3		ALAT SAR	
			1.3.2.15.3.1	ALAT PENOLONG	5
			1.3.2.15.3.2	ALAT PENDUKUNG PENCARIAN	5
			1.3.2.15.3.3	ALAT KERJA BAWAH AIR	5
			1.3.2.15.3.4	ALAT SAR LAINNYA	5
		1.3.2.15.4		ALAT KERJA PENERBANGAN	
			1.3.2.15.4.1	PERALATAN FASILITAS KOMUNIKASI PENERBANGAN	7

KODE BARANG				NAMA BARANG	MASA MANFAAT (TAHUN)
			1.3.2.15.4.2	PERALATAN FASILITAS NAVIGASI DAN PENGAMATAN PENERBANGAN	7
			1.3.2.15.4.3	PERALATAN FASILITAS BANTU PENDARATAN	7
			1.3.2.15.4.4	PERALATAN FASILITAS BANTU PELAYANAN DAN PENGAMANAN BANDAR UDARA	7
			1.3.2.15.4.5	PERALATAN FASILITAS LISTRIK BANDAR UDARA	7
			1.3.2.15.4.6	ALAT UKUR PERALATAN FASLEKTRIK	7
			1.3.2.15.4.7	ALAT KERJA PENERBANGAN LAINNYA	7
	1.3.2.16			ALAT PERAGA	
		1.3.2.16.1		ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	
			1.3.2.16.1.1	ALAT PERAGA PELATIHAN	7
			1.3.2.16.1.2	ALAT PERAGA PERCONTOHAN	7
			1.3.2.16.1.3	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN LAINNYA	7
	1.3.2.17			PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
		1.3.2.17.1		UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
			1.3.2.17.1.1	LIQUID-LIQUID CONTRACTOR EQUIPMENT	10
			1.3.2.17.1.2	SOLID-SOLID MIXING EQUIPMENT	10
			1.3.2.17.1.3	SOLID-SOLID SCREENING EQUIPMENT	10
			1.3.2.17.1.4	SOLID-SOLID CLASSIFIER	10
			1.3.2.17.1.5	SOLID-LIQUID MIXING EQUIPMENT	10
			1.3.2.17.1.6	SOLID LIQUID CRYSTALLIZATION EQUIPMENT	10
			1.3.2.17.1.7	ION EXCHANGE ABSORTION EQUIPMENT	10
			1.3.2.17.1.8	LEACHING EQUIPMENT	10
			1.3.2.17.1.9	GRAVITY SEDIMENTATION EQUIPMENT	10
			1.3.2.17.1.10	SOLID LIQUID FILTERING EQUIPMENT	10
			1.3.2.17.1.11	CENTRIFUGE FOR SOLID LIQUID	10
			1.3.2.17.1.12	LIQUID FROM SOLID EXPELLING (EXPRESSOR)-EQUIPMENT	10
			1.3.2.17.1.13	GAS-SOLID DRYING EQUIPMENT	10
			1.3.2.17.1.14	GAS - SOLID FLUIDISED BED EQUIPMENT	10
			1.3.2.17.1.15	GAS - SOLID SEPARATION EQUIPMENT	10

KODE BARANG				NAMA BARANG	MASA MANFAAT (TAHUN)
			1.3.2.17.1.16	GAS - LIQUID DISTILLATION EQUIPMENT	10
			1.3.2.17.1.17	GAS - LIQUID SEPARITION EQUIPMENT	10
			1.3.2.17.1.18	ISOTOPE SEPARATION EQUIPMENT	10
			1.3.2.17.1.19	TRANSPORT AND STORAGE EQUIPMENT FOR LIQUID	10
			1.3.2.17.1.20	SOLID MATERIAL HANDLING EQUIPMENT	10
			1.3.2.17.1.21	SIZE REDUCTION SIZE BALARGEMENT EQUIPMENT	10
			1.3.2.17.1.22	HEAT GENERATING EQUIPMENT	10
			1.3.2.17.1.23	HEAT TRANSFER EQUIPMENT	10
			1.3.2.17.1.24	MECHANICAL PROCES	10
			1.3.2.17.1.25	CHEMICAL REAKTION EQUIPMENT	10
			1.3.2.17.1.26	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI LAINNYA	10
	1.3.2.18			RAMBU - RAMBU	
		1.3.2.18.1		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	
			1.3.2.18.1.1	RAMBU BERSUAR	7
			1.3.2.18.1.2	RAMBU TIDAK BERSUAR	7
			1.3.2.18.1.3	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT LAINNYA	7
		1.3.2.18.2		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	
			1.3.2.18.2.1	RUNWAY/THRESHOLD LIGHT	5
			1.3.2.18.2.2	VISUAL APPROACH SLOPE INDICATOR (VASI)	5
			1.3.2.18.2.3	APPROACH LIGHT	5
			1.3.2.18.2.4	RUNWAY IDENTIFICATION LIGHT (REILS)	5
			1.3.2.18.2.5	SIGNAL	5
			1.3.2.18.2.6	FLOOD LIGHTS	5
			1.3.2.18.2.7	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA LAINNYA	5
		1.3.2.18.3		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	
			1.3.2.18.3.1	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	15
			1.3.2.18.3.2	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT LAINNYA	15
	1.3.2.19			PERALATAN OLAH RAGA	
		1.3.2.19.1		PERALATAN OLAH RAGA	
			1.3.2.19.1.1	PERALATAN OLAH RAGA ATLETIK	3
			1.3.2.19.1.2	PERALATAN PERMAINAN	3
			1.3.2.19.1.3	PERALATAN SENAM	3
			1.3.2.19.1.4	PARALATAN OLAH RAGA AIR	3
			1.3.2.19.1.5	PERALATAN OLAH RAGA UDARA	3
			1.3.2.19.1.6	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA	3

KODE BARANG				NAMA BARANG	MASA MANFAAT (TAHUN)
1.3.3				GEDUNG DAN BANGUNAN	
	1.3.3.1			BANGUNAN GEDUNG	
		1.3.3.1.1		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	
			1.3.3.1.1.1	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	50
			1.3.3.1.1.2	BANGUNAN GUDANG	50
			1.3.3.1.1.3	BANGUNAN GEDUNG UNTUK BENGKEL/HANGGAR	50
			1.3.3.1.1.4	BANGUNAN GEDUNG INSTALASI	50
			1.3.3.1.1.5	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM	50
			1.3.3.1.1.6	BANGUNAN KESEHATAN	50
			1.3.3.1.1.7	BANGUNAN OCEANARIUM/OBSERVATORIUM	50
			1.3.3.1.1.8	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	50
			1.3.3.1.1.9	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	50
			1.3.3.1.1.10	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	50
			1.3.3.1.1.11	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA	50
			1.3.3.1.1.12	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	50
			1.3.3.1.1.13	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	50
			1.3.3.1.1.14	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	50
			1.3.3.1.1.15	BANGUNAN GEDUNG PEMOTONG HEWAN	50
			1.3.3.1.1.16	BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN	50
			1.3.3.1.1.17	BANGUNAN GEDUNG MUSIUM	50
			1.3.3.1.1.18	BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN/BANDARA	50
			1.3.3.1.1.19	BANGUNAN PENGUJIAN KELAIKAN	50
			1.3.3.1.1.20	BANGUNAN GEDUNG LEMBAGA PEMASYARAKATAN	50
			1.3.3.1.1.21	BANGUNAN RUMAH TAHANAN	50
			1.3.3.1.1.22	BANGUNAN GEDUNG KREMATORIUM	50
			1.3.3.1.1.23	BANGUNAN PEMBAKARAN BANGKAI HEWAN	50
			1.3.3.1.1.24	BANGUNAN TEMPAT PERSIDANGAN	50
			1.3.3.1.1.25	BANGUNAN TERBUKA	50
			1.3.3.1.1.26	BANGUNAN PENAMPUNG SEKAM	50
			1.3.3.1.1.27	BANGUNAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)	50
			1.3.3.1.1.28	BANGUNAN INDUSTRI	50

KODE BARANG				NAMA BARANG	MASA MANFAAT (TAHUN)
			1.3.3.1.1.29	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN	50
			1.3.3.1.1.30	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	50
			1.3.3.1.1.31	BANGUNAN PERALATAN GEOFISIKA	50
			1.3.3.1.1.32	BANGUNAN FASILITAS UMUM	50
			1.3.3.1.1.33	BANGUNAN PARKIR	50
			1.3.3.1.1.34	BANGUNAN GEDUNG PABRIK	50
			1.3.3.1.1.35	BANGUNAN STASIUN BUS	50
			1.3.3.1.1.36	TAMAN	50
			1.3.3.1.1.37	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	50
		1.3.3.1.2		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	
			1.3.3.1.2.1	RUMAH NEGARA GOLONGAN I	50
			1.3.3.1.2.2	RUMAH NEGARA GOLONGAN II	50
			1.3.3.1.2.3	RUMAH NEGARA GOLONGAN III	50
			1.3.3.1.2.4	MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN	50
			1.3.3.1.2.5	ASRAMA	50
			1.3.3.1.2.6	HOTEL	50
			1.3.3.1.2.7	MOTEL	50
			1.3.3.1.2.8	FLAT/RUMAH SUSUN	50
			1.3.3.1.2.9	RUMAH NEGARA DALAM PROSES PENGGOLONGAN	50
			1.3.3.1.2.10	PANTI ASUHAN	50
			1.3.3.1.2.11	APARTEMEN	50
			1.3.3.1.2.12	RUMAH TIDAK BERSUSUN	50
			1.3.3.1.2.13	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL LAINNYA	50
	1.3.3.2			MONUMEN	
		1.3.3.2.1		CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	
			1.3.3.2.1.1	CANDI	50
			1.3.3.2.1.2	TUGU	50
			1.3.3.2.1.3	BANGUNAN PENINGGALAN	50
			1.3.3.2.1.4	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI LAINNYA	50
	1.3.3.3			BANGUNAN MENARA	
		1.3.3.3.1		BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	
			1.3.3.3.1.1	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI	40
			1.3.3.3.1.2	BANGUNAN PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI	40
			1.3.3.3.1.3	BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI	40
			1.3.3.3.1.4	BANGUNAN MENARA PENGAWAS	40

KODE BARANG				NAMA BARANG	MASA MANFAAT (TAHUN)
			1.3.3.3.1.5	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN LAINNYA	40
	1.3.3.4			TUGU TITIK KONTROL/PASTI	
		1.3.3.4.1		TUGU/TANDA BATAS	
			1.3.3.4.1.1	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI	50
			1.3.3.4.1.2	TUGU/TANDA JARING KONTROL GEODESI	50
			1.3.3.4.1.3	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA	50
			1.3.3.4.1.4	PAGAR	50
			1.3.3.4.1.5	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA	50
1.3.4				JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
	1.3.4.1			JALAN DAN JEMBATAN	
		1.3.4.1.1		JALAN	
			1.3.4.1.1.1	JALAN NASIONAL	10
			1.3.4.1.1.2	JALAN PROPINSI	10
			1.3.4.1.1.3	JALAN KABUPATEN	10
			1.3.4.1.1.4	JALAN KOTA	10
			1.3.4.1.1.5	JALAN DESA	10
			1.3.4.1.1.6	JALAN TOL	10
			1.3.4.1.1.7	JALAN KERETA API	10
			1.3.4.1.1.8	LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG	10
			1.3.4.1.1.9	JALAN KHUSUS	10
			1.3.4.1.1.10	JALAN LAINNYA	10
		1.3.4.1.2		JEMBATAN	
			1.3.4.1.2.1	JEMBATAN PADA JALAN NASIONAL	50
			1.3.4.1.2.2	JEMBATAN PADA JALAN PROPINSI	50
			1.3.4.1.2.3	JEMBATAN PADA JALAN KABUPATEN	50
			1.3.4.1.2.4	JEMBATAN PADA JALAN KOTA	50
			1.3.4.1.2.5	JEMBATAN PADA JALAN DESA	50
			1.3.4.1.2.6	JEMBATAN PADA JALAN TOL	50
			1.3.4.1.2.7	JEMBATAN PADA JALAN KERETA API	50
			1.3.4.1.2.8	JEMBATAN PADA LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG	50
			1.3.4.1.2.9	JEMBATAN PADA JALAN KHUSUS	50
			1.3.4.1.2.10	JEMBATAN PENYEBERANGAN	50
			1.3.4.1.2.11	JEMBATAN LABUH/SANDAR PADA TERMINAL	50
			1.3.4.1.2.12	JEMBATAN PENGUKUR	50
			1.3.4.1.2.13	JEMBATAN LAINNYA	50
	1.3.4.2			BANGUNAN AIR	
		1.3.4.2.1		BANGUNAN AIR IRIGASI	
			1.3.4.2.1.1	BANGUNAN WADUK IRIGASI	50
			1.3.4.2.1.2	BANGUNAN PENGAMBILAN IRIGASI	50
			1.3.4.2.1.3	BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI	50

KODE BARANG				NAMA BARANG	MASA MANFAAT (TAHUN)
			1.3.4.2.1.4	BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI	50
			1.3.4.2.1.5	BANGUNAN PENGAMAN IRIGASI	50
			1.3.4.2.1.6	BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI	50
			1.3.4.2.1.7	BANGUNAN SAWAH IRIGASI	50
			1.3.4.2.1.8	BANGUNAN AIR IRIGASI LAINNYA	50
		1.3.4.2.2		BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	
			1.3.4.2.2.1	BANGUNAN WADUK PASANG SURUT	50
			1.3.4.2.2.2	BANGUNAN PENGAMBILAN PASANG SURUT	50
			1.3.4.2.2.3	BANGUNAN PEMBAWA PASANG SURUT	50
			1.3.4.2.2.4	SALURAN PEMBUANG PASANG SURUT	50
			1.3.4.2.2.5	BANGUNAN PENGAMAN PASANG SURUT	50
			1.3.4.2.2.6	BANGUNAN PELENGKAP PASANG SURUT	50
			1.3.4.2.2.7	BANGUNAN SAWAH PASANG SURUT	50
			1.3.4.2.2.8	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT LAINNYA	50
		1.3.4.2.3		BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	
			1.3.4.2.3.1	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN RAWA	25
			1.3.4.2.3.2	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN RAWA	25
			1.3.4.2.3.3	BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN RAWA	25
			1.3.4.2.3.4	BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN RAWA	25
			1.3.4.2.3.5	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN RAWA	25
			1.3.4.2.3.6	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN RAWA	25
			1.3.4.2.3.7	BANGUNAN SAWAH PENGEMBANGAN RAWA	25
			1.3.4.2.3.8	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER LAINNYA	25
		1.3.4.2.4		BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	
			1.3.4.2.4.1	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10

KODE BARANG				NAMA BARANG	MASA MANFAAT (TAHUN)
			1.3.4.2.4.2	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI	10
			1.3.4.2.4.3	BANGUNAN PEMBAWA PENGAMAN SUNGAI/PANTAI	10
			1.3.4.2.4.4	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI	10
			1.3.4.2.4.5	BANGUNAN PENGAMAN PENGAMANAN SUNGAI/PANTAI	10
			1.3.4.2.4.6	BANGUNAN PELENGKAP PENGAMAN SUNGAI	10
			1.3.4.2.4.7	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LAINNYA	10
		1.3.4.2.5		BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	
			1.3.4.2.5.1	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30
			1.3.4.2.5.2	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30
			1.3.4.2.5.3	BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30
			1.3.4.2.5.4	BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30
			1.3.4.2.5.5	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30
			1.3.4.2.5.6	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30
			1.3.4.2.5.7	BANGUNAN SAWAH IRIGASI AIR TANAH	30
			1.3.4.2.5.8	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH LAINNYA	30
		1.3.4.2.6		BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	
			1.3.4.2.6.1	BANGUNAN WADUK AIR BERSIH/AIR BAKU	40
			1.3.4.2.6.2	BANGUNAN PENGAMBILAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40
			1.3.4.2.6.3	BANGUNAN PEMBAWA AIR BERSIH/AIR BAKU	40
			1.3.4.2.6.4	BANGUNAN PEMBUANG AIR BERSIH/AIR BAKU	40
			1.3.4.2.6.5	BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU	40
			1.3.4.2.6.6	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU LAINNYA	40
		1.3.4.2.7		BANGUNAN AIR KOTOR	
			1.3.4.2.7.1	BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR	40

KODE BARANG				NAMA BARANG	MASA MANFAAT (TAHUN)
			1.3.4.2.7.2	BANGUNAN WADUK AIR KOTOR	40
			1.3.4.2.7.3	BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR	40
			1.3.4.2.7.4	BANGUNAN PENGAMAN AIR KOTOR	40
			1.3.4.2.7.5	BANGUNAN PELENGKAP AIR KOTOR	40
			1.3.4.2.7.6	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	40
	1.3.4.3			INSTALASI	
		1.3.4.3.1		INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	
			1.3.4.3.1.1	INSTALASI AIR PERMUKAAN	30
			1.3.4.3.1.2	INSTALASI AIR SUMBER / MATA AIR	30
			1.3.4.3.1.3	INSTALASI AIR TANAH DALAM	30
			1.3.4.3.1.4	INSTALASI AIR TANAH DANGKAL	30
			1.3.4.3.1.5	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA	30
		1.3.4.3.2		INSTALASI AIR KOTOR	
			1.3.4.3.2.1	INSTALASI AIR BUANGAN DOMESTIK	30
			1.3.4.3.2.2	INSTALASI AIR BUANGAN INDUSTRI	30
			1.3.4.3.2.3	INSTALASI AIR BUANGAN PERTANIAN	30
			1.3.4.3.2.4	INSTALASI AIR KOTOR LAINNYA	30
		1.3.4.3.3		INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	
			1.3.4.3.3.1	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK	10
			1.3.4.3.3.2	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK	10
			1.3.4.3.3.3	BANGUNAN PENAMPUNG SAMPAH	10
			1.3.4.3.3.4	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH LAINNYA	10
		1.3.4.3.4		INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	
			1.3.4.3.4.1	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERCONTOHAN	10
			1.3.4.3.4.2	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERINTIS	10
			1.3.4.3.4.3	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN TERAPAN	10
			1.3.4.3.4.4	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN LAINNYA	10
		1.3.4.3.5		INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	
			1.3.4.3.5.1	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA)	40
			1.3.4.3.5.2	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD)	40
			1.3.4.3.5.3	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTM)	40
			1.3.4.3.5.4	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN (PLTAN)	40

KODE BARANG				NAMA BARANG	MASA MANFAAT (TAHUN)
			1.3.4.3.5.5	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)	40
			1.3.4.3.5.6	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR (PLTN)	40
			1.3.4.3.5.7	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS (PLTG)	40
			1.3.4.3.5.8	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (PLTP)	40
			1.3.4.3.5.9	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)	40
			1.3.4.3.5.10	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS (PLTB)	40
			1.3.4.3.5.11	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMUDERA / GELOMBANG SAMUDERA	40
			1.3.4.3.5.12	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK LAINNYA	40
		1.3.4.3.6		INSTALASI GARDU LISTRIK	
			1.3.4.3.6.1	INSTALASI GARDU LISTRIK INDUK	40
			1.3.4.3.6.2	INSTALASI GARDU LISTRIK DISTRIBUSI	40
			1.3.4.3.6.3	INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK	40
			1.3.4.3.6.4	INSTALASI GARDU LISTRIK LAINNYA	40
		1.3.4.3.7		INSTALASI PERTAHANAN	
			1.3.4.3.7.1	INSTALASI PERTAHANAN DI DARAT	30
			1.3.4.3.7.2	INSTALASI PERTAHANAN LAINNYA	30
		1.3.4.3.8		INSTALASI GAS	
			1.3.4.3.8.1	INSTALASI GARDU GAS	30
			1.3.4.3.8.2	INSTALASI JARINGAN PIPA GAS	30
			1.3.4.3.8.3	INSTALASI PENGOLAHAN GAS	30
			1.3.4.3.8.4	INSTALASI GAS LAINNYA	30
		1.3.4.3.9		INSTALASI PENGAMAN	
			1.3.4.3.9.1	INSTALASI PENGAMAN PENANGKAL PETIR	20
			1.3.4.3.9.2	INSTALASI REAKTOR NUKLIR	20
			1.3.4.3.9.3	INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RADIO AKTIF	20
			1.3.4.3.9.4	INSTALASI PENGAMAN LAINNYA	20
		1.3.4.3.10		INSTALASI LAIN	
			1.3.4.3.10.1	INSTALASI LAIN	20
	1.3.4.4			JARINGAN	
		1.3.4.4.1		JARINGAN AIR MINUM	
			1.3.4.4.1.1	JARINGAN PEMBAWA	30
			1.3.4.4.1.2	JARINGAN INDUK DISTRIBUSI	30
			1.3.4.4.1.3	JARINGAN CABANG DISTRIBUSI	30
			1.3.4.4.1.4	JARINGAN SAMBUNGAN KE RUMAH	30

KODE BARANG				NAMA BARANG	MASA MANFAAT (TAHUN)
			1.3.4.4.1.5	JARINGAN AIR MINUM LAINNYA	30
		1.3.4.4.2		JARINGAN LISTRIK	
			1.3.4.4.2.1	JARINGAN TRANSMISI	40
			1.3.4.4.2.2	JARINGAN DISTRIBUSI	40
			1.3.4.4.2.3	JARINGAN LISTRIK LAINNYA	40
		1.3.4.4.3		JARINGAN TELEPON	
			1.3.4.4.3.1	JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH	20
			1.3.4.4.3.2	JARINGAN TELEPON DIBAWAH TANAH	20
			1.3.4.4.3.3	JARINGAN TELEPON DIDALAM AIR	20
			1.3.4.4.3.4	JARINGAN DENGAN MEDIA UDARA	20
			1.3.4.4.3.5	JARINGAN TELEPON LAINNYA	20
		1.3.4.4.4		JARINGAN GAS	
			1.3.4.4.4.1	JARINGAN PIPA GAS TRANSMISI	30
			1.3.4.4.4.2	JARINGAN PIPA DISTRIBUSI	30
			1.3.4.4.4.3	JARINGAN PIPA DINAS	30
			1.3.4.4.4.4	JARINGAN BBM	30
			1.3.4.4.4.5	JARINGAN GAS LAINNYA	30
1.3.5				ASET TETAP LAINNYA	
	1.3.5.7			ASET TETAP DALAM RENOVASI	
		1.3.5.7.1		ASET TETAP DALAM RENOVASI	
			1.3.5.7.1.1	ASET TETAP DALAM RENOVASI	20

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

a. Tanah;
b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
c. Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya kelompok Aset Lain-Lain berupa:
    1) Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya;
    2) Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan;
    3) Aset tetap yang diberhentikan penggunaannya dari operasional pemerintah daerah karena sebab lainnya seperti akan dihibahkan dan digunakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah.

Realisasi atas pekerjaan jasa konsultansi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

(4) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan Dana Cadangan.

Termasuk dalam Aset Lainnya adalah :

1. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)
2. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga.
4. Aset Tak Berwujud, dan
5. Aset Lain-lain.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemda sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaan merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu.

Aset Tak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi *software* komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya; hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut.

Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 tahun.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah daerah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah, dan aset pemerintah daerah yang digunakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), di samping yang dialihkan.

7) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar untuk jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Utang bunga atas utang pemerintah daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Utang Perhitungan Fihak ketiga (PFK) dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

8) Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah daerah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar pemerintah daerah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

9) Ekuitas

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah daerah pada tanggal laporan, saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir perubahan ekuitas.

10) Selisih Kurs

Menurut SAP, transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Utang pemerintah daerah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia saat terjadinya transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Kemudian, selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Penjelasan mengenai berbagai komponen Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut.

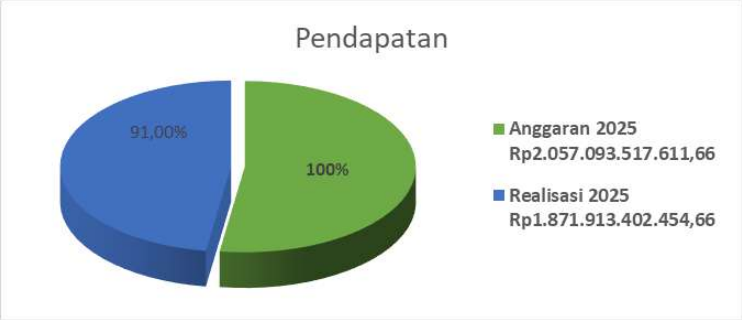
		2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.1.	Pendapatan	2.057.093.517.611,66	1.871.913.402.454,66	1.797.381.785.576,67

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan LRA diakui pada saat:

a. Kas atas Pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
b. Kas atas Pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
c. Kas atas Pendapatan tersebut telah diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
d. Kas atas Pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
e. Kas atas Pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah dijelaskan pada grafik berikut.



Gambar 5.1.1 Grafik Komposisi Pendapatan Daerah TA 2025

Realisasi Pendapatan tahun anggaran 2025 sebesar Rp.1.871.913.402.454,66 atau mencapai 91,00% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Pergeseran sebesar Rp.2.057.093.517.611,66.

Realisasi Pendapatan tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp.74.531.616.877,99 atau 4,15% jika dibandingkan dengan Realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp.1.797.381.785.576,67. Pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perbandingan antara anggaran dan realisasi Pendapatan tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.1.1 Realisasi Pendapatan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	2025			2024	Kenaikan/ Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	262.994.521.811,00	312.272.802.118,66	118,74	249.510.829.842,67	25,15
2	Pendapatan Transfer	1.748.642.327.485,66	1.514.183.932.021,00	86,59	1.534.786.996.202,00	(1,34)
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	45.456.668.315,00	45.456.668.315,00	100,00	13.083.959.532,00	247,42
Jumlah		**2.057.093.517.611,66**	**1.871.913.402.454,66**	**91,00**	**1.797.381.785.576,67**	**4,15**

Rincian realisasi Pendapatan Per SKPD TA 2025 dapat dilihat di **Lampiran 1.1**.

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah dijelaskan pada grafik berikut :



Gambar 5.1.2 Grafik Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah TA 2025

	2025		2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah	**262.994.521.811,00**	**312.272.802.118,66**	**249.510.829.842,67**

Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp312.272.802.118,66 atau 118,74% dari anggaran sebesar Rp262.994.521.811,00. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 mengalami

kenaikan sebesar Rp62.761.972.275,99 atau 25,15% dari realisasi pendapatan tahun anggaran 2024 sebesar Rp249.510.829.842,67, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2025 dan 2024

No	Uraian	2025			2024	Kenaikan/ Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(%)
1	Pajak Daerah	30.848.734.000,00	36.868.038.669,00	119,51	16.681.812.765,00	121,01
2	Retribusi Daerah	37.351.402.575,00	228.768.959.135,00	612,48	24.390.591.600,00	837,94
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.316.087.147,00	8.316.087.147,00	100,00	9.137.692.478,00	(8,99)
4	Lain-lain PAD yang Sah	186.478.298.089,00	38.319.717.167,66	20,55	199.300.732.999,67	(80,77)
Jumlah		**262.994.521.811,00**	**312.272.802.118,66**	**118,74**	**249.510.829.842,67**	**25,15**

		2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.1.1.1.	**Pendapatan Pajak Daerah**	**30.848.734.000,00**	**36.868.038.669,00**	**16.681.812.765,00**

Pendapatan Pajak Daerah adalah pajak daerah yang telah dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2025 (ditetapkan 14 Juli 2025) yang mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun anggaran 2025 sebesar Rp36.868.038.669,00 atau mencapai 119,51% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Pergeseran sebesar Rp30.848.734.000,00. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp20.186.225.904,00 atau 121,01% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp16.681.812.765,00. Kenaikan Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar 121,01% bersifat struktural. Artinya, kenaikan ini terjadi karena Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah mulai menerima pembagian langsung (Opsen) dari Pajak Kendaraan Bermotor yang sebelumnya dikelola sepenuhnya oleh Provinsi, serta adanya pencatatan pendapatan dari pengembalian yang signifikan. Perbandingan anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.1.3 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	2025			2024	Kenaikan/ Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(%)
1	Pajak Reklame	75.677.000,00	90.825.338,00	120,01	315.687.315,00	(71,23)
2	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	250.000,00	(100,00)
3	Pajak Sarang Burung Walet	3.500.000,00	2.959.600,00	84,56	3.018.148,00	(1,94)
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	150.000.000,00	1.460.000,00	0,97	184.156.757,00	(99,21)
5	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.370.000.000,00	1.392.051.449,00	101,60	1.375.397.256,00	1,21
6	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.118.000.000,00	2.871.622.407,00	135,58	2.602.416.720,00	10,34
7	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	11.042.598.000,00	12.796.658.875,00	115,88	12.200.886.569,00	4,88
8	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.994.989.000,00	11.659.029.800,00	116,64	0,00	0,00
9	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.093.970.000,00	8.053.431.200,00	132,15	0,00	0,00
Jumlah		**30.848.734.000,00**	**36.868.038.669,00**	**119,51**	**16.681.812.765,00**	**121,01**

Realisasi Pajak Reklame tahun anggaran 2025 sebesar Rp90.825.338,00 atau mencapai 120,01% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Pergeseran sebesar Rp75.677.000,00. Realisasi Pajak Reklame tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp224.861.977,00 atau 71,23% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp315.687.315,00. Penurunan sebesar 71,23% tidak menunjukkan kinerja pemungutan yang buruk di Tahun Anggaran 2025, tapi karena koreksi wajar setelah tahun tinggi **(*high-base effect*)** akibat Pemilu pada tahun 2024. Pencapaian 120,01% dari target membuktikan bahwa SKPD terkait tetap optimal dalam memungut pajak dari objek reklame komersial yang tersedia di luar agenda politik.

Realisasi Pajak Parkir tahun anggaran 2025 tidak ada atau Rp0,00 dan tidak ada pagu anggaran pergeseran yang ditetapkan, sedangkan realisasi Pajak Parkir tahun anggaran 2024 sebesar Rp.250.000,00. Pendapatan Pajak Parkir pada tahun 2025 realisasi Rp0,00 bukan berarti tidak ada penerimaan parkir sama sekali, tapi karena bentuk penyesuaian administrasi perpajakan daerah. Pendapatan dari sektor parkir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara nyata terserap ke dalam dua pos besar lainnya di antaranya : Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk parkir pada tempat-tempat yang dikelola oleh pihak swasta, dan Retribusi tempat Khusus Parkir di aset Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Realisasi Pajak Sarang Burung Walet tahun anggaran 2025 sebesar Rp2.959.600,00 atau mencapai 84,56% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Pergeseran sebesar Rp3.500.000,00. Realisasi Pajak Sarang Burung Walet tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp58.548,00 atau 1,94% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp3.018.148,00.

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.460.000,00 atau mencapai 0,97% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Pergeseran sebesar Rp150.000.000,00. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun anggaran 2025

mengalami penurunan sebesar Rp182.696.757,00 atau 99,21% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp184.156.757,00

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.392.051.449,00 atau mencapai 101,60% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Pergeseran sebesar Rp1.370.000.000,00. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp16.654.193,00 atau 1,21% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.375.397.256,00.

Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tahun anggaran 2025 sebesar Rp2.871.622.407,00 atau mencapai 135,58% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Pergeseran sebesar Rp2.118.000.000,00. Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp269.205.687,00 atau 10,34% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.602.416.720,00.

Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tahun anggaran 2025 sebesar Rp12.796.658.875,00 atau mencapai 115,88% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Pergeseran sebesar Rp11.042.598.000,00. Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pada tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp595.772.306,00 atau 4,88% dari realisasi tahun anggaran sebesar Rp12.200.886.569,00.

Realisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun anggaran 2025 sebesar Rp11.659.029.800,00 atau mencapai 116,64% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Pergeseran sebesar Rp9.994.989.000,00. Realisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan karena pada tahun anggaran 2024 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi.

Realisasi Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun anggaran 2025 sebesar Rp8.053.431.200,00 atau mencapai 132,15% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Pergeseran sebesar Rp6.093.970.000,00. Realisasi Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan karena pada tahun anggaran 2024 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak ada realisasi.

		2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.1.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**37.351.402.575,00**	**228.768.959.135,00**	**24.390.591.600,00**

Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing SKPD pemungut dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2025 (ditetapkan 14 Juli 2025) yang mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun anggaran 2025 sebesar Rp228.768.959.135,00 atau 612,48 % dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Pergeseran sebesar Rp37.351.402.575,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp204.378.367.535,00 atau 837,94% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp24.390.591.600,00. Kenaikan realisasi ini terjadi

karena penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan tersebut mengatur bahwa jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BLUD termasuk dalam bagian Pendapatan Retribusi. Pada tahun sebelumnya jasa pelayanan kesehatan yang diberikan BLUD termasuk dalam bagian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah. Perbandingan anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.4 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	2025			2024	Kenaikan/ Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(%)
1	Retribusi Jasa Umum	29.927.590.275,00	220.794.567.157,00	737,76	15.841.130.411,00	108,60
2	Retribusi Jasa Usaha	7.273.812.300,00	7.727.126.991,00	106,23	8.043.346.982,00	(3,93)
3	Retribusi Perizinan Tertentu	150.000.000,00	247.264.987,00	164,84	506.114.207,00	(51,14)
Jumlah		**37.351.402.575,00**	**228.768.959.135,00**	**612,48**	**24.390.591.600,00**	**837,94**

a) Retribusi Jasa Umum

Pendapatan Retribusi Jasa Umum pada tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp220.794.567.157,00 atau 737,76% dari anggaran sebesar Rp29.927.590.275,00. Realisasi Retribusi Jasa Umum mengalami kenaikan besar Rp204.953.436.746,00 atau 1.293,81% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp15.841.130.411,00. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Retribusi Jasa Umum tahun 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.5 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2025 dan 2024

No	Uraian	2025			2024	Kenaikan/ Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(%)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	29.309.361.775,00	220.406.667.157,00	752,00	15.490.671.918,00	1.322,83
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	0,00	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	120.000.000,00	0,00	0,00	20.007.493,00	(100,00)
4	Retribusi Pelayanan Pasar	498.228.500,00	381.000.000,00	76,47	330.451.000,00	15,30
Jumlah		**29.927.590.275,00**	**220.794.567.157,00**	**737,76**	**15.841.130.411,00**	**1.293,81**

Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan (PKM dan RSHD). Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun anggaran 2025 sebesar Rp220.406.667.157,00 atau mencapai 752,00% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Pergeseran sebesar Rp29.309.361.775,00. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp204.915.995.239,00 atau 1.322,83% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp15.490.671.918,00.

Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan. Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tahun anggaran 2025 sebesar Rp6.900.000,00 dari pagu APBD tahun 2025 yang tidak dianggarkan. Sedangkan untuk realisasi tahun 2024 tidak ada dan tidak ada pagu APBD yang di anggarkan pada tahun anggaran 2024. Adanya realisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tahun 2025 karena adanya penerimaan pendapatan yang baru teridentifikasi atau baru dipungut setelah proses penyusunan APBD/Pergeseran selesai, dan merupakan hasil dari penyesuaian kode rekening(nomenklatur) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2025 (ditetapkan 14 Juli 2025) yang mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan. Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tahun anggaran anggaran 2025 sebesar Rp0,00 atau 0.00% dari pagu anggaran pergeseran sebesar Rp120.000.000,00. Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum mengalami penurunan sebesar Rp20.007.493,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp20.007.493,00. Realisasi Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2025 sebesar Rp0,00,-, tidak terdapat realisasi pada Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum tersebut disebabkan adanya perubahan regulasi tarif (penyesuaian Peraturan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) atau perubahan kebijakan tata ruang yang mengalihkan potensi parkir ke tempat khusus parkir, sehingga tidak ada realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada tahun 2025.

Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan. Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar tahun anggaran 2025 sebesar Rp381.000.000,00 atau mencapai 76,47% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Pergeseran sebesar Rp498.228.500,00. Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp50.549.000,00 atau 15,30% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp330.451.000,00.

b) Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha pada tahun 2025 adalah sebesar Rp7.727.126.991,00 atau 106,23% dari anggaran sebesar Rp7.273.812.300,00. Retribusi Jasa Usaha mengalami penurunan sebesar Rp318.029.991,00 atau 3,95% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp8.045.156.982,00. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Retribusi Jasa Usaha tahun 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.6 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2025 dan 2024

No	Uraian	2025			2024	Kenaikan/ Penurunan
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	(%)
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	546.993.600,00	297.590.000,00	54,40	295.680.000,00	0,65
2	Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan	0,00	0,00	0,00	928.094.500,00	(100,00)
3	Retribusi Terminal	14.000.000,00	0,00	0,00	34.800.000,00	(100,00)
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	5.000.000.000,00	6.023.434.991,00	120,47	6.398.564.982,00	(5,86)
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	26.000.000,00	25.000.000,00	96,15	23.025.000,00	8,58
6	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	120.000.000,00	136.650.000,00	113,88	190.720.000,00	(28,35)
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	200.000.000,00	191.511.000,00	95,76	172.462.500,00	11,05
8	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha	1.366.818.700,00	1.052.941.000,00	77,04	0.00	0,00
Jumlah		**7.273.812.300,00**	**7.727.126.991,00**	**106,23**	**8.043.346.982,00**	**(3,93)**

Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp297.590.000,00 atau mencapai 54,40% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Pergeseran sebesar Rp546.993.600,00. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.910.000,00 atau 0,65% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp295.680.000,00. Realisasi Tahun 2025 yang hanya mencapai 54,40% bukan berarti terjadi penurunan kinerja, karena secara nominal justru ada kenaikan 0,65% dibandingkan tahun 2024. Rendahnya persentase tersebut lebih disebabkan oleh aspek perencanaan (penetapan target) yang terlalu tinggi dibandingkan dengan potensi riil kekayaan daerah yang siap disewakan di Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan.

Pemungutan Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan. Tahun anggaran 2025 untuk Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan tidak ada realisasi dan tidak ada pagu yang

dianggarkan. Sedangkan Realisasi Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan tahun anggaran 2024 sebesar Rp928.094.500,00. Ketiadaan pagu anggaran dan realisasi pada akun Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan tahun Anggaran 2025 disebabkan oleh reklasifikasi akun (perubahan nomenklatur) dalam rangka implementasi UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Objek pendapatan tersebut dialihkan ke akun retribusi lain yang sesuai dengan regulasi terbaru seperti Retribusi Pelayanan Pasar atau Pemakaian Kekayaan Daerah guna memastikan legalitas pemungutan sesuai dengan Perda Pajak dan Retribusi Daerah yang baru. Jadi tidak adanya realisasi pada Pemungutan Retribusi Pasar Grosi/Pertokoan adalah karena adanya reklasifikasi akun, bukan hilangnya pendapatan secara riil.

Pemungutan Retribusi Terminal dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan. Realisasi Retribusi Terminal tahun anggaran 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Pergeseran sebesar Rp14.000.000,00. Realisasi Retribusi Terminal tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp34.800.000,00 atau 100% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp34.800.000,00, kondisi ini disebabkan karena terminal sudah tidak difungsikan lagi.

Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan. Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir tahun anggaran 2025 sebesar Rp6.023.434.991,00 atau mencapai 120,47% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Pergeseran sebesar Rp5.000.000.000,00. Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp375.129.991,00 atau 5,86% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp6.398.564.982,00.

Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian. Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan tahun anggaran 2025 sebesar Rp25.000.000,00 atau mencapai 96,15% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Pergeseran sebesar Rp26.000.000,00. Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.975.000,00 atau 8,58% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp23.025.000,00.

Pemungutan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Realisasi Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga tahun anggaran 2025 sebesar Rp136.650.000,00 atau mencapai 113,88% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Pergeseran sebesar Rp120.000.000,00. Realisasi Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp54.070.000,00 atau 28,35% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp190.720.000,00.

Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp191.511.000,00 atau mencapai 95,76% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Pergeseran sebesar Rp200.000.000,00. Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp19.048.500,00 atau 11,05 % jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp172.462.500,00.

Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan. Realisasi Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.052.941.000,00 atau mencapai 77,04% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Pergeseran sebesar Rp1.366.818.700,00. Sedangkan Realisasi Retribusi Penyediaan

Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha tahun 2024 tidak ada dan juga tidak ada dianggarkan pagu pada tahun anggaran 2024.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu (Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung) dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu (Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung) tahun anggaran 2025 sebesar Rp247.264.987,00 atau 164,84% dari anggaran pergeseran sebesar Rp150.000.000,00. Retribusi Perizinan Tertentu (Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung) mengalami penurunan sebesar Rp258.849.220,00 atau 51,14% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024, yaitu sebesar Rp506.114.207,00. Penurunan realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar 51,14% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2024 disebabkan oleh penurunan volume permohonan izin bangunan baru dari masyarakat, serta adanya penyesuaian tarif retribusi melalui kebijakan dan regulasi baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Meskipun demikian, realisasi tahun 2025 masih melampaui target yang ditetapkan pada APBD Pergeseran mencapai 164,84%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu (Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung) pada tahun 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.7 Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu

No	Uraian	2025			2024	Kenaikan/ Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(%)
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	150.000.000,00	247.264.987,00	164,84	506.114.207,00	(51,14)
Jumlah		**150.000.000,00**	**247.264.987,00**	**164,84**	**506.114.207,00**	**(51,14)**

	2025		2024
	Anggaran (Rp)	**Realisasi (Rp)**	**Realisasi (Rp)**
5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**8.316.087.147,00**	**8.316.087.147,00**	**9.137.692.478,00**

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari investasi kepada perusahaan berupa dividen atau laba usaha. Realisasi Pendapatan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dicatat berdasarkan Metode Biaya dan Metode Ekuitas. Metode Biaya digunakan untuk mencatat Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari Investasi yang persentase kepemilikannya kurang dari 20% yakni diakui seluruhnya sebagai pendapatan atas semua penerimaan ke Kas Daerah. Metode Ekuitas digunakan untuk mencatat Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari Investasi yang persentase kepemilikannya 20% sampai 50% yakni dinilai sebesar bagian laba atau rugi sesuai persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Realisasi tersebut berasal dari objek investasi sebagai berikut.

Tabel 5.1.8 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	2025			2024	Kenaikan/ Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(%)
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Kalsel	8.316.087.147,00	8.315.979.422,00	100,00	9.137.619.055,00	(8,99)
2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPR Sanggam Cipta Sejahtera	0,00	107.725,00	0,00	73.423,00	46,72
Jumlah		**8.316.087.147,00**	**8.316.087.147,00**	**100,00**	**9.137.692.478,00**	**(8,99)**

Dari target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun anggaran 2025 sebesar Rp8.316.087.147,00 dapat direalisasikan sebesar Rp8.316.087.147,00 atau 100,00%. Realisasi tersebut berasal dari dividen yang diterima pada tahun 2025 atas penyertaan modal pada Bank Kalsel sebesar Rp8.315.979.422,00 dan BPR Sanggam Cipta Sejahtera sebesar Rp107.725,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp9.137.692.478,00, terjadi penurunan sebesar Rp821.605.331,00, atau 8,99%.

		2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.1.1.4.	**Lain-lain PAD yang Sah**	**186.478.298.089,00**	**38.319.717.167,66**	**199.300.732.999,67**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan Pendapatan Asli Daerah dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun anggaran 2025 sebesar Rp38.319.717.167,66 atau mencapai 20,55% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Pergeseran sebesar Rp186.478.298.089,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp160.981.015.832,01 atau sebesar 80,77% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp199.300.732.999,67. Perbandingan antara anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.9 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	2025			2024	Kenaikan/ Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(%)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	540.524.400,00	490.524.400,00	90,74	0.00	0,00
2	Jasa Giro	10.000.000.000,00	10.299.559.922,04	102,99	15.734.074.665,81	(34,54)

No	Uraian	2025			2024	Kenaikan/ Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(%)
3	Pendapatan Bunga	5.180.269.928,00	7.596.439.766,00	146,64	8.405.618.581,00	(9,63)
4	Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain	3.500.000.000,00	4.848.780.224,99	138,53	2.622.652.914,87	84,88
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	500.000.000,00	1.696.312.329,00	339,26	98.134.185,00	1.628,56
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	132.400.000,00	87.837.858,00	66,34	15.550.354,00	464,86
7	Pendapatan dari Pengembalian	11.285.274.141,00	11.285.274.141,00	100,00	0.00	0,00
8	Pendapatan BLUD	155.339.829.620,00	2.014.988.526,63	1,29	172.424.702.298,99	(98,83)
Jumlah		**186.478.298.089,00**	**38.319.717.167,66**	**20,55**	**199.300.732.999,67**	**(80,77)**

Realisasi Pendapatan Hasil Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang Tidak Dipisahkan tahun anggaran 2025 sebesar Rp490.524.400,00 atau 90,74% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Pergeseran sebesar Rp540.524.400,00. Realisasi Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp490.524.400,00 atau 100% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp0,00. Realisasi Pendapatan Hasil Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang Tidak Dipisahkan tahun anggaran 2025 sebesar Rp490.524.400,00 berasal dari hasil penjualan/pelepasan aset daerah (barang inventaris seperti Kendaraan dinas dan alat berat) yang tidak dipisahkan dan sudah tidak digunakan lagi oleh pemerintah daerah. Realisasi ini mencapai 90,75% dari target APBD Pergeseran dan mengalami kenaikan sebesar Rp490.524.400,00 atau 100% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp0,00.

Realisasi Pendapatan Jasa Giro pada Kas Umum Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp10.299.559.922,04 atau mencapai 102,99% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Pergeseran sebesar Rp10.000.000.000,00. Realisasi Jasa Giro tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp5.434.514.743,77 atau 34,54% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 Rp15.734.074.665,81.

Realisasi Pendapatan Bunga tahun anggaran 2025 sebesar Rp7.596.439.766,00 atau 146,64% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Pergeseran sebesar Rp5.180.269.928,00. Realisasi Pendapatan Bunga tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp809.178.815,00 atau 9,63% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp8.405.618.581,00.

Realisasi Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain tahun anggaran 2025 sebesar Rp4.848.780.224,99 atau mencapai 138,53% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Pergeseran sebesar Rp3.500.000.000,00. Realisasi Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.226.127.310,12 atau 84,88% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.622.652.914,87.

Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.696.312.329,00 atau mencapai 339,26% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD

Pergeseran sebesar Rp500.000.000,00. Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.598.178.144,00 atau 1.628,56% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp98.134.185,00. Kenaikan signifikan pada realisasi Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar 1.628,56% dibandingkan tahun 2024 karena adanya optimalisasi penagihan sanksi administrasi (denda) terhadap penyedia jasa yang tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai kontrak. Selain itu, realisasi ini juga mencakup penyetoran denda sebagai bentuk tindak lanjut atas hasil temuan pemeriksaan dari BPK dan Inspektorat atas pelaksanaan proyek-proyek fisik pada periode sebelumnya.

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp87.837.858,00 atau mencapai 66,34% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Pergeseran sebesar Rp132.400.000,00. Realisasi Denda Pajak Daerah tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp72.287.504,00 atau 464,86% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp15.550.354,00. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp72.287.504,00 atau 464,86% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024, realisasi tersebut berasal dari sanksi denda atas keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), serta adanya kontribusi denda dari implementasi kebijakan baru Opsen Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Realisasi Pendapatan Pendapatan dari Pengembalian tahun anggaran 2025 sebesar Rp11.285.274.141,00 atau mencapai 100,00% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Pergeseran sebesar Rp11.285.274.141,00. Realisasi Pendapatan Pendapatan dari Pengembalian tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp11.285.274.141,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp0,00. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian tahun anggaran 2025 sebesar Rp11.285.274.141,00 berasal dari penyetoran kembali atas kelebihan pembayaran belanja daerah dan sisa dana transfer tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan signifikan ini merupakan hasil dari optimalisasi tindak lanjut atas temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI serta penyelesaian tuntutan ganti rugi (TGR) atas pelaksanaan program dan kegiatan oleh pihak ketiga maupun SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Realisasi Pendapatan BLUD tahun anggaran 2025 Rp2.014.988.526,63 atau 1,29% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Pergeseran sebesar Rp155.339.829.620,00. Realisasi Pendapatan BLUD tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp170.409.713.772,36 atau 98,83% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp172.424.702.298,99. Pendapatan BLUD sudah mengikuti Pencatatan Akuntansi yang disesuaikan dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.13.1/214/Keuda tanggal 6 Januari 2024 tentang Penjelasan pelaksanaan PP 35 Tahun 2023, yaitu Pendapatan yang dicatat dalam Retribusi Daerah adalah penerimaan pendapatan yang berasal dari Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai tarif yang diatur dalam Perda Retribusi. Oleh karena itu, pendapatan dari jasa pelayanan kesehatan pada BLUD yang pada tahun sebelumnya dicatat pada Lain-lain PAD yang Sah (BLUD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (FKTP) dilakukan reklasifikasi untuk dicatat pada Pendapatan Retribusi.

	2025		2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.1.2. Pendapatan Transfer	**1.748.642.327.485,66**	**1.514.183.932.021,00**	**1.534.786.996.202,00**

Realisasi Pendapatan Transfer tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.514.183.932.021,00 atau mencapai 86,59% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Pergeseran sebesar Rp1.748.642.327.485,66. Realisasi Pendapatan Transfer tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp20.603.064.181,00 atau 1,34% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp 1.534.786.996.202,00.

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Dana Desa, Insentif Fiskal, Dana Bagi hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Rincian Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.10 Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 dan 2024

No	Uraian	2025			2024	Kenaikan/ Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(%)
1	Transfer Pemerintah Pusat	1.531.535.800.287,00	1.404.346.663.006,00	91,70	1.406.141.152.511,00	(0,13)
a	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	11.581.993.000,00	100,00
b	Dana Desa	126.044.386.000,00	115.959.796.462,00	92,00	129.129.755.200,00	(10,20)
c	Dana Bagi Hasil (DBH)	661.163.257.287,00	559.357.580.379,00	84,60	509.268.584.713,00	9,84
	DBH Pajak	27.434.397.000,00	25.358.965.200,00	92,43	18.429.550.000,00	37,60
	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	632.562.707.287,00	532.832.462.179,00	84,23	487.944.157.713,00	9,20
	DBH Lainnya	1.166.153.000,00	1.166.153.000,00	100,00	2.894.877.000,00	(59,72)
d	Dana Alokasi Umum (DAU)	551.962.927.000,00	546.966.063.077,00	99,09	546.064.341.637,00	0,17
	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	503.340.366.000,00	503.112.045.722,00	99,95	546.064.341.637,00	(7,87)
	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	48.622.561.000,00	43.854.017.355,00	90,19	0,00	0,00
e	Dana Alokasi Khusus (DAK)	192.365.230.000,00	182.063.223.088,00	94,64	210.096.477.961,00	(13,34)
	DAK Fisik	51.634.120.000,00	50.742.422.165,00	98,27	99.851.972.094,00	(49,18)

No	Uraian	2025			2024	Kenaikan/ Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(%)
	DAK Non Fisik	140.731.110.000,00	131.320.800.923,00	93,31	110.244.505.867,00	19,12
3	Transfer Antar Daerah	217.106.527.198,66	109.837.269.015,00	50,59	128.645.843.691,00	(4,62)
Jumlah (1+2)		**1.748.642.327.485,66**	**1.514.183.932.021,00**	**86,59**	**1.534.786.996.202,00**	**(1,34)**

		2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.1.2.1.	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.531.535.800.287,00**	**1.404.346.663.006,00**	**1.406.141.152.511,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berasal Dana Desa, Insentif Fiskal, Dana Bagi hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Realisasi transfer pusat pada tahun 2025 sebesar Rp1.404.346.663.006,00 atau mencapai 91,70% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Pergeseran sebesar Rp1.531.535.800.287,00 Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.794.489.505,00 atau 0,13% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.406.141.152.511,00, dengan rincian per nama rekening sebagai berikut:

		2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.1.2.1.1.	**Dana Insentif Daerah**	**0,00**	**0,00**	**11.581.993.000,00**

Realisasi Dana Insentif daerah (DID) tahun anggaran 2025 sebesar Rp0,00 dan tidak ada dianggarkan pada tahun 2025. Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 100% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp11.581.993.000,00.

Dana Insentif Daerah (DID) kini bertransformasi menjadi Insentif Fiskal (IF) atas kinerja tahun berjalan, bukan lagi sekadar DID. Insentif ini adalah dana penghargaan dari APBN untuk Pemda berprestasi, khususnya dalam penanganan inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, dan penggunaan produk dalam negeri. Dana ini kini lebih fleksibel untuk mendukung prioritas nasional. Insentif fiskal adalah dana APBN yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagai penghargaan atas kinerja baik, seperti perbaikan tata kelola keuangan, pelayanan umum, dan pencapaian tujuan strategis nasional (contoh: pengendalian inflasi). Tujuannya memotivasi daerah meningkatkan kinerja, digunakan untuk percepatan ekonomi daerah. Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2025 tidak mendapatkannya karena belum memenuhi kriteria utama, seperti kecepatan penyerapan anggaran atau perbaikan insfrastruktur.

	2025		2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.1.2.1.2. Dana Desa	**126.044.386.000,00**	**115.959.796.462,00**	**129.129.755.200,00**

Realisasi Dana Desa tahun anggaran 2025 sebesar Rp115.959.796.462,00 atau 92,00% dari pagu anggaran pergeseran sebesar Rp126.044.386.000,00. Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp13.169.958.738,00 atau 10,20% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp129.129.755.200,00. Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian penyaluran Dana Desa yang didasarkan pada tingkat pemenuhan syarat salur (seperti APBDes dan rincian penggunaan Dana Desa yang telah memenuhi kriteria) dari masing-masing desa. Sisa pagu anggaran yang tidak tersalurkan tersebut tetap menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) di Kas Negara atau tidak dicairkan karena belum memenuhi persyaratan salur di tahap akhir, serta tidak adanya sanksi pemotongan yang bersifat material.

Dana Desa tahun anggaran 2025 yang diperuntukan kepada 161 Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) langsung ke Rekening Kas Daerah (RKD). Penginputan persyaratan penyaluran melalui aplikasi OMSPAN (*Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara) dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kesesuaian kelengkapan persyaratan yang diverifikasi oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menerbitkan SPP, SPM, dan SP2D menginformasikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk dibuatkan Surat Pengantar Pencairan Dana Desa .

	2025		2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.1.2.1.3. Dana Bagi Hasil (DBH)	**661.163.257.287,00**	**559.357.580.379,00**	**509.268.584.713,00**

Realisasi Dana Bagi Hasil tahun anggaran 2025 sebesar Rp559.357.580.379,00 atau 84,60% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Pergeseran sebesar Rp661.163.257.287,00. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp50.088.995.666,00 atau 9,84% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp509.268.584.713,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.11 Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2025 dan 2024

No	Uraian	2025			2024	Kenaikan/ Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(%)
1	DBH PBB	16.958.268.000,00	15.863.407.700,00	93,54	11.572.368.000,00	37,08
2	DBH PPh Pasal 21	10.162.156.000,00	9.211.781.600,00	90,64	6.665.730.000,00	38,20
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	313.973.000,00	283.775.900,00	90,38	191.452.000,00	48,22
4	DBH Cukai Hasil	-	-	0,00	29.000,00	(100,00)

No	Uraian	2025			2024	Kenaikan/ Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(%)
	Tembakau (CHT)					
5	DBH SDA Minyak Bumi	18.180.000,00	18.180.000,00	100,00	119.227.000,00	(84,75)
6	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	145.569.000,00	145.569.000,00	100,00	65.577.000,00	121,98
7	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	631.314.721.287,00	531.584.476.179,00	84,20	486.467.340.713,00	9,27
8	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	250.432.000,00	250.432.000,00	100,00	148.142.000,00	69,05
9	DBH SDA Perikanan	833.805.000,00	833.805.000,00	100,00	1.143.842.000,00	(27,10)
10	DBH Sawit	1.166.153.000,00	1.166.153.000,00	100,00	2.894.877.000,00	(59,72)
Jumlah		**661.163.257.287,00**	**559.357.580.379,00**	**84,60**	**509.268.584.713,00**	**9,84**

	2025		2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.1.2.1.4. Dana Alokasi Umum (DAU)	**551.962.927.000,00**	**546.966.063.077,00**	**546.064.341.637,00**

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Dana Alokasi Umum tahun anggaran 2025 untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah diterima sebesar Rp546.966.063.077,00 atau 99,09% dari pagu anggaran 2025 sebesar Rp551.962.927.000,00. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 901.721.440,00 atau 0,17% jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2024 sebesar Rp546.064.341.637,00.

	2025		2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.1.2.1.5 Dana Alokasi Khusus (DAK)	**192.365.230.000,00**	**182.063.223.088,00**	**210.096.477.961,00**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pada tahun 2025 Realisasi DAK sebesar Rp182.063.223.088,00 dari anggaran pergeseran yang diteapkan sebesar Rp192.365.230.000,00. Realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp28.033.254.873,00 atau 13,34% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp210.096.477.961,00. Dana Alokasi Khusus (DAK) secara garis besar terdiri dari dua jenis utama, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus Fisik (insftrastruktur/sarana prasarana) yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan tujuan meningkatkan layanan publik, mengurangi kesenjangan antardaerah, dan memacu pertumbuhan ekonomi. Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaam Dana Alokasi Khusus Fisik. Realisasi DAK Fisik tahun anggaran 2025 sebesar Rp50.742.422.165,00 atau 98,27% dari anggaran sebesar Rp51.634.120.000,00. Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami penurunan Rp49.109.549.929,00 atau 49,18% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp99.851.972.094,00. Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagai berikut:

Tabel 5.1.12 Realisasi DAK Fisik TA 2025 dan 2024

No	Uraian	2025			2024	Kenaikan/ Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(%)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.187.397.000,00	1.164.302.532,00	98,05	1.754.839.400,00	(33,65)
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	415.855.000,00	368.209.200,00	88,54	20.477.512.591,00	(98,20)
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	281.240.000,00	269.285.200,00	95,74	12.271.897.750,00	(97,81)
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	9.438.638.000,00	(100,00)
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	94.430.000,00	(100,00)
6	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	665.732.000,00	(100,00)
7	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	0,00	4.500.000.000,00	(100,00)

No	Uraian	2025			2024	Kenaikan/ Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(%)
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	2.162.002.224,00	(100,00)
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan	49.749.628.000,00	48.940.625.233,00	98,37	48.486.920.129,00	0,94
Jumlah		**51.634.120.000,00**	**50.742.422.165,00**	**98,27**	**99.851.972.094,00**	**(49,18)**

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik merupakan dana yang berasal dari APBN dimana peruntukan dan pertanggungjawaban penggunaannya diatur oleh Pemerintah Pusat. Realisasi DAK Non Fisik tahun 2025 sebesar Rp131.320.800.923,00 atau 93,31% dari anggaran sebesar Rp140.731.110.000,00. Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan Rp21.076.295.056,00 atau 19,12% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp110.244.505.867,00. Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagai berikut.

Tabel 5.1.13 Realisasi DAK Non Fisik TA 2025 dan 2024

No	Uraian	2025			2024	Kenaikan/ Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(%)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	22.526.669.000,00	22.366.366.054,00	99,29	22.661.169.913,00	(1,30)
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.367.750.000,00	1.367.750.000,00	100,00	1.355.000.000,00	0,94
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	77.369.445.000,00	80.911.627.500,00	104,58	60.434.632.000,00	33,88
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.481.250.000,00	648.750.000,00	43,80	2.368.420.000,00	(72,61)
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.837.239.000,00	1.828.131.000,00	99,50	1.818.486.000,00	0,53
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.220.526.000,00	4.185.106.269,00	99,16	4.341.522.000,00	(3,60)
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	3.758.700.000,00	3.763.078.871,00	100,12	3.245.811.976,00	15,94
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	22.716.588.000,00	2.472.491.815,00	10,88	9.863.257.268,00	(74,93)
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan	279.971.000,00	279.971.000,00	100,00	0,00	0,00

No	Uraian	2025			2024	Kenaikan/ Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(%)
	Obat dan Makanan					
10	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.155.800.000,00	3.847.829.350,00	92,59	3.331.724.550,00	15,49
11	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	140.347.204,00	35,03	304.989.260,00	(53,98)
12	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	616.512.000,00	616.512.000,00	100,00	519.492.900,00	18,68
13	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	0,00	8.892.839.860,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**140.731.110.000,00**	**131.320.800.923,00**	**93,31**	**110.244.505.867,00**	**19,12**

		2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.1.2.2.	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**217.106.527.198,66**	**109.837.269.015,00**	**128.645.843.691,00**

Pendapatan Transfer Antar Daerah berasal merupakan penerimaan uang atau hak menerima uang yang berasal dari pemerintah daerah lain (provinsi ke kabupaten/kota atau sebaliknya) dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan. Ini merupakan bagian dari pendapatan transfer yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan dan mendukung pelayanan publik antarwilayah. Pendapatan Transfer Antar Daerah yang diterima oleh Kabupaten Hulu Sungai Tengah berasal dari Pemerintah Provinsi, dengan komponen utama terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp109.837.269.015,00 atau 50,59% dari anggaran pergeseran sebesar Rp217.106.527.198,66 dengan rincian sebagai berikut :

		2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.1.2.2.1.	**Pendapatan Bagi Hasil**	**217.106.527.198,66**	**109.837.269.015,00**	**128.645.843.691,00**

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil tahun anggaran 2025 sebesar Rp109.837.269.015,00 atau 50,59% dari anggaran pergeseran sebesar Rp217.106.527.198,66. Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp18.808.574.676,00 atau 14,62% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp128.645.843.691,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.14 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil TA 2025 dan 2024

No	Uraian	2025			2024	Kenaikan/ Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	13.756.965.642,00	2.418.571.635,00	17,58	8.425.233.340,00	(71,29)
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	22.701.497.025,00	3.382.779.307,00	14,90	10.460.028.345,00	(67,6)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	154.179.893.528,00	87.661.149.217,00	56,86	94.345.356.236,00	(7,08)
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	128.112.989,00	70.779.665,00	55,25	271.038.204,00	(73,89)
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	26.340.058.014,66	16.303.989.191,00	61,90	15.144.187.566,00	7,66
Jumlah		**217.106.527.198,66**	**109.837.269.015,00**	**50,59**	**128.645.843.691,00**	**(14,62)**

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor tahun anggaran 2025 sebesar Rp2.418.571.635,00 atau 17,58% dari anggaran sebesar Rp13.756.965.642,00. Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp6.006.661.705,00 atau 71,29% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp 8.425.233.340,00.

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun anggaran 2025 sebesar Rp3.382.779.307,00 atau 14,90% dari anggaran sebesar Rp22.701.497.025,00. Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp7.077.249.038,00 atau 67,66% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp10.460.028.345,00.

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun anggaran 2025 sebesar Rp87.661.149.217,00 atau 56,86% dari anggaran sebesar Rp154.179.893.528,00. Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp6.684.207.019,00 atau 7,08% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp94.345.356.236,00.

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan tahun anggaran 2025 sebesar Rp70.779.665,00 atau 55,25% dari anggaran sebesar Rp128.112.989,00. Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp200.258.539,00 atau 73,89% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp271.038.204,00.

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok anggaran 2025 sebesar Rp16.303.989.191,00 atau 61,90% dari anggaran sebesar Rp26.340.058.014,66 Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.159.801.625,00 atau 7,66% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp15.144.187.566,00.

		2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.1.3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**45.456.668.315,00**	**45.456.668.315,00**	**13.083.959.532,00**

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun anggaran 2025 sebesar Rp45.456.668.315,00 atau mencapai 100% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Pergeseran sebesar Rp45.456.668.315,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp32.372.708.783,00 atau 247,42% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp13.083.959.532,00.

		2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.1.3.1.	**Pendapatan Hibah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Realisasi Pendapatan Hibah tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00. Pemerintah Daerah tidak menganggarkan Pendapatan Hibah baik pada tahun anggaran 2025 maupun pada tahun anggaran 2024. Hal ini menunjukkan bahwa dalam dua tahun anggaran terakhir, Pemerintah Daerah tidak menerima penyerahan bantuan dalam bentuk hibah yang mengikat dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri.

		2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.1.3.2.	**Pendapatan Lainnya**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Realisasi Pendapatan Lainnya tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00. Pemerintah Daerah tidak menganggarkan Pendapatan Lainnya baik pada tahun anggaran 2025 maupun pada tahun anggaran 2024. Nihilnya pagu anggaran dan realisasi pada pos Pendapatan Lainnya dalam dua tahun anggaran berturut-turut tersebut menunjukkan bahwa selama periode Tahun Anggaran 2024 dan 2025, tidak terdapat objek pendapatan daerah di luar klasifikasi yang telah ditentukan, ataupun penerimaan lainnya yang sah yang dapat diakui dan diklasifikasikan ke dalam pos ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

		2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.1.3.3.	**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	**45.456.668.315,00**	**45.456.668.315,00**	**13.083.959.532,00**

Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tahun anggaran 2025 sebesar Rp45.456.668.315,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp45.456.668.315,00. Pendapatan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

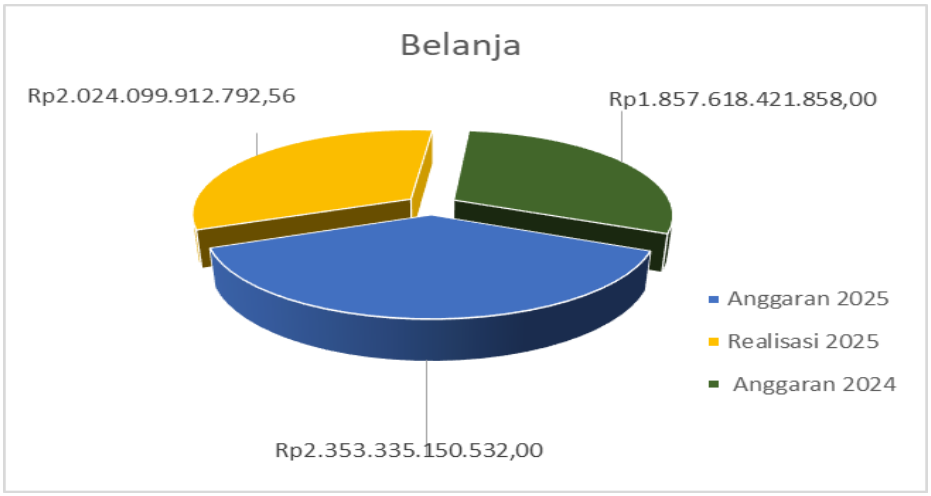
Tabel 5.1.15 Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	2025			2024	Kenaikan/ Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(%)
1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	45.456.668.315,00	45.456.668.315,00	100,00	13.083.959.532,00	247,42
a	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	13.083.959.532,00	(100,00)
b	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	45.456.668.315,00	45.456.668.315,00	100,00	0,00	100,00
Jumlah		**45.456.668.315,00**	**45.456.668.315,00**	**100,00**	**13.083.959.532,00**	**247,42**

Sehubungan dengan ditetapkannya 19 Puskesmas dari FKTP menjadi BLUD pada tahun anggaran 2025 maka Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP tidak dianggarkan pada komponen Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan pada tahun 2024, realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp13.083.959.532,00.

		2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.2.	**Belanja**	**2.353.335.150.532,00**	**2.024.099.912.792,56**	**1.857.618.421.858,00**

Belanja LRA adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja LRA diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari RKUD. Pengukuran Belanja LRA berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
Komposisi realisasi Belanja Daerah dijelaskan pada grafik berikut.



Gambar 5.3 Grafik Komposisi Belanja Daerah TA 2025 dan TA 2024

Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dikelompokkan berdasarkan jenis Belanja yang terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga (BTT) dan Belanja Transfer. Perbandingan antara anggaran dan realisasi Belanja tahun anggaran 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.16 Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024

No	Uraian	2025			2024	Kenaikan/ Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(%)
1	Belanja Operasi	1.598.559.706.191,00	1.399.691.309.974,56	87,56	1.210.683.466.424,00	15,61
2	Belanja Modal	482.874.805.439,00	408.697.037.216,00	84,64	412.885.248.064,00	(1,01)
3	Belanja Tak Terduga	13.286.744.252,00	1.410.395.000,00	10,62	593.586.332,00	137,61
4	Belanja Transfer	258.613.894.650,00	214.301.170.602,00	82,87	233.456.121.038,00	(8,20)
Jumlah		**2.353.335.150.532,00**	**2.024.099.912.792,56**	**86,01**	**1.857.618.421.858,00**	**8,96**

Realisasi Belanja pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp2.024.099.912.792,56 atau 86,01 % dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Pergeseran sebesar Rp2.353.335.150.532,00. Realisasi Belanja tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp166.481.490.934,56 atau 8,96% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.857.618.421.858,00. Secara grafik, dapat dilihat komposisi sebagai berikut.



Gambar 1.4 Grafik Komposisi Realisasi Belanja TA 2025

		2025		2024
		Anggaran (Rp)	**Realisasi (Rp)**	**Realisasi (Rp)**
5.1.2.1.	**Belanja Operasi**	**1.598.559.706.191,00**	**1.399.691.309.974,56**	**1.210.683.466.424,00**

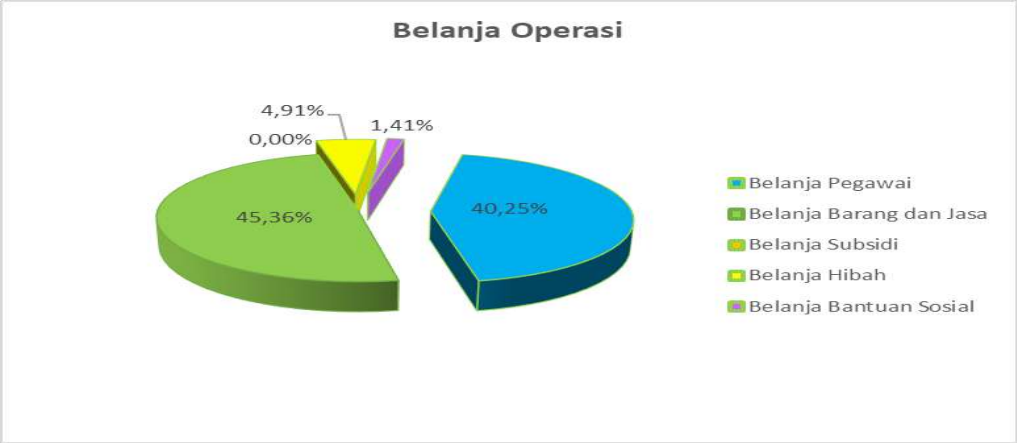
Belanja Operasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dibagi menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.17 Realisasi Belanja Operasi TA 2025 dan 2024

No	Uraian	2025			2024	Kenaikan / Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	709.333.333.249,00	605.290.692.945,00	85,33	529.887.769.556,00	14,23
2	Belanja Barang dan Jasa	783.538.891.750,00	708.318.667.192,32	90,40	597.206.622.002,25	18,61
3	Belanja Subsidi	300.000.000,00	62.515.221,24	20,84	388.104.230,75	(83,89)
4	Belanja Hibah	72.125.481.192,00	53.667.554.616,00	74,40	64.587.820.635,00	(16,91)
5	Belanja Bantuan Sosial	33.262.000.000,00	32.351.880.000,00	97,26	18.613.150.000,00	73,81
Jumlah		**1.598.559.706.191,00**	**1.399.691.309.974,56**	**87,56**	**1.210.683.466.424,00**	**15,61**

Realisasi Belanja Operasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.399.691.309.974,56 atau 87,56% dari anggaran sebesar Rp1.598.559.706.191,00. Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami

kenaikan sebesar Rp189.007.843.550,56 atau 15,61% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.210.683.466.424,00.



Gambar 5.1.3 Grafik Komposisi Realisasi Belanja Operasi TA 2025

		2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.2.1.1.	Belanja Pegawai	709.333.333.249,00	605.290.692.945,00	529.887.769.556,00

Belanja Pegawai sebesar Rp605.290.692.945,00 merupakan realisasi pengeluaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama tahun 2025 sebagai kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan berlaku yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas pekerjaan dilaksanakan. Realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2025 sebesar Rp605.290.692.945,00 atau 85,33% dari anggaran sebesar Rp709.333.333.249,00. Realisasi tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp75.402.923.389,00 atau 14,23% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp529.887.769.556,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.18 Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024

No	Uraian	2025			2024	Kenaikan / Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	405.363.486.724,00	346.575.421.852,00	85,49	331.487.121.536,00	4,55
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	268.073.439.345,00	220.180.813.443,00	82,13	89.115.668.849,00	147,07
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	81.062.695.227,00	(100,00)

No	Uraian	2025			2024	Kenaikan / Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	20.667.626.890,00	19.914.060.860,00	96,35	17.445.450.431,00	14,15
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	3.294.237.500,00	1.946.197.159,00	59,07	890.970.444,00	118,44
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	912.480.000,00	818.538.624,00	89,70	708.357.892,00	15,55
7	Belanja Pegawai BLUD	11.022.062.790,00	15.855.661.007,00	143,85	9.177.505.177,00	72,77
Jumlah		**709.333.333.249,00**	**605.290.692.945,00**	**85,33**	**529.887.769.556,00**	**14,23**

Rincian Realisasi Belanja Pegawai Per SKPD TA 2025 dapat dilihat di **Lampiran 1.2**.

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan tahun anggaran 2025 sebesar Rp346.575.421.852,00 atau mencapai 85,49% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Pergeseran sebesar Rp405.363.486.724,00. Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp15.088.300.316,00 atau 4,55% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp331.487.121.536,00.

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS tahun anggaran 2025 sebesar Rp220.180.813.443,00 atau mencapai 82,13% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Pergeseran sebesar Rp268.073.439.345,00. Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp131.065.144.594,00 atau 147,07% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp89.115.668.849,00. Belanja Tambahan Penghasilan mengalami kenaikan sebesar Rp131.065.144.594,00 atau 147,07% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2024 disebabkan oleh adanya penyesuaian kebijakan penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai, serta adanya penyatuan/reklasifikasi komponen tambahan penghasilan yang pada tahun 2024 dianggarkan pada sub-rekening yang terpisah.

Realisasi anggaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN tahun anggaran 2025 tidak ada dan tidak ada ditetapkan pada APBD Pergeseran. Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 100% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 yaitu sebesar Rp81.062.695.227,00.

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD tahun anggaran 2025 sebesar Rp19.914.060.860,00 atau mencapai 96,35% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Pergeseran sebesar Rp20.667.626.890,00. Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.468.610.429,00 atau 14,15% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp17.445.450.431,00.

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.946.197.159,00 atau mencapai 59,07% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Pergeseran sebesar Rp3.294.237.500,00. Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan

sebesar Rp1.055.226.715,00 atau 118,44% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp890.970.444,00.

Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH tahun anggaran 2025 sebesar Rp818.538.624,00 atau mencapai 89,70% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Pergeseran sebesar Rp912.480.000,00. Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp110.180.732,00 atau 15,55% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp708.357.892,00. Kenaikan ini disebabkan oleh penyesuaian alokasi insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah yang realisasinya meningkat di tahun anggaran 2025, di mana besaran insentif tersebut merupakan salah satu komponen dalam Belanja Penerimaan Lainnya KDH/WKDH sesuai regulasi yang berlaku. Realisasi PAD yang mengalami naik/ turun biasanya meruapakan dasar untuk perhitungan insentif bagi Kepala Daerah.

Realisasi Belanja Pegawai BLUD tahun anggaran 2025 sebesar Rp15.855.661.007,00 atau mencapai 143,85% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Pergeseran sebesar Rp11.022.062.790,00. Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.678.155.830,00 atau 72,77% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp9.177.505.177,00. Kenaikan realisaasi Belanja Pegawai BLUD tahun 2025 ini merupakan kenaikan yang berasal dari pembayaran gaji, honorarium, dan insentif pegawai pada RSUD H. Damanhuri (RSHD) serta 19 Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dana ini bersumber dari pendapatan operasional BLUD yang diperoleh dari layanan kesehatan masyarakat dan klaim BPJS Kesehatan pada tahun 2025.

		2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.2.1.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**783.538.891.750,00**	**708.318.667.192,32**	**597.206.622.002,25**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa merupakan realisasi pengeluaran yang terdiri dari Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Barang Jasa BOSP, Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas dan Belanja Barang dan Jasa BLUD. Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2025 sebesar Rp708.318.667.192,32 atau 90,40% dari anggaran sebesar Rp783.538.891.750,00 Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp111.112.045.190,07 atau 18,61% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp597.206.622.002,25 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.19 Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024

No	Uraian	2025			2024	Kenaikan / Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Barang	193.202.094.016,00	172.829.508.018,50	89,46	88.137.667.448,17	96,09
2	Belanja Jasa	317.304.989.744,00	262.747.883.940,82	82,81	221.379.726.044,30	18,69

No	Uraian	2025			2024	Kenaikan / Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
3	Belanja Pemeliharaan	31.913.419.351,00	24.096.764.089,00	75,51	10.740.792.212,79	124,35
4	Belanja Perjalanan Dinas	67.300.108.070,00	57.389.435.926,00	85,27	77.581.482.810,99	(26,03)
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.982.537.479,00	10.390.194.890,00	69,35	7.892.327.937,00	31,65
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	24.058.084.614,00	(100,00)
7	Belanja Barang dan Jasa BOSP	23.939.510.000,00	23.376.269.011,00	97,65	0,00	0,00
8	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	16.712.253.000,00	6.655.276.625,00	39,82	7.557.654.993,00	(11,94)
9	Belanja Barang dan Jasa BLUD	118.183.980.090,00	150.833.334.692,00	127,63	159.858.885.942,00	(5,65)
Jumlah		**783.538.891.750,00**	**708.318.667.192,32**	**90,40**	**597.206.622.002,25**	18,61

Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa Per SKPD TA 2025 dapat dilihat di **Lampiran 1.2**.

Sehubungan dengan adanya pelampauan belanja barang/ jasa yaitu pada belanja barang dan jasa BLUD yang mana realisasi sebesar Rp150.833.334.692,00 atau 127,63 % dari anggaran sebesar Rp118.183.980.090,00. Pelampauan realisasi tersebut dikarenakan pihak RSUD. Damanhuri Barabai menggunakan Persentase Ambang Batas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Pasal 60 ayat (4) berbunyi ; *"Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD".* Oleh karena itu, Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diperbolehkan melampaui batas pagu/ambang batas anggran dalam rencana Bisnis dan anggran (RBA) dan Dokumen Pelaksanaan anggran (DPA). Hal ini merupakan bentuk fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD agar kelangsungan pelayanan kepada masyaraka tetap terjamin.

		2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.2.1.3.	**Belanja Subsidi**	**300.000.000,00**	**62.515.221,24**	**388.104.230,75**

Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran pemerintah daerah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Subsidi dapat diberikan dalam bentuk uang, barang, sembako, hibah, atau keringanan biaya.

Belanja Subsidi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dikelola oleh SKPD Dinas Perdagangan. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan terkait pengelolan Belanja Subsidi yaitu mengadakan pasar murah untuk masyarakat yang membutuhkan, dan juga dilaksanakan untuk

pembayaran subsidi bunga pinjaman KUR dalam bentuk uang kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 180/08-PKS//HST-TKKSD/2023 dan Nomor 20/PKS/OPR-BRB/KC/2023 tanggal 26 September 2023 yang bertujuan untuk membantu penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa bunga kepada pelaku usaha di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

		2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.2.1.4.	**Belanja Hibah**	**72.125.481.192,00**	**53.667.554.616,00**	**64.587.820.635,00**

Belanja Hibah merupakan belanja hibah dalam bentuk uang/barang kepada Pemerintah Pusat, Badan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Belanja Hibah Dana BOS, Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dan Belanja Hibah Dana BOSP. Realisasi Belanja Hibah tahun anggaran 2025 sebesar Rp53.667.554.616,00 atau 74,40% dari anggaran sebesar Rp72.125.481.192,00. Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp10.920.266.019,00 atau 16,91% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp64.587.820.635,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.20 Belanja Hibah TA 2025

No	Uraian	2025			2024	Kenaikan / Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	33.017.822.000,00	21.753.373.731,00	65,88	42.487.311.181,00	(48,80)
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	29.240.663.192,00	21.982.361.613,00	75,17	12.734.101.235,00	72,63
3	Belanja Hibah Dana BOS	1.366.360.000,00	1.446.373.751,00	105,85	1.337.280.349,00	8,16
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.546.710.000,00	1.546.710.000,00	100,00	1.525.574.370,00	1,39
5	Belanja Hibah Dana BOSP	6.953.926.000,00	6.938.735.521,00	99,78	6.503.553.500,00	6,69
Jumlah		**72.125.481.192,00**	**53.667.554.616,00**	**74,40**	**64.587.820.635,00**	**(16,91)**

Rincian penerima hibah dapat dilihat dalam **Lampiran 2**.

Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat tahun anggaran 2025 sebesar Rp21.753.373.731,00 atau 65,88% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Pergeseran sebesar Rp33.017.822.000,00. Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar

Rp20.733.937.450,00 atau 48,80% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp42.487.311.181,00.

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia tahun anggaran 2025 sebesar Rp21.982.361.613,00 atau 75,17% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Pergeseran sebesar Rp29.240.663.192,00,00. Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp9.248.260.378,00 atau 72,63% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp12.734.101.235,00.

Realisasi Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.446.373.751,00 atau 105,85% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Pergeseran sebesar Rp1.366.360.000,00. Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp109.093.402,00 atau 8,16% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.337.280.349,00.

Realisasi Belanja Hibah kepada Partai Politik tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.546.710.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Pergeseran sebesar Rp1.546.710.000,00. Realisasi Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp21.135.630,00 atau 1,39% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.525.574.370,00.

Realisasi Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun anggaran 2025 sebesar Rp6.938.735.521,00 atau 99,78% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Pergeseran sebesar Rp6.953.926.000,00. Realisasi Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp435.182.021,00 atau 6,69% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp6.503.553.500,00.

		2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.2.1.5.	**Belanja Bantuan Sosial**	**33.262.000.000,00**	**32.351.880.000,00**	**18.613.150.000,00**

Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja bantuan sosial kepada Individu dan Lembaga Non Pemerintah (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya) di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2025 sebesar Rp32.351.880.000,00 atau 97,26% dari anggaran sebesar Rp33.262.000.000,00. Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp13.738.730.000,00 atau 73,81% dari realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp18.613.150.000,00 dengan rincian penerima sebagai berikut :

Tabel 5.1.21 Belanja Bantuan Sosial TA 2025

No	Uraian	2025			2024	Kenaikan / Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	28.444.000.000,00	28.288.700.000,00	99,45	13.794.750.000,00	105,07
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	4.818.000.000,00	4.063.180.000,00	84,33	4.818.400.000,00	(15,67)

No	Uraian	2025			2024	Kenaikan / Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
Jumlah		33.262.000.000,00	32.351.880.000,00	97,26	18.613.150.000,00	73,81

Rincian penerima bantuan sosial dapat dilihat dalam **Lampiran 3.**

		2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.2.2.	**Belanja Modal**	**482.874.805.439,00**	**408.697.037.216,00**	**412.885.248.064,00**

Realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2025 sebesar Rp408.697.037.216,00 atau 84,64% dari anggaran sebesar Rp482.874.805.439,00. Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.188.210.848,00 atau 1,01% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp412.885.248.064,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.22 Belanja Modal TA 2025 dan 2024

No	Uraian	2025			2024	Kenaikan / Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Modal Tanah	10.992.639.013,00	3.381.372.000,00	30,76	1.748.178.600,00	93,42
2	Belanja Peralatan dan Mesin	151.897.003.512,00	141.163.477.540,00	92,93	101.305.541.636,00	39,34
3	Belanja Gedung dan Bangunan	118.745.592.917,00	112.776.401.824,00	94,97	211.553.884.590,49	(46,69)
4	Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan	199.271.579.997,00	150.098.514.061,00	75,32	97.690.359.646,51	53,65
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.849.990.000,00	1.227.971.791,00	66,38	587.283.591,00	109,09
6	Belanja Modal Aset Lainnya	118.000.000,00	49.300.000,00	41,78	0,00	0,00
Jumlah		**482.874.805.439,00**	**408.697.037.216,00**	**84,64**	**412.885.248.064,00**	**(1,01)**

Rincian realisasi Belanja Modal Per SKPD TA 2025 dapat dilihat di **Lampiran 1.2**.

		2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.2.2.1.	**Belanja Modal Tanah**	**10.992.639.013,00**	**3.381.372.000,00**	**1.748.178.600,00**

Realisasi Belanja Modal Tanah tahun 2025 sebesar Rp3.381.372.000,00 atau 30,76% dari anggaran Rp10.992.639.013,00. Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.633.193.400,00 atau 93,42% dibandingkan tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.748.178.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.23 Belanja Modal Tanah TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	2025			2024	Kenaikan / Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Modal Tanah	8.390.902.900,00	3.381.372.000,00	40,30	1.748.178.600,00	93,42
2	Belanja Modal Tanah BLUD	2.601.736.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**10.992.639.013,00**	**3.381.372.000,00**	**30,76**	**1.748.178.600,00**	**93,42**

Rincian realisasi Belanja Modal Tanah Per SKPD TA 2025 dapat dilihat di **Lampiran 1.2**.

		2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.2.2.2.	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**151.897.003.512,00**	**141.163.477.540,00**	**101.305.541.636,00**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2025 sebesar Rp141.163.477.540,00 atau 92,93% dari anggaran sebesar Rp151.897.003.512,00. Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp39.857.935.904,00 atau 39,34% dari realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp101.305.541.636,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.24 Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	2025			2024	Kenaikan / Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Modal Alat Besar	14.710.369.600,00	5.166.886.138,00	35,12	11.929.547.000,00	(56,69)
2	Belanja Modal Alat Angkutan	19.852.172.400,00	18.695.117.856,00	94,17	13.997.891.000,00	33,56
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	26.435.000,00	17.602.000,00	66,59	48.662.000,00	(63,83)
4	Belanja Modal Alat Pertanian	12.600.000,00	11.766.000,00	93,38	39.750.000,00	(70,40)
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.526.802.738,00	5.963.624.774,00	91,37	7.288.740.092,00	(18,18)
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.487.909.100,00	3.187.108.585,00	91,38	2.543.237.479,00	25,32

No	Uraian	2025			2024	Kenaikan / Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	69.728.643.304,00	69.268.448.469,00	99,34	35.626.969.905,00	94,43
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	5.241.077.850,00	4.740.776.208,00	90,45	3.867.023.550,00	22,59
9	Belanja Modal Komputer	16.173.855.900,00	15.731.898.922,00	97,27	14.004.695.833,00	12,33
10	Belanja Modal Alat Eksplorasi	506.629.500,00	372.145.286,00	73,46	398.065.500,00	(6,51)
11	Belanja Modal Alat Pengeboran	722.000.000,00	714.840.000,00	99,01	41.770.000,00	1.611,37
12	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	1.984.000.000,00	1.969.273.200,00	99,26	0,00	0,00
13	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	87.500.000,00	13.500.000,00	15,43	48.075.000,00	(71,92)
14	Belanja Modal Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	31.879.600,00	(100,00)
15	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0.00	0,00	58.700.000,00	(100,00)
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	12.837.008.120,00	15.310.490.102,00	119,27	11.380.534.677,00	34,53
Jumlah		**151.897.003.512,00**	**141.163.477.540,00**	**92,93**	**101.305.541.636,00**	**39,34**

Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per SKPD TA 2025 dapat dilihat di **Lampiran 1.2**

		2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.2.2.3.	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**118.745.592.917,00**	**112.776.401.824,00**	**211.553.884.590,49**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2025 sebesar Rp112.776.401.824,00 atau 94,97% dari anggaran sebesar Rp118.745.592.917,00. Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp98.777.482.766,49 atau 46,69% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp211.553.884.590,49.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagai berikut.

Tabel 5.1.25 Belanja Gedung dan Bangunan TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	2025			2024	Kenaikan / Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	80.353.762.805,00	75.052.912.208,00	93,40	204.722.469.550,49	(63,34)
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.326.910.800,00	1.123.482.980,00	84,66	2.059.419.065,00	(45,45)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	37.064.919.312,00	36.600.006.636,00	98,74	4.771.995.975,00	666,97
Jumlah		**118.745.592.917,00**	**112.776.401.824,00**	**94,97**	**211.553.884.590,49**	**(46,69)**

Rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per SKPD TA 2025 dapat dilihat di **Lampiran 1.2**

		2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.2.2.4.	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**199.271.579.997,00**	**150.098.514.061,00**	**97.690.359.646,51**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi tahun 2025 sebesar Rp150.098.514.061,00 atau 75,32% dari anggaran sebesar Rp199.271.579.997,00. Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp52.408.154.414,49 55 atau 53,65% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp97.690.359.646,51. Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagai berikut:

Tabel 5.1.26 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	2025			2024	Kenaikan / Penurunan
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	184.895.833.004,00	141.188.110.359,00	76,36	93.409.350.080,00	51,15
2	Belanja Modal Bangunan Air	11.326.137.500,00	6.041.234.839,00	53,34	1.644.762.672,51	267,30
3	Belanja Modal Instalasi	0,00	0,00	0,00	2.016.125.000,00	(100,00)
4	Belanja Modal Jaringan	178.125.000,00	83.746.186,00	47,02	148.121.894,00	(43,46)
5	Belanja Modal Jalan, Jaringan,	2.871.484.493,00	2.785.422.677,00	97,00	472.000.000,00	490,13

No	Uraian	2025			2024	Kenaikan / Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
	dan Irigasi BLUD					
Jumlah		**199.271.579.997,00**	**150.098.514.061,00**	**75,32**	**97.690.359.646,51**	**53,65**

Rincian realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Per SKPD TA 2025 dapat dilihat di **Lampiran 1.2**.

		2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.2.2.5.	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	**1.849.990.000,00**	**1.227.971.791,00**	**587.283.591,00**

Realisasi Belanja Modal Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2025 sebesar Rp1.227.971.791,00 atau 66,38% dari anggaran Rp1.849.990.000,00. Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp640.688.200,00 atau 109,09% dari realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp587.283.591,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.27 Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	2025			2024	Kenaikan / Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.449.990.000,00	829.099.951,00	57,17	552.283.591,00	50,12
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	400.000.000,00	398.871.840,00	99,71	35.000.000,00	1.039,63
Jumlah		**1.849.990.000,00**	**1.227.971.791,00**	**66,38**	**587.283.591,00**	**109,09**

Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per SKPD TA 2025 dapat dilihat di **Lampiran 1.2.**

		2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.2.2.6.	**Belanja Modal Aset Lainnya**	**118.000.000,00**	**49.300.000,00**	**0,00**

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp49.300.000,00 atau 41,78% dengan anggaran pergeseran sebesar Rp118.000.000,00. Untuk realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp0,00. Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp49.300.000,00 merupakan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

.

		2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.2.3.	**Belanja Tak Terduga**	**13.286.744.252,00**	**1.410.395.000,00**	**593.586.332,00**

Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tak terduga lainnya. Realisasi Belanja Tak Terduga tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.410.395.000,00 atau 10,62% dari anggaran sebesar Rp13.286.744.252,00. Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp816.808.668,00 atau 137,61% dari realisasi Belanja Tidak Terduga tahun anggaran 2024 Rp593.586.332,00.

		2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.2.3.1	**Belanja Tak Terduga**	**13.286.744.252,00**	**1.410.395.000,00**	**593.586.332,00**

Realisasi Belanja Tak Terduga tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.410.395.000,00 atau 10,62% dari anggaran sebesar Rp13.286.744.252,00. Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp816.808.668,00 atau 137,61% dari realisasi Belanja Tidak Terduga tahun anggaran 2024 Rp593.586.332,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.28 Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2025 dan 2024

No	Uraian	2025			2024	Kenaikan / Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Tidak Terduga	13.286.744.252,00	1.410.395.000,00	10,62	593.586.332,00	137,61
Jumlah		**13.286.744.252,00**	**1.410.395.000,00**	**10,62**	**593.586.332,00**	**137,61**

Rincian realisasi Belanja Tidak Terduga dapat dilihat pada **Lampiran 4**

		2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.2.4.	**Belanja Transfer**	**258.613.894.650,00**	**214.301.170.602,00**	**233.456.121.038,00**

Belanja Transfer merupakan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada Pemerintah Desa. Realisasi Belanja Transfer tahun anggaran 2025 Rp214.301.170.602,00 atau 82,87% dari anggaran sebesar Rp258.613.894.650,00. Realisasi tahun anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp19.154.950.436,00 atau 8,20% dibandingkan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 sebesar Rp233.456.121.038,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.29 Belanja Transfer TA 2025 dan 2024

No	Uraian	2025			2024	Kenaikan / Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bagi Hasil	4.775.402.521,00	3.839.426.798,00	80,40	2.547.308.000,00	50,72
2	Belanja Bantuan Keuangan	253.838.492.129,00	210.461.743.804,00	82,91	230.908.813.038,00	(8,86)
Jumlah		**258.613.894.650,00**	**214.301.170.602,00**	**82,87**	**233.456.121.038,00**	**(8,20)**

		2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.2.4.1.	**Belanja Bagi Hasil**	**4.775.402.521,00**	**3.839.426.798,00**	**2.547.308.000,00**

Realisasi Belanja Bagi Hasil tahun anggaran 2025 sebesar Rp 3.839.426.798,00 atau 80,40% dari anggaran Rp4.775.402.521,00. Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.292.118.798,00 atau 50,72% dari realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.547.308.000,00. Belanja Bagi Hasil tahun anggaran 2025 terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.30 Belanja Bagi Hasil TA 2025 dan 2024

No	Uraian	2025			2024	Kenaikan / Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3.368.982.379,00	2.927.434.531,00	86,89	1.492.521.000,00	96,14
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.406.420.142,00	911.992.267,00	64,84	1.054.787.000,00	(13,54)
Jumlah		**4.775.402.521,00**	**3.839.426.798,00**	**80,40**	**2.547.308.000,00**	**50,72**

		2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.2.4.1.1.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.368.982.379,00	2.927.434.531,00	1.492.521.000,00

Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa tahun anggaran 2025 sebesar Rp2.927.434.531,00 atau 86,89% dari anggaran Rp3.368.982.379,00. Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.434.913.531,00 atau 96,14% dari realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.492.521.000,00.

		2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.2.4.1.2.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	1.406.420.142,00	911.992.267,00	1.054.787.000,00

Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa tahun anggaran 2025 sebesar Rp911.992.267,00 atau 64,84% dari anggaran Rp1.406.420.142,00. Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp142.794.733,00 atau 13,54% dari realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.054.787.000,00.

		2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.2.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	253.838.492.129,00	210.461.743.804,00	230.908.813.038,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan tahun anggaran 2025 sebesar Rp210.461.743.804,00 atau 82,91% dari anggaran Rp253.838.492.129,00. Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp20.447.069.234,00 atau 8,86% dari realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp230.908.813.038,00. Belanja Bantuan Keuangan tahun anggaran 2025 terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.31 Belanja Bantuan Keuangan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	2025			2024	Kenaikan / Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau	251.838.492.129,00	210.004.267.004,00	83,39	229.308.813.038,00	(8,42)

No	Uraian	2025			2024	Kenaikan / Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
	Kabupaten/Kota kepada Desa					
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	2.000.000.000,00	457.476.800,00	22,87	1.600.000.000,00	(71,41)
Jumlah		**253.838.492.129,00**	**210.461.743.804,00**	**82,91**	**230.908.813.038,00**	**(8,86)**

		2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.2.4.2.1.	**Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa**	**251.838.492.129,00**	**210.004.267.004,00**	**229.308.813.038,00**

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Desa tahun 2025 sebesar Rp210.004.267.004,00 atau 83,39% dengan anggaran pergeseran sebesar Rp251.838.492.129,00. Realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp19.304.546.034,00 atau 8,42% dibandingkan dengan realisasi anggran Tahun 2024 sebesar Rp 229.308.813.038,00.

		2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.2.4.2.2.	**Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00. Pemerintah Daerah tidak menganggarkan Belanja Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi baik pada tahun anggaran 2025 maupun pada tahun 2024.

		2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.2.4.2.3.	**Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota Kepada Desa**	**2.000.000.000,00**	**457.476.800,00**	**1.600.000.000,00**

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa tahun 2025 sebesar Rp457.476.800,00 atau 22,87% dari anggaran Rp2.000.000.000,00. Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.142.523.200,00 atau 71,41% dari realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.600.000.000,00.

		2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.3.	**Surplus/Defisit**	**(296.241.632.920,34)**	**(152.186.510.337,90)**	**(60.236.636.281,33)**

Surplus/Defisit merupakan selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah TA 2025 defisit sebesar Rp152.186.510.337,90 atau 51,37% dari anggaran defisit Rp296.241.632.920,34. Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2024 yang surplus sebesar Rp91.949.874.056,57 atau 152,65% dari realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp60.236.636.281,33. Perhitungan surplus/defisit pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai berikut :

Tabel 5.1.32 Surplus/Defisit TA 2025 dan 2024

No	Uraian	2025			2024	Kenaikan / Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan	2.057.093.517.611,66	1.871.913.402.454,66	91,00	1.797.381.785.576,67	4,15
2	Belanja	2.353.335.150.532,00	2.024.099.912.792,56	86,01	1.857.618.421.858,00	8,96
Surplus/Defisit		**(296.241.632.920,34)**	**(152.186.510.337,90)**	**51,37**	**(60.236.636.281,33)**	**152,65**

		2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.4.	**Pembiayaan *Netto***	**296.241.632.920,34**	**306.241.632.920,34**	**366.478.269.201,67**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Daerah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan *Netto* adalah selisih antara penerimaan

pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Realisasi Pembiayaan *Netto* tahun anggaran 2025 sebesar Rp306.241.632.920,34 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Pergeseran sebesar Rp306.241.632.920,34. Realisasi Pembiayaan *Netto* tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp60.236.636.281,33 atau 16,44% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp366.478.269.201,67. Pembiayaan *Netto* terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.33 Rincian Pembiayaan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	2025			2024	Kenaikan / Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Penerimaan Pembiayaan	306.241.632.920,34	306.241.632.920,34	100,00	366.478.269.201,67	(16,44)
2	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan *Netto*		**296.241.632.920,34**	**306.241.632.920,34**	**103,38**	**366.478.269.201,67**	**(16,44)**

		2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.4.1.	**Penerimaan Pembiayaan**	**306.241.632.920,34**	**306.241.632.920,34**	**366.478.269.201,67**

Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun anggaran 2025 sebesar Rp306.241.632.920,34 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Pergeseran sebesar Rp306.241.632.920,34 Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp60.236.636.281,33 atau 16,44% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp366.478.269.201,67.

Penerimaan Pembiayaan mencakup penerimaan Kas Daerah yang berasal dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dan Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat.

Tabel 5.1.34 Rincian Penerimaan Pembiayaan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	2025			2024	Kenaikan / Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	306.241.632.920,34	306.241.632.920,34	100,00	366.477.908.065,67	(16,44)
2	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	361.136,00	(100,00)

No	Uraian	2025			2024	Kenaikan / Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
	kepada Masyarakat					
Penerimaan Pembiayaan		306.241.632.920,34	306.241.632.920,34	100,00	366.478.269.201,67	(16,44)

		2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.4.1.1.	**SiLPA Tahun Sebelumnya**	**306.241.632.920,34**	**306.241.632.920,34**	**366.477.908.065,67**

Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2025 yang dialokasikan untuk pembiayaan pada tahun anggaran 2025. Realisasi penggunaan SiLPA tahun 2025 adalah Rp306.241.632.920,34 atau 100% dari anggaran sebesar Rp306.241.632.920,34. Realisasi tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp60.236.275.145,33 atau 16,44% dibandingkan realisasi penggunaan SiLPA tahun anggaran 2024 adalah Rp366.477.908.065,67.

		2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.4.1.2.	**Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat**	**0,00**	**0,00**	**361.136,00**

Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat merupakan penerimaan berdasarkan dokumen piutang yang sudah diserahkan ke KPKNL Banjarmasin untuk dilakukan penghapusan. Seiring dengan proses penanganan dari KPKNL Banjarmasin yang dilaksanakan ke masing-masing peternak, pada tahun anggaran 2025 tidak ada realisasi dan pagu anggaran pergeseran yang ditetapkan. Sedangkan realisasi tahun anggran 2024 sebesar Rp361.136,00.

		2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.4.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**10.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Tidak terdapat realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun anggaran 2025, sedangkan pagu anggaran pergeseran tahun 2025 sebesar Rp10.000.000.000,00. Untuk Tahun 2024 juga tidak terdapat realisasi Pengeluaran Pembiayaan.

		2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.4.2.1.	**Penyertaan Modal Daerah**	**10.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Realisasi Penyertaan Modal Daerah Rp0,00 dari pagu anggaran Tahun 2025 yang ditetapkan pada APBD Pergeseran Rp10.000.000.000,00. Untuk Tahun 2024 juga tidak terdapat realisasi Penyertaan Modal Daerah.

		2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.4.2.2.	**Pemberian Pinjaman Daerah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Realisasi Pemberian Pinjaman Daerah Rp0,00 dari pagu anggaran Tahun 2025 yang ditetapkan pada APBD Pergeseran Rp0,00. Untuk Tahun 2024 juga tidak terdapat realisasi Pemberian Pinjaman Daerah.

		2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.5.	**SiLPA**	**0,00**	**154.055.122.582,44**	**306.241.632.920,34**

Nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) diperoleh dari realisasi Pendapatan sebesar Rp1.871.913.402.454,66 dikurangi Realisasi Belanja sebesar Rp2.024.099.912.792,56 diperoleh defisit sebesar Rp152.186.510.337,90, ditambah dengan Pembiayaan *Netto* senilai Rp306.241.632.920,34 sehingga didapat Nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan sebesar Rp154.055.122.582,44.

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) TA 2025 sebesar Rp154.055.122.582,44 yang ada di Rekening Kas Umum Daerah merupakan sebagian uang sisa dari Dana Transfer dan dana lainnya per 31 Desember 2025. SiLPA TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp152.186.510.337,90 atau 49,69% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2024 sebesar Rp306.241.632.920,34 dengan rincian:

Tabel 5.1.35 Rincian SiLPA sampai dengan 31 Desember 2025

No	Uraian		Jumlah
1)	**Sisa Dana Alokasi Khusus Tahun 2010 s.d. 2023 :**		**41.298.183.581,00**
	1. Tahun 2010	3.378.530.250,00	
	2. Tahun 2011	1.928.627.150,00	

No	Uraian		Jumlah
	3. Tahun 2012	1.438.209.901,00	
	4. Tahun 2013	4.350.563.183,00	
	5. Tahun 2014	5.526.599.481,00	
	6. Tahun 2015	9.198.057.285,00	
	7. Tahun 2016	13.097.365.775,00	
	8. Tahun 2018	4.625.702,00	
	9. Tahun 2019	509.666.729,00	
	10. Tahun 2020	83.875.901,00	
	11. Tahun 2021	224.401.000,00	
	12. Tahun 2022	904.815.458,00	
	13. Tahun 2023	652.845.766,00	
2)	**DAK Fisik TA 2024:**		**913.807.949,00**
	DAK Penugasan Bidang Pendidikan	733.520.205,00	
	DAK Penugasan Kesehatan dan KB	114.314.303,00	
	DAK Penugasan Air Minum	65.973.441,00	
3)	**DAK Non Fisik TA 2024:**		**1.989.785.639,00**
	1. Tunjangan Profesi Guru	277.694.000,00	
	2. Tunjangan Khusus Guru	98.359.600,00	
	3. Tambahan Penghasilan Guru	548.670.000,00	
	4. Bantuan Operasioanal Kesehatan	691.572.982,00	
	5. Akreditasi Puskesmas	0,00	
	6. Jaminan Persalinan	0,00	
	7. Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	
	8. Bantuan Operasional Keluarga Berencana	59.595.420,00	
	9. Koperasi dan UMKM	31.084.500,00	

No	Uraian		Jumlah
	10. Ketahanan Pangan dan Pertanian	47.787.000,00	
	11. Penanaman Modal	0.00	
	12. Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	235.022.137,00	
4)	**Dana Insentif Daerah**		**3.641.740.306,00**
	1. Dana Insentif Daerah (Tahun 2021)	422.695.813,00	
	2. Dana Insentif Daerah (Tahun 2022)	1.940.493.844,00	
	3. Dana Insentif Daerah (Tahun 2023)	410.401.904,00	
	4. Dana Insentif Fiskal (Tahun 2024)	868.148.745,00	
5)	**DBH dan DAU**		**94.350.779.559,78**
	1. Dana Bagi Hasil	33.621.726.790,79	
	2. DBH Sawit	333.275.000,00	
	3. Dana Alokasi Umum	60.395.777.768,99	
6)	**Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya**		**199.334.500,00**
	1. DAU Penggajian Formasi PPPK	0,00	
	2. DAU Pendanaan Kelurahan	195.959.500,00	
	3. DAU Bidang Pendidikan	3.375.000,00	
	4. DAU Bidang Kesehatan	0,00	
Jumlah kas di RKUD			**142.393.631.534,78**
Kas di Bendahara Penerimaan			**0,00**
Kas di Bendahara Pengeluaran			**0,00**
Kas di BLUD			**3.381.394.356,07**
Kas Dana BOK Puskesmas			**8.067.938.355,00**
Kas Dana BOS			**212.158.336,59**
SILPA			**154.055.122.582,44**

5.2. Penjelasan Atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal tahun 2025 sebesar Rp306.241.632.920,34, yang merupakan akumulasi dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp366.484.008.061,67 yang merupakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun 2024 dikurangi dengan penggunaan SAL tahun 2024 sebesar Rp366.477.908.065,67, ditambah SILPA sebesar Rp306.241.632.920,34 dan dikurangi dengan nilai koreksi kesalahan pembukuan pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp6.099.996,00.

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA tahun 2024 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun 2025 sebesar Rp306.241.632.920,34.

5.2.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan LRA dan Belanja, serta Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2025 sebesar Rp154.055.122.582,44 berasal dari :

- Realisasi Pembiayaan *Netto* Rp 306.241.632.920,34
- Defisit Anggaran Rp(152.186.510.337,90)
- SiLPA Tahun Berjalan Rp 154.055.122.582,44

SiLPA tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp152.186.510.337,90 atau 49,69% dibandingkan dengan tahun anggaran 2024 sebesar Rp306.241.632.920,34.

Defisit anggaran tahun 2025 diperoleh dari realisasi pendapatan sebesar Rp1.871.913.402.454,66 atau 91,00% dari anggaran sebesar Rp2.057.093.517.611,66, dikurangi realisasi belanja sebesar Rp2.024.099.912.792,56 atau 86,01% dari anggaran sebesar Rp2.353.335.150.532,00.

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun 2024 Rp6.099.996,00 sedangkan tahun anggaran 2025 sebesar Rp0,00.

5.2.5. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2025 sebesar Rp154.055.122.582,44, sedangkan Saldo Akhir Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp306.241.632.920,34 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Saldo Kas di Kas Daerah	142.393.631.534,78	296.746.820.536,31
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	1.810.000,00
Saldo Kas di BLUD	3.381.394.356,07	418.615.493,64
Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	8.736.606.332,80
Saldo Kas Dana BOK Puskesmas	8.067.938.355,00	0.00
Saldo Kas Dana BOS	212.158.336,59	337.780.557,59
Jumlah	**154.055.122.582,44**	**306.241.632.920,34**

Sehubungan dengan tabel di atas untuk di informasikan bahwa Saldo Anggaran Lebih Kas di BLUD sebesar Rp3.381.394.356,07 terdiri dari :
a. BLUD RSUD sebesar Rp54.403.313,27; dan
b. BLUD PKM sebesar Rp3.326.991.042,80.

Untuk Kas Dana Kapitasi pada FKTP tahun 2024 terdiri dari Kas Dana Kapitasi pada FKTP dan Kas Dana BOK Puskesmas. Sehubungan dengan ditetapkannya 19 Puskesmas menjadi BLUD, Kas Dana Kapitasi pada FKTP direklasifikasi ke Kas Dana BOK Puskesmas. Rincian Kas BLUD Puskesmas tahun anggaran 2025 pada Lampiran 5 dan Rincian Kas Dana BOK Puskesmas Tahun Anggaran 2025 pada Lampiran 5.1.

Untuk Saldo Anggaran Lebih Kas Dana BOS sebesar Rp212.158.336,59 terdiri dari:
a. Saldo Kas di Bendahara BOS sebesar Rp 211.607.243,59; dan
b. Saldo Kas di Bendahara BOP sebesar Rp551.093,00.

5.3. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1. Aset	**3.311.776.627.903,39**	**3.181.531.833.474,85**

Aset adalah sumber daya ekonomis yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.311.776.627.903,39 dan Rp3.181.531.833.474,85, mengalami kenaikan sebesar Rp130.244.794.428,54 atau 4,09% dari tahun 2024. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1. Aset Lancar	**387.803.302.170,53**	**594.414.354.910,97**

Aset Lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai dalam satu tahun periode akuntansi. Aset Lancar antara lain berupa Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang dan Persediaan.
Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp387.803.302.170,53 dan Rp594.414.354.910,97 mengalami penurunan sebesar Rp206.611.052.740,44 atau 34,76%, terdiri dari :

Tabel 5.3.1 Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	142.393.631.534,78	296.746.820.536,31
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	1.810.000,00
4	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	3.381.394.356,07	418.615.493,64
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	8.736.606.332,80
6	Kas Dana BOK Puskesmas	8.067.938.355,00	0,00
7	Kas Dana BOS	212.158.336,59	337.780.557,59
8	Piutang Pajak	2.863.342.902,34	1.894.229.800,74
9	Piutang Retribusi	9.783.493.144,81	446.865.432,50
10	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	1.035.156.500,56	4.770.922.756,58

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
11	Piutang Transfer Antar Daerah	38.379.296.665,00	34.331.460.697,00
12	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	146.933.750.000,00	215.324.003.000,00
13	Beban Dibayar Di Muka	59.968.000,00	48.224.750,00
14	Persediaan	34.693.172.375,38	31.357.015.553,81
Jumlah		**387.803.302.170,53**	**594.414.354.910,97**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah	**142.393.631.534,78**	**296.746.820.536,31**

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas di Kas Daerah adalah Kas Daerah dan Setara Kas yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah. Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. Kas di Kas Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp142.393.631.534,78 dan Rp296.746.820.536,31 mengalami penurunan sebesar Rp154.353.189.001,53 atau 52,02% dari tahun 2024 dengan rincian rekening sebagai berikut :

Tabel 5.3.2 Rincian Rekening Kas Daerah Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nomor Rekening	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1.	002.00.03.00002.5 (RKUD)	142.393.631.534,78	296.746.820.536,31
	Jumlah	**142.393.631.534,78**	**296.746.820.536,31**

Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp142.393.631.534,78 ada di Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Kalsel dengan Nomor Rekening 002.00.03.00002.5 terdiri dari :

Tabel 5.3.3 Rincian Sisa Dana Transfer dan Dana Lainnya.

No	Uraian		Jumlah
1)	**Sisa Dana Alokasi Khusus Tahun 2010 s.d. 2023 :**		**41.298.183.581,00**
	1. Tahun 2010	3.378.530.250,00	
	2. Tahun 2011	1.928.627.150,00	
	3. Tahun 2012	1.438.209.901,00	
	4. Tahun 2013	4.350.563.183,00	
	5. Tahun 2014	5.526.599.481,00	
	6. Tahun 2015	9.198.057.285,00	
	7. Tahun 2016	13.097.365.775,00	

No	Uraian		Jumlah
	8. Tahun 2018	4.625.702,00	
	9. Tahun 2019	509.666.729,00	
	10. Tahun 2020	83.875.901,00	
	11. Tahun 2021	224.401.000,00	
	12. Tahun 2022	904.815.458,00	
	13. Tahun 2023	652.845.766,00	
2)	**DAK Fisik TA 2024:**		**913.807.949,00**
	DAK Penugasan Bidang Pendidikan	733.520.205,00	
	DAK Penugasan Kesehatan dan KB	114.314.303,00	
	DAK Penugasan Air Minum	65.973.441,00	
3)	**DAK Non Fisik TA 2024:**		**1.989.785.639,00**
	1. Tunjangan Profesi Guru	277.694.000,00	
	2. Tunjangan Khusus Guru	98.359.600,00	
	3. Tambahan Penghasilan Guru	548.670.000,00	
	4. Bantuan Operasional Kesehatan	691.572.982,00	
	5. Akreditasi Puskesmas		
	6. Jaminan Persalinan		
	7. Pengawasan Obat dan Makanan		
	8. Bantuan Operasional Keluarga Berencana	59.595.420,00	
	9. Koperasi dan UMKM	31.084.500,00	
	10. Ketahanan Pangan dan Pertanian	47.787.000,00	
	11. Penanaman Modal	0,00	
	12. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	235.022.137,00	
4)	**Dana Insentif Daerah**		**3.641.740.306,00**
	1. Dana Insentif Daerah (Tahun 2021)	422.695.813,00	
	2. Dana Insentif Daerah (Tahun 2022)	1.940.493.844,00	
	3. Dana Insentif Daerah (Tahun 2023)	410.401.904,00	
	4. Dana Insentif Fiskal (Tahun 2024)	868.148.745,00	
5)	**DBH dan DAU**		**94.350.779.559,78**
	1. Dana Bagi Hasil	33.621.726.790,79	
	2. DBH Sawit	333.275.000,00	
	3. Dana Alokasi Umum	60.395.777.768,99	
6)	**Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya**		**199.334.500,00**
	1. DAU Penggajian Formasi PPPK	0,00	
	2. DAU Pendanaan Kelurahan	195.959.500,00	
	3. DAU Bidang Pendidikan	3.375.000,00	
	4. DAU Bidang Kesehatan	0,00	
Jumlah Kas di Kas Daerah			**142.393.631.534,78**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran	**0,00**	**0,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa uang persediaan yang ada pada Bendahara Pengeluaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum disetorkan per 31 Desember 2025. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Penerimaan	**0,00**	**1.810.000,00**

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan sisa uang yang ada pada Bendahara Penerimaan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum disetorkan per 31 Desember 2025. Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.810.000,00.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.4. Kas di Badan Layanan Umum Daerah	**3.381.394.356,07**	**418.615.493,64**

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan sisa uang yang ada pada BLUD di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.381.394.356,07 dan Rp418.615.493,64 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.962.778.862,43 atau 707,76% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.4 Rincian Kas di BLUD RSUD Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1.	**Kas di BLUD RSUD. H. Damanhuri Barabai :**		
	1) Rekening Bank Kalsel No.002.00.04.00551.9	52.266.185,27	347.031.289,64
	2) Rekening Bank Kalsel No. 002.00.04.00391.2		
	3) Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	2.137.128,00	71.584.204,00
	Jumlah Kas di BLUD RSUD. H. Damanhuri Barabai	**54.403.313,27**	**418.615.493,64**

Tabel 5.3.5 Rincian Kas Di BLUD 19 Puskesmas Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama Puskesmas	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	BARABAI	751.810.112,00	0,00
2	AWANG BESAR	41.922.084,80	0,00
3	PANTAI HAMBAWANG	300.045.984,00	0,00
4	DURIAN GANTANG	205.863.342,00	0,00
5	KASARANGAN	302.955.305,00	0,00
6	SUNGAI BULUH	106.415.395,00	0,00
7	HARUYAN	179.752.585,00	0,00
8	BARIKIN	121.658.867,00	0,00
9	PAGAT	104.830.283,00	0,00
10	KALIBARU	54.372.069,00	0,00
11	HANTAKAN	93.550.205,00	0,00
12	BIRAYANG	160.236.234,00	0,00
13	KUBUR JAWA	102.797.363,00	0,00
14	BATU TANGGA	43.212.781,00	0,00
15	TANDILANG	34.292.324,00	0,00
16	ILUNG	216.652.872,00	0,00
17	LIMPASU	104.022.401,00	0,00
18	PANDAWAN	241.404.440,00	0,00
19	KAMBAT UTARA	161.196.396,00	0,00
JUMLAH		**3.326.991.042,80**	**0,00**

Kas di BLUD per tanggal 31 Desember 2025 merupakan saldo pada BLUD RSUD H. Damanhuri Barabai dan BLUD 19 Puskesmas. Saldo Kas tersebut per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.381.394.356,07 merupakan saldo Kas di BLUD berdasarkan pengesahan SPB Triwulan IV tahun 2025, untuk rincian Kas di BLUD 19 Puskesmas ada pada **Lampiran 5**.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.5. Kas Dana Kapitasi pada FKTP	**0,00**	**8.736.606.332,80**

Kas Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merupakan sisa uang dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada SKPD Dinas Kesehatan yang dikelola oleh 19 Puskesmas di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp8.736.606.332,80 mengalami penurunan sebesar Rp8.736.606.332,80 dari tahun 2024, dengan uraian sebagai berikut :

a. Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp1.926.038.292,80**,** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.6 Rincian Kas Dana Kapitasi pada FKTP Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
	Kas Dana Kapitasi pada FKTP :		
1.	Rekening Bank	0,00	1.926.038.292,80
2.	Kas Tunai		
Jumlah		**0,00**	1.926.038.292,80

b. Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP dari Dana Bantuan Operasioanal Kesehatan (BOK) Puskesmas pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp6.810.568.040,00, dengan rincian umum sebagai berikut :

Tabel 5.3.7 Rincian Kas Dana Kapitasi pada FKTP dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 19 Puskesmas Tahun 2025 dan 2024

No	Nama Puskesmas	Jumlah Tahun 2025 (Rp)	Jumlah Tahun 2024 (Rp)
1	HARUYAN	0,00	482.348.000,00
2	BARIKIN	0,00	224.765.190,00
3	PAGAT	0,00	260.121.078,00
4	KALIBARU	0,00	228.051.336,00
5	HANTAKAN	0,00	247.968.500,00
6	BIRAYANG	0,00	247.524.559,00
7	KUBUR JAWA	0,00	379.696.247,00
8	BATU TANGGA	0,00	493.663.149,00
9	TANDILANG	0,00	720.820.243,00
10	BARABAI	0,00	574.976.312,00
11	AWANG BESAR	0,00	212.420.440,00
12	PANTAI HAMBAWANG	0,00	307.744.687,00
13	DURIAN GANTANG	0,00	362.822.014,00
14	KASARANGAN	0,00	470.962.919,00
15	SUNGAI BULUH	0,00	468.800.505,00
16	PANDAWAN	0,00	249.752.692,00
17	KAMBAT UTARA	0,00	377.547.196,00
18	ILUNG	0,00	261.938.390,00
19	LIMPASU	0,00	238.644.583,00
JUMLAH		**0,00**	**6.810.568.040,00**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.6. Kas Dana BOK Puskesmas	**8.067.938.355,00**	**0,00**

Kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas dikelola oleh 19 Puskesmas di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp8.067.938.355,00 dan Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.067.938.355,00 atau 100% dari tahun 2024, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.3.8 Rincian Kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 19 Puskesmas Tahun 2025 dan 2024

No	Nama Puskesmas	Jumlah Tahun 2025 (Rp)	Jumlah Tahun 2024 (Rp)
1	HARUYAN	524.570.597,00	0,00
2	BARIKIN	274.938.233,00	0,00
3	PAGAT	287.530.100,00	0,00
4	KALIBARU	281.865.100,00	0,00
5	HANTAKAN	413.628.899,00	0,00
6	BIRAYANG	460.521.265,00	0,00
7	KUBUR JAWA	463.075.122,00	0,00
8	BATU TANGGA	602.518.700,00	0,00
9	TANDILANG	664.372.702,00	0,00
10	BARABAI	418.591.103,00	0,00
11	AWANG BESAR	247.330.392,00	0,00
12	PANTAI HAMBAWANG	301.022.576,00	0,00
13	DURIAN GANTANG	566.540.844,00	0,00
14	KASARANGAN	484.438.436,00	0,00
15	SUNGAI BULUH	525.871.000,00	0,00
16	PANDAWAN	240.266.086,00	0,00
17	KAMBAT UTARA	617.549.900,00	0,00
18	ILUNG	249.363.300,00	0,00
19	LIMPASU	443.944.000,00	0,00
JUMLAH		**8.067.938.355,00**	**0,00**

Rincian Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 pada **Lampiran 5.1**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.7. Kas Dana BOS	**212.158.336,59**	**337.780.557,59**

Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan saldo kas dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD dan SMP Negeri dan Kas Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOP) Negeri pada Dinas

Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp212.158.336,59 dan Rp337.780.557,59 mengalami penurunan sebesar Rp125.622.221,00 atau 37,19% dari tahun 2024, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.3.9 Rincian Kas Dana BOS Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
	Kas Dana BOS :		
1.	SD	168.526.234,59	235.680.146,59
2.	SMP	43.081.009,00	85.064.946,00
3.	PAUD	551.093,00	1.660.181,00
4.	Kesetaraan	0,00	15.375.284,00
Jumlah		**212.158.336,59**	**337.780.557,59**

Rincian saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2025 disajikan dalam **Lampiran 6.**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.10. Piutang Pajak	**8.487.686.609,00**	**7.024.609.258,00**

Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarannya dalam Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar. Piutang Pajak Daerah dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :

a. Piutang PBB-P2
b. Piutang Pajak Restoran
c. Piutang PBJT - Tenaga Listrik

Tabel 5.3.10 Piutang Pajak Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Pajak	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1.	Piutang PBB - P2	7.564.949.900,00	7.019.139.137,00
	Penyisihan Piutang PBB-P2	(5.619.730.023,11)	(5.130.352.106,65)
	Piutang Pajak *Netto* PBB-P2	**1.945.219.876,89**	**1.888.787.030,35**
2.	Piutang Pajak Restoran	15.284.939,00	5.470.121,00
	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(76.424,70)	(27.350,61)
	Piutang Pajak *Netto* Restoran	**15.208.514,30**	**5.442.770,39**
3.	Piutang PBJT - Tenaga Listrik	907.451.770,00	0.00
	Penyisihan Piutang PBJT - Tenaga Listrik	(4.537.258,85)	(0,00)
	Piutang PBJT *Netto* -Tenaga Listrik	**902.914.511,15**	**0,00**

No	Jenis Pajak	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Jumlah Piutang Pajak		8.487.686.609,00	7.024.609.258,00
Jumlah Penyisihan Piutang Pajak		(5.624.343.706,66)	(5.130.379.457,26)
Jumlah Piutang Pajak *Netto*		2.863.342.902,34	1.894.229.800,74

Piutang Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp8.487.686.609,00 dan Rp7.024.609.258,00, mengalami kenaikan sebesar Rp1.463.077.351,00 atau 20,83% dari tahun 2024.

Piutang Pajak *Netto* adalah selisih antara Piutang Pajak setelah dikurangi dengan penyisihan Piutang Pajak. Piutang Pajak per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.487.686.609,00 dikurangi Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp5.624.343.706,66, sehingga diperoleh saldo Piutang Pajak *Netto* tahun 2025 sebesar Rp2.863.342.902,34.

Piutang Pajak *Netto* adalah selisih antara Piutang Pajak setelah dikurangi dengan penyisihan Piutang Pajak. Piutang Pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.024.609.258,00 dikurangi Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp5.130.379.457,26, sehingga diperoleh saldo Piutang Pajak *Netto* tahun 2024 sebesar Rp1.894.229.800,74.

Penjelasan masing-masing Piutang Pajak sebagai berikut :

a. Piutang PBB-P2

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.564.949.900,00 merupakan Piutang PBB-P2 berdasarkan ketetapan pajak yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten hulu sungai tengah mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2024. Piutang PBB-P2 tahun 2025 sebesar Rp7.564.949.900,00 diperoleh dari jumlah piutang PBB-P2 tahun 2024 (Piutang awal 2024) sebesar Rp7.019.139.137,00 setelah ditambah dengan ketetapan piutang tahun 2025 berdasarkan Keputusan Kepala BPPRD No.973/6/BPPRD/TAHUN 2025 tanggal 6 Januari 2025 sebesar Rp1.937.862.212,00 dan dikurangi realisasi penerimaan piutang PBB-P2 selama tahun 2025 sebesar Rp1.392.051.449,00. Adapun rincian mutasi piutang pajak per tahun yaitu sebagai berikut :

Tabel 5.3.11 Mutasi Piutang PBB-P2

No.	Tahun	Piutang Awal 31 Des 2024	Mutasi Tambah Ketetapan	Mutasi Kurang Realisasi 2025	Piutang Akhir 31 Des 2025
1	2012	978.392.749,00		297.754,00	978.094.995,00
2	2013	1.059.929.993,00		43.253,00	1.059.886.740,00
3	2014	490.799.943,00		25.341,00	490.774.602,00
4	2015	471.973.690,00		209.162,00	471.764.528,00
5	2016	324.338.918,00		1.723.705,00	322.615.213,00
6	2017	265.022.415,00		1.173.611,00	263.848.804,00
7	2018	352.732.123,00		1.641.593,00	351.090.530,00
8	2019	346.234.534,00		2.549.454,00	343.685.080,00
9	2020	511.753.374,00		8.239.726,00	503.513.648,00

No.	Tahun	Piutang Awal 31 Des 2024	Mutasi Tambah Ketetapan	Mutasi Kurang Realisasi 2025	Piutang Akhir 31 Des 2025
10	2021	538.383.549,00		12.719.713,00	525.663.836,00
11	2022	518.631.760,00		13.873.258,00	504.758.502,00
12	2023	534.091.260,00		19.248.606,00	514.842.654,00
13	2024	626.854.829,00		41.051.321,00	585.803.508,00
14	2025		1.937.862.212,00	1.289.254.952,00	648.607.260,00
Jumlah		**7.019.139.137,00**	**1.937.862.212,00**	**1.392.051.449,00**	**7.564.949.900,00**

b. Piutang Pajak Restoran

Piutang Pajak Restoran tahun 2025 yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp15.284.939,00 dan Penyisihan Piutang Pajak Restoran sebesar Rp76.424,70 sehingga Piutang Pajak Restoran *netto* tahun 2025 adalah sebesar Rp15.208.514,30. Piutang Pajak Restoran tersebut merupakan piutang tahun 2025 yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember tahun 2025.

c. Piutang PBJT - Tenaga Listrik

Piutang PBJT - Tenaga Listrik tahun 2025 yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp907.451.770,00 dan Penyisihan Piutang PBJT - Tenaga Listrik sebesar Rp4.537.258,85 sehingga Piutang Piutang PBJT - Tenaga Listrik *netto* tahun 2025 adalah sebesar Rp902.914.511,15. Piutang PBJT - Tenaga Listrik tersebut merupakan tahun 2025 yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember tahun 2025.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.10.1. Penyisihan Piutang Pajak	**(5.624.343.706,66)**	**(5.130.379.457,26)**

Penyisihan Piutang merupakan penyisihan piutang tak tertagih yaitu taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.624.343.706,66 dan Rp5.130.379.457,26 mengalami kenaikan sebesar Rp493.964.249,40 atau 9,63% dari tahun 2025.

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengatur mengenai penyisihan piutang sebagai berikut :
- Kualitas Lancar sebesar 0,5%;

- Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari piutang Kualitas Kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan Kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan Kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak didasarkan pada beberapa kriteria, salah satunya yaitu dari umur piutang dengan kriteria sebagai berikut.

- Kualitas Lancar dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun ($X \leq 1$)
- Kualitas Kurang Lancar dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun ($1 < X \leq 2$)
- Kualitas Diragukan dengan kriteria Umur piutang di atas 2 tahun sampai dengan 5 tahun ($2 < X \leq 5$)
- Kualitas macet dengan Umur piutang diatas 5 tahun ($X > 5$)

Adapun penyisihan piutang pajak sebesar Rp5.624.343.706,66 diperhitungkan sebagai berikut.

a. Penyisihan Piutang PBB-P2

Tabel 5.3.12 Penyisihan Piutang PBB-P2

No	Tahun	Kualitas Piutang	Saldo Piutang	% Penyisihan	Penyisihan	Piutang *Netto*
1	2025	Lancar	648.607.260,00	0,50%	3.243.036,30	645.364.223,70
2	2024	Kurang Lancar	585.803.508,00	10%	58.580.350,81	527.223.157,20
3	2023	Diragukan	514.842.654,00	50%	257.421.327,00	257.421.327,00
4	2022	Diragukan	504.758.502,00	50%	252.379.251,00	252.379.251,00
5	2021	Diragukan	525.663.836,00	50%	262.831.918,00	262.831.918,00
6	2020	Macet	503.513.648,00	100%	503.513.648,00	0,00
7	2019	Macet	343.685.080,00	100%	343.685.080,00	0,00
8	2018	Macet	351.090.530,00	100%	351.090.530,00	0,00
9	2017	Macet	263.848.804,00	100%	263.848.804,00	0,00
10	2016	Macet	322.615.213,00	100%	322.615.213,00	0,00
11	2015	Macet	471.764.528,00	100%	471.764.528,00	0,00
12	2014	Macet	490.774.602,00	100%	490.774.602,00	0,00
13	2013	Macet	1.059.886.740,00	100%	1.059.886.740,00	0,00
14	2012	Macet	978.094.995,00	100%	978.094.995,00	0,00
Jumlah			**7.564.949.900,00**		**5.619.730.023,11**	**1.945.219.876,89**

b. Penyisihan Piutang Pajak Restoran

Piutang Pajak Restoran Tahun 2025 yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp15.284.939,00 dan penyisihan

piutang sebesar Rp76.424,70 Piutang Pajak Restoran termasuk dalam kualitas lancar sehingga penyisihannya adalah 0,50% dari nilai Piutang.

c. Penyisihan Piutang PBJT - Tenaga Listrik

Piutang Piutang PBJT - Tenaga Listrik Tahun 2025 yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp907.451.770,00 dan penyisihan piutang sebesar Rp4.537.258,85 Piutang Pajak PBJT - Tenaga Listrik termasuk dalam kualitas lancar sehingga penyisihannya adalah 0,50% dari nilai Piutang.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.10.2. Piutang Pajak *Netto*	**2.863.342.902,34**	**1.894.229.800,74**

Piutang Pajak *Netto* merupakan Piutang Pajak per 31 Desember 2025 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Pajak tahun 2025. Piutang Pajak *netto* per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.863.342.902,34 dan Rp1.894.229.800,74 mengalami kenaikan sebesar Rp969.113.101,60 atau 51,16% dari tahun 2024.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.11. Piutang Retribusi	**12.767.299.305,00**	**3.159.702.783,00**

Piutang Retribusi merupakan hak pemerintah daerah dari pengenaan retribusi daerah per 31 Desember 2025 yang belum diterima pembayarannya. Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp12.767.299.305,00 dan tahun 2024 sebesar Rp3.159.702.783,00, mengalami kenaikan sebesar Rp9.607.596.522,00 atau 304,07% dari tahun 2024.

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp12.767.299.305,00 dikurangi dengan penyisihan sebesar Rp2.983.806.160,19 sehingga saldo Piutang Retribusi *Netto* sebesar Rp9.783.493.144,81, sedangkan saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.159.702.783,00 dikurangi dengan penyisihan sebesar Rp2.712.837.350,50 sehingga saldo Piutang Retribusi *Netto* sebesar Rp446.865.432,50.

Tabel 5.3.13 Piutang Retribusi Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Piutang Retribusi Daerah	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
I. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan			
1.	Dinas Perdagangan		
1.a	Tunggakan sewa kios/pasar s.d Tahun 2024		
	- Pasar Murakata	338.696.783,00	557.372.783,00
	- Pasar Keramat	2.462.011.500,00	2.598.900.000,00

No	Piutang Retribusi Daerah	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		(Rp)	(Rp)
	- Pasar Birayang	0,00	0,00
	- Pasar Pantai Hambawang	0,00	3.430.000,00
1.b	Tambahan tunggakan sewa kios/pasar Tahun 2025		
	- Pasar Murakata	297.817.000,00	0,00
	- Pasar Keramat	430.387.000,00	0,00
	- Pasar Birayang	0,00	0,00
	- Pasar Pantai Hambawang	0,00	0,00
	Jumlah Piutang	3.528.912.283,00	3.159.702.783,00
	Penyisihan Piutang	(2.937.614.225,08)	(2.712.837.350,50)
	Piutang *(Netto)*	591.298.057,92	446.865.432,50
II. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah			
2.	RSUD H. Damanhuri Barabai		
2.a	Piutang Pelayanan s.d Tahun 2025		
	- Pasien Umum	0,00	0,00
	- Pasien BPJS RITL / RJTL	9.047.306.850,00	0,00
	- KSO	0,00	0,00
2.b	Piutang Pelayanan s.d Tahun 2025		
	- BPJSTK	139.110.205,00	0,00
	- SIS SERA	41.708.759,00	0,00
	- SIS ADMO	9.132.726,00	0,00
	- SIS MACO	1.128.482,00	0,00
	Jumlah Piutang	9.238.387.022,00	0,00
	Penyisihan Piutang	(46.191.935,11)	(0,00)
	Piutang *(Netto)*	9.192.195.086,89	0,00
Jumlah Piutang Retribusi Daerah		**12.767.299.305,00**	**3.159.702.783,00**
Penyisihan Piutang Retribusi		**(2.983.806.160,19)**	**(2.712.837.350,50)**
Piutang Retribusi Daerah *(Netto)*		**9.783.493.144,81**	**446.865.432,50**

Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.159.702.783,00 dan 0,00 dikelola oleh Dinas Perdagangan dan RSUD H. Damanhuri Barabai merupakan Piutang Retribusi sewa kios/pasar dan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah .

Piutang Retribusi sewa kios/pasar tahun 2024 (Piutang Awal 2025) sebesar Rp3.159.702.783,00 dikurangi dengan realisasi penerimaan s.d. tahun 2024 sebesar Rp358.994.500,00 dan ditambah dengan tunggakan tahun 2025 sebesar Rp728.204.000,00 sehingga Saldo Akhir Piutang diperoleh sebesar Rp3.528.912.283,00. Adapun rincian mutasi Piutang Retribusi dan penyisihannya pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

Tabel 5.3.14 Mutasi Piutang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan

No	Tahun Piutang	Tahun 2024	Tambahan Piutang Tahun 2025	Realisasi Penerimaan 2025	Saldo Akhir
1	2013	83.839.783,00	0,00	0,00	83.839.783,00
2	2014	10.963.000,00	0,00	0,00	10.963.000,00
3	2015	13.403.000,00	0,00	0,00	13.403.000,00
4	2016	17.194.000,00	0,00	0,00	17.194.000,00
5	2017	26.941.500,00	0,00	1.230.000,00	25.711.500,00
6	2018	32.565.000,00	0,00	1.515.000,00	31.050.000,00
7	2019	276.867.500,00	0,00	9.390.000,00	267.477.500,00
8	2020	373.487.500,00	0,00	7.995.000,00	365.492.500,00
9	2021	469.795.000,00	0,00	13.230.000,00	456.565.000,00
10	2022	548.655.000,00	0,00	26.385.000,00	522.270.000,00
11	2023	590.770.000,00	0,00	84.470.000,00	506.300.000,00
12	2024	715.221.500,00	0,00	214.779.500,00	500.442.000,00
13	2025	0,00	728.204.000,00	0,00	728.204.000,00
Jumlah		**3.159.702.783,00**	**728.204.000,00**	**358.994.500,00**	**3.528.912.283,00**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.11.1. Penyisihan Piutang Retribusi	**(2.983.806.160,19)**	**(2.712.837.350,50)**

Penyisihan Piutang merupakan penyisihan piutang tak tertagih yaitu taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.983.806.160,19 dan Rp2.712.837.350,50, mengalami kenaikan sebesar Rp270.968.809,69 atau 9,99% dari tahun 2024.

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengatur mengenai penyisihan piutang sebagai berikut.

- Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
- Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari piutang Kualitas Kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan Kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

- Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan Kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi didasarkan pada beberapa kriteria, salah satunya yaitu dari umur piutang dengan kriteria sebagai berikut :

- Kualitas Lancar dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 bulan ($X \leq 1$)
- Kualitas Kurang Lancar dengan kriteria umur piutang di atas 1 Bulan sampai dengan 3 Bulan ($1 < X \leq 3$)
- Kualitas Diragukan dengan kriteria Umur piutang 3 bulan sampai dengan 12 bulan ($3 < X \leq 12$);
- Kualitas macet dengan Umur piutang lebih dari 12 bulan ($X > 12$

Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp2.983.806.160,19 yang terdiri dari pasar grosir/pertokoan dan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp2.937.614.225,08 dan Rp46.191.935,11.
Untuk perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan sebagai berikut :

Tabel 5.3.15 Penyisihan Piutang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan

No	Tahun Piutang	Kualitas Piutang	Saldo Piutang	Penyisihan	Jumlah
1	2013	Macet	83.839.783,00	100%	83.839.783,00
2	2014	Macet	10.963.000,00	100%	10.963.000,00
3	2015	Macet	13.403.000,00	100%	13.403.000,00
4	2016	Macet	17.194.000,00	100%	17.194.000,00
5	2017	Macet	25.711.500,00	100%	25.711.500,00
6	2018	Macet	31.050.000,00	100%	31.050.000,00
7	2019	Macet	267.477.500,00	100%	267.477.500,00
8	2020	Macet	365.492.500,00	100%	365.492.500,00
9	2021	Macet	456.565.000,00	100%	456.565.000,00
10	2022	Macet	522.270.000,00	100%	522.270.000,00
11	2023	Macet	506.300.000,00	100%	506.300.000,00
12	2024	Macet	500.442.000,00	100%	500.442.000,00
13	2025	Diragukan	258.721.750,00	50%	129.360.875,00
14	2025	Kurang lancar	54.712.166,67	10%	5.471.216,67
15	2025	Lancar	414.770.083,33	0,5%	2.073.850,42
Jumlah			**3.528.912.283,00**		**2.937.614.225,08**

Dan Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp46.191.935,11. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD termasuk dalam kualitas lancar sehingga penyisihannya adalah 0,50% dari nilai piutang.
Daftar Piutang Retribusi dan Perhitungan Penyisihan Piutang Berdasarkan Umur Piutang disajikan dalam **Lampiran 7.**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.11.2. Piutang Retribusi *Netto*	**9.783.493.144,81**	**446.865.432,50**

Piutang Retribusi merupakan hak pemerintah daerah dari pengenaan retribusi daerah per 31 Desember 2025 yang belum diterima pembayarannya. Sedangkan Piutang Retribusi *Netto* adalah Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Retribusi tahun 2025. Piutang Retribusi *Netto* per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp9.783.493.144,81 dan Rp446.865.432,50, mengalami kenaikan sebesar Rp9.336.627.712,31 atau 2.089,36%.

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.12.	**Piutang Lain-lain PAD Yang Sah**	**1.040.358.292,02**	**4.795.643.473,96**

Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah merupakan hak pemerintah daerah dari kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan dalam Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, maupun Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2025 yang belum diterima pembayarannya.

Saldo Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.040.358.292,02 dan tahun 2024 sebesar Rp4.795.643.473,96 mengalami penurunan sebesar Rp3.755.285.181,94 atau 78,31% dari tahun 2024.

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.040.358.292,02 dikurangi dengan penyisihan sebesar Rp5.201.791,46 sehingga saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah *Netto* sebesar Rp1.035.156.500,56 Sedangkan saldo Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.795.643.473,96 dikurangi dengan penyisihan sebesar Rp24.720.717,38 sehingga saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto sebesar Rp4.770.922.756,58.

Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah tahun 2025 terdiri dari :

1. Piutang Jasa Pelayanan Kesehatan RSUD H.Damanhuri Barabai sebesar Rp0,00 dan penyisihan piutang sebesar Rp0,00. Piutang Jasa Pelayanan Kesehatan RSUD H. Damanhuri telah dilakukan reklasifikasi ke Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2023.
2. Piutang Kekurangan Volume Pekerjaan Aset Tetap, Atribusi Jasa Konsultan Pengawas, Belanja Bahan Bakar dan Pelumas yang tidak didukung bukti yang lengkap dan sah dan Kekurangan Volume Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp1.040.358.292,02 dan penyisihan piutang sebesar Rp5.201.791,46 Piutang Pajak ini termasuk dalam kualitas lancar sehingga penyisihannya adalah 0,50% dari nilai Piutang

Tabel 5.3.14 Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1.	**Piutang Pelayanan RSUD.H.Damanhuri Barabai**		
	- BPJS TK	0,00	0,00
	- Piutang Pasien Umum	0,00	50.046.727,00
	- Piutang Pasien BPJS RJTL/RITL	0,00	3.918.702.598,00
	Piutang Hasil Kerja Sama		
	- KSO	0,00	11.250.000,00
	Jumlah Piutang	0,00	3.979.999.325,00
	Penyisihan Piutang	(0,00)	(20.642.496,63)
	Jumlah Piutang *Netto*	0,00	3.959.356.828,37
2.	**Piutang Kekurangan Volume Pekerjaan Aset Tetap, Atribusi Jasa Konsultan Pengawas, Belanja Bahan Bakar dan Pelumas yang tidak didukung bukti yang lengkap dan sah dan Kekurangan Volume Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**		
	- Piutang Kurang Volume Pekerjaan Jalan	367.328.500,00	123.091.047,62
	- Piutang Atribusi Jasa Konsultan Pengawas	202.205.942,02	85.844.135,00
	- Piutang Kurang Volume Pekerjaan Gedung	423.450.100,00	394.994.838,51
	- Piutang Pembayaran Honorarium Tidak Sesuai Ketentuan	0,00	83.625.500,00
	- Piutang Kurang Volume Belanja Hibah	0,00	128.088.627,83
	- Piutang Belanja Bahan Bakar dan Pelumas yang tidak didukung bukti yang lengkap dan sah	17.616.250,00	0,00
	- Piutang Kurang Volume Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	29.757.500,00	0,00
	Jumlah Piutang	1.040.358.292,02	815.644.148,96
	Penyisihan Piutang	(5.201.791,46)	(4.078.220,75)
	Jumlah Piutang *Netto*	1.035.156.500,56	811.565.928,21
Jumlah Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah (1+2)		**1.040.358.292,02**	**4.795.643.473,96**
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah (1+2)		**(5.201.791,46)**	**(24.720.717,38)**
Jumlah Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah *Netto* (1+2)		**1.035.156.500,56**	**4.770.922.756,58**

Tabel 5.3.15 Rincian Piutang Kekurangan Volume Pekerjaan Aset Tetap, Atribusi Jasa Konsultan Pengawas, Belanja Bahan Bakar dan Pelumas yang tidak didukung bukti yang lengkap dan sah dan Kekurangan Volume Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Per 31 Desember 2025

No.	Nama SKPD	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	367.328.500,00	Kekurangan Volume atas 16 Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No.	Nama SKPD	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
2	Dinas Pendidikan	138.050.100,00	Kekurangan Volume atas Enam Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
3	RSUD H.Damanhuri Barabai	149.657.700,00	Kekurangan Volume atas Enam Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4	Dinas Kesehatan	135.742.300,00	Kekurangan Volume atas Empat Paket Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	59.721.580,00	Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Personel atas 26 Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi
6	Dinas Pendidikan	82.342.555,58	Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Personel atas 26 Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi
7	Dinas Kesehatan	30.145.902,44	Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Personel atas 26 Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi
8	Dinas Pertanian	29.995.904,00	Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Personel atas 26 Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.616.250,00	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Tidak Didukung Bukti yang Lengkap dan Sah
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29.757.500,00	Kekurangan Volume atas Dua Paket Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
	JUMLAH	**1.040.358.292,02**	

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.12.1. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	**(5.201.791,46)**	**(24.720.717,38)**

Penyisihan Piutang merupakan penyisihan piutang tak tertagih yaitu taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.201.791,46 dan Rp24.720.717,38 mengalami penurunan sebesar Rp19.518.925,92 atau 78,96% dari tahun 2024.

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengatur mengenai penyisihan piutang sebagai berikut :

- 0,5% dari Piutang dengan Kualitas lancar;
- 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan Kualitas Kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 50% (lima puluh per seratus) dari Piutang dengan Kualitas diragukan setelah diKurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada) ; dan
- 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan Kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain Retribusi didasarkan pada beberapa kriteria, salah satunya yaitu dari umur piutang dengan kriteria sebagai berikut.

- Kualitas Lancar,apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan ; dan
- Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.12.2. Piutang Lain-lain PAD yang Sah *Netto*	**1.035.156.500,56**	**4.770.922.756,58**

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah *Netto* sebesar Rp1.035.156.500,56 adalah Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.040.358.292,02 setelah dikurangi dengan penyisihan piutang sebesar Rp5.201.791,46.

Piutang lain-lain PAD yang Sah *Netto* Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.035.156.500,56 dan Rp4.770.922.756,58 terjadi penurunan sebesar Rp3.735.766.256,02 atau 78,30%.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.13. Piutang Transfer Antar Daerah	**38.379.296.665,00**	**34.331.460.697,00**

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan hak pemerintah daerah dari Dana Bagi Hasil Provinsi yang belum diterima oleh pemerintah daerah per 31 Desember 2025. Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Pajak-Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp38.379.296.665,00 dan Rp34.331.460.697,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.047.835.968,00 atau 11,79% dari tahun 2024 yang terdiri dari :

Tabel 5.3.16 Piutang Transfer Antar Daerah Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Piutang Dana Bagi Hasil	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	35.870.605.337,00	25.186.133.605,00
2	Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB)	0,00	5.801.350.942,00
3	Pajak Air Permukaan	16.821.742,00	17.936.477,00
4	Pajak Rokok	2.491.869.586,00	3.326.039.673,00
Jumlah		**38.379.296.665,00**	**34.331.460.697,00**

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah tahun 2025 tersebut terdiri atas sisa dana bagi hasil pajak dari Provinsi Kalimantan selatan yang belum diterima Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur yang terbit tahun 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut :

a. PBB-KB

Kurang salur berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan 100.3.3.1/0953/KUM/2025 (Periode Juli s,d September 2025) dan 100.3.3.1/0131/KUM/2026 (Periode Oktober s.d Desember 2025) tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp 24.875.195.432,00 dan 26.497.965.480,00, telah disalurkan pada tanggal 10 November 2025 sebesar Rp15.502.555.575,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.17 Piutang PBB-KB Tahun 2025 per 31 Desember 2025

No	Dasar Hukum	Periode	Nilai Pembagian (Rp)	Piutang (Rp)
1.	Peraturan Gubernur Nomor 100.3.3.1/0953/KUM/2025 TAHUN 2025	Juli s.d. September 2025	24.875.195.432,00	9.372.639.857,00
2.	Peraturan Gubernur Nomor : 100.3.3.1/0131/KUM/2026 TAHUN 2026	Oktober s.d. Desember 2025	26.497.965.480,00	26.497.965.480,00
Jumlah			**51.373.160.912,00**	**35.870.605.337,00**

b. PKB-BBNKB

Kurang salur berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan 100.3.3.1/01009/KUM/2024 (Periode Juli s.d September 2024) tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.071.431.854,00 telah disalurkan pada tanggal 09 Januari 2025 dan kurang salur berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan 100.3.3.1/0130/KUM/2025 (Periode Oktober s.d Desember 2025) tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp24.114.701.751,00 telah disalurkan pada tanggal 14 Februari 2025. Keseluruhan kurang salur telah tersalurkan 100% sehingga

tidak terdapat Piutang PKB-BBNKB per 31 Desember 2025. Rincian Piutang PKB-BBNKB sebagai berikut :

Tabel 5.3.18 Piutang PKB-BBNKB Tahun 2024 dan 2025

No	Dasar Hukum	Periode	Kurang Salur 2024 (Rp)	Kurang Salur 2025 (Rp)
1.	Peraturan Gubernur Nomor 100.3.3.1/01009/KUM/2024	Juli s.d. September 2024	1.071.431.854,00	0,00
2	Peraturan Gubernur Nomor 100.3.3.1/0130/KUM/2025	Oktober s.d. Desember 2024	24.114.701.751,00	0,00
Jumlah			**25.186.133.605,00**	**0,00**

c. Pajak Air Permukaan

Kurang salur berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan 100.3.3.1/0131/KUM/2026 (Periode Oktober s.d Desember 2025) tentang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp16.821.742,00 dan telah disalurkan pada tanggal 9 Februari 2026 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.19 Piutang Pajak Air Permukaan Tahun 2025 per 31 Desember 2025

No	Dasar Hukum	Periode	Nilai Pembagian (Rp)	Piutang (Rp)
1.	Peraturan Gubernur Nomor : 100.3.3.1/0131/KUM/2026 TAHUN 2026	Oktober s.d. Desember 2025	16.821.742,00	16.821.742,00
Jumlah			**16.821.742,00**	**16.821.742,00**

d. Pajak Rokok

Kurang salur berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan 100.3.3.1/0131/KUM/2026 (Periode Oktober s.d November 2025) tentang Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp2.491.869.586,00 dan telah disalurkan pada tanggal 09 Februari 2026 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.20 Piutang Pajak Rokok Tahun 2025 per 31 Desember 2025

No	Dasar Hukum	Periode	Nilai Pembagian (Rp)	Piutang (Rp)
1	Peraturan Gubernur Nomor : 100.3.3.1/0131/KUM/2026 TAHUN 2025	Oktober s.d. November 2025	2.491.869.586,00	2.491.869.586,00
Jumlah			**2.491.869.586,00**	**2.491.869.586,00**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.14. Piutang Transfer Pemerintah Pusat	**146.933.750.000,00**	**215.324.003.000,00**

Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp146.933.750.000,00 dan Rp215.324.003.000,00 Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp146.933.750.000,00 dicatat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 Tanggal 31 Desember 2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar dan Lebih Bayar Bagi Hasil Pada tahun anggaran 2025 terdiri dari :

Tabel 5.3.21 Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	DBH PBB	17.338.383.000,00	Penetapan Kurang Bayar 2025
2.	DBH PPh Pasal 21	5.658.108.000,00	Penetapan Kurang Bayar 2025
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	351.800.000,00	Penetapan Kurang Bayar 2025
4.	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	107.789.000,00	Penetapan Kurang Bayar 2025
5.	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	123.101.006.000,00	Penetapan Kurang Bayar 2025
6.	DBH SDA Kehutanan-PSDH	376.664.000,00	Penetapan Kurang Bayar 2025
Jumlah		**146.933.750.000,00**	

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.15 Beban Dibayar Di Muka	**59.968.000,00**	**48.224.750,00**

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban namun belum menimbulkan kewajiban. Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan.

Beban dibayar di muka per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp59.968.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.22 Beban Dibayar Di Muka per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1.	Sewa Asrama Mahasiswa di Malang Jawa Timur	22.096.750,00	18.056.625,00
2.	Sewa Asrama Mahasiswa di Yogyakarta	23.354.000,00	18.055.625,00
3.	Sewa Asrama Santri di Martapura	14.517.250,00	12.112.500,00
	Jumlah	**59.968.000,00**	**48.224.750,00**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.16. Persediaan	**34.693.172.375,38**	**31.357.015.553,81**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan :

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
   Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
   Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan dinilai dengan menggunakan sistem FIFO (*First In First Out*) atau Metode Masuk Pertama Keluar Pertama. Dengan demikian nilai persediaan akhir periode menggunakan harga pembelian terakhir secara berlapis (*layer*).
Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Persediaan merupakan aset yang berupa :

a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.

c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.

d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp34.693.172.375,38 Rp31.357.015.553,81, mengalami kenaikan sebesar Rp3.336.156.821,57 atau 10,64% dari tahun 2024. Berdasarkan laporan dari SKPD keadaan persediaan dalam kondisi baik. Rincian persediaan SKPD per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.23 Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	Jenis Barang Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah erah	Alat Tulis Kantor	1.111.000,00	3.539.000,00
		Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	451.000,00
		Bahan Cetak	0,00	9.750.000,00
		Benda Pos	500.000,00	0,00
		Kertas dan Cover	18.253.000,00	8.318.000,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Alat Listrik	1.952.000,00	0,00
		Benda Pos	1.200.000,00	0,00
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Alat Listrik	0,00	570.000,00
		Alat Tulis Kantor	8.444.000,00	6.179.500,00
		Bahan Cetak	7.045.000,00	7.000.000,00
		Bahan Lainnya	138.000,00	757.500,00
		Benda Pos	683.000,00	10.150.000,00
		Kertas dan Cover	4.163.000,00	5.838.000,00
4	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Alat Tulis Kantor	0,00	991.000,00
		Bahan Cetak	107.402.852,15	111.897.852,15
		Bahan Lainnya	0,00	770.000,00
		Kertas dan Cover	0,00	2.340.500,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kertas dan Cover	703.000,00	703.000,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Alat Tulis Kantor	10.290.000,00	10.290.000,00
		Bahan Cetak	320.728.600,00	372.544.918,00
		Kertas dan Cover	48.750.000,00	63.750.000,00
7	Dinas Kesehatan	Obat	12.798.278.663,09	11.915.662.338,83
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0,00	243.300.000,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	163.567.799,56	85.720.251,66
		Natura	1.310.315.110,52	1.195.023.128,74
		Natura dan Pakan Lainnya	15.920.000,00	175.203.160,51
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	Alat Tulis Kantor	75.400,00	4.721.300,00
		Kertas dan Cover	0,00	2.397.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	147.841.249,19
		Bahan Cetak	106.146.200,00	136.765.500,00

NO	SKPD	Jenis Barang Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
		Bahan Kimia	435.294.520,85	432.180.326,38
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	1.981.540.000,00	0,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Alat Listrik	265.000,00	0,00
		Alat Tulis Kantor	130.000,00	215.000,00
		Bahan Cetak	0,00	830.000,00
		Kertas dan Cover	2.347.000,00	1.400.000,00
13	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Alat Tulis Kantor	870.000,00	0,00
		Bahan Cetak	1.134.700,00	969.000,00
		Kertas dan Cover	1.100.000,00	0,00
14	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Benda Pos	60.000,00	1.092.000,00
		Kertas dan Cover	300.000,00	6.935.000,00
15	Dinas Pendidikan	Alat Listrik	4.637.000,00	0,00
		Alat Tulis Kantor	2.971.000,00	25.726.250,00
		Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	317.000,00	0,00
		Bahan Bakar dan Pelumas	25.900,00	0,00
		Bahan Bangunan dan Konstruksi	17.984.000,00	0,00
		Benda Pos	888.000,00	0,00
		Kertas dan Cover	9.651.000,00	19.415.000,00
		Perlengkapan Pendukung Olahraga	3.800.000,00	0,00
		Suvenir/Cendera Mata	1.600.000,00	0,00
16	Dinas Perdagangan	Alat Listrik	1.528.750,00	0,00
		Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	18.000.000,00
		Bahan Cetak	5.507.500,00	7.579.406,00
		Kertas dan Cover	638.000,00	0,00
		Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	25.404.000,00
17	Dinas Pertanian	Bahan Lainnya	157.244.410,00	336.355.237,00
18	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bahan Lainnya	47.697.539,00	88.424.667,00
19	Inspektorat	Alat Listrik	540.000,00	0,00
		Benda Pos	240.000,00	0,00
20	RSUD H. Damanhuri	Alat Listrik	157.340.500,00	34.853.400,00
		Alat Tulis Kantor	5.567.500,00	1.235.000,00
		Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	351.055.385,61	94.702.557,50
		Bahan Cetak	8.430.000,00	2.445.000,00
		Bahan Lainnya	8.045.232.339,00	7.827.034.788,00
		Isi Tabung Gas	270.677.912,10	84.194.118,10
		Natura	77.110.895,50	5.808.409,75
		Obat	8.173.779.898,00	7.812.667.795,00
21	Sekretariat Daerah	Alat Tulis Kantor	0,00	4.975.000,00
		Bahan Lainnya	0,00	50.000,00
		Kertas dan Cover	0,00	2.049.400,00
		JUMLAH	**34.693.172.375,38**	**31.357.015.553,81**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang	**200.990.545.646,26**	**194.617.496.485,75**

Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp200.990.545.646,26 dan Rp194.617.496.485,75 mengalami kenaikan sebesar Rp6.373.049.160,51 atau 3,27% dari tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.24 Rincian Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1..	Investasi Non Permanen	0,00	0,00
2..	Investasi Permanen	200.990.545.646,26	194.617.496.485,75
Jumlah		**200.990.545.646,26**	**194.617.496.485,75**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.2.1. Investasi Non Permanen	**0,00**	**0,00**

Saldo Investasi Non Permanen *Netto* Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2025 *Netto* diperoleh dari Rp287.624.770,00 dikurangi penyisihan sebesar Rp287.624.770,00, sedangkan saldo Investasi Non Permanen *Netto* tahun 2025 sebesar Rp0,00 diperoleh dari saldo Investasi Non Permanen sebesar Rp287.985.906,00 setelah dikurangi dengan penyisihan sebesar 287.985.906.00 Sehingga saldo *netto* atas Investasi Non Permanen adalah nihil atau Rp0,00.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.2.1.1. Investasi Dana Bergulir	**287.624.770,00**	**287.624.770,00**

Investasi Dana bergulir berupa pemberian dana bergulir dalam kegiatan usaha penggemukan sapi tahun 2001 sampai dengan 2003 yang dikelola Dinas Peternakan dan Perikanan. Nilai Dana bergulir per 31 Desember 2025 sebesar

Rp287.624.770,00 dan 2024 sebesar Rp287.624.770,00 merupakan tunggakan 31 penggaduh ternak sapi yang belum disetorkan ke kas daerah.

Tabel 5.3.25 Rincian Investasi Non Permanen Per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1.	Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)	287.624.770,00	287.624.770,00
Jumlah		**287.624.770,00**	**287.624.770,00**

Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Inspektorat Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 700/01/INSP/2019 atas Tunggakan Dana Bergulir Penggemukan Sapi pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Hulu Sungai Tengah tahun Anggaran 2001-2003 sebesar Rp. 298.107.500,00 atas 30 peternak diperoleh hasil konfirmasi sebagai berikut.

a. Peternak yang meninggal dunia sebanyak 12 (dua belas) orang dengan nilai tunggakan sebesar Rp94.907.500,00;
b. Peternak yang tidak ditemukan alamat/domisilinya sebanyak 13 (tiga belas) orang dengan nilai tunggakan sebesar Rp153.100.000,00;
c. Peternak yang dapat dikonfirmasi sebanyak 7 (tujuh) orang dengan nilai tunggakan sebesar Rp50.100.000,00. Dari 7 (tujuh) peternak ini terdapat 1 (satu) peternak yang telah melunasi tagihan sebesar Rp13.000.000,00 dengan bukti STS Nomor 08/STS-Distan/VII/219 tanggal 17 Juli 2019 a.n. H. Ali Pandi Desa Rantau Keminting Kec. Labuan Amas Utara.
d. Verifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan kesimpulan “Berdasarkan hasil survey lapangan dan pencarian di Aplikasi SIAK ditemukan data yang telah meninggal dunia sebanyak 13 orang dan tidak berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 10 orang”.
e. Verifikasi oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, KBPP dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan kesimpulan “Berdasarkan hasil pencarian melalui Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ditemukan data yang merupakan Keluarga Prasejahtera/tidak mampu sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor : 146/HUK/2021 sebanyak 7 orang.
f. Rekomendasi hasil survey lapangan dari 6 (enam) kecamatan sesuai dengan domisili penerima Dana bergulir Penggemukan Sapi tahun 2001-2003.
g. Sehubungan dengan Tunggakan Dana Bergulir tersebut di atas pada tahun 2021 tidak dapat dilakukan penagihan terhadap peternak tersebut dikarenakan seperti yang disebutkan diatas.
h. Setelah konfirmasi ke Dinas Peternakan dan Perikanan Kab.Hulu Sungai Tengah Perda Kepala Daerah tentang penyaluran Dana Bergulir Penggemukan Sapi pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kab.Hulu Sungai Tengah mereka tidak dapat menunjukan dokumennya.

i. Pada bulan Juli tahun 2022 untuk tunggakan dana bergulir telah diserahkan pengurusannya ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin untuk dilakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
j. Tunggakan Peternak Sapi Program Dana Bergulir 2021 sebesar Rp298.107.500,00 dan tahun 2022 sebesar Rp290.538.406,00 terjadi penurunan karena adanya realisasi pembayaran tunggakan dana bergulir penggemukan sapi sebesar Rp7.569.094,00 dengan rincian sebagai berikut.
   1) Matran (domisili tidak diketahui) desa Kias/Paya Rp1.677.395,00 (pembayaran di tahun 2022 nomor bukti 1/TF KPNKL/2022);
   2) Daransyah (meninggal dunia) desa Kadundung Rp5.891.699,00, pembayaran di tahun 2022 nomor bukti 2/TF KPNKL/2022, 3/TF KPKNL/2022 dan 05/TF KPKNL/2022.
k. Pada tahun 2023 diterima pembayaran tunggakan dana bergulir sebesar Rp2.552.500,00 sehingga tunggakan dana bergulir tahun 2023 sebesar Rp287.985.906,00.
l. Pada tahun 2024 diterima pembayaran tunggakan dana bergulir sebesar Rp361.136,00 an. Insan sehingga tunggakan dana bergulir tahun 2024 sebesar Rp287.624.770,00.

Data Tunggakan Dana Bergulir disajikan pada **Lampiran 13**.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.2.1.2. Penyisihan Dana Bergulir	**(287.624.770,00)**	**(287.624.770,00)**

Nilai Penyisihan dana bergulir per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp287.624.770,00 dan Rp287.624.770,00 Penyajian Dana Bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan. Untuk memperoleh nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu nilai perolehan awal dikurangi dengan penyisihan untuk dana bergulir yang diragukan dapat ditagih serta benar-benar tidak tertagih. Untuk kualitas dana bergulir ini dikategorikan tidak dapat ditagih sehingga penyisihannya dihitung 100%.

Tabel 5.3.26 Penyisihan Dana Bergulir

No	Tahun	Kualitas Dana bergulir	Saldo Dana Bergulir	Penyisihan	Jumlah Penyisihan	Sisa Dana Bergulir
1.	2001 s.d 2021	Macet	298.107.500,00	100%	298.107.500,00	0,00
2.	2001 s.d 2022	Macet	290.538.406,00	100%	290.538.406,00	0,00
3.	2001 s.d 2023	Macet	287.985.906,00	100%	287.985.906,00	0,00
4.	2001 s.d 2024	Macet	287.624.770,00	100%	287.624.770,00	0,00
5	2001 s.d 2025	Macet	287.624.770,00	100%	287.624.770,00	0,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.2.2. Investasi Permanen	**200.990.545.646,26**	**194.617.496.485,75**

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp200.990.545.646,26 dan Rp194.617.496.485,75 mengalami kenaikan sebesar Rp6.373.049.160,51 atau 3,27% dari tahun 2024. Investasi permanen tersebut berupa penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Bank Kalsel, BPR Sanggam Cipta Sejahtera, dan PT Air Minum Murakata Lestari.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.2.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	**200.990.545.646,26**	**194.617.496.485,75**

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp200.990.545.646,26 dan Rp194.617.496.485,75 mengalami kenaikan sebesar Rp6.373.049.160,51 atau 3,27% dari tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.27 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1.	Bank Kalsel	90.500.000.000,00	90.500.000.000,00
2.	PD BPR Sanggam Cipta Sejahtera	4.350.000,00	4.350.000,00
3.	PT Air Minum Murakata Lestari	110.486.195.645,26	104.113.146.485,75
	Jumlah	**200.990.545.646,26**	**194.617.496.485,75**

Penjelasan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

a. Penyertaan Modal pada Bank Kalsel
   Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Bank Kalsel per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp55.500.000.000,00 dengan jumlah saham sebanyak 222.000 lembar. Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Bank Kalsel per 31 Desember 2022 adalah sebesar 4,06% dan tahun 2023 sebesar 5,51%, sehingga penyertaan modal tersebut dicatat dengan metode biaya. Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah memberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp35.000.000.000,00 sehingga saldo penyertaan modal mengalami perubahan.Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Selatan (PERSERODA) tanggal 31 Desember 2025 telah memberikan deviden tahun buku 2025

sebesar Rp8.315.979.422,00 dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah – Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

b. Penyertaan Modal pada PT BPR Sanggam Cipta Sejahtera
Penyertaan modal awal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada PT BPR Sanggam Cipta Sejahtera sebesar Rp116.400.000,00. Penyertaan modal sebesar Rp116.400.000,00 pada PT BPR.Sanggam Cipta Sejahtera tersebut berupa sertifikat kolektif saham yang terdiri dari :

Tabel 5.4.28 Sertifikat Kolektif Saham PD BPR Labuan Amas Selatan Per 31 Desember 2021

No	No Saham	Jumlah (Lbr)	Nominal (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	0002	200	50.000,00	10.000.000,00
2.	0005	15	50.000,00	750.000,00
3.	0007	17	50.000,00	850.000,00
4.	0009	19	50.000,00	950.000,00
5.	0011	19	50.000,00	950.000,00
6.	0014	32	50.000,00	1.600.000,00
7.	0015	1.000	50.000,00	50.000.000,00
8.	0017	1.000	50.000,00	50.000.000,00
9.	Bagian Deviden yang menambah penyertaan modal			1.300.000,00
	Jumlah			**116.400.000,00**

Penyertaan modal awal pemerintah daerah pada PD BPR Labuan Amas Selatan sebesar Rp116.400.000,00 setelah terjadi penggabungan dengan PT BPR Sanggam Cipta Sejahtera maka kepemilikan saham pemerintah daerah kabupaten hulu sungai tengah per 31 Desember 2021 dibawah 20% sehingga terjadi penurunan penyertaan modal pada tahun 2021 sebesar Rp112.050.000,00 menjadi sebesar Rp4.350.000.00 Pada tahun 2024 Laporan Keuangan PT BPR Sanggam Cipta Sejahtera tahun 2025 (Unaudited) persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 0,02% dengan 87 lembar saham sejumlah Rp4.350.000,00.

Penyertaan modal tersebut dicatat dengan metode biaya, dengan investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha.tahun 2025 BPR Sanggam Cipta Sejahtera memberikan deviden laba usaha dengan nilai Rp107.725,00.

c. Penyertaan Modal pada PT Air Minum Murakata Lestari (Perseroda) yang semula bernama PDAM Tirta Dharma Kabupaten Hulu Sungai Tengah didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 08 tanggal 20 April 2022 adalah Badan Usaha Milik pemerintah daerah yang bergerak dalam bidang pengelolaan dan penyediaan air bersih dan berkedudukan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kota Barabai,yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 3 tahun 2021 tanggal 16 Februari 2021, PT Air Minum Murakata Lestari (Perseroda) merupakan kelanjutan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 17 tahun

2002 tanggal 14 Desember 2002 tentang perubahan pertama atas Peraturan Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah No. 3 tahun 1991 tanggal 23 Februari 1991 dengan nama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah dan disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 16/SK-1/KUM tanggal 27 Juli 1991.

Kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada PT Air Minum Murakata Lestari (Perseroda) per 31 Desember 2025 sebesar Rp144,822.516.660,00 atau 96,99% sehingga penyertaan modal tersebut dicatat dengan metode ekuitas yaitu investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk deviden yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Perhitungan persentase kepemilikan modal pada tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.29 Rincian Kepemilikan Modal pada PT Air Minum Murakata Lestari (Perseroda) Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	2025		2024	
	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	4.500.000.000,00	3,01	4.500.000.000,00	3,01
2. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	144.822.516.660,00	96,99	144.822.516.660,00	96,99
Jumlah	**149.322.516.660,00**	**100,00**	**149.322.516.660,00**	**100,00**

Rincian perhitungan penyertaan modal per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut :

Tabel 5.3.30 Perhitungan Penyertaan Modal pada PT Air Minum Murakata Lestari (Perseroda) Per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1.	**Penyertaan Modal Tahun Berjalan**	**144.822.516.660,00**	**144.822.516.660,00**
2.	Akumulasi Alokasi Keuntungan (Kerugian) 31 Desember 2025	(40.709.370.174,25)	(45.679.463.306,64)
3.	Koreksi Saldo Awal	0,00	0,00
4.	Alokasi Keuntungan (Kerugian) Tahun Berjalan:	0,00	0,00
	Laba Tahun Berjalan PDAM	6.570.831.179	5.124.335.635,00
	Persentase Kepemilikan Modal Tahun Berjalan	96,99%	96,99%
5.	**Jumlah Alokasi Keuntungan Tahun Berjalan**	**6.373.049.160,51**	**4.970.093.132,39**
6.	Total Alokasi Keuntungan (Kerugian) Tahun Berjalan (2+3+5)	(34.336.321.013,74)	(40.709.370.174,25)

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
7.	**Nilai Bersih Penyertaan Modal Tahun Berjalan (1-6)**	**110.486.195.645,26**	**104.113.146.485,75**

Tabel 5.3.31 Penyertaan Modal pada PT Air Minum Murakata Lestari (Perseroda) Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)
1.	Saldo Awal 1 Januari 2025	104.113.146.485,75
2.	Penambahan Modal Tahun 2025	0,00
3.	Akumulasi Alokasi Keuntungan	6.373.049.160,51
	Nilai Bersih Penyertaan Modal Tahun Berjalan (1-3)	**110.486.195.645,26**

Adapun penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang belum ditetapkan statusnya adalah sebesar Rp3.676.947.264,00, terdiri dari:

Instalasi Pengolahan Air Eks PPAB tahun 1996 / 1997	100.417.742
Instalasi Pengolahan Air Eks PPAB tahun 1997 / 1998	502.456.050
Jaringan Pipa 75-200	444.000.000
Jaringan Pipa Eks PPAB tahun 2002	163.451.000
Instalasi Perpompaan tahun 2002	233.882.000
Mobil Tanki Eks PPDPSE Air Bersih tahun 2002	180.000.000
Jaringan Pipa Distribusi PKPS BBM tahun 2004	455.583.382
IPA IKK Birayang (Limpasu) tahun 2009	1.597.157.090
Jumlah	**3.676.947.264**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.3. Aset Tetap	**2.599.081.623.080,25**	**2.146.593.178.732,77**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau 1 tahun, yang kepemilikannya untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah per 31 Desember 2025 telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2016 tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 68 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 39 tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.599.081.623.080,25 dan Rp2.146.593.178.732,77 mengalami kenaikan sebesar Rp452.488.444.347,48 atau 21,08% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.34 Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1.	Tanah	345.442.122.680,38	342.000.866.180,38
2.	Peralatan dan Mesin	897.977.451.227,15	711.539.029.891,71
3.	Gedung dan Bangunan	1.282.901.507.113,34	1.100.892.316.130,12
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.191.688.488.594,07	2.037.546.694.191,43
5.	Aset Tetap Lainnya	62.668.926.436,68	47.757.685.311,82
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	70.221.688.954,79	146.212.229.971,09
7.	Akumulasi Penyusutan	(2.251.818.561.926,16)	(2.239.355.642.943,78)
	Jumlah	**2.599.081.623.080,25**	**2.146.593.178.732,77**

Rekapitulasi saldo akhir Aset Tetap per 31 Desember 2025 per SKPD dan rekapitulasi mutasi aset tetap tahun 2025 selengkapnya pada **Lampiran 8** dan **Lampiran 9**.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.3.1. Tanah	**345.442.122.680,38**	**342.000.866.180,38**

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan. Saldo Aset Tetap - Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp345.442.122.680,38 dan Rp342.000.866.180,38 mengalami kenaikan sebesar Rp3.441.256.500,00 atau 1,01% dari tahun 2024. Rincian mutasi nilai Aset Tetap - Tanah pada tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.33 Rincian Mutasi Aset Tanah Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo Awal 2025	342.000.866.180,38	338.923.823.580,38
2	Mutasi Tambah	3.441.256.500,00	3.176.855.600,00
3	Mutasi Kurang	0,00	(99.813.000,00)
	Saldo 31 Desember 2025	**345.442.122.680,38**	**342.000.866.180,38**

Mutasi tambah nilai Aset Tetap - Tanah selama tahun 2025 terdiri dari :

a. Pembelian yang berasal dari Belanja Modal pada SKPD
   - Dinas Pendidikan : Rp 417.264.000,00
   - Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang : Rp 1.014.074.000,00

- Dinas Pengelola Lingkungan Hidup dan Perhubungan	:	Rp	1.950.034.000,00
Jumlah	**:**	**Rp**	**3.381.372.000,00**

b. Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa berupa Jasa Appraisal sebesar Rp. 59.884.500,00 pada Dinas Pendidikan

Mutasi kurang nilai Aset Tetap - Tanah selama tahun 2025 adalah Rp0,00

Rincian mutasi Aset Tetap Tanah tahun 2025 per SKPD selengkapnya pada **Lampiran 9.a.**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin	**897.977.451.227,15**	**711.539.029.891,71**

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap dipakai. Saldo Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp897.977.451.227,15 dan Rp711.539.029.891,71, mengalami kenaikan sebesar Rp186.438.421.335,44 atau 26,20% dari tahun 2024. Rincian mutasi nilai Peralatan dan Mesin pada tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.34 Rincian Mutasi Aset Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo Awal	711.539.029.891,71	579.521.530.414,71
2	Mutasi Tambah	206.766.383.253,14	138.123.022.559,00
3	Mutasi Kurang	(20.327.961.917,70)	(6.105.523.082,00)
4	**Saldo Akhir**	**897.977.451.227,15**	**711.539.029.891,71**

Mutasi tambah nilai Aset Tetap - Peralatan dan Mesin pada tahun 2025 terdiri dari :

a.	Pembelian yang berasal dari belanja Modal	:	Rp	141.163.477.540,00
b.	Utang Pengadaan Aset Tetap pada RSUD.H.Damanhuri Barabai.	:	Rp	1.736.264.152,00
c.	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa ke Belanja Modal pada SKPD :			
	- Dinas Pendidikan	:	Rp	4.788.416.683,00
	- Dinas Kesehatan	:	Rp	1.722.720.000,00
d.	Hibah	:	Rp	420.000.000,00

e. Mutasi Masuk Peralatan & Mesin antar SKPD :

- RSUD. H. Damanhuri Barabai	:	Rp	1.308.888.650,00
- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	:	Rp	367.666.667,00
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	:	Rp	367.666.666,00
- Dinas Komunikasi dan Informatika	:	Rp	378.380.667,00
- Sekretariat Daerah	:	Rp	468.235.000,00
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	:	Rp	573.525.650,00
- BPKAD (Pengelola Barang)	:	Rp	565.981.202,14
- Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	:	Rp	156.000.000,00
- Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Daerah	:	Rp	426.190.000,00
- Kecamatan Barabai	:	Rp	282.200.000,00
- Kecamatan Labuan Amas Selatan	:	Rp	156.000.000,00
- Kecamatan Batang Alai Utara	:	Rp	273.400.000,00

f. Reklas Antar KIB pada SKPD :

- Dinas Pendidikan	:	Rp	121.654.050,00
- RSUD. H. Damanhuri Barabai	:	Rp	49.042.093.950,00
- Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	:	Rp	188.700.000,00
- Badan Perecanaan Pembangunan, Penelitian dan Bangda	:	Rp	82.695.000,00

g Koreksi Tahun Berjalan pada SKPD :

- Dinas Pendidikan	:	Rp	1.042.581.731,00
- Dinas Kesehatan	:	Rp	24.100.000,00
- RSUD. H. Damanhuri Barabai	:	Rp	404.547.900,00
- Dinas Pengelola Lingkungan Hidup dan Perhubungan	:	Rp	700.772.961,00
- Kecamatan Haruyan	:	Rp	2.098.840,00
- Kecamatan Hantakan	:	Rp	2.125.944,00
Jumlah	**:**	**Rp**	**206.766.383.253,14**

Mutasi kurang nilai Aset Tetap - Peralatan dan Mesin pada tahun 2025 terdiri dari :

a. Penghapusan pada SKPD :

- Dinas Komunikasi dan Informatika	:	Rp	295.385.000,00
- Sekretariat Daerah	:	Rp	295.385.000,00
- Sekretariat DPRD	:	Rp	1.451.176.000,00

b. Ekstrakompatabel pada SKPD :

- Dinas Pendidikan	:	Rp	472.126.028,00
- Dinas Kesehatan	:	Rp	22.080.000,00
- RSUD. H. Damanhuri Barabai	:	Rp	3.390.000,00
- Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	:	Rp	800.000,00
- Dinas Perpustakaan	:	Rp	9.687.260,00
- Kecamatan Barabai	:	Rp	430.000,00

c. Pembayaran Utang Pengadaan Aset Tahun 2024

	- RSUD. H. Damanhuri Barabai	:	Rp	2.689.779.191,00
d.	Mutasi Keluar Peralatan & Mesin antar SKPD pada:			
	- Dinas Sosial, PP dan Perlindungan Anak	:	Rp	292.368.000,00
	- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	:	Rp	156.235.000,00
	- Dinas Pengelola Lingkungan Hidup dan Perhubungan	:	Rp	57.003.026,00
	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	:	Rp	273.400.000,00
	- Dinas Pertanian	:	Rp	604.397.000,00
	- Sekretariat Daerah	:	Rp	2.874.963.650,00
	- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	:	Rp	10.714.000,00
	- BPKAD (Pengelola Barang)	:	Rp	359.443.650,00
	- Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	:	Rp	32.016.000,00
	- Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Daerah	:	Rp	12.500.000,00
	- Kecamatan Barabai	:	Rp	173.500.000,00
	- Kecamatan Labuan Amas Selatan	:	Rp	156.000.000,00
	- Kecamatan Batang Alai Utara	:	Rp	156.000.000,00
	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	:	Rp	38.687.176,14
e.	Unkapitalisasi Belanja Modal pada SKPD :			
	- Dinas Pendidikan	:	Rp	1.612.099.404,00
	- Dinas Kesehatan	:	Rp	105.193.598,00
	- RSUD. H. Damanhuri Barabai	:	Rp	964.904.026,19
	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	:	Rp	335.000,00
	- Dinas Komunikasi dan Informatika	:	Rp	2.500.000,00
	- Dinas Perpustakaan	:	Rp	25.617.361,00
	- Sekretariat Daerah	:	Rp	150.005.785,00
	- Sekretariat DPRD	:	Rp	665.500,00
	- Kecamatan Labuan Amas Selatan	:	Rp	1.680.000,00
	- Kecamatan Hantakan	:	Rp	7.500.000,00
f.	Reklas Antar KIB pada SKPD :			
	- Dinas Pendidikan	:	Rp	24.737.800,00
	- Dinas Kesehatan	:	Rp	36.572.000,00
	- RSUD. H. Damanhuri Barabai	:	Rp	97.320.000,00
	- Dinas Pengelola Lingkungan Hidup dan Perhubungan	:	Rp	1.692.661.200,00
	- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	:	Rp	11.000.000,00
g.	Koreksi Tahun Berjalan pada SKPD :			
	- Dinas Pendidikan	:	Rp	4.401.446.416,63
	- Dinas Kesehatan	:	Rp	118.944.602,00
	- RSUD. H. Damanhuri Barabai	:	Rp	168.047.581,20
	- Dinas Sosial, PP dan Perlindungan Anak	:	Rp	54.484.064,00
	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	:	Rp	47.705.951,44
	- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	:	Rp	23.469.920,51

- Dinas Pengelola Lingkungan Hidup dan Perhubungan	:	Rp	3.795.000,00
- Dinas Komunikasi dan Informatika	:	Rp	18.866.000,00
- Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	:	Rp	18.112.500,00
- Dinas Perpustakaan	:	Rp	1.257.000,00
- Dinas Pertanian	:	Rp	16.490.000,00
- Sekretariat Daerah	:	Rp	113.373.115,50
- Sekretariat DPRD	:	Rp	4.296.300,00
- Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	:	Rp	37.681.200,48
- Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Daerah	:	Rp	14.206.500,00
- Kecamatan Barabai	:	Rp	900.000,00
- Kecamatan Pandawan	:	Rp	22.984.500,00
- Kecamatan Labuan Amas Selatan	:	Rp	19.589.267,56
- Kecamatan Labuan Amas Utara	:	Rp	1.263.000,00
- Kecamatan Haruyan	:	Rp	34.753.143,05
- Kecamatan Batu Benawa	:	Rp	4.450.000,00
- Kecamatan Hantakan	:	Rp	16.500.000,00
- Kecamatan Batang Alai Utara	:	Rp	9.088.200,00
- Kecamatan Limpasu	:	Rp	6.000.000,00
Jumlah	**:**	**Rp**	**20.327.961.917,70**

Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2025 per SKPD selengkapnya pada **Lampiran 9.b.**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan	**1.282.901.507.113,34**	**1.100.892.316.130,12**

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Saldo Aset Tetap - Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.282.901.507.113,34 dan Rp1.100.892.316.130,12, mengalami kenaikan sebesar Rp182.009.190.983,22 atau 16,53% dari tahun 2024. Rincian mutasi nilai Gedung dan Bangunan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.35 Rincian Mutasi Aset Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo Awal	1.100.892.316.130,12	1.008.546.044.027,11
2	Mutasi Tambah	255.971.659.806,24	230.741.487.823,51
3	Mutasi Kurang	(73.962.468.823,02)	(138.395.215.720,50)
	Saldo Akhir	**1.282.901.507.113,34**	**1.100.892.316.130,12**

Mutasi tambah nilai Aset Tetap - Gedung dan Bangunan pada tahun 2025 terdiri dari :

a.	Pembelian yang berasal dari belanja Modal	:	Rp	112.776.401.824,00
b.	Utang Pengadaan Aset Tetap pada SKPD :			
	- Dinas Pendidikan	:	Rp	100.000,00
	- RSUD. H. Damanhuri Barabai	:	Rp	28.944.162.000,00
	- Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	:	Rp	126.158.361,00
c.	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa ke Belanja Modal pada SKPD :			
	- Dinas Pendidikan	:	Rp	3.904.839.096,00
	- Dinas Kesehatan	:	Rp	7.503.106.659,00
	- Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	:	Rp	292.624.900,00
	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	:	Rp	49.474.000,00
	- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	:	Rp	692.384.230,82
	- Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	:	Rp	49.120.322,00
	- Dinas Perpustakaan	:	Rp	194.750.850,00
	- Dinas Perdagangan	:	Rp	104.321.135,00
d.	Mutasi Masuk Gedung dan Bangunan antar SKPD :			
	- Dinas Pendidikan	:	Rp	1.772.226.043,69
e.	Reklas Antar KIB			
	- RSUD. H. Damanhuri Barabai		Rp	90.450.212.984,63
	- Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	:	Rp	5.713.650.332,82
f.	Koreksi Tahun Berjalan pada SKPD :			
	- Dinas Pendidikan	:	Rp	3.300.807.067,28
	- RSUD. H. Damanhuri Barabai	:	Rp	97.320.000,00
	Jumlah	**:**	**Rp**	**255.971.659.806,24**

Mutasi kurang nilai Aset Tetap - Gedung dan Bangunan pada tahun 2025 terdiri dari :

a.	Pembayaran Utang Pengadaan Aset Tahun 2024 pada SKPD :			
	- RSUD. H. Damanhuri Barabai	:	Rp	3.575.598.625,00
	- Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	:	Rp	445.597.347,00
b.	Mutasi Keluar Gedung dan Bangunan antar SKPD pada:			
	- Dinas Sosial, PP dan Perlindungan Anak	:	Rp	1.772.226.043,69
c.	Reklas Antar KIB pada SKPD :			
	- Dinas Kesehatan	:	Rp	443.588.802,00
	- RSUD. H. Damanhuri Barabai	:	Rp	50.858.674.350,00
	- Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	:	Rp	7.279.593.722,00
	- Dinas Perdagangan	:	Rp	8.504.278.000,00
d.	Koreksi Tahun Berjalan pada SKPD :			
	- Dinas Pendidikan	:	Rp	7.733.333,33
	- Sekretariat DPRD	:	Rp	15.211.200,00

e. Kekurangan Volume pada SKPD :

- Dinas Pendidikan	:	Rp	138.050.100,00
- Dinas Kesehatan	:	Rp	161.648.600,00
- RSUD. H. Damanhuri Barabai	:	Rp	149.657.700,00
- Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	:	Rp	53.598.800,00
- Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	:	Rp	557.012.200,00
Jumlah	**:**	**Rp**	**73.962.468.823,02**

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2025 per SKPD selengkapnya pada **Lampiran 9.c.**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	**2.191.688.488.594,07**	**2.037.546.694.191,43**

Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi dipakai. Saldo Aset Tetap - Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.191.688.488.594,07 dan Rp2.037.546.694.191,43, mengalami kenaikan sebesar Rp154.141.794.402,64 atau 7,57% dari tahun 2024. Rincian mutasi nilai Aset Tetap - Jalan, Jaringan dan Irigasi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.36 Rincian Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan
Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo Awal 2025	2.037.546.694.191,43	1.950.971.334.039,96
2	Mutasi Tambah	190.785.807.829,64	121.635.410.988,89
3	Mutasi Kurang	(36.644.013.427,00)	(35.060.050.837,42)
	Saldo 31 Desember 2025	**2.191.688.488.594,07**	**2.037.546.694.191,43**

Mutasi tambah nilai Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2025 terdiri dari :

a. Pembelian yang berasal dari belanja Modal	:	Rp	150.098.514.061,00
b. Utang Pengadaan Aset Tetap pada SKPD :			
- Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	:	Rp	4.674.084.421,00
c. Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa ke Belanja Modal pada SKPD :			
- Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	:	Rp	4.957.082.692,00

-	Dinas Komunikasi dan Informatika	:	Rp	39.957.120,00
-	Inspektorat	:	Rp	70.279.250,00
-	Kecamatan Batang Alai Selatan	:	Rp	39.888.915,00
-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	:	Rp	296.147.000,00

e. Reklas Antar KIB

-	Dinas Kesehatan	:	Rp	36.572.000,00
-	RSUD. H. Damanhuri Barabai	:	Rp	1.431.775.400,00
-	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	:	Rp	21.725.039.935,85
-	Dinas Pengelola Lingkungan Hidup dan Perhubungan	:	Rp	1.692.661.200,00

f. Koreksi Tahun Berjalan pada SKPD :

-	Dinas Pendidikan	:	Rp	2.769.049.127,54
-	Dinas Kesehatan	:	Rp	61.800.850,00
-	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	:	Rp	2.843.417.507,25
-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran	:	Rp	750.000,00
-	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	:	Rp	6.300.000,00
-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	:	Rp	775.000,00
-	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	:	Rp	2.430.500,00
-	Dinas Perpustakaan	:	Rp	7.500.000,00
-	Dinas Pertanian	:	Rp	4.830.000,00
-	Dinas Perdagangan	:	Rp	12.067.900,00
-	Kecamatan Labuan Amas Selatan	:	Rp	1.870.000,00
-	Kecamatan Labuan Amas Utara	:	Rp	3.705.000,00
-	Kecamatan Haruyan	:	Rp	2.880.000,00
-	Kecamatan Hantakan	:	Rp	4.011.250,00
-	Kecamatan Limpasu	:	Rp	1.168.700,00
-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	:	Rp	1.250.000,00
	Jumlah	**:**	**Rp**	**190.785.807.829,64**

Mutasi kurang nilai Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2025 terdiri dari :

a. Pembayaran Utang Pengadaan Aset Tahun 2024 pada SKPD :

-	RSUD. H. Damanhuri Barabai	:	Rp	1.895.231.000,00
-	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	:	Rp	3.890.585.750,00

b. Unkapitalisasi dari Belanja Modal pada SKPD :

-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	:	Rp	361.962.000,00
-	Kecamatan Labuan Amas Selatan	:	Rp	187.344,00

c. Reklas Antar KIB pada SKPD :

-	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	:	Rp	27.356.716.033,00

d. Kekurangan Volume pada SKPD :

- Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	:	Rp	3.139.331.300,00
Jumlah	**:**	**Rp**	**36.644.013.427,00**

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan tahun 2025 per SKPD selengkapnya pada **Lampiran 9.d.**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya	**62.668.926.436,68**	**47.757.685.311,82**

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, antara lain Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp62.668.926.436,68 dan Rp47.757.685.311,82, mengalami kenaikan sebesar Rp14.911.241.124,86 atau 31,22% dari tahun 2024. Rincian mutasi nilai Aset Tetap Lainnya pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.37 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo Awal 2025	47.757.685.311,82	44.443.211.405,82
2	Mutasi Tambah	15.333.842.374,86	3.453.462.106,00
3	Mutasi Kurang	(422.601.250,00)	(138.988.200,00)
	Saldo 31 Desember 2025	**62.668.926.436,68**	**47.757.685.311,82**

Mutasi tambah nilai Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya pada tahun 2025 terdiri dari :

a. Pembelian yang berasal dari belanja Modal	:	Rp	1.227.971.791,00
b. Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa ke Belanja Modal pada SKPD :			
- Dinas Pendidikan	:	Rp	3.082.727.293,00
c. Reklas Antar KIB pada SKPD :			
- Dinas Pendidikan	:	Rp	24.737.800,00
d. Koreksi Tahun Berjalan pada SKPD :			
- Dinas Pendidikan	:	Rp	10.556.720.611,15
- Dinas Kesehatan	:	Rp	116.328.099,00

- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	:	Rp	5.858.995,90
- Dinas Pengelola Lingkungan Hidup dan Perhubungan	:	Rp	5.715.330,00
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	:	Rp	1.713.500,00
- Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	:	Rp	601.500,00
- Dinas Perpustakaan	:	Rp	280.110.498,81
- Dinas Pertanian	:	Rp	676.000,00
- Dinas Perdagangan	:	Rp	610.000,00
- Sekretariat Daerah	:	Rp	3.110.000,00
- Sekretariat DPRD	:	Rp	3.830.500,00
- Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	:	Rp	3.770.000,00
- Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Daerah	:	Rp	2.931.800,00
- Inspektorat	:	Rp	5.125.100,00
- Kecamatan Pandawan	:	Rp	786.000,00
- Kecamatan Labuan Amas Utara	:	Rp	1.562.700,00
- Kecamatan Haruyan	:	Rp	900.000,00
- Kecamatan Batu Benawa	:	Rp	2.544.000,00
- Kecamatan Hantakan	:	Rp	1.437.000,00
- Kecamatan Batang Alai Utara	:	Rp	845.000,00
- Kecamatan Batang Alai Timur	:	Rp	1.319.250,00
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	:	Rp	1.909.606,00
Jumlah	**:**	**Rp**	**15.333.842.374,86**

Mutasi kurang nilai Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya pada tahun 2025 terdiri dari :

a. Unkapitalisasi dari Belanja Modal pada SKPD :

- Dinas Pendidikan	:	Rp	29.552.200,00

b. Reklas Antar KIB pada SKPD :

- Dinas Pendidikan	:	Rp	121.654.050,00
- Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	:	Rp	188.700.000,00
- Badan Perecanaan Pembangunan, Penelitian dan Bangda	:	Rp	82.695.000,00
Jumlah	**:**	**Rp**	**422.601.250,00**

Rincian mutasi Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya tahun 2025 per SKPD selengkapnya pada **Lampiran 9.e.**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	**70.221.688.954,79**	**146.212.229.971,09**

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan pada pemerintah daerah kabupaten hulu sungai tengah. konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp70.221.688.954,79 dan Rp146.212.229.971,09, terjadi penurunan sebesar Rp75.990.541.016,30 atau 51,97% dari tahun 2024. Rincian mutasi nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.40 Rincian Mutasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo Awal 2025	146.212.229.971,09	37.069.315.287,02
2	Mutasi Tambah	41.898.362.237,00	121.941.280.457,00
3	Mutasi Kurang	(117.888.903.253,30)	(12.798.365.772,93)
	Saldo 31 Desember 2025	**70.221.688.954,79**	**146.212.229.971,09**

Mutasi tambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada tahun 2025 terdiri dari :

a. Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa ke Belanja Modal pada SKPD :
   - Dinas Pendidikan : Rp 86.778.000,00
   - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata : Rp 198.118.585,00
   - Dinas Pertanian : Rp 35.219.190,00
   - Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah : Rp 95.302.602,00
   - Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Daerah : Rp 99.400.578,00
   - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan : Rp 29.659.500,00
   - Dinas Komunikasi dan Informatika : Rp 49.996.000,00
   - Sekretariat Daerah : Rp 96.347.778,00
   - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman : Rp 194.613.000,00

b. Reklas Antar KIB pada SKPD :
   - Dinas Kesehatan : Rp 443.588.802,00
   - RSUD. H. Damanhuri Barabai : Rp 384.805.000,00
   - Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang : Rp 32.904.939.480,00

- Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	:	Rp	7.279.593.722,00
Jumlah	**:**	**Rp**	**41.898.362.237,00**

Mutasi kurang nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada tahun 2025 terdiri dari :

a. Reklas Antar KIB pada SKPD :

- RSUD. H. Damanhuri Barabai	:	Rp	90.450.212.984,63
- Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	:	Rp	27.438.690.268,67
Jumlah	**:**	**Rp**	**117.888.903.253,30**

Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2025 per SKPD yang mencakup rincian kontrak, nilai kontrak, sumber pendanaan, dan jumlah biaya yang telah dikeluarkan selengkapnya pada **Lampiran 9.f** dan daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2025 per SKPD pada **Lampiran 9.g.**

Dalam hal pekerjaan konstruksi tersebut selesai dikerjakan pada tanggal laporan keuangan maka akan dibayar 95% dari nilai kontrak dan sebesar 5% tidak dibayarkan yaitu sebagai retensi, Retensi tersebut akan dibayarkan setelah pihak ketiga telah selesai melaksanakan masa pemeliharaan sehingga apabila dalam masa pemeliharaan terdapat kerusakan/cacat terhadap hasil pekerjaan tersebut maka pihak ketiga tetap bertanggungjawab untuk perbaikan pekerjaan dimaksud. Rincian retensi tahun 2025 dapat dilihat pada **lampiran 9.h**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan	**(2.251.818.561.926,16)**	**(2.239.355.642.943,78)**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan total akumulasi penyusutan aset tetap dari masing-masing jenis aset tetap selain tanah yang dihitung berdasarkan nilai perolehan dan masa manfaat. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.251.818.561.926,16 dan Rp2.239.355.642.943,78 mengalami kenaikan sebesar Rp12.462.918.982,38 atau 0,56% dari tahun 2024 yang terdiri dari :

Tabel 5.3.39 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1.	Tanah	0,00	0,00
2.	Peralatan dan Mesin	557.627.495.028,01	481.924.062.484,54
3.	Gedung dan Bangunan	280.444.314.943,04	264.915.016.592,70
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.413.746.751.955,11	1.492.516.563.866,54

No.	Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Jumlah		**2.251.818.561.926,16**	**2.239.355.642.943,78**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2025 sebesar Rp2.251.818.561.926,16 berasal dari :

1.	Saldo Awal Tahun 2025	:	Rp	2.239.355.642.943,78
2.	Ditambah :	:		
	- Beban Penyusutan 2025	:	Rp	138.166.663.751,93
	- Mutasi SKPD masuk	:	Rp	3.379.260.135,00
	- Koreksi Tahun Berjalan	:	Rp	45.653.859.983,53
	Jumlah		**Rp**	**187.199.783.870,46**
3.	Dikurang :	:		
	- Aset Tetap Kondisi Rusak Berat	:	Rp	(8.504.278.000,00)
	- Penghapusan Aset 2025	:	Rp	(2.133.716.859,00)
	- Mutasi Keluar SKPD		Rp	(4.168.616.750,15)
	- Koreksi Tahun Berjalan	:	Rp	(159.930.253.278,93)
	Jumlah	**:**	**Rp**	**(174.736.864.888,08)**
	Jumlah Penyusutan Tahun 2025	**:**	**Rp**	**2.251.818.561.926,16**

Rincian Mutasi Akumulasi penyusutan tahun 2025 per SKPD pada **Lampiran 9.i**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.4. Aset Lainnya	**123.901.157.006,35**	**245.906.803.345,36**

Aset Lainnya adalah aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, namun tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang maupun aset tetap. Aset lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp123.901.157.006,35 dan Rp245.906.803.345,36 mengalami penurunan sebesar Rp122.005.646.339,01 atau 49,61% terdiri dari :

Tabel 5.3.40 Rincian Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Aset Lainnya	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.471.692.064,00	1.471.692.064,00
2.	Aset Tidak Berwujud	2.104.559.862,45	657.469.038,00
3.	Aset Lain-Lain	20.594.659.971,90	23.490.654.956,36
4.	Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)	99.730.245.108,00	220.286.987.287,00
Jumlah		**123.901.157.006,35**	**245.906.803.345,36**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.4.1. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	**1.471.692.064,00**	**1.471.692.064,00**

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan tuntutan perbendaharaan atas kerugian daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Bendahara atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Saldo Tuntutan Perbendaharaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.471.692.064,00 dan Rp1.471.692.064,00. Berdasarkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dicatat berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Nomor 11.TP.09-2012/I/2018.SKP Tanggal 31 Januari 2018.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.4.2. Aset Tidak Berwujud *Netto*	**2.104.559.862,45**	**657.469.038,00**

Aset Tidak Berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh Aset Tidak Berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset Tidak Berwujud *Netto* Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.104.559.862,45 dan Rp657.469.038,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.447.090.824,45 atau 220,10% dari tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.41 Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud
Per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo Awal	4.150.813.784,90	4.150.813.784,90
2	Mutasi Tambah	1.656.753.255,00	0,00
3	Mutasi Kurang	0,00	0,00
4	**Saldo Akhir**	**5.807.567.039,90**	**4.150.813.784,90**
5	Akm. Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.703.007.177,45)	(3.493.344.746,90)
	Saldo Akhir *Netto*	**2.104.559.862,45**	**657.469.038,00**

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.807.567.039,90 berupa :

Tabel 5.3.42 Daftar Aset Tidak Berwujud

NO	U N I T	NAMA BARANG	Nilai (Rp)
1	2	3	4
1.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Software - Website Kabupaten	190.064.000,00
2.	SEKRETARIAT DAERAH	Kajian	94.500.000,00
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kajian	330.221.000,00
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kajian	318.533.000,00
5.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kajian	44.605.000,00
6.	DINAS PERDAGANGAN	Kajian	39.850.000,00
7.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Software - Website dan Aplikasi Sistem Informasi Perijinan	74.435.000,00
8.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kajian	151.066.028,70
9.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kajian	60.358.971,20
10.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kajian	253.555.000,00
11.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kajian	130.500.000,00
12.	KECAMATAN HARUYAN	Software - Aplikasi Profil Kecamatan	5.500.000,00
13.	DINAS PERTANIAN	Software - Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Pupuk	48.400.000,00
14.	SEKRETARIAT DPRD	Software - Website DPRD Kab. HST	40.987.500,00
15.	SEKRETARIAT DAERAH	Software - E-monev	195.775.000,00
16.	SEKRETARIAT DAERAH	Software	48.785.000,00
17.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH	Software - Aplikasi Sidik Jari Online	49.445.000,00
18.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH	Software - Aplikasi Website BKD	39.490.000,00
19.	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	Software - SISMIOP	49.500.000,00
20.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Software	334.823.500,00
21.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kajian	435.011.000,00
22.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Software - Website Disdukcapil	44.756.667,00
23.	DINAS KESEHATAN	Kajian	96.789.000,00
24.	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	Software - Aplikasi Pendapatan	181.500.000,00
25.	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	Software - Website dan SMS Blaster	4.050.000,00
26.	SEKRETARIAT DPRD	Kajian	47.350.000,00
27.	SEKRETARIAT DAERAH	Kajian	94.842.000,00
28.	SEKRETARIAT DAERAH	Kajian	89.892.000,00
29.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Software - SIM PKB	30.324.118,00
30.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Software - Aplikasi E-Commmers Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	53.750.000,00
31.	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	Software - Aplikasi Modernisasi Pajak Daerah	198.500.000,00

NO	U N I T	NAMA BARANG	Nilai (Rp)
1	2	3	4
32.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Kajian	199.250.000,00
33.	RSUD H. DAMANHURI BARABAI	Kajian Lainnya	174.405.000,00
34.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Software - E-Presensi	49.300.000,00
35.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jasa Penelitian Penyelidikan Tanah	197.900.000,00
36.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jasa Penelitian Penyelidikan Tanah	298.430.000,00
37.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jasa Penelitian Penyelidikan Tanah	297.300.000,00
38.	DINAS PERDAGANGAN	Kajian Lainnya	376.438.740,00
39.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Kajian	85.648.589,00
40.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Kajian	351.735.926,00
Jumlah			**5.807.567.039,90**

Rincian mutasi Aset Lainnya – Aset Tidak Berwujud tahun 2025 per SKPD pada **Lampiran 10**.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.4.3. Aset Lain-lain *Netto*	**20.594.659.971,90**	**23.490.654.956,36**

Aset Lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Aset lain-Lain Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp20.594.659.971,90 dan Rp23.490.654.956,36 mengalami penurunan sebesar Rp2.895.994.984,46 atau 12,33% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.43 Rincian Mutasi Aset Lain-lain Per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo Awal	27.274.305.926,21	23.164.623.445,95
2	Mutasi Tambah	19.925.543.673,85	4.372.498.680,26
3	Mutasi Kurang	(3.927.594.957,38)	(262.816.200,00)
4	**Saldo Akhir**	**43.272.254.642,68**	**27.274.305.926,21**
5	Akm. Penyusutan Aset Lain-Lain	(22.677.594.670,78)	(3.783.650.969,85)
	Saldo Akhir *Netto*	**20.594.659.971,90**	**23.490.654.956,36**

Rincian mutasi Aset Lainnya – Aset Lain-Lain tahun 2025 per SKPD pada **Lampiran 11.**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.4.4. Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)	**99.730.245.108,00**	**220.286.987.287,00**

Saldo kas *Treasury Deposit Facility Transfer* ke Daerah (TDF-TKD), sesuai dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, selanjutkan berdasarkan Angka 19 Perubahan Pasal 47 pada ayat 6 PMK 211/PMK.07/2023 tersebut, disampaikan bahwa penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dalam bentuk Nontunai dilakukan dengan Penetapan SBN; dan/atau *Treasury Deposit Facility*.

Pembentukan dan pengelolaan *Treasury Deposit Facility* Transfer dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang lebih sehat, efisien dan efektif serta untuk mengurangi uang kas.

Saldo kas *Treasury Deposit Facility Transfer* ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp99.730.245.108,00 dan sebesar Rp220.286.987.287,00.

Penyaluran *Treasury Deposit Facility Transfer* ke Daerah (TDF-TKD) sesuai dengan PMK Nomor : 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025.

Tabel 5.3.44 Rincian Penyaluran *Treasury Deposit Facility (TDF)* Tahun 2025

Uraian	SALDO	Penarikan TDF 2025				SALDO 2025
	2024	Tanggal STBP	Nomor STBP	Nama Rekening	Nilai (Rp)	
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan	**1.160.891.000,00**					**1.160.891.000,00**
- DBH, TDF 2023 => 611111 DBH PPh Pasal 21 (001.Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	1.153.660.000,00					1.153.660.000,00
- DBH, TDF 2023 => 611111 DBH PPh Pasal 21 (001.Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	-					-
- DBH, TDF 2023 => 611112 DBH PPh Pasal 25/29 OP (001.Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	7.231.000,00					7.231.000,00
- DBH, TDF 2023 => 611112 DBH PPh Pasal 25/29 OP (001.Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	-					-
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	**968.925.000,00**					**968.925.000,00**
- DBH, TDF 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D01.DBH PBB Migas Bagian Daerah)	124.066.000,00					124.066.000,00
- DBH, TDF 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D03.DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah)	94.294.000,00					94.294.000,00
- DBH, TDF 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D04.DBH PBB Kehutanan Bagian Daerah)	6.467.000,00					6.467.000,00

Uraian	SALDO	Penarikan TDF 2025				SALDO 2025
	2024	Tanggal STBP	Nomor STBP	Nama Rekening	Nilai (Rp)	
- DBH, TDF 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D05.DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah)	732.423.000,00					732.423.000,00
- DBH, TDF 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D06.DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah)	11.675.000,00					11.675.000,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi	**10.406.000,00**					**10.406.000,00**
- DBH, TDF 2023 => 612111 DBH SDA Minyak Bumi 15% (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	10.406.000,00					10.406.000,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	**218.114.613.287,00**				**120.556.742.179,00**	**97.557.871.108,00**
- DBH, TDF 2023 => 612311 DBH SDA Minerba - Iuran Tetap (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	25.094.000,00					25.094.000,00
- DBH, TDF 2023 => 612312 DBH SDA Minerba - Royalti (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	125.852.415.358,00	10 April 2025	63.07/41.0/000264/STBP/5.02.0.00.0.00.01.0000/4/2025	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	38.284.009.036,00	87.568.406.322,00
- DBH, TDF 2023 => 612312 DBH SDA Minerba - Royalti (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	- 28.884.246.071,00	04 Desember 2025	63.07/41.0/001078/STBP/5.02.0.00.0.00.01.0000/12/2025	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	43.988.724.107,00	- 72.872.970.178,00
- DBH, TDF 2023 => 612312 DBH SDA Minerba - Royalti (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	121.121.350.000,00	02 Juni 2025	63.07/41.0/000486/STBP/5.02.0.00.0.00.01.0000/6/2025	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	38.284.009.036,00	82.837.340.964,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	**32.152.000,00**					**32.152.000,00**
- DBH, TDF 2023 => 612512 DBH SDA Kehutanan (002.PSDH . Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	2.000,00					2.000,00
- DBH, TDF 2023 => 612512 DBH SDA Kehutanan (002.PSDH . Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	32.150.000,00					32.150.000,00
Jumlah	**220.286.987.287,00**				**120.556.742.179,00**	**99.730.245.108,00**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.2. Kewajiban	**82.129.711.555,70**	**87.370.937.588,00**

Utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berupa Kewajiban Jangka Pendek yaitu Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya Utang dengan saldo per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp82.129.711.555,70 dan Rp87.370.937.588,00, mengalami penurunan sebesar Rp5.241.226.032,30 atau 6,00% dari tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.45 Rincian Kewajiban / Utang Per 31 Desember 2025 dan 2024.

No.	Jenis Kewajiban Jangka Pendek	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Pendapatan Diterima Dimuka	41.081.933,70	89.348.117,03
2	Utang Belanja	80.282.945.622,00	87.281.589.470,97

No.	Jenis Kewajiban Jangka Pendek	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.805.684.000,00	0,00
Jumlah		**82.129.711.555,70**	**87.370.937.588,00**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.2.1. Pendapatan Diterima Dimuka	**41.081.933,70**	**89.348.117,03**

Pendapatan diterima dimuka merupakan kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca, seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak lain. Pendapatan Diterima di Muka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp41.081.933,70 dan Rp89.348.117,03, mengalami kenaikan sebesar Rp48.266.183,33 atau 54,02% dari tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp41.081.933,70 terdiri dari :

1	Penerimaan dari sewa Ruang Kantor Kas Bank Kalsel Cab. Barabai pada RSUD Barabai	:	Rp	7.500.000,00
2	Penerimaan dari sewa tempat ATM Bank Mandiri pada RSUD Barabai	:	Rp	1.875.000,00
3	Penerimaan dari sewa ATM Bank BRI Cab. Barabai pada RSUD Barabai	:	Rp	1.875.000,00
4	Penerimaan dari sewa ATM Bank Kalsel Cab. Barabai pada RSUD Barabai	:	Rp	6.750.000,00
5	Penerimaan dari Pajak Reklame pada BPPRD	:	Rp	14.531.933,70
6	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024 pada Sekretariat Daerah berupa sewa tempat ATM	:	Rp	8.550.000,00
	Jumlah		**Rp**	**41.081.933,70**

Perhitungan pengakuan pendapatan diterima di muka dihitung berdasarkan apabila perjanjian untuk bulan desember melewat ke tahun berikutnya atau awal bulan berikutnya maka menurut padangan kami karena itu masih belum melampaui petengahan bulan berkenaan maka kami bulatan ke bulan tahun sebelumnya (tidak ada metode perhitungan pengakuan pendapatan (*cut off by date*) yang terhutang.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp89.348.117,03 terdiri dari:

a.	Penerimaan dari sewa tempat ATM Bank Mandiri pada RSUD Barabai	:	Rp	24.375.000,00
b.	Penerimaan dari sewa ATM Bank Kalsel Cab. Barabai pada RSUD Barabai	:	Rp	5.625.000,00
c.	Penerimaan dari sewa ATM Bank BRI Cab. Barabai pada RSUD Barabai	:	Rp	1.875.000,00

d.	Penerimaan dari sewa Ruang Kantor Kas Bank Kalsel Cab. Barabai pada RSUD Barabai	:	Rp	7.500.000,00
e.	Penerimaan dari Pajak Reklame pada BPPRD	:	Rp	36.473.117,03
f.	Penerimaan dari sewa ATM pada Sekretariat Daerah Kab.HST	:	Rp	13.500.000,00
	Jumlah	:	**Rp**	**89.348.117,03**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.2.2. Utang Belanja	**80.282.945.622,00**	**87.281.589.470,97**

Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp80.282.945.622,00 dan Rp87.281.589.470,97 mengalami penurunan sebesar Rp6.998.643.848,97 atau 8,02% dari tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.46 Utang Belanja per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	SKPD	Keterangan
1. Utang Beban Pegawai					
-	Kewajiban Belanja Pegawai BLUD RSUD.H,Damanhuri Tahun 2024, Kewajiban TPG Tambahan Penghasilan dan Honorarium (RSUD.H.Damanhuri Barabai) Tahun 2023	150.000.000,00	15.130.965.785,00	RSUD.H.Damanhuri Barabai	Belum cukup penganggarannya tahun 2025 dan dianggarkan 2026
-	Kewajiban membayar Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	47.210.792,00	47.210.792,00	Sekretariat Daerah dan Dinas Perdagangan Tahun 2023	Belum cukup penganggarannya tahun 2025 dan dianggarkan 2026
-	Kewajiban membayar jasa pelayanan pada Dinas Kesehatan	0,00	841.424.360,00	Dinas Kesehatan	Sudah dibayar tahun 2025
2. Utang Belanja Barang dan Jasa					
-	Kewajiban membayar Jasa barang dan jasa serta pembelian obat pada RSUD. H. Damanhuri Barabai	43.798.779.899,00	43.534.886.528,00	RSUD H.Damanhuri Barabai	Belum cukup penganggarannya tahun 2025 dan dianggarkan 2026
-	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 / Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	0,00	7.754.563.800,00	Dinas Kesehatan	Sudah dibayar tahun 2025
-	Insentif Nakes Penanganan Covid-19 2021-2022	0,00	1.342.607.218,00	Dinas Kesehatan	Sudah dibayar tahun 2025
-	Kewajiban jasa konsultansi dan pemeliharaan jalan,jaringan dan irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	77.290.752,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sudah dibayar tahun 2025
3. Utang Belanja Bantuan Keuangan					
-	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	0,00	4.469.320.100,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	Sudah dibayar tahun 2025

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	SKPD	Keterangan
	Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa				
4. Utang Belanja Bagi Hasil					
-	Kewajiban membayar Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun 2023, 2024 dan 2025 pada BPKAD selaku SKPKD	799.340.147,00	960.783.229,00	BPKAD selaku SKPKD	Sudah dibayar dan dianggarkan kembali 2026
5. Utang Pengadaan Aset Tetap					
-	Utang Alat Kantor Lainnya	174.749.700,00	0,00	RSUD H. Damanhuri Barabai	Dianggarkan kembali 2026
-	Utang Alat Kedokteran Gigi	0,00	84.656.370,00	RSUD H. Damanhuri Barabai	Sudah dibayar tahun 2025
-	Utang Alat Kedokteran Lainnya	1.481.363.452,00	14.507.700,00	RSUD H. Damanhuri Barabai	Sudah dibayar dan dianggarkan kembali 2026
-	Utang Alat Kedokteran Tht	0,00	46.620.000,00	RSUD H. Damanhuri Barabai	Sudah dibayar tahun 2025
-	Utang Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	80.151.000,00	0,00	RSUD H. Damanhuri Barabai	Dianggarkan kembali 2026
-	Utang Bangunan Gedung Kantor	126.158.361,00	445.597.346,97	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Sudah dibayar dan dianggarkan kembali 2026
-	Utang Bangunan Kesehatan	28.813.573.000,00	5.407.807.121,00	RSUD H. Damanhuri Barabai	Sudah dibayar dan dianggarkan kembali 2026
-	Utang Bangunan Pengambilan Irigasi	0,00	19.311.650,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Sudah dibayar tahun 2025
	Utang Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	64.679.172,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dianggarkan kembali 2026
-	Utang Bangunan Peternakan/Perikanan	2.126.850,00	2.126.850,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Sudah dibayar dan dianggarkan kembali 2026
-	Utang Ikan Budidaya	4.719.000,00	4.719.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Sudah dibayar dan dianggarkan kembali 2026
-	Utang Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	270.231.000,00	RSUD H. Damanhuri Barabai	Sudah dibayar tahun 2025
-	Utang Instalasi Lain	0,00	1.625.000.000,00	RSUD H. Damanhuri Barabai	Sudah dibayar tahun 2025
-	Utang Jalan Kabupaten	0,00	3.793.058.919,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Sudah dibayar tahun 2025
-	Utang Jembatan Pada Jalan Kabupaten	0,00	697.114.325,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Sudah dibayar tahun 2025
-	Utang Rumah Negara Golongan I	0,00	711.786.625,00	RSUD H. Damanhuri Barabai	Sudah dibayar tahun 2025
-	Utang Taman	130.589.000,00	0,00	RSUD H. Damanhuri Barabai	Dianggarkan kembali 2026
-	Utang Bangunan Gedung Kantor	100.000,00	0,00	Dinas Pendidikan	Dianggarkan kembali 2026
-	Utang Pengadaan Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.609.405.249,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dianggarkan kembali 2026
	Jumlah Utang Belanja	**80.282.945.622,00**	**87.281.589.470,97**		

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.2.3 Utang Jangka Pendek Lainnya	**1.805.684.000,00**	**0,00**

Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan. Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.805.684.000,00 dan Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.805.684.000,00.

Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari Utang Kelebihan Transfer Pemerintah Pusat:

a. Utang lebih bayar bagi hasil pajak Saldo Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00
b. Utang lebih bayar Transfer Pemerintah Pusat - Bagi Hasil Sumber Daya Alam Saldo per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 1.805.684.000,00 dan Rp0,00

Tabel 5.3.47 Rincian Utang Kelebihan Transfer Pemerintah Pusat dan Utang Jangka Pendeknya Lainnya TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	2025	2024	SKPD
	Utang Kelebihan Transfer Pemerintah Pusat - Bagi Hasil Pajak			
1.	DBH PBB Bagian Daerah Sektor Pertambangan (Migas dan Pertambangan Lainnya)	0,00	0,00	BPKAD
2.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	0,00	BPKAD
	Utang Kelebihan Transfer Pemerintah Pusat - Bagi Hasil SDA			
1.	DBH SDA Minyak Bumi	119.227.000,00	0,00	BPKAD
2.	Royalty	0,00	0,00	BPKAD
3.	DBH Sumber Daya Alam Perikanan	218.641.000,00	0,00	BPKAD
4.	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan	0,00	0,00	BPKAD
5.	DBH Sumber Daya Alam Sawit	1.467.816.000,00	0,00	BPKAD
Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya		**1.805.684.000,00**	**0,00**	

Utang Kelebihan Transfer Pemerintah Pusat merupakan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.3.	**Ekuitas**	**3.229.646.916.347,69**	**3.094.160.895.886,85**

Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. Jumlah ekuitas pemerintah kabupaten hulu sungai tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.229.646.916.347,69 dan Rp3.094.160.895.886,85 atau terjadi kenaikan kekayaan bersih sebesar Rp135.486.020.460,84 atau 4,38% dari tahun 2024.

5.4. Penjelasan Atas Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional.

5.4.1. Pendapatan-LO

Pendapatan LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diakui sebagai penambah nilai ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) dan pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban). Realisasi Pendapatan LO Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.580.899.348.625,16 dan Rp1.905.484.067.805,78 mengalami penurunan sebesar Rp324.584.719.180,62 atau 17,03% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.1 Pendapatan-LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Pendapatan - LO	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	320.318.747.184,16	259.288.786.515,78	61.029.960.668,38	23,54
2	Pendapatan Transfer – LO	1.214.322.788.250,00	1.631.310.031.196,00	(416.987.242.946,00)	(25,56)
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	46.257.813.191,00	14.885.250.094,00	31.372.563.097,00	210,76
Jumlah		**1.580.899.348.625,16**	**1.905.484.067.805,78**	**(324.584.719.180,62)**	**(17,03)**

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah - LO

Pendapatan Asli Daerah–LO tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp320.318.747.184,16 dan Rp259.288.786.515,78 mengalami kenaikan sebesar Rp61.029.960.668,38 atau 23,54 % dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.2 Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2025 dan 2024

No.	Pendapatan - LO	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pajak Daerah - LO	37.501.921.383,33	17.238.602.752,72	20.263.318.630,61	117,55
2	Retribusi Daerah - LO	234.414.179.432,00	24.898.518.100,00	209.515.661.332,00	841,48
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	14.689.136.307,51	14.107.785.610,39	581.350.697,12	4,12
4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	33.713.510.061,32	203.043.880.052,67	(169.330.369.991,35)	(83,40)
Jumlah		**320.318.747.184,16**	**259.288.786.515,78**	**61.029.960.668,38**	**23,54**

5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah–LO tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp37.501.921.383,33 dan Rp17.238.602.752,72 mengalami kenaikan sebesar Rp20.263.318.630,61 atau 117,55% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.3 Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2025 dan 2024

No.	Pendapatan Pajak Daerah - LO	2025	2024	Kenaikan/	%
		(Rp)	(Rp)	(Penurunan)	
1	Pajak Reklame - LO	112.766.521,33	320.266.723,72	(207.500.202,39)	(64,79)
2	Pajak Parkir-LO	0,00	250.000,00	(250.000,00)	(100,00)
3	Pajak Sarang Burung Walet - LO	2.959.600,00	3.018.148,00	(58.548,00)	(1,94)
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	1.460.000,00	181.463.807,00	(180.003.807,00)	(99,20)
5	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	1.937.862.212,00	1.924.830.664,00	13.031.548,00	0,68
6	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	2.871.622.407,00	2.602.416.720,00	269.205.687,00	10,34
7	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	12.862.789.643,00	12.206.356.690,00	656.432.953,00	5,38
8	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	11.659.029.800,00	0,00	11.659.029.800,00	100,00
9	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	8.053.431.200,00	0,00	8.053.431.200,00	100,00
Jumlah		**37.501.921.383,33**	**17.238.602.752,72**	**20.263.318.630,61**	**117,55**

Pendapatan Pajak Daerah–LO tahun 2025 disajikan sebesar Rp37.501.921.383,33 sedangkan Pendapatan Pajak Daerah LRA TA 2025 disajikan sebesar Rp36.868.038.669,00 atau terdapat selisih sebesar Rp633.882.714,33. Perbedaan tersebut disebabkan adanya penambahan dan pengurangan dengan rincian sebagai berikut:

-	Saldo akhir Pendapatan Diterima di Muka Pajak Reklame tahun 2025	Rp	(14.531.933,70)
-	Saldo akhir Pendapatan Diterima di Muka Pajak Reklame tahun 2024	Rp	36.473.117,03
-	Saldo akhir Piutang Pajak PBB-P2 tahun 2025	Rp	7.564.949.900,00
-	Saldo akhir Piutang Pajak PBB-P2 tahun 2024	Rp	(7.019.139.137,00)
-	Saldo Akhir Piutang Pajak Restoran tahun 2025	Rp	15.284.939,00
-	Saldo Akhir Piutang Pajak Restoran tahun 2024	Rp	(5.470.121,00)
-	Saldo Akhir Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tahun 2025	Rp	907.451.770,00
-	Koreksi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tahun 2024	Rp	(851.135.820,00)
	Jumlah	**Rp**	**633.882.714,33**

5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah–LO

Pendapatan Retribusi Daerah–LO tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp234.414.179.432,00 dan Rp24.898.518.100,00 mengalami kenaikan sebesar Rp209.515.661.332,00 atau 841,48% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.4 Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2025 dan 2024

No.	Retribusi Daerah - LO	2025	2024	Kenaikan/	%
		(Rp)	(Rp)	(Penurunan)	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas - LO	17.445.647.622,00	3.125.614.400,00	14.320.033.222,00	458,15

No.	Retribusi Daerah - LO	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	208.232.080.332,00	12.363.247.518,00	195.868.832.814,00	1.584,28
3	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00	100,00
4	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	0,00	20.007.493,00	(20.007.493,00)	(100,00)
5	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran - LO	381.000.000,00	330.451.000,00	50.549.000,00	15,30
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	302.540.000,00	286.920.000,00	15.620.000,00	5,44
7	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	0,00	1.446.591.000,00	(1.446.591.000,00)	(100,00)
8	Retribusi Terminal - LO	0,00	34.800.000,00	(34.800.000,00)	(100,00)
9	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO	6.023.434.991,00	6.398.564.982,00	(375.129.991,00)	(5,86)
10	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	25.000.000,00	23.025.000,00	1.975.000,00	8,58
11	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga- LO	136.650.000,00	190.720.000,00	(54.070.000,00)	(28,35)
12	Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah - LO	191.511.000,00	172.462.500,00	19.048.500,00	11,05
13	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO	1.422.150.500,00	0,00	1.422.150.500,00	100,00
13	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	247.264.987,00	506.114.207,00	(258.849.220,00)	(51,14)
	Jumlah	**234.414.179.432,00**	**24.898.518.100,00**	**209.515.661.332,00**	**841,48**

Pendapatan Retribusi Daerah–LO tahun 2025 disajikan sebesar Rp234.414.179.432,00 sedangkan Pendapatan Retribusi Daerah–LRA TA 2025 disajikan sebesar Rp228.768.959.135,00 atau terdapat selisih sebesar Rp5.645.220.297,00. Perbedaan tersebut disebabkan adanya penambahan dan pengurangan dengan rincian sebagai berikut.

-	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan tahun 2025	Rp	3.528.912.283,00
-	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan tahun 2024	Rp	(3.159.702.783,00)
-	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah tahun 2025	Rp	9.238.387.022,00
-	Pelunasan Piutang Lain-lain PAD yang Sah yang dicatat mengurangi Pendapatan Retribusi	Rp	(3.967.340.725,00)
-	Pendapatan Diterima di Muka tahun 2025	Rp	(8.550.000,00)
-	Pendapatan Diterima di Muka tahun 2024	Rp	13.500.000,00
-	Beban Transfer Transaksi Keuangan BLUD (Biaya Transfer Bank) yang diakui sebagai Pendapatan Retribusi-LO BLUD	Rp	14.500,00
	Jumlah	**Rp**	**5.645.220.297,00**

5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp14.689.136.307,51 dan Rp14.107.785.610,39 mengalami kenaikan sebesar Rp581.350.697,12 atau 4,12% yang merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan–LO tahun 2025 disajikan sebesar Rp14.689.136.307,51 sedangkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA TA 2025 disajikan sebesar Rp8.316.087.147,00 atau terdapat selisih sebesar Rp6.373.049.160,51. Perbedaan tersebut disebabkan adanya Alokasi Laba Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada PT. Air Minum Murakata Lestari (Perseroda) tahun 2025 yang perhitungannya berdasarkan Laporan Keuangan PT. Air Minum Murakata Lestari (Perseroda) tahun 2025 (*Unaudited*).

5.4.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah – LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp33.713.510.061,32 dan Rp203.043.880.052,67, mengalami penurunan sebesar Rp169.330.369.991,35 atau 83,40% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.5 Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

No.	Lain-lain PAD yang Sah-LO	2025	2024	Kenaikan/	%
		(Rp)	(Rp)	(Penurunan)	
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan - LO	490.524.400,00	0,00	490.524.400,00	100,00
2	Penerimaan Jasa Giro - LO	10.299.559.922,04	15.734.074.665,81	(5.434.514.743,77)	(34,54)
3	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	7.596.439.766,00	8.405.618.581,00	(809.178.815,00)	(9,63)
4	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	1.696.312.329,00	98.134.185,00	1.598.178.144,00	1.628,56
5	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	258.256.305,85	2.622.652.914,87	(2.364.396.609,02)	(90,15)
6	Pendapatan Denda Pajak - LO	87.837.858,00	15.550.354,00	72.287.504,00	464,86
7	Pendapatan dari Pengembalian-LO	11.285.274.141,00	0,00	11.285.274.141,00	100,00
8	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	0,00	173.536.412.088,00	(173.536.412.088,00)	(100,00)
9	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	339.000.000,00	373.250.000,00	(34.250.000,00)	(9,18)
10	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-LO	1.660.305.339,43	2.258.187.263,99	(597.881.924,56)	(26,48)
Jumlah		**33.713.510.061,32**	**203.043.880.052,67**	**(169.330.369.991,35)**	**(83,40)**

Pendapatan lain-lain PAD yang sah–LO tahun 2025 disajikan sebesar Rp33.713.510.061,32 sedangkan pendapatan lain-lain PAD yang sah–LRA TA 2025 disajikan sebesar Rp38.319.717.167,66 atau terdapat selisih sebesar Rp4.606.207.106,34. Perbedaan tersebut disebabkan adanya penambahan dan pengurangan dengan rincian sebagai berikut.

-	Saldo Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2024	Rp	(4.795.643.473,96)
-	Saldo akhir Pendapatan Diterima di Muka Pendapatan BLUD tahun 2025	Rp	(18.000.000,00)
-	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah yang dicatat sebagai pengurang Aset Lain-lain (Pengembalian Temuan LHP Tahun 2024)	Rp	(3.800.687.957,38)
-	Saldo akhir Pendapatan Diterima di Muka Pendapatan BLUD tahun 2024	Rp	39.375.000,00
-	Pelunasan Piutang Lain-lain PAD yang Sah yang dicatat mengurangi Pendapatan Retribusi	Rp	3.967.340.725,00
-	Beban Transfer Transaksi Keuangan BLUD (Biaya Transfer Bank) yang diakui sebagai Pendapatan Retribusi-LO BLUD	Rp	1.408.600,00
		Rp	**(4.606.207.106,34)**

5.4.1.2. Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer–LO tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.214.322.788.250,00 dan Rp1.631.310.031.196,00, mengalami penurunan sebesar Rp416.987.242.946,00 atau 25,56% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.6 Pendapatan Transfer Tahun 2025 dan 2024

NO	Uraian	2025	2024	Kenaikan	%
		(Rp)	(Rp)	(Penurunan)	
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	1.099.439.871.365,00	1.504.080.883.029,00	(404.641.011.664,00)	(26,90)
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	114.882.916.885,00	127.229.148.167,00	(12.346.231.282,00)	(9,70)
Jumlah		**1.214.322.788.250,00**	**1.631.310.031.196,00**	**(416.987.242.946,00)**	**(25,56)**

5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–LO tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.099.439.871.365,00 dan Rp1.504.080.883.029,00, mengalami penurunan sebesar Rp404.641.011.664,00 atau 26,90% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.7 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	2025	2024	Kenaikan	%
		(Rp)	(Rp)	(Penurunan)	
1	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	11.581.993.000,00	(11.581.993.000,00)	(100,00)
2	Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dana Bagi Hasil (DBH)	370.410.585.200,00	736.338.070.431,00	(365.927.485.231,00)	(49,70)
4	Dana Alokasi Umum (DAU)	546.966.063.077,00	546.064.341.637,00	901.721.440,00	0,17
5	Dana Alokasi Khusus (DAK)	182.063.223.088,00	210.096.477.961,00	(28.033.254.873,00)	(13,34)
Jumlah		**1.099.439.871.365,00**	**1.504.080.883.029,00**	**(404.641.011.664,00)**	**(26,90)**

Transfer Pemerintah Pusat-LO tahun 2025 disajikan sebesar Rp1.099.439.871.365,00 sedangkan Transfer Pemerintah Pusat–LRA tahun 2025 disajikan sebesar Rp1.404.346.663.006,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp304.906.791.641,00. Perbedaan tersebut disebabkan adanya penambahan dan pengurangan dengan rincian sebagai berikut:

-	Saldo akhir Piutang Transfer Pemerintah Pusat tahun 2025	Rp	146.933.750.000,00
-	Saldo akhir Piutang Transfer Pemerintah Pusat tahun 2024	Rp	(215.324.003.000,00)
-	Transfer Dana Bagi Hasil dari *Treasury Deposit Facility* pada Bank Indonesia ke Rekening Kas Umum Daerah	Rp	(120.556.742.179,00)
-	Penerapan Buletin Teknis No. 21 KSAP Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Desa tidak dicatat dalam Laporan Operasional	Rp	(115.959.796.462,00)
	Jumlah	**Rp**	**(304.906.791.641,00)**

5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp114.882.916.885,00 dan Rp127.229.148.167,00 mengalami penurunan sebesar Rp12.346.231.282,00 atau 9,70% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.8 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Pendapatan Transfer Antar Daerah- LO	2025	2024	Kenaikan	%
		(Rp)	(Rp)	(Penurunan)	
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	8.703.637.316,00	(8.703.637.316,00)	(100,00)
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	11.286.658.727,00	(11.286.658.727,00)	(100,00)
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	98.345.620.949,00	91.136.740.809,00	7.208.880.140,00	7,91
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	69.664.930,00	183.561.679,00	(113.896.749,00)	(62,05)
5	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	16.467.631.006,00	15.918.549.636,00	549.081.370,00	3,45
Jumlah		**114.882.916.885,00**	**127.229.148.167,00**	**(12.346.231.282,00)**	**(9,70)**

Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO tahun 2025 disajikan sebesar Rp114.882.916.885,00 sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah–LRA tahun 2025 disajikan sebesar Rp109.837.269.015,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp5.045.647.870,00. Perbedaan tersebut disebabkan adanya penambahan dan pengurangan dengan rincian sebagai berikut.

-	Saldo akhir Piutang Transfer Antar Daerah tahun 2025	Rp	38.379.296.665,00
-	Saldo akhir Piutang Transfer Antar Daerah tahun 2024	Rp	(34.331.460.697,00)
-	Koreksi Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	Rp	997.811.902,00
	Jumlah	**Rp**	**5.045.647.870,00**

5.4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LO tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp46.257.813.191,00 dan Rp14.885.250.094,00 mengalami kenaikan sebesar Rp31.372.563.097,00 atau 210,76% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.9 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun - LO 2025 dan 2024

No.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	2025	2024	Kenaikan/	%
		(Rp)	(Rp)	(Penurunan)	
1	Pendapatan Hibah-LO	801.144.876,00	1.801.290.562,00	(1.000.145.686,00)	(55,52)
2	Pendapatan Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Lain-lain Pendapatan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan - LO	45.456.668.315,00	13.083.959.532,00	32.372.708.783,00	247,42
	Jumlah	**46.257.813.191,00**	**14.885.250.094,00**	**31.372.563.097,00**	**210,76**

5.4.1.3.1. Pendapatan Hibah–LO

Pendapatan Hibah-LO tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp801.144.876,00 dan Rp1.801.290.562,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.000.145.686,00 atau 55,52% yang terdiri dari hibah berupa bahan alat kesehatan habis pakai dari pemerintah daerah lainnya dan hibah berupa peralatan dan mesin dari pemerintah pusat dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.10 Pendapatan Hibah-LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Pendapatan Hibah-LO	2025	2024	Kenaikan/	%
		(Rp)	(Rp)	(Penurunan)	
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	801.144.876,00	0,00	801.144.876,00	100,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	0,00	372.613.562,00	(372.613.562,00)	(100,00)
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO	0,00	1.428.677.000,00	(1.428.677.000,00)	(100,00)
5	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pendapatan Hibah Luar Negeri Dana IPDMIP-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**801.144.876,00**	**1.801.290.562,00**	**(1.000.145.686,00)**	**(55,52)**

Pendapatan Hibah–LO tahun 2025 disajikan sebesar Rp801.144.876,00 sedangkan Pendapatan Hibah–LRA TA 2025 disajikan sebesar Rp0,00 atau terdapat selisih sebesar Rp801.144.876,00 terdiri dari :

- Pendapatan Hibah berupa Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai dan dari Pemerintah Daerah Lainnya — Rp 381.144.876,00
- Pendapatan Hibah Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin dari Pemerintah Pusat — Rp 420.000.000,00

Jumlah — **Rp 801.144.876,00**

5.4.1.3.2. Pendapatan Lainnya–LO

Pendapatan Lainnya–LO tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00. Pendapatan Lainnya–LO dan Pendapatan Lainnya–LRA masing-masing disajikan sebesar Rp0,00.

5.4.1.3.3. Lain-lain Pendapatan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan–LO

Lain-lain Pendapatan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp45.456.668.315,00 dan Rp13.083.959.532,00 mengalami kenaikan sebesar Rp32.372.708.783,00 atau 247,42 % yang terdiri dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP. Lain-lain Pendapatan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO tahun 2025 dan Lain-lain Pendapatan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan–LRA TA 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp45.456.668.315,00.

5.4.2. Beban

Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban terdiri dari Beban Operasi, Beban Transfer, Defisit Non Operasional dan Beban Luar Biasa. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.565.460.295.044,64 dan Rp1.459.827.176.159,24, mengalami kenaikan sebesar Rp105.633.118.885,40 atau 7,24%. Rincian beban adalah sebagai berikut.

Tabel 5.4.11 Realisasi Beban Tahun 2025 dan 2024

No.	Beban	2025	2024	Kenaikan/	%
		(Rp)	(Rp)	(Penurunan)	
1	Beban Operasi	1.332.212.670.756,04	1.242.005.934.029,41	90.206.736.726,63	7,26
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	138.126.618.330,60	112.577.866.771,83	25.548.751.558,77	22,69
3	Beban Transfer	93.710.610.958,00	104.649.789.026,00	(10.939.178.068,00)	(10,45)
4	Beban Tak Terduga	1.410.395.000,00	593.586.332,00	816.808.668,00	137,61
	Jumlah	**1.565.460.295.044,64**	**1.459.827.176.159,24**	**105.633.118.885,40**	**7,24**

5.4.2.1. Beban Operasi

Beban Operasi tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.332.212.670.756,04 dan Rp1.242.005.934.029,41 mengalami kenaikan sebesar Rp90.206.736.726,63 atau 7,26% dengan rincian sebagai berikut berikut:

Tabel 5.4.12 Realisasi Beban Operasi Tahun 2025 dan 2024

No.	Beban	2025	2024	Kenaikan/	%
		(Rp)	(Rp)	(Penurunan)	
1	Beban Pegawai	590.309.727.160,00	545.151.320.021,00	45.158.407.139,00	8,28
2	Beban Barang dan Jasa	655.294.963.308,25	612.700.526.617,59	42.594.436.690,66	6,95
3	Beban Subsidi	62.515.221,24	388.104.230,75	(325.589.009,51)	(83,89)
4	Beban Hibah	53.423.450.216,00	64.169.552.612,70	(10.746.102.396,70)	(16,75)
5	Beban Bantuan Sosial	32.351.880.000,00	18.613.150.000,00	13.738.730.000,00	73,81
6	Beban Penyisihan Piutang	770.134.850,55	983.280.547,37	(213.145.696,82)	(21,68)
	Jumlah	**1.332.212.670.756,04**	**1.242.005.934.029,41**	**90.206.736.726,63**	**7,26**

5.4.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp590.309.727.160,00 dan Rp545.151.320.021,00 mengalami kenaikan sebesar Rp45.158.407.139,00 atau 8,28% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.13 Realisasi Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

No.	Beban	2025	2024	Kenaikan/	%
		(Rp)	(Rp)	(Penurunan)	
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	346.575.421.852,00	331.484.571.308,00	15.090.850.544,00	4,55
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	220.180.813.443,00	89.391.676.769,00	130.789.136.674,00	146,31
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	81.062.695.227,00	(81.062.695.227,00)	(100,00)
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	19.914.060.860,00	17.445.450.431,00	2.468.610.429,00	14,15
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.946.197.159,00	890.970.444,00	1.055.226.715,00	118,44
6.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	818.538.624,00	708.357.892,00	110.180.732,00	15,55
7.	Beban Pegawai BLUD	874.695.222,00	24.167.597.950,00	(23.292.902.728,00)	(96,38)
	Jumlah	**590.309.727.160,00**	**545.151.320.021,00**	**45.158.407.139,00**	**8,28**

Beban pegawai (LO) tahun 2025 disajikan sebesar Rp590.309.727.160,00 sedangkan belanja pegawai (LRA) TA 2025 disajikan sebesar Rp605.290.692.945,00 atau terdapat selisih sebesar Rp14.980.965.785,00. Perbedaan tersebut disebabkan adanya pengakuan Utang Belanja Pegawai tahun 2025 dan pembayaran Utang Belanja Pegawai tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

-	Saldo akhir Utang Belanja Pegawai Tahun 2025	Rp	197.210.792,00
-	Saldo akhir Utang Belanja Pegawai Tahun 2024	Rp	(16.019.600.937,00)
-	Utang Belanja Pegawai 20NN-1 yang pembayarannya menggunakan Rekening Beban Barang dan Jasa	Rp	841.424.360,00
	Jumlah	Rp	**(14.980.965.785,00)**

5.4.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp655.294.963.308,25 dan Rp612.700.526.617,59 mengalami kenaikan sebesar 42.594.436.690,66 atau 6,95% terdiri atas beban sebagai berikut:

Tabel 5.4.14 Realisasi Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

No	Beban	2025	2024	Kenaikan/	%
		(Rp)	(Rp)	(Penurunan)	
1	Beban Bahan Pakai Habis	164.288.456.900,79	112.628.677.184,53	51.659.779.716,26	45,87
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	4.272.620.144,00	1.034.527.117,00	3.238.093.027,00	313,00
3	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	3.459.271.386,19	4.380.987.817,00	(921.716.430,81)	(21,04)
4	Beban Jasa Kantor	147.722.143.558,00	135.580.122.515,00	12.142.021.043,00	8,96
5	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	56.495.725.720,00	50.011.913.201,00	6.483.812.519,00	12,96
6	Beban Sewa Tanah	634.308.750,00	590.879.000,00	43.429.750,00	7,35
7	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.742.684.967,00	1.485.156.998,00	257.527.969,00	17,34
8	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.319.412.793,00	3.489.236.860,00	(1.169.824.067,00)	(33,53)
9	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	118.250.000,00	184.400.000,00	(66.150.000,00)	(35,87)

No	Beban	2025	2024	Kenaikan/	%
		(Rp)	(Rp)	(Penurunan)	
10	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	0,00	1.202.000,00	(1.202.000,00)	(100,00)
11	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	8.637.360.702,98	8.943.456.470,80	(306.095.767,82)	(3,42)
12	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.050.000.000,00	3.884.181.955,00	(2.834.181.955,00)	(72,97)
13	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	1.128.000.000,00	615.600.000,00	512.400.000,00	83,24
14	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	190.000.000,00	400.000.000,00	(210.000.000,00)	(52,50)
15	Belanja Kursus/pelathan,sosialiasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan	10.807.556.134,00	11.298.888.025,00	(491.331.891,00)	(4,35)
16	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.346.112.728,00	5.013.431.842,00	(667.319.114,00)	(13,31)
17	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.590.542.008,00	4.692.257.554,79	898.284.453,21	19,14
18	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.375.962.507,00	892.775.068,00	7.483.187.439,00	838,19
19	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57.389.435.926,00	77.588.656.810,99	(20.199.220.884,99)	(26,03)
20	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.204.885.200,00	7.252.669.760,00	1.952.215.440,00	26,92
22	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.185.309.690,00	639.658.177,00	545.651.513,00	85,30
23	Beban Barang dan Jasa BOSP	15.505.125.035,00	16.707.843.779,00	(1.202.718.744,00)	(7,20)
24	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	6.655.276.625,00	7.557.654.993,00	(902.378.368,00)	(11,94)
25	Beban Barang dan Jasa BLUD	144.176.522.533,29	157.826.349.489,48	(13.649.826.956,19)	(8,65)
Jumlah		**655.294.963.308,25**	**612.700.526.617,59**	**42.594.436.690,66**	**6,95**

Beban Barang dan Jasa (LO) tahun 2025 disajikan sebesar Rp655.294.963.308,25 sedangkan Belanja Barang dan Jasa (LRA) TA 2025 disajikan sebesar Rp708.318.667.192,32 atau terdapat selisih sebesar Rp53.023.703.884,07. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penambahan Beban Barang dan Jasa:

- Persediaan Tahun 2024 Rp 31.357.015.553,81
- Hibah Persediaan dari Pemerintah Pusat Rp 381.144.876,00
- Saldo akhir Utang Beban Barang dan Jasa 2025 Rp 43.798.779.899,00
- Koreksi Utang Beban Barang dan Jasa Rp 180.214.307,00
- Reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Barang dan Jasa Rp 3.365.367.606,19
- Saldo Beban Dibayar di Muka Tahun 2024 Rp 48.224.750,00

- Potongan Biaya Transfer Bank Pendapatan yang Dicatat sebagai Beban Barang dan Jasa BLUD	Rp	1.423.100,00		
Jumlah			Rp	79.132.170.092,00
Pengurangan Beban Barang dan Jasa:				
- Saldo akhir Beban Dibayar di Muka Tahun 2025	Rp	59.968.000,00		
- Utang Belanja Pegawai 2024 yang pembayarannya menggunakan Rekening Beban Barang dan Jasa	Rp	841.424.360,00		
- Persediaan Tahun 2025	Rp	34.693.172.375,38		
- Saldo akhir Utang Beban Barang dan Jasa 2024	Rp	52.709.348.298,00		
- Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa ke Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Rp	165.499.800,00		
- Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa ke Aset Tetap	Rp	35.398.076.580,82		
- Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa ke Aset Lain-Lain	Rp	8.288.384.561,87		
Jumlah			Rp	132.155.873.976,07
Selisih			Rp	**(53.023.703.884,07)**

Dalam beban barang dan jasa diantaranya terdapat beban persediaan pada beban barang habis pakai dan beban barang tak habis pakai sebesar Rp146.321.386.019,43 dengan rincian sebagai berikut.

- Persediaan akhir tahun 2024	Rp	31.357.015.553,81		
- Realisasi belanja persediaan TA 2025	Rp	160.624.641.443,00		
- Pendapatan Hibah Persediaan	Rp	381.144.876,00		
- Utang Beban Persediaan Tahun 2025	Rp	129.253.294.114,00		
Jumlah			Rp	321.616.095.986,81
- Reklasifikasi Beban Persediaan ke Aset Tetap	Rp	755.346.392,00)		
- Persediaan Akhir tahun 2025	Rp	(34.693.172.375,38)		
- Utang Beban Persediaan Tahun 2024	Rp	(139.798.817.450,00)		
- Reklasifikasi Beban Persediaan ke Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Rp	(47.373.750,00)		
Jumlah			Rp	(175.294.709.967,38)
Beban Persediaan Tahun 2025			**Rp**	**146.321.386.019,43**

5.4.2.1.3. Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Beban Subsidi (LO) dan Belanja Subsidi (LRA) tahun 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp62.515.221,24 sedangkan tahun 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp388.104.230,75 mengalami penurunan sebesar Rp325.589.009,51 atau 83,89 %.

5.4.2.1.4. Beban Hibah

Beban Hibah merupakan pengeluaran/kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang/jasa yang dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Beban Hibah tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp53.423.450.216,00 dan Rp64.169.552.612,70 atau mengalami penurunan sebesar Rp10.746.102.396,70 atau 16,75% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.15 Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024

No.	Hibah – LO	2025	2024	Kenaikan.	%
		(Rp)	(Rp)	(Penurunan)	
1.	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	2.629.805.600,00	30.381.618.333,70	(27.751.812.733,70)	(91,34)
2	Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	18.879.463.731,00	11.930.724.825,00	6.948.738.906,00	58,24
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	12.551.610.613,00	8.232.818.127,00	4.318.792.486,00	52,46
5	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.340.000.000,00	410.000.000,00	1.930.000.000,00	470,73
6	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.060.751.000,00	3.847.983.108,00	3.212.767.892,00	83,49
	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00
7	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.546.710.000,00	1.525.574.370,00	21.135.630,00	1,39
8	Beban Hibah Uang Dana BOS yang	1.446.373.751,00	269.049.214,00	1.177.324.537,00	437,59

No.	Hibah – LO	2025	2024	Kenaikan.	%
		(Rp)	(Rp)	(Penurunan)	
	Diterima oleh Satdikdas Swasta				
9	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	0,00	1.068.231.135,00	(1.068.231.135,00)	(100,00)
10	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.816.566.450,00	3.974.322.000,00	(157.755.550,00)	(3,97)
11	Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	3.122.169.071,00	2.529.231.500,00	592.937.571,00	23,44
	Jumlah	**53.423.450.216,00**	**64.169.552.612,70**	**(10.746.102.396,70)**	**(16,75)**

Beban Hibah (LO) tahun 2025 disajikan sebesar Rp53.423.450.216,00 sedangkan Belanja Hibah (LRA) TA 2025 disajikan sebesar Rp53.667.554.616,00 atau terdapat selisih sebesar Rp244.104.400,00. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya kekurangan volume atas empat paket pekerjaan Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5.4.2.1.5. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Beban Bantuan Sosial tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp32.351.880.000,00 dan Rp18.613.150.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp13.738.730.000,00 atau 73,81%.

Beban Bantuan Sosial (LO) tahun 2025 dan Belanja Bantuan Sosial (LRA) TA 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp32.351.880.000,00.

5.4.2.1.6. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan penyisihan piutang tidak tertagih Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp770.134.850,55 dan Rp983.280.547,37 mengalami penurunan sebesar Rp213.145.696,82 atau 21,68% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.16 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024

No.	Beban Penyisihan Piutang	2025	2024	Kenaikan.	%
		(Rp)	(Rp)	(Penurunan)	
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	493.964.249,40	416.713.973,85	77.250.275,55	18,54
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	270.968.809,69	543.053.867,50	(272.085.057,81)	(50,10)
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.201.791,46	23.512.706,02	(18.310.914,56)	(77,88)
4	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**770.134.850,55**	**983.280.547,37**	**(213.145.696,82)**	**(21,68)**

5.4.2.2. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan merupakan beban penyusutan aset tetap tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp138.126.618.330,60 dan Rp112.577.866.771,83 mengalami kenaikan sebesar Rp25.548.751.558,77 atau 22,69% yang dikarenakan oleh adanya pembebanan penyusutan atas penambahan aset tetap pada tahun berjalan. Rincian beban penyusutan sebagai berikut.

Tabel 5.4.17 Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 dan TA 2024

No.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	2025	2024	Kenaikan.	%
		(Rp)	(Rp)	(Penurunan)	
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	69.675.752.828,93	49.769.130.197,72	19.906.622.631,21	40,00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	22.982.155.868,29	20.600.977.813,08	2.381.178.055,21	11,56
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	45.259.047.202,83	42.129.866.137,03	3.129.181.065,80	7,43
4	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	209.662.430,55	77.892.624,00	131.769.806,55	169,17
Jumlah		**138.126.618.330,60**	**112.577.866.771,83**	**25.548.751.558,77**	**22,69**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah diketahui metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus *(straight line method)*, dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Metode garis lurus adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Perhitungan penyusutan aset tetap menggunakan pendekatan bulanan, yaitu aset tetap yang diperoleh pada awal, pertengahan maupun akhir bulan tetap disusutkan satu bulan. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah, konstruksi dalam pengerjaan dan buku.

5.4.2.3. Beban Transfer - LO

Beban Transfer terdiri atas pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Beban Transfer tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp93.710.610.958,00 dan Rp104.649.789.026,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.939.178.068,00 atau 10,45% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.18 Beban Transfer Tahun 2025 dan 2024

No.	Beban Transfer	2025	2024	Kenaikan.	%
		(Rp)	(Rp)	(Penurunan)	
1.	Beban Bagi Hasil	3.677.983.716,00	2.870.731.188,00	807.252.528,00	28,12
2.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	90.032.627.242,00	101.779.057.838,00	(11.746.430.596,00)	(11,54)
Jumlah		**93.710.610.958,00**	**104.649.789.026,00**	**(10.939.178.068,00)**	**(10,45)**

Beban Transfer (LO) tahun 2025 disajikan sebesar Rp93.710.610.958,00 sedangkan Belanja Transfer (LRA) TA 2025 disajikan sebesar Rp214.301.170.602,00 atau terdapat selisih sebesar Rp120.590.559.644,00 karena adanya pembayaran Utang Beban Transfer tahun 2024, penambahan Utang Beban Transfer tahun 2025 dan Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa yang tidak dicatat pada Laporan Operasional karena Dana Desa merupakan hak Desa untuk memanfaatkannya sedangkan Pemerintah Daerah sebagai penampung sementara sebelum disalurkan. Hal tersebut sesuai Buletin Teknis Nomor 21 Standar Akuntansi

Pemerintahan. Adapun dengan rinciannya sebagai berikut.

-	Saldo akhir Utang Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun 2025	Rp	509.730.515,00
-	Saldo akhir Utang Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun 2025	Rp	289.609.632,00
-	Saldo akhir Utang Beban Transfer Penyaluran Dana Desa tahun 2025	Rp	0,00
-	Saldo akhir Utang Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun 2024	Rp	(405.621.140,00)
-	Saldo akhir Utang Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun 2024	Rp	(555.162.089,00)
-	Saldo akhir Utang Beban Transfer Penyaluran Dana Desa tahun 2024	Rp	(4.469.320.100,00)
-	Penerapan Bultek 21 (belanja dana desa tidak diakui dalam LO)	Rp	(115.959.796.462,00)
	Jumlah	**Rp**	**(120.590.559.644,00)**

5.4.2.4. Beban Tak Terduga

Beban Tak Terduga merupakan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk penanganan bencana alam, pendampingan pasien miskin rawat inap di Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai dan santunan kematian. Beban Tak Terduga digunakan untuk meringankan beban masyarakat atas korban musibah kebakaran, kebanjiran, tanah longsor, angin puting beliung, antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 dan lainnya di wilayah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sebagai Belanja Tak Terduga. Beban Tak Terduga tahun 2025 dan 2024 disajikan masing–masing sebesar Rp1.410.395.000,00 dan Rp593.586.332,00, terjadi kenaikan sebesar Rp816.808.668,00 atau 137,61% . Beban Tak Terduga tahun 2025 dan Belanja Tak Terduga tahun 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp1.410.395.000,00.

5.4.4. Surplus/Defisit

5.4.4.1. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional dari Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp15.439.053.580,52 dan Rp445.656.891.646,54, mengalami penurunan sebesar (Rp430.217.838.066,02) dari Tahun 2024. Perhitungan Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2025 sebesar Rp15.439.053.580,52 diperoleh dari pendapatan sebesar Rp1.580.899.348.625,16 dikurangi dengan beban sebesar Rp1.565.460.295.044,64.

5.4.4.2. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan Tahun 2024 disajikan sebesar Rp0,00.

5.4.5. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan Tahun 2024 disajikan sebesar Rp15.439.053.580,52 dan Rp445.656.891.646,54

5.4.6. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan Tahun 2024 disajikan sebesar Rp0,00.

5.6. Penjelasan Atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun anggaran 2025 dibandingkan dengan tahun anggaran 2024.

5.6.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal tahun 2025 sebesar Rp3.094.160.895.886,85 berasal dari saldo ekuitas per 31 Desember 2024. Saldo ekuitas per 31 Desember 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2025 Tanggal 2 September 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

5.6.2 Surplus/(Defisit)-LO TA 2025

Surplus/(Defisit)-LO TA 2025 sebesar Rp15.439.053.580,52 berasal dari pendapatan Rp1.580.899.348.625,16 setelah dikurangi beban sebesar Rp1.565.460.295.044,64 Penjelasan mengenai Surplus/Defisit-LO dapat dilihat juga penjelasan atas Laporan Operasional.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar merupakan koreksi/penyesuaian saldo awal pos-pos neraca diakibatkan oleh perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi-koreksi kesalahan pencatatan berupa koreksi ekuitas lainnya.

5.6.3 Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp120.046.966.880,32 merupakan koreksi/penyesuaian saldo awal pos-pos neraca diakibatkan oleh perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi-koreksi kesalahan pencatatan. Koreksi ekuitas lainnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.6.1 Penambahan dan Pengurangan Koreksi Ekuitas

Per 31 Desember 2025 dan 2024

Koreksi yang menambah Ekuitas Akhir :	TAHUN 2025	TAHUN 2024
- Koreksi Nilai Kas	-	-
- Koreksi Nilai Piutang	875.856.537,38	269.295,00
- Koreksi Nilai Persediaan	-	74.040.000,00
- Koreksi Nilai Investasi	-	361.136,00
- Koreksi Nilai Aset Tetap	188.259.751.753,83	1.847.469.617,00
- Koreksi Nilai Utang	799.113.451,00	2.550.228,00
Jumlah	**189.934.721.742,21**	**1.924.690.276,00**
Koreksi yang mengurangi Ekuitas Akhir :		
- Koreksi Nilai Kas	-	6.099.996,00
- Koreksi Nilai Piutang	997.811.902,00	0,38
- Koreksi Nilai Persediaan	-	4.728.917,73
- Koreksi Nilai Investasi	-	-
- Koreksi Nilai Aset Tetap	56.567.686.258,96	2.382.177.855,00
- Koreksi Nilai Aset Lainnya	10.516.572.700,93	-
- Koreksi Nilai Utang	1.805.684.000,00	2.256.361.650,00
Jumlah	**69.887.754.861,89**	**4.649.368.419,11**
Jumlah Koreksi Ekuitas	**120.046.966.880,32**	**(2.724.678.143,11)**

Rincian koreksi ekuitas disajikan pada **Lampiran 12.**

Penambahan dan pengurangan koreksi ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Koreksi Yang Menambah Ekuitas :

a. Koreksi Nilai Piutang sebesar Rp875.856.537,38.

Penyesuaian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada RSUD H. Damanhuri Barabai, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perpustakaan, Sekretariat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah dilunasi dan Penyesuaian Piutang Pendapatan PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain-LO Tahun 2024.

b. Koreksi Nilai Aset Tetap sebesar Rp188.259.751.753,83

-	Koreksi Saldo Awal Aset Tetap	Rp	15.729.121.882,11
-	Koreksi Saldo Awal Penyusutan Aset Tetap	Rp	166.126.538.450,87
-	Mutasi Masuk Aset Tetap antar SKPD	Rp	5.757.726.991,85
-	Penghapusan Aset Tetap	Rp	646.364.429,00
	Jumlah	**Rp**	**188.259.751.753,83**

c. Koreksi Nilai Utang sebesar Rp799.113.451,00.

Koreksi atas Saldo Awal Utang Insentif Nakes Penangan Covid-19 2021-2022 pada Dinas Kesehatan berdasarkan berdasarkan Hasil Revieu Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Covid-19 Tahun 2022 Nomor: 700/306-IRBANWIL-IV/LHR/INSP/2025 sebesar Rp180.214.307,00 dan Koreksi atas Saldo Awal Utang Pengadaan Aset Tetap dan Retensi 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp618.899.144,00.

2. Koreksi Yang Mengurangi Ekuitas :

a. Koreksi Nilai Piutang sebesar Rp997.811.902,00.

Penyesuaian Piutang DBH Pajak Rokok yang dikompensasi pada penyaluran DBH Pajak Rokok Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 900.1/1303/BPKAD/2025.

b. Koreksi Nilai Aset Tetap sebesar Rp56.567.686.258,96.

-	Mutasi Keluar Aset Tetap antar SKPD	Rp	4.841.463.376,71
-	Koreksi Saldo Awal Aset Tetap	Rp	5.517.769.328,73
-	Koreksi Saldo Awal Penyusutan Aset Tetap	Rp	45.653.859.983,52
-	Penghapusan Aset Tetap	Rp	554.593.570,00
	Jumlah	**Rp**	**56.567.686.258,96**

c. Koreksi Nilai Aset Lainnya Rp10.516.572.700,93.

Koreksi atas saldo awal aset lain-lain karena adanya migrasi aplikasi dan kebijakan akuntansi.

d. Koreksi Nilai Utang sebesar Rp1.805.684.000,00.

Penyesuaian Lebih Bayar Dana Perimbangan berdasarkan PMK Nomor 120 Tahun 2025 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

5.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.229.646.916.347,69 berasal dari saldo akhir Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.094.160.895.886,85 ditambah Defisit-LO tahun 2025 sebesar Rp15.439.053.580,52 ditambah Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar

Rp120.046.966.880,32.

Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.094.160.895.886,85 berasal dari saldo akhir Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.651.228.682.383,42 ditambah Surplus-LO tahun 2024 sebesar Rp445.656.891.646,54 ditambah Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar (Rp2.724.678.143,11).

Ekuitas Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.229.646.916.347,69 dan Rp3.094.160.895.886,85 atau terjadi kenaikan kekayaan bersih sebesar Rp135.486.020.460,84 atau 4,38%.

5.5. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan dan perubahan terhadap Kas dan Setara Kas selama tahun Anggaran 2025 dan 2024 dan saldo Kas dan Setara Kas sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.5.1.	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**	**256.020.002.478,10**	**352.648.611.782,67**

Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi untuk tahun Anggaran yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp256.020.002.478,10 dan Rp352.648.611.782,67. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, maka Arus Kas dari Aktivitas Operasi mengalami penurunan sebesar Rp96.628.609.304,57 atau 27,40%. Perhitungan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.5.1 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	1.871.422.878.054,66	1.797.381.785.576,67
2	Arus Keluar Kas	1.615.402.875.576,56	1.444.733.173.794,00
Arus Kas Bersih		**256.020.002.478,10**	**352.648.611.782,67**

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.5.1.1.	**Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi**	**1.871.422.878.054,66**	**1.797.381.785.576,67**

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi merupakan kas yang diterima dari kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi. Jumlah Masuk Arus Kas dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.871.422.878.054,66 dan Rp1.797.381.785.576,67. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan tahun Anggaran 2024 maka Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp74.041.092.477,99 atau 4,12%. Rincian dan perbandingan Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi tahun Anggaran 2025 dan Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi tahun Anggaran 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.5.2 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi
Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	36.868.038.669,00	16.681.812.765,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	228.768.959.135,00	24.390.591.600,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.316.087.147,00	9.137.692.478,00
4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	37.829.192.767,66	199.300.732.999,67
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil	559.357.580.379,00	509.268.584.713,00
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	546.966.063.077,00	546.064.341.637,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	182.063.223.088,00	210.096.477.961,00
8	Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	11.581.993.000,00
9	Penerimaan Dana Desa	115.959.796.462,00	129.129.755.200,00
10	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi	109.837.269.015,00	128.645.843.691,00
11	Penerimaan Hibah	0,00	0,00
12	Penerimaan Lainnya	45.456.668.315,00	13.083.959.532,00
Arus Masuk Kas		**1.871.422.878.054,66**	**1.797.381.785.576,67**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.5.1.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	**1.615.402.875.576,56**	**1.444.733.173.794,00**

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi merupakan kas yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi dan tidak menambah ekuitas. Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.615.402.875.576,56 dan Rp1.444.733.173.794,00. Jika dibandingkan dengan Arus Keluar Kas pada Aktivitas Operasi tahun anggaran 2024 maka Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp170.669.701.782,56 atau 11,81%.

Tabel 5.5.3 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi
Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	605.290.692.945,00	529.887.769.556,00
2	Pembayaran Barang dan Jasa	708.318.667.192,32	597.206.622.002,25
3	Pembayaran Subsidi	62.515.221,24	388.104.230,75
4	Pembayaran Hibah	53.667.554.616,00	64.587.820.635,00
5	Pembayaran Bantuan Sosial	32.351.880.000,00	18.613.150.000,00
6	Pembayaran Tak Terduga	1.410.395.000,00	593.586.332,00
7	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah	2.927.434.531,00	1.492.521.000,00
8	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Daerah	911.992.267,00	1.054.787.000,00
9	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kepada Desa	210.004.267.004,00	229.308.813.038,00
10	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa	457.476.800,00	1.600.000.000,00
	Arus Keluar Kas	**1.615.402.875.576,56**	**1.444.733.173.794,00**

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.5.2.	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi**	**(408.206.512.816,00)**	**(412.885.248.064,00)**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi merupakan aktivitas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi dalam satu periode akuntansi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp408.206.512.816,00) dan (Rp412.885.248.064,00). Jika dibandingkan dengan Arus Kas dari Aktivitas Investasi tahun 2024, maka Arus Kas dari Aktivitas Investasi mengalami kenaikan sebesar Rp4.678.735.248,00 atau 1,13%. Perhitungan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.5.4 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi
Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	490.524.400,00	0,00
2	Arus Keluar Kas	408.697.037.216,00	412.885.248.064,00
	Arus Kas Bersih	**(408.206.512.816,00)**	**(412.885.248.064,00)**

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.5.2.1.	**Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi**	**490.524.400,00**	**0,00**

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi merupakan kas yang diterima dari pelepasan sumber daya ekonomi selama satu periode akuntansi. Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar 490.524.400,00 dan 2024 sebesar Rp0,00, mengalami kenaikan sebesar Rp490.524.400,00 atau 100%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.5 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi
Per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Penjualan atas Alat-Alat Berat	0,00	0,00
2	Penjualan atas Kendaraan Dinas Roda Dua	0,00	0,00
3	Penjualan atas Kendaraan Dinas Roda Empat	490.524.400,00	0,00
	Jumlah	**490.524.400,00**	**0,00**

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.5.2.2.	**Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi**	**408.697.037.216,00**	**412.885.248.064,00**

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan merupakan kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan sumber daya ekonomi selama satu periode akuntansi yaitu berupa pengadaan/pembelian aset tetap yang dianggarkan dari Belanja Modal APBD. Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp408.697.037.216,00 dan Rp412.885.248.064,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.188.210.848,00 atau 1,01% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.6 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi
Per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Perolehan Tanah	3.381.372.000,00	1.748.178.600,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	141.163.477.540,00	101.305.541.636,00
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	112.776.401.824,00	211.553.884.590,49
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	150.098.514.061,00	97.690.359.646,51
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.227.971.791,00	587.283.591,00
6	Perolehan Aset Lainnya	49.300.000,00	0,00
	Jumlah	**408.697.037.216,00**	**412.885.248.064,00**

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.5.3.	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan**	**0,00**	**361.136,00**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali, yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan merupakan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, serta bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 20244 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp361.136,00 mengalami penurunan sebesar Rp361.136,00,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.7 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	0,00	361.136,00
2	Arus Keluar Kas	0,00	0,00
	Arus Kas Bersih	**0,00**	**361.136,00**

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.5.3.1.	**Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan**	**0,00**	**361.136,00**

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan merupakan aktivitas penerimaan kas selama satu periode akuntansi yang perlu dibayar kembali di masa yang akan datang. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp361.136,00 mengalami penurunan sebesar Rp361.136,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.8 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	361.136,00
	Jumlah	**0,00**	**361.136,00**

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.5.3.2.	**Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan**	**0,00**	**0,00**

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan merupakan aktivitas pengeluaran kas selama satu periode akuntansi. Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.9 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.5.4.	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris**	**0.00**	**(6.099.996,00)**

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto selama satu periode akuntansi yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan (Rp6.099.996,00). Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.099.996,00 atau 100,00% jika dibandingkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris tahun 2024. Perhitungan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.5.10 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris
Per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	266.976.164.402,00	229.139.758.234,31
2	Arus Keluar Kas	266.976.164.402,00	229.145.858.230,31
	Arus Kas Bersih	**0,00**	**(6.099.996,00)**

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.5.4.1.	**Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris**	**266.976.164.402,00**	**229.139.758.234,31**

Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp266.976.164.402,00 dan Rp229.139.758.234,31. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp37.836.406.167,69 atau 16,51%, jika dibandingkan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.11 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris
Per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	111.248.967.160,50	98.039.912.670,29
2	Pemindahbukuan Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
3	Pemindahbukuan Kas Lainnya	0,00	0,00
4	Penerimaan Pengembalian UP/TU dan GU Nihil	155.727.197.241,50	131.099.845.564,02
5	Pengembalian UP/TU Tahun Lalu	0,00	0,00
	Jumlah	**266.976.164.402,00**	**229.139.758.234,31**

Penerimaan Pengembalian UP/TU dan GU Nihil merupakan penerimaan pengembalian UP/TU tahun 2025 dan pertanggungjawaban UP/TU (GU Nihil) Tahun Anggaran 2025.

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.5.4.2.	**Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris**	**266.976.164.402,00**	**229.145.858.230,31**

Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp266.976.164.402,00 dan Rp229.145.858.230,31. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp37.830.306.171,69 atau 16,51%, jika dibandingkan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.12 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris
Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	111.248.967.160,50	98.039.912.670,29
2	Pengeluaran Dana UP/TU	155.727.197.241,50	131.099.845.564,02
3	Koreksi Silpa		6.099.996,00
	Arus Keluar Kas	**266.976.164.402,00**	**229.145.858.230,31**

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.5.5.1.	**Kenaikan/(Penurunan) Kas**	**(152.186.510.337,90)**	**(60.242.375.141,33)**

Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode Laporan Keuangan tahun berjalan merupakan penjumlahan dari Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris. Jumlah Penurunan Bersih Kas Selama Periode Tahun Anggaran yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp152.186.510.337,90) dan (Rp60.242.375.141,33) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.13 Perhitungan Kenaikan/(Penurunan) Kas
Per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	256.020.002.478,10	352.648.611.782,67
2	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(408.206.512.816,00)	(412.885.248.064,00)
3	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	0,00	361.136,00
4	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	0,00	(6.099.996,00)
	Kenaikan/(Penurunan) Kas	**(152.186.510.337,90)**	**(60.242.375.141,33)**

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.5.5.2.	**Saldo Awal Kas**	**306.241.632.920,34**	**366.484.008.061,67**

Saldo awal kas 1 Januari 2025 terdiri dari:
- Saldo awal Kas di Kas Daerah sebesar Rp296.746.820.536,31. Merupakan saldo awal kas di rekening kas daerah per 1 Januari 2025.
- Saldo Awal kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp1.810.000,00 merupakan saldo awal kas pada Bendahara Penerimaan Dinas Perdagangan.
- Saldo awal Kas di BLUD sebesar Rp418.615.493,64 merupakan saldo awal Kas di BLUD per 1 Januari 2025 dari BLUD RSUD. H. Damanhuri Barabai.
- Saldo awal Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp8.736.606.332,80 merupakan saldo awal kas dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp1.926.038.292,80 dan Saldo Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp6.810.568.040,00 dari 19 puskesmas 1 Januari 2025.
- Saldo awal Dana Dana BOS TA 2025 sebesar Rp337.780.557,59, merupakan saldo awal Kas Dana BOS dari Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri sebesar Rp320.745.092,59, saldo akhir kas BOP PAUD Negeri dan BOP Kesetaraan Negeri sebesar Rp17.035.465,00 per 1 Januari 2025.

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.5.5.3.	**Saldo Akhir Kas Lainnya**	**0,00**	**0,00**

Saldo akhir kas lainnya per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00.

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.5.5.4.	**Saldo Akhir Kas**	**154.055.122.582,44**	**306.241.632.920,34**

Saldo akhir kas TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp154.055.122.582,44 dan Rp306.241.632.920,34 merupakan saldo kas per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.14 Perhitungan Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	142.393.631.534,78	296.746.820.536,31
2	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	1.810.000,00
4	Saldo Akhir Kas di BLUD	3.381.394.356,07	418.615.493,64
5	Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	8.736.606.332,80

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
6	Saldo Akhir Kas Dana BOK Puskesmas	8.067.938.355,00	0,00
7	Saldo Akhir Kas pada BOS	212.158.336,59	337.780.557,59
8	Saldo Akhir Kas Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	**154.055.122.582,44**	**306.241.632.920,34**

Saldo akhir kas per 31 Desember 2025 terdiri dari:

- Saldo akhir Kas di Kas Daerah sebesar Rp142.393.631.534,78
  Merupakan saldo akhir kas di rekening kas daerah per 31 Desember 2025.
- Saldo akhir Kas di BLUD sebesar Rp3.381.394.356,07.
  Merupakan saldo akhir Kas di BLUD per 31 Desember 2025 dari BLUD RSUD. H. Damanhuri Barabai dan 19 Puskesmas.
- Saldo akhir Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp8.067.938.355,00
  Merupakan Saldo Kas dari Dana Bantuan Operasioanal Kesehatan (BOK) per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.067.938.355,00.
- Saldo akhir Kas Dana BOS sebesar Rp212.158.336,59.
  Merupakan saldo akhir Kas Dana BOS dari Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri per 31 Desember 2025 sebesar Rp211.607.243,59 dan saldo akhir Kas BOP PAUD Negeri per 31 Desember 2025 sebesar Rp551.093,00.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Hulu Sugai Tengah

Pada tanggal 23 Desember 1959 dilaksanakan serah terima antara Pejabat Bupati Hulu Sungai Selatan dengan Daerah Swatantra Tingkat II Hulu Sungai Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor Des-575-1-9 tanggal 5 Desember 1959. Dengan demikian, sejak tanggal 24 Desember 1959 Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah berdiri sendiri, terpisah dari Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan di Kandangan. Dengan dasar tersebut, maka ditetapkanlah tanggal 24 Desember 1959 sebagai hari lahirnya Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah sebagai daerah otonom yang melaksanakan pembangunan daerahnya sendiri hingga saat ini.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036, secara geografis Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada 2°27’0.9”-2°46’55” lintang selatan dan 115°9’17”-115°53’33” bujur timur. Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki wilayah seluas 1.770,77 km^2 yang beribukota di Barabai. Secara administratif, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari 11 kecamatan, 8 kelurahan dan 161 desa. Berdasarkan persentase luas wilayah kecamatan, kecamatan terluas adalah Kecamatan Batang Alai Timur dengan wilayah seluas 771,42 Km2 atau 43,73 % dari total wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Barabai dengan wilayah seluas 40,83 Km2 atau 2,31 % dari total wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Secara administratif, Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	Kab. Balangan
Sebelah Timur	Kab. Kotabaru
Sebelah Selatan	Kab. Hulu Sungai Selatan
Sebelah Barat	Kab. Hulu Sungai Utara

Unsur pimpinan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari:

1. Pimpinan Eksekutif periode 2025 s.d. 2030
   a. Bupati Hulu Sungai Tengah : Samsul Rizal
   b. Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah : Gusti Rosyadi Elmi
2. Pimpinanan Legislatif periode 2024 s.d. 2029
   a. Ketua DPRD : H. Pahrijani
   b. Wakil Ketua DPRD : Tajudin

6.2. Transisi Kepemimpinan Kepala Daerah

Tahun 2025 diwarnai dengan adanya masa transisi kepemimpinan Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Samsul Rizal dan Gusti Rosyadi Elmi resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) oleh Presiden Prabowo Subianto. Pelantikan pada tanggal 20 Februari 2025 menjadi bagian dari pengukuhan serentak 961 kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024.

Dinamika pergantian pimpinan ini membawa implikasi pada penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kebijakan ini turut memengaruhi tata kelola keuangan daerah melalui pergeseran pagu anggaran dan *refocusing* beberapa program prioritas, yang diupayakan agar tetap selaras dengan visi dan misi pemerintahan yang baru tanpa mengganggu kontinuitas pelayanan publik.

6.3. Perubahan Kelembagaan Pemerintah Daerah

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2025 diundang pada tanggal 17 November 2025 dan mengamanatkan perubahan kelembagaan perangkat daerah. Tujuan utama dari perubahan kelembagaan ini adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan rasional (*rightsizing*), mengoptimalkan rentang kendali (*span of control*) pelayanan publik, serta mensinkronkan urusan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah. Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Peraturan Bupati tersebut, baru diberlakukan pada 3 Januari 2026 sejak dilakukannya pengukuhan dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas.

Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut di atas terjadi perubahan Perangkat Daerah :

1. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah digabungkan dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, sebelumnya Pemadam Kebakaran merupakan bagian Satpol Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Satpol Pamong Praja berdiri sendiri dan Pemadam Kebakaran digabungkan dengan BPBD;
3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah diubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
4. Dinas Perdagangan berdiri sendiri, dan dibentuk Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
5. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dipecah menjadi dua dinas, yaitu Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup;
6. Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja diubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Secara keseluruhan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menjadi:

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD

3. Inspektorat
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
6. Dinas Kesehatan
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10. Satuan Polisi Pamong Praja
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12. Dinas Perdagangan
13. Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
14. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
17. Dinas Pertanian
18. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
19. Dinas Lingkungan Hidup
20. Dinas Perhubungan
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
24. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
25. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran
27. Kecamatan Barabai
28. Kecamatan Batu Benawa
29. Kecamatan Hantakan
30. Kecamatan Batang Alai Selatan
31. Kecamatan Limpasu
32. Kecamatan Batang Alai Timur
33. Kecamatan Batang Alai Utara
34. Kecamatan Pandawan
35. Kecamatan Labuan Amas Utara
36. Kecamatan Labuan Amas Selatan
37. Kecamatan Haruyan

6.4. Perubahan Aplikasi Barang Milik Daerah

Sebagai langkah penyesuaian terhadap perkembangan regulasi dan kebutuhan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang semakin kompleks, untuk peningkatan dan kemudahan pengelolaan data barang milik daerah, pada awal Tahun 2026 dilakukan perubahan aplikasi barang milik daerah, dari SIMDA BMD ke aplikasi SIMBADA. Aplikasi SIMDA BMD yang sebelumnya digunakan untuk membantu proses penatausahaan aset daerah, namun dalam implementasinya masih memiliki keterbatasan, khususnya karena belum sepenuhnya mengakomodir ketentuan terbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 membawa perubahan yang cukup signifikan dalam tata kelola BMD, mulai dari mekanisme pembukuan, kodefikasi barang, inventarisasi, rekonsiliasi data, hingga penyajian laporan aset daerah yang harus lebih akurat, transparan, dan akuntabel. Sementara itu, fitur dan struktur pada SIMDA BMD masih mengacu pada ketentuan sebelumnya sehingga belum mampu mendukung seluruh kebutuhan administrasi dan pelaporan sesuai regulasi terbaru. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kendala dalam proses penatausahaan aset, seperti ketidaksesuaian kode barang, kesulitan rekonsiliasi data, serta kurang optimalnya penyajian laporan keuangan dan aset daerah.

Implementasi aplikasi SIMBADA menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah. SIMBADA dirancang dengan menyesuaikan ketentuan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 sehingga mampu mendukung proses pengelolaan BMD secara lebih terintegrasi, efektif, dan sesuai standar regulasi yang berlaku. Selain itu, penggunaan SIMBADA juga diharapkan dapat meningkatkan tertib administrasi, mempermudah monitoring dan pengawasan aset, mempercepat proses penyusunan laporan, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya perubahan aplikasi ini, pemerintah daerah diharapkan dapat menghasilkan data aset yang lebih valid dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan, perencanaan kebutuhan barang milik daerah, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk mendukung pelayanan publik.

6.5. Pemberlakuan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perjalanan Dinas

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perjalanan Dinas, yang sekaligus mencabut dan menggantikan Peraturan Bupati sebelumnya yaitu Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021. Regulasi pembaruan ini diterbitkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah berjalan secara selektif, efisien, efektif, patut, wajar, dan akuntabel.

Aturan baru ini menata ulang prosedur penatausahaan dengan mempertegas standar mekanisme pertanggungjawaban biaya berdasarkan skema Biaya Riil (*at cost)* dan lumsum untuk komponen uang harian, uang representasi, biaya transport, dan biaya penginapan. Penyesuaian kebijakan ini berdampak langsung pada pengetatan syarat kelengkapan bukti pengeluaran sah yang harus diverifikasi oleh Bendahara Pengeluaran di masing-masing Perangkat Daerah. Hal ini secara signifikan meningkatkan pengendalian internal atas pelaksanaan belanja, meminimalisir potensi kerugian daerah, serta menjamin kewajaran dan

keandalan nilai realisasi Belanja Barang dan Jasa (khususnya Belanja Perjalanan Dinas) yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Sebagai langkah penguatan tata kelola dan efisiensi belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perjalanan Dinas. Regulasi ini menata ulang sistem dan prosedur penatausahaan, standar biaya, serta mekanisme pertanggungjawaban perjalanan dinas di lingkungan pemerintah daerah. Penyesuaian regulasi ini berdampak signifikan terhadap akurasi penganggaran, pengendalian pelaksanaan belanja, serta peningkatan kualitas verifikasi pada pelaporan keuangan di masing-masing SKPD selaku entitas akuntansi.

6.6. Optimalisasi Kerja Sama Daerah

Optimalisasi Kerja Sama Daerah Sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menginisiasi dan merealisasikan kuantitas Kerja sama Daerah yang cukup signifikan sepanjang tahun 2025. Kerja sama yang terjalin, baik dengan instansi vertikal, pemerintah daerah lain, maupun kemitraan strategis dengan pihak ketiga (badan usaha), ditujukan untuk optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dan *cost-sharing* pembangunan. Perjanjian kerja sama ini memberikan kontribusi yang positif terhadap proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masa mendatang dan pencatatan komitmen daerah.

Sebagai upaya akselerasi pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara masif mengoptimalkan sinergi dengan berbagai pihak. Sepanjang Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah telah merealisasikan penandatanganan 21 dokumen kerja sama, serta tengah memproses 9 rencana kerja sama lanjutan. Ruang lingkup kerja sama ini terjalin secara komprehensif, mencakup bidang pendidikan, riset dan inovasi, perhubungan, kesehatan, keuangan, hukum, hingga infrastruktur pembangunan daerah.

Adapun rincian 21 dokumen kerja sama yang telah ditandatangani dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan Bersama dengan PT Bridgestone Kalimantan Plantation tentang Program Pendampingan Petani Karet dan Penguatan Produk Pasar Produk *Unsmoke Sheet* (USS).
2. Nota Kesepakatan dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tentang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Serta Invensi dan Inovasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Kesepakatan Bersama dengan Dinas Pendidikan tentang Peningkatan dan Penjaminan Mutu Bidang Pendidikan.
4. Perjanjian Kerja Sama dengan PT Bridgestone Kalimantan Plantation tentang Program Pendampingan Petani Karet dan Penguatan Produk Pasar Produk *Unsmoke Sheet* (USS).
5. Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan 12 Kabupaten/Kota lainnya tentang Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 828 di Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Kesepakatan Bersama dengan Universitas Lambung Mangkurat tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pembangunan Daerah.

7. Perjanjian Kerja Sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Bank Kalsel) tentang Fasilitasi Layanan Bank Kalsel dalam Mendukung Program Transaksi Non Tunai dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa.
8. Nota Kesepakatan dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbudristek tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
9. Kesepakatan Bersama dengan PT Digital Gasing Edukasi tentang Program Kerja Sama Peningkatan Kualitas Pendidikan.
10. Perjanjian Kerja sama dengan PT Digital Gasing Edukasi tentang Program Pandai Berhitung Dengan Metode Gasing.
11. Nota Kesepakatan dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tentang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Serta Invensi dan Inovasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
12. Nota Kesepahaman dengan Google Asia Pacific Pte. Ltd., tentang *Google for Education*.
13. Kesepakatan Bersama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan tentang Pengembangan SDM Perhubungan melalui Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
14. Perjanjian Kerja Sama dengan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD tentang Pemenuhan Sumber Daya Manusia Bidang Perhubungan Darat.
15. Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Lambung Mangkurat tentang Kerja Sama Perkuliahan di Kampus ULM Hulu Sungai Tengah Dalam Kelas Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU).
16. Perjanjian Kerja Sama dengan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat tentang Penyusunan Kebijakan dan Strategi Air Limbah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
17. Nota Kesepahaman dengan Politeknik Statistika STIS tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Pengembangan SDM.
18. Nota Kesepakatan dengan BPJS Kesehatan tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dalam rangka *Universal Health Coverage*.
19. Kesepakatan Bersama dengan Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah tentang Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Perkaranya Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
20. Perjanjian Kerja Sama dengan Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah Dalam Penerapan Pidana Kerja Sosial Bagi Pelaku tindak Pidana.
21. Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan 12 Kabupaten/Kota lainnya tentang Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Markas Komando Daerah Militer (Kodam) X/Lambung Mangkurat.

Kemitraan strategis yang terjalin dalam berbagai naskah kerja sama di atas memberikan kontribusi yang positif terhadap Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, perluasan akses layanan masyarakat, serta perkuatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB VII
PENUTUP

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp2.057.093.517.611,66 dapat direalisasi sebesar Rp1.871.913.402.454,66 atau 91,00 %. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2024 sebesar Rp1.797.381.785.576,67 maka terjadi kenaikan sebesar Rp74.531.616.877,99 atau 4,15%.
b. Belanja dan Transfer pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2.353.335.150.532,00 dan terealisasi sebesar Rp2.024.099.912.792,56 atau 86,01%. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja dan transfer Tahun 2024 sebesar Rp1.857.618.421.858,00 maka terjadi kenaikan realisasi belanja dan transfer sebesar Rp166.481.490.934,56 atau 8,96%.
c. Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 defisit anggaran sebesar (Rp296.241.632.920,34). Pada pelaksanaan APBD TA 2025 pendapatan direalisasi sebesar Rp1.871.913.402.454,66 sedang pada belanja dan transfer direalisasi sebesar Rp2.024.099.912.792,56 sehingga terdapat defisit sebesar (Rp152.186.510.337,90).
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 didapat dari realisasi Pembiayaan *Netto* sebesar Rp306.241.632.920,34 ditambah dengan defisit realisasi sebesar (Rp152.186.510.337,90) sehingga didapat nilai SILPA tahun berjalan sebesar Rp154.055.122.582,44.

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

SAMSUL RIZAL

Lampiran 1.1

Rincian Realisasi Pendapatan Per SKPD TA 2025

No.	SKPD	PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7=3+4+5+6+7+8+9
1	Dinas Kesehatan	-	220.406.667.157,00	-	2.014.988.526,63	-	-	-	**222.421.655.683,63**
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	247.264.987,00	-	-	-	-	-	**247.264.987,00**
3	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	-	34.011.000,00	-	-	-	-	-	**34.011.000,00**
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-	6.224.394.991,00	-	-	-	-	-	**6.224.394.991,00**
5	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	-	136.650.000,00	-	-	-	-	-	**136.650.000,00**
6	Dinas Pertanian	-	191.500.000,00	-	-	-	-	-	**191.500.000,00**
7	Dinas Perdagangan	-	1.460.441.000,00	-	-	-	-	-	**1.460.441.000,00**
8	Sekretariat Daerah	-	68.030.000,00	-	-	-	-	-	**68.030.000,00**
9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	8.316.087.147,00	36.304.728.641,03	1.404.346.663.006,00	109.837.269.015,00	45.456.668.315,00	**1.604.261.416.124,03**
10	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	36.868.038.669,00	-	-	-	-	-	-	**36.868.038.669,00**
JUMLAH		**36.868.038.669,00**	**228.768.959.135,00**	**8.316.087.147,00**	**38.319.717.167,66**	**1.404.346.663.006,00**	**109.837.269.015,00**	**45.456.668.315,00**	**1.871.913.402.454,66**

Lampiran 1.2

Rincian Realisasi Belanja Pegawai, Barang Jasa dan Modal Per SKPD TA 2025

Rincian Realisasi Belanja Pegawai Per SKPD TA 2025

No.	SKPD	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN	BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN ASN	BELANJA PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINYA ASN	BELANJA GAJI & TUNJANGAN DPRD	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN KDH/WKDH	BELANJA PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DPRD SERTA KDH/WKDH	BELANJA PEGAWAI BLUD	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=3+4+5+6+7+8+9
1	Dinas Pendidikan	184.787.904.718,00	126.808.046.554,00	-	-	-	-	-	**311.595.951.272,00**
2	Dinas Kesehatan	90.854.660.240,00	47.946.471.703,00	-	-	-	-	15.855.661.007,00	**154.656.792.950,00**
0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.310.521.167,00	3.006.622.237,00	-	-	-	-	-	**6.317.143.404,00**
4	Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat	1.069.415.835,00	957.445.983,00	-	-	-	-	-	**2.026.861.818,00**
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.447.083.002,00	956.692.524,00	-	-	-	-	-	**2.403.775.526,00**
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	857.415.571,00	457.447.676,00	-	-	-	-	-	**1.314.863.247,00**
7	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.119.036.534,00	1.251.057.811,00	-	-	-	-	-	**3.370.094.345,00**
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.317.631.037,00	858.040.766,00	-	-	-	-	-	**2.175.671.803,00**
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	2.874.868.829,00	1.660.132.757,00	-	-	-	-	-	**4.535.001.586,00**
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.378.077.122,00	970.492.841,00	-	-	-	-	-	**2.348.569.963,00**
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.201.102.138,00	775.746.662,00	-	-	-	-	-	**1.976.848.800,00**
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.411.841.379,00	794.420.335,00	-	-	-	-	-	**2.206.261.714,00**
13	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	1.632.596.505,00	994.568.068,00	-	-	-	-	-	**2.627.164.573,00**
14	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	985.684.356,00	665.868.101,00	-	-	-	-	-	**1.651.552.457,00**
15	Dinas Perpustakaan	1.179.491.942,00	750.303.058,00	-	-	-	-	-	**1.929.795.000,00**
16	Dinas Pertanian	9.281.859.859,00	4.281.861.339,00	-	-	-	-	-	**13.563.721.198,00**
17	Dinas Perdagangan	2.505.366.986,00	1.523.518.468,00	-	-	-	-	-	**4.028.885.454,00**
18	Sekretariat Daerah	7.137.304.134,00	5.618.482.006,00	-	-	1.946.197.159,00	599.298.624,00	-	**15.301.281.923,00**
19	Inspektorat	2.919.203.890,00	2.896.703.370,00	-	-	-	-	-	**5.815.907.260,00**
20	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.350.899.823,00	1.109.733.660,00	-	-	-	-	-	**2.460.633.483,00**
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.022.326.402,00	1.563.446.821,00	-	-	-	-	-	**3.585.773.223,00**
22	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	1.379.346.527,00	1.084.483.745,00	-	-	-	-	-	**2.463.830.272,00**

No.	SKPD	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN	BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN ASN	BELANJA PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINYA ASN	BELANJA GAJI & TUNJANGAN DPRD	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN KDH/WKDH	BELANJA PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DPRD SERTA KDH/WKDH	BELANJA PEGAWAI BLUD	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=3+4+5+6+7+8+9
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	6.515.604.015,00	3.406.331.242,00	-	-	-	-	-	**9.921.935.257,00**
24	Sekretariat DPRD	1.301.313.199,00	897.754.938,00	-	19.914.060.860,00	-	219.240.000,00	-	**22.332.368.997,00**
25	Kecamatan Barabai	3.833.391.632,00	2.131.448.591,00	-	-	-	-	-	**5.964.840.223,00**
26	Kecamatan Pandawan	792.078.041,00	459.868.905,00	-	-	-	-	-	**1.251.946.946,00**
27	Kecamatan Labuan Amas Selatan	1.388.268.487,00	735.827.908,00	-	-	-	-	-	**2.124.096.395,00**
28	Kecamatan Labuan Amas Utara	940.175.867,00	577.736.120,00	-	-	-	-	-	**1.517.911.987,00**
29	Kecamatan Haruyan	1.097.023.286,00	619.315.982,00	-	-	-	-	-	**1.716.339.268,00**
30	Kecamatan Batu Benawa	878.934.054,00	565.321.256,00	-	-	-	-	-	**1.444.255.310,00**
31	Kecamatan Hantakan	1.016.348.822,00	602.846.778,00	-	-	-	-	-	**1.619.195.600,00**
32	Kecamatan Batang Alai Selatan	1.621.148.187,00	850.644.408,00	-	-	-	-	-	**2.471.792.595,00**
33	Kecamatan Batang Alai Utara	952.402.934,00	534.811.961,00	-	-	-	-	-	**1.487.214.895,00**
34	Kecamatan Batang Alai Timur	1.285.404.313,00	676.644.092,00	-	-	-	-	-	**1.962.048.405,00**
35	Kecamatan Limpasu	948.495.398,00	522.599.242,00		-	-	-	-	**1.471.094.640,00**
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	981.195.621,00	668.075.535,00	-	-	-	-	-	**1.649.271.156,00**
JUMLAH		**346.575.421.852,00**	**220.180.813.443,00**	**-**	**19.914.060.860,00**	**1.946.197.159,00**	**818.538.624,00**	**15.855.661.007,00**	**605.290.692.945,00**

Rincian Realisasi Belanja Barang Jasa Per SKPD TA 2025

NO	SKPD	BELANJA BARANG	BELANJA JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA PERJALANAN DINAS	BELANJA UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KE MASYARAKAT	BELANJA BARANG DAN JASA BOSP	BELANJA BARANG DAN JASA BOK	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=3+4+5+6+6+7+8+9+10
1	Dinas Pendidikan	4.183.538.100,00	43.287.159.101,00	1.395.128.335,00	3.369.899.313,00	1.254.995.000,00	23.376.269.011,00	-	-	**76.866.988.860,00**
2	Dinas Kesehatan	99.056.198.874,00	75.656.356.311,00	7.268.066.483,00	2.777.157.254,00	632.994.690,00	-	6.655.276.625,00	150.833.334.692,00	**342.879.384.929,00**
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.569.719.322,00	24.766.917.923,00	8.128.639.481,00	3.073.975.224,00	-	-	-	-	**46.539.251.950,00**
4	Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat	729.443.261,00	5.269.100.868,00	61.371.966,00	1.550.391.932,00	-	-	-	-	**7.610.308.027,00**
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	834.277.883,00	4.156.101.372,00	129.891.014,00	495.994.824,00	5.000.000,00	-	-	-	**5.621.265.093,00**
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	704.797.379,00	1.635.158.177,00	82.477.378,00	241.934.597,00	3.850.000,00	-	-	-	**2.668.217.531,00**
7	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.683.805.460,00	5.936.899.437,00	27.005.850,00	2.130.201.651,00	26.100.000,00		-	-	**9.804.012.398,00**
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.605.626.365,00	1.817.750.273,82	28.496.508,00	1.021.717.272,00	53.150.000,00	-	-	-	**5.526.740.418,82**
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	8.268.461.528,00	22.662.264.331,00	1.763.448.777,00	940.638.672,00	299.790.000,00	-	-	-	**33.934.603.308,00**
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	692.910.697,00	3.241.224.299,00	105.178.000,00	414.980.397,00	-	-	-	-	**4.454.293.393,00**
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.198.590.494,00	3.246.753.382,00	61.580.440,00	1.645.838.145,00	121.321.000,00	-	-	-	**6.274.083.461,00**
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	674.136.041,00	4.552.683.549,00	350.127.144,00	524.331.820,00	40.750.000,00	-	-	-	**6.142.028.554,00**
13	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	892.684.504,00	8.569.259.284,00	91.558.841,00	923.947.273,00	11.000.000,00	-	-	-	**10.488.449.902,00**
14	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	2.324.016.385,00	3.172.133.476,00	243.496.500,00	1.184.119.501,00	2.000.850.000,00	-	-	-	**8.924.615.862,00**
15	Dinas Perpustakaan	627.298.470,00	1.511.366.719,00	22.892.825,00	615.033.401,00	63.360.000,00	-	-	-	**2.839.951.415,00**
16	Dinas Pertanian	13.470.374.284,00	4.495.000.854,00	23.688.000,00	1.087.728.727,00	50.000.000,00	-	-	-	**19.126.791.865,00**
17	Dinas Perdagangan	821.797.349,00	4.156.751.652,00	659.310.300,00	1.034.108.398,00	1.978.000,00	-	-	-	**6.673.945.699,00**
18	Sekretariat Daerah	10.892.615.709,00	16.135.980.195,00	2.206.329.184,00	6.707.186.239,00	5.158.960.000,00	-	-	-	**41.101.071.327,00**
19	Inspektorat	509.347.423,00	1.781.911.554,00	41.536.507,00	2.953.876.281,00	-	-	-	-	**5.286.671.765,00**
20	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	902.728.157,00	2.664.134.143,00	300.437.634,00	1.176.251.015,00	26.794.200,00	-	-	-	**5.070.345.149,00**
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	799.822.267,00	2.812.906.699,00	45.240.331,00	1.221.343.296,00	-	-	-	-	**4.879.312.593,00**
22	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	1.338.258.486,00	2.847.265.762,00	76.592.400,00	1.033.673.074,00	180.050.000,00	-	-	-	**5.475.839.722,00**
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	422.913.856,00	2.139.075.841,00	29.150.000,00	1.202.138.219,00	-	-	-	-	**3.793.277.916,00**
24	Sekretariat DPRD	2.488.920.167,00	3.271.787.872,00	520.733.205,00	16.970.863.928,00	138.360.000,00	-	-	-	**23.390.665.172,00**
25	Kecamatan Barabai	1.099.856.017,00	2.919.189.175,00	62.230.750,00	384.693.907,00	-	-	-	-	**4.465.969.849,00**
26	Kecamatan Pandawan	485.012.200,00	709.657.406,00	49.845.001,00	275.570.168,00	44.600.000,00	-	-	-	**1.564.684.775,00**
27	Kecamatan Labuan Amas Selatan	727.933.190,00	1.024.674.554,00	66.810.155,00	200.810.116,00	-	-	-	-	**2.020.228.015,00**
28	Kecamatan Labuan Amas Utara	393.737.673,00	935.006.915,00	7.407.500,00	123.687.241,00	-	-	-	-	**1.459.839.329,00**



NO	SKPD	BELANJA BARANG	BELANJA JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA PERJALANAN DINAS	BELANJA UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KE MASYARAKAT	BELANJA BARANG DAN JASA BOSP	BELANJA BARANG DAN JASA BOK	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD	JUMLAH
29	Kecamatan Haruyan	375.981.463,00	744.225.997,00	-	159.045.016,00	30.450.000,00	-	-	-	**1.309.702.476,00**
30	Kecamatan Batu Benawa	390.735.784,50	734.766.274,00	31.357.800,00	207.569.370,00	18.750.000,00	-	-	-	**1.383.179.228,50**
31	Kecamatan Hantakan	329.542.453,00	532.921.983,00	14.657.000,00	123.909.564,00	139.000.000,00	-	-	-	**1.140.031.000,00**
32	Kecamatan Batang Alai Selatan	531.097.610,00	1.096.544.852,00	128.142.208,00	184.429.457,00	36.792.000,00	-	-	-	**1.977.006.127,00**
33	Kecamatan Batang Alai Utara	427.526.716,00	493.006.476,00	14.399.322,00	150.216.667,00	26.000.000,00	-	-	-	**1.111.149.181,00**
34	Kecamatan Batang Alai Timur	308.625.187,00	771.266.851,00	13.130.000,00	144.876.099,00	15.300.000,00	-	-	-	**1.253.198.137,00**
35	Kecamatan Limpasu	531.879.410,00	737.149.328,00	33.242.250,00	172.614.063,00	10.000.000,00	-	-	-	**1.484.885.051,00**
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	535.297.854,00	2.263.531.055,00	13.165.000,00	964.683.805,00	-	-	-	-	**3.776.677.714,00**
Jumlah		**172.829.508.018,50**	**262.747.883.940,82**	**24.096.764.089,00**	**57.389.435.926,00**	**10.390.194.890,00**	**23.376.269.011,00**	**6.655.276.625,00**	**150.833.334.692,00**	**708.318.667.192,32**

Rincian Realisasi Belanja Modal Per SKPD TA 2025

NO	SKPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Belanja Modal Aset Lainnya	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	10=3+4+5+6+7+8
1	Dinas Pendidikan	417.264.000,00	14.326.000.508,00	27.241.946.577,00	-	790.969.540,00	-	**42.776.180.625,00**
2	Dinas Kesehatan	-	89.085.611.901,00	68.560.441.943,00	2.835.211.069,00	-	-	**160.481.264.913,00**
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.014.074.000,00	5.189.576.092,00	3.582.480.649,00	142.333.682.464,00	188.700.000,00	-	**152.308.513.205,00**
4	Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat	-	976.928.150,00	-	4.764.144.000,00	-	-	**5.741.072.150,00**
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	332.122.300,00	-	-	-	-	**332.122.300,00**
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	520.372.000,00	198.016.000,00	-	-	-	**718.388.000,00**
7	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	18.475.950,00	-	-	-	-	**18.475.950,00**
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	-	421.699.310,00	461.528.980,00	-	-	-	**883.228.290,00**
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	1.950.034.000,00	5.645.305.198,00	-	-	-	-	**7.595.339.198,00**
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	154.456.499,00	-	-	-	-	**154.456.499,00**
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	397.979.940,00	-	-	-	-	**397.979.940,00**
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	502.866.100,00	48.560.000,00	-	-	-	**551.426.100,00**
13	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	-	706.891.504,00	-	-	-	-	**706.891.504,00**
14	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	-	1.950.000,00	7.480.393.575,00	-	-	-	**7.482.343.575,00**
15	Dinas Perpustakaan	-	1.080.699.571,00	1.892.092.000,00	-	165.607.251,00	-	**3.138.398.822,00**
16	Dinas Pertanian	-	969.929.001,00		-	-	-	**969.929.001,00**
17	Dinas Perdagangan	-	882.815.500,00	3.295.730.900,00	-	-	-	**4.178.546.400,00**
18	Sekretariat Daerah	-	15.977.039.553,00	-	-	-	-	**15.977.039.553,00**
19	Inspektorat	-	295.218.060,00	-	-	-	-	**295.218.060,00**
20	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	178.116.000,00	-	-	82.695.000,00	49.300.000,00	**310.111.000,00**
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	976.368.444,00	-	-	-	-	**976.368.444,00**
22	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	-	667.391.000,00	-	-	-	-	**667.391.000,00**
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	224.963.700,00	-	-	-	-	**224.963.700,00**
24	Sekretariat DPRD	-	570.469.688,00	15.211.200,00	-	-	-	**585.680.888,00**
25	Kecamatan Barabai	-	65.593.100,00	-	9.958.000,00	-	-	**75.551.100,00**
26	Kecamatan Pandawan	-	15.318.000,00	-	-	-	-	**15.318.000,00**

NO	SKPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Belanja Modal Aset Lainnya	JUMLAH
27	Kecamatan Labuan Amas Selatan	-	49.655.000,00	-	11.760.794,00	-	-	**61.415.794,00**
28	Kecamatan Labuan Amas Utara	-	-	-	-	-	-	**-**
29	Kecamatan Haruyan	-	9.476.000,00	-	-	-	-	**9.476.000,00**
30	Kecamatan Batu Benawa	-	107.811.720,00	-	-	-	-	**107.811.720,00**
31	Kecamatan Hantakan	-	44.310.000,00	-	-	-	-	**44.310.000,00**
32	Kecamatan Batang Alai Selatan	-	163.419.750,00	-	131.518.734,00	-	-	**294.938.484,00**
33	Kecamatan Batang Alai Utara	-	189.255.000,00	-	-	-	-	**189.255.000,00**
34	Kecamatan Batang Alai Timur	-	1.875.000,00	-	-	-	-	**1.875.000,00**
35	Kecamatan Limpasu	-	175.728.000,00	-	6.874.500,00	-	-	**182.602.500,00**
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	237.790.001,00	-	5.364.500,00	-	-	**243.154.501,00**
Jumlah		**3.381.372.000,00**	**141.163.477.540,00**	**112.776.401.824,00**	**150.098.514.061,00**	**1.227.971.791,00**	**49.300.000,00**	**408.697.037.216,00**

Lampiran 2

1. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat TA 2025 Rp. 2.629.805.600,00

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
1. Sekretariat Daerah Rp. 2.480.000.000,00				
1	Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjen H.Hasan Basry Banjarmasin 70123	Pembukaan PSDKU (Program Studi Di Luar Kampus Utama)	2.480.000.000,00
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp 149.805.600,00				
1	Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah	Jl.Ir. P.M Noor No.29 Barabai 71311 Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Pemeliharaan dan Perawatan (ETLE) HST	149.805.600,00
JUMLAH				**2.629.805.600,00**

2. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat TA 2025 Rp. 19.123.568.131,00

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	KETERANGAN	JUMLAH
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp19.123.568.131,00				
1	Kejaksaan Negeri Barabai	Jl. Abdul Muis Ridhani No. 60 Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kab. Hulu... More	Hibah Pekerjaan Pembagunan Wisma Kejaksaan Negeri Barabai	10.294.784.065,00
2	Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah	Jl.Ir. P.M Noor No.29 Barabai 71311 Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Rehap Kantor Polres HT, Rumah Dinas Kapolres HST, dan TK Bhyangkari	1.957.304.000,00
3	Kantor Polisi Sektor BAT	Tandilang, Kec. Batang Alai Tim., Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan 71382	Pembangunan Kantor Polisi Sektor BAT	403.315.400,00
4	Kantor Polisi Sektor LIMPASU	Jalan Limpasu Raya, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 71392	Pembangunan Kantor Polisi Sektor LIMPASU	4.779.696.000,00
5	Kantor Kodim 1002 HST	Jl. Telaga Padawangan, Kelurahan Barabai Timur, Kec. Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan 71315.	Rehabilitas Lapangan Kantor Kodim, Rumah Kasdim, dan Rumah Prajurit	1.057.445.744,00
6	KORAMIL BAT	Tandilang, Kec. Batang Alai Tim., Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan	Pembangunan Kantor Koramil Kec. BAT	631.022.922,00
JUMLAH				**19.123.568.131,00**

3. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2025 Rp. 7.528.493.613,00

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	KETERANGAN	JUMLAH
1. Dinas Pendidikan Rp. 200.000.000,00,-				
1	Kantor Kodim 1002 HST	Jl. Telaga Padawangan, Kelurahan Barabai Timur, Kec. Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan 71315.	Rehabilitasi Ruang Kelas TK Kartika V-25 Barabai	200.000.000,00
2. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Rp. 4.403.419.113,00,-				
1	KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA	Jl. Ir. Pangeran Muhammad Noor, Barabai Selatan, Kec. Barabai Kab.HST	dalam rangka mendukung kegiatan keolahragaan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah	3.756.524.113,00
2	NATIONAL PARALYMPIC COMMIITTEE INDONESIA	Komplek Bawan Permai RT.013 RW.005 kel. Bukat Kec. Barabai, Kab.HST	dalam rangka mendukung kegiatan keolahragaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Hulu Sungai Tengah	400.000.000,00
3	KOMITE OLAHRAGA REKREASI DAN MASYARAKAT INDONESIA	Komplek Bawan Permai RT.013 RW.005 kel. Bukat Kec. Barabai, Kab.HST	dalam rangka mendukung kegiatan keolahragaan tradisional maupun olahraga rekreasi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah	146.895.000,00
4	KWARTIR CABANG PRAMUKA	Jl. Bintara Kel. Barabai Timur, Kec.Barabai, Kab.HST	dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan kepramukaan, motivasi pembina dan peserta didik, untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945	100.000.000,00
3. Sekretariat Daerah Rp.2.925.074.500,00				
1	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kab. HST	Jl. Abdul Muis Redhani No. 57 Barabai	-	800.000.000,00
2	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Hulu Sungai Teng	Jl. P. Antasari No.02 RT.07/02 Kel. Barabai Utara, Kec. Barabai	-	1.195.100.000,00
3	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Hulu Sung	Jl. P. Antasari No.02 RT.07/02 Kel. Barabai Utara, Kec. Barabai	-	929.974.500,00
JUMLAH				**7.528.493.613,00**

4. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2025 Rp. 5.023.117.000,00

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	KETERANGAN	JUMLAH
1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp.5.023.117.000,00				
2	Pemerintahan Desa Sungai Buluh	Jalan Raya Sungai Buluh Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara	Pembangunan/Peningkatan Titian Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara	394.762.000,00
	Pemerintahan Kelurahan Barabai Utara	Jalan Bulau Sarigading Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kode Pos 71352	Pembangunan/Peningkatan Drainase Permukiman Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai	307.913.000,00
	Pemerintahan Desa Matang Ginalun	Jalan Putera Harapan RT 003 RW 002 Desa Matang Ginalun Kecamatan Pandawan Kode Pos 71352	Pembangunan/Peningkatan Drainase Permukiman Desa Matang Ginalun Kecamatan Pandawan	272.607.000,00
	Pemerintahan Desa Pajukungan	Jalan A. Yani No. 001 RT 003 RW 002 Desa Pajukungan Kecamatan Barabai Kode Pos 71312	Pembangunan/Peningkatan Jalan Permukiman Desa Pajukungan Kecamatan Barabai	216.839.000,00
	Pemerintahan Desa Palajau	Jalan Palas RT 007 RW 004 Desa Palajau Kecamatan Pandawan Kode Pos 71352	Pembangunan/Peningkatan Jalan Permukiman Desa Palajau Kecamatan Pandawan	135.844.000,00
	Pemerintahan Desa Andang	Jalan Divisi IV ALRI Desa Andang RT 005 Desa Andang Kecamatan Haruyan	Pembangunan/Peningkatan Jalan Permukiman Desa Andang Kecamatan Haruyan	164.615.000,00
	Pemerintahan Desa Banua Hanyar	Desa Banua Hanyar RT 002 RW 001 Kecamatan Pandawan Kode Pos 71352	Pembangunan/Peningkatan Jalan Permukiman Desa Banua Hanyar Kecamatan Pandawan	202.759.000,00
	Pemerintahan Desa Banua Kepayang	Jalan Banua Kepayang RT 003 RW 002 Desa Banua Kepayang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kode Pos 71361	Pembangunan/Peningkatan Jalan Permukiman Desa Banua Kepayang Kecamatan Labuan Amas Selatan	191.524.000,00
	Pemerintahan Desa Jamil	Jalan Jamil RT 005 RW 003 Desa Jamil Kecamatan Labuan Amas Selatan Kode Pos 71361	Pembangunan/Peningkatan Jalan Permukiman Desa Jamil Kecamatan Labuan Amas Selatan	309.521.000,00
	Pemerintahan Desa Taras Padang	Jalan Desa Taras Padang RT 005 RW 003 Desa Taras Padang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kode Pos 71361	Pembangunan/Peningkatan Jalan Permukiman Desa Taras Padang Kecamatan Labuan Amas Selatan	259.722.000,00
	Pemerintahan Desa Telang	Jalan A. Yani Km. 160 RT 002 RW 001 Desa Telang Kecamatan Batang Alai Utara Kode Pos 71391	Pembangunan/Peningkatan Jalan Permukiman Desa Telang Kecamatan Batang Alai Utara	365.335.000,00
	Pemerintahan Desa Aluan Mati	Jalan Desa Aluan Mati RT 004 RW 002 Desa Aluan Mati Kecamatan Batu Benawa Kode Pos 71371	Pembangunan/Peningkatan Jalan Permukiman Desa Aluan Mati Kecamatan Batu Benawa	311.354.000,00
	Pemerintahan Desa Bakti	Jalan Penas Tani IV RT 003 RW 002 Desa Bakti Kecamatan Batu Benawa	Pembangunan/Peningkatan Jalan Permukiman Desa Bakti Kecamatan Batu Benawa	225.698.000,00
	Pemerintahan Desa Baru	Jalan H. M. Taher RT 001 RW 001 Desa Baru Kecamatan Batu Benawa Kode Pos 71371	Pembangunan/Peningkatan Jalan Permukiman Desa Baru Kecamatan Batu Benawa	247.405.000,00
	Pemerintahan Desa Buluan	Jalan Griliya RT 002 RW 002 Desa Buluan Kecamatan Pandawan Kode Pos 71352	Pembangunan/Peningkatan Jalan Permukiman Desa Buluan Kecamatan Pandawan	213.600.000,00
	Pemerintahan Desa Walatung	Jalan Kemakmuran RT 003 RW 002 Desa Walatung Kecamatan Pandawan Kode Pos 71352	Pembangunan/Peningkatan Jalan Permukiman Desa Walatung Kecamatan Pandawan	172.602.000,00
	Pemerintahan Desa Kahakan	Jalan Tanjung Pura RT 002 RW 002 Desa Kahakan Kecamatan Batu Benawa Kode Pos 71371	Pembangunan/Peningkatan Jalan Permukiman Desa Kahakan Kecamatan Batu Benawa	268.849.000,00
	Pemerintahan Kelurahan Barabai Utara	Jalan Bulau Sarigading Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kode Pos 71352	Pembangunan/Peningkatan Jalan Permukiman Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai	105.139.000,00
	Pemerintahan Desa Matang Ginalun	Jalan Putera Harapan RT 003 RW 002 Desa Matang Ginalun Kecamatan Pandawan Kode Pos 71352	Pembangunan/Peningkatan Jalan Permukiman Desa Matang Ginalun Kecamatan Pandawan	257.295.000,00
	Pemerintahan Desa Sungai Buluh	Jalan Raya Sungai Buluh Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara	Pembangunan/Peningkatan Titian Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara Tahap 2	399.734.000,00
JUMLAH				**5.023.117.000,00**

5. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2025 Rp. 2.340.000.000,00

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Rp 1.975.000.000,00				
1	BALAKAR 654 MURAKATA	Barabai Sel., Kec. Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan 71315	-	1.975.000.000,00
2. Sekretariat Daerah Rp 365.000.000,00				
1	Pimpinan Daerah Muhammadiyah HST	Jl. Ir.PHM Noor No.08 RT.03 Barabai	-	150.000.000,00
2	Yayasan Ponpes Attahiriyah Al Jafariyah As Syarbini	Desa Mantaas Rt.001 RW.001 Kec. Labuan Amas Utara	-	30.000.000,00
3	Panitia Pembangunan Pondok Pesantren Raudhatul M	Desa Maringgit, Kec. Batang Alai Utara	-	100.000.000,00
4	Yayasan Al-Mujtahidin	Desa Hawang Kec. Limpasu	-	35.000.000,00

5	Dewan Pimpinan Daerah Pengajian Al Hidayah Kab. HST	Jl. Murakata Komp Swakarya RT.009 Kec. Barabai	-	50.000.000,00
JUMLAH				**2.340.000.000,00**

6. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan TA 2024 Rp. 2.490.000.000,00

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
1. Sekretariat Daerah Rp 2.490.000.000,00				
1	Pengurus Langgar Darul Khairat	Jl. KH. Hasan Ahmad RT.14 RW.004 Kel Barabai Timur Kec. Barabai	-	35.000.000,00
2	Panitia Pembangunan Musholla Ar-Ridha	Jl. Perintis Kemerdekaan RT.001 RW.001 Desa Benawa Tengah Kec. Barabai	-	45.000.000,00
3	Mesjid Mujahidin Barabai	Jl. Ir. P.H.M. Noor Kel. Barabai Utara Kec. Barabai	-	100.000.000,00
4	Langgar Al- Muhajirin	Komp. Murakata Indah RT.010 Desa Mandingin Kec. Barabai	-	35.000.000,00
5	Panitia Pembangunan Majelis Rasulullah SAW	Jl. Perintis Kemerdekaan Batali RT.009 RW.005 Desa Benawa Tengah Kec. Barabai	-	100.000.000,00
6	Pengurus Mesjid Al-Munawwarah	Desa Pajukungan RT.003 RW 002 Kec. Barabai	-	100.000.000,00
7	Panitia Langgar Miftahul Jannah	Desa Pagat RT.008 RW.002 Kec. Batu Benawa	-	35.000.000,00
8	Langgar Darul Ibadah	Jl. Penas Tani IV RT.002 RW.001 Desa Kahakan Kec. Batu Benawa	-	45.000.000,00
9	Badan Pengelola Mesjid Al Muttaqin	Jl. H. Arjan RT.002 RW.001 Desa Pantai Batung Kec Batu Benawa	-	100.000.000,00
10	Pengurus Langgar Darul Muta'alimin	Desa Aluan Sumur Kec. Batu Benawa	-	35.000.000,00
11	Panitia Langgar Nurul Huda	Desa Hantakan Kec. Hantakan	-	35.000.000,00
12	Panitia Mesjid Darul Munawwarah	Desa Tilahan RT.003 RW.002 Kec. Hantakan	-	65.000.000,00
13	Badan Pengelola Masjid Nurul Yaqin	Desa Kindingan Kec. Hantakan	-	60.000.000,00
14	Panitia Perbaikan Mesjid Al Ubbad	Desa Masiraan RT.004 RW.002 Kec. Pandawan	-	55.000.000,00
15	Langgar Darul Husna	Desa Mahang Matang Landung RT.002 RW.001 Kec. Pandawan	-	35.000.000,00
16	Langgar Darul Matab	Desa Banua Hanyar Kec. Pandawan	-	23.000.000,00
17	Panitia Langgar Al-Huda	Jl. Setia RT.006 RW.002 Desa Kayu Rabah Kec. Pandawan	-	35.000.000,00
18	Langgar Nurul Huda	Desa Mahang Sungai Hanyar RT.001 RW.001 Kec. Pandawan	-	35.000.000,00
19	Langgar Darul Istiqamah	Desa Jatuh Kec. Pandawan	-	35.000.000,00
20	Pengurus Mesjid Taqwa	Desa Banua Hanyar Kec. Pandawan	-	100.000.000,00
21	Panitia Mesjid Darul Huda	Desa Mundar Kec. Labuan Amas Selatan	-	100.000.000,00
22	Panitia Pembangunan Mesjid Al-Muttaqin	Desa Bangkal RT.004 Rw.002 Kec. Labuan Amas Selatan	-	75.000.000,00
23	Mushola Nurul Iman	Desa Rantau Bujur Kec. Labuan Amas Utara	-	30.000.000,00
24	Pengurus Mesjid At Taqwa	Desa Perumahan RT.003 Kec. Labuan Amas Utara	-	50.000.000,00
25	Pengurus Masjid Al-Mukarramah	Desa Rantau Bujur RT.001 Kec. Labuan Amas Utara	-	80.000.000,00
26	Mesjid Al-Mujahiddin	Desa Rantau Bujur RT.003 Kec. Labuan Amas Utara	-	35.000.000,00
27	Pengurus Mesjid Syiblul Amin	Desa Rantau Keminting RT.2 RW.1 Kec. Labuan Amas Utara	-	100.000.000,00
28	Panitia Pembangunan Mesjid Ubudiyah	Desa Dangu RT.002 RW.001 Kec. Batang Alai Utara	-	100.000.000,00
29	Pengurus Langgar Raudhatul Abidin	Jl. H. Damanhuri RT,006 RW.003 Desa Ilung Kec. Batang Alai Utara	-	35.000.000,00

30	Pengurus Langgar Al-Hijrah	Jl. Hidup Baru RT.003 RW.002 Desa Ilung Kec. Batang Alai Utara	-	35.000.000,00
31	Pengurus Mesjid Al-Muttaqin	Jl. Mantarungin RT.008 RW.003 Desa Labunganak Kec. Batang Alai Utara	-	50.000.000,00
32	Panitia Musholla At-Taubah	Desa Labunganak RT.001 RW.001 Kec. Batang Alai Utara	-	35.000.000,00
33	Badan Pengurus Masjid Darul Khairat	Jl. Bina Banua RT.005 RW.003 Desa Ilung Tengah Kec. Batang Alai Utara	-	80.000.000,00
34	Panitia Pembangunan Langgar Annur	Jl. Gerilya H. Hasan Baseri RT.006 RW.002 Kel. Birayang Kec. Batang Alai Selatan	-	27.000.000,00
35	Pengurus Langgar Al-Karamah	Jl. Kesatria, Desa Wawai Gardu, Kec. Batang Alai Selatan	-	30.000.000,00
36	Pengurus Mesjid Al-Muttaqin	Jl. Kesatria, Desa Wawai Gardu RT.001 Kec. Batang Alai Selatan	-	100.000.000,00
37	Panitia Pembangunan Langgar Darul Mu'minin	Jl. Abung Jayapati, RT.004 RW.002 Desa Abung, Kec. Limpasu	-	40.000.000,00
38	Majelis Ratib Al Athas	Desa Hawang RT.003 RW.002 Kec. Limpasu	-	40.000.000,00
39	Panitia Mesjid Asshabirin	Desa Hawang Kec. Limpasu	-	40.000.000,00
40	Lembaga Mesjid Berkat	Desa Hawang Kec. Limpasu	-	55.000.000,00
41	Panitia Mesjid Hidayatul Islam	Jl. Karau RT.009 RW.003 Desa Karau Kec. Limpasu	-	70.000.000,00
42	Pengurus Masjid Darul Muttaqin	Desa Pauh Kec. Limpasu	-	55.000.000,00
43	Pengurus Langgar Jannatul Taqwa	Desa Tapuk, RT.012 RW.006 Kec. Limpasu	-	35.000.000,00
44	Panitia Mesjid Al-Jawahir	Desa Batu Panggung RT.002 RW.001 Kec. Haruyan	-	50.000.000,00
45	Pengurus Langgar Siratul Jannah	Desa Sungai Harang, RT.004 RW.002 Kec. Haruyan	-	35.000.000,00
JUMLAH				**2.490.000.000,00**

7. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan TA 2025 Rp. 4.570.751.000,00

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	KETERANGAN	JUMLAH
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 4.570.751.000,00				
1	Pondok Pesantren Nurul Muhibbin	Jl. M. Ramli Kitun, Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.	Pembangunan Prasaranan Ponpes	816.563.000,00
2	Pondok Pesantren Minhajul Abidin Barabai	Jalan Merdeka, Mandingin, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.	Pembangunan Asrama Ponpes	1.800.993.000,00
3	Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Hantakan	Jl. Brigjend H. Hasan Baseri, Desa Hantakan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan	Pembangunan Prasaranan Ponpes	679.916.000,00
4	Pondok Pesantren Dhiyaul Amin Pemangkih	Desa Pemangkih, Kec. Labuan Amas Utara	Pembangunan Prasaranan Ponpes	888.979.000,00
5	Klinik Pondok Pesantren Al Muhajirin Pemangkih Seberang	Pemangkih, Kec. Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan 71362	pembangunan Klinik Ponpes	384.300.000,00
JUMLAH				**4.570.751.000,00**

8. Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2025 Rp. 30.000.0000,00

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	KETERANGAN	JUMLAH
1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp 30.000.000,00				
1	Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI)	Barabai	-	30.000.000,00
JUMLAH				**30.000.000,00**

9. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta TA 2025 Rp. 1.446.373.751,00

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	KETERANGAN	JUMLAH
1. Dinas Pendidikan Rp 1.446.373.751,00				
1	SD IBNUL AMIN	Desa Binjai Pemangkih RT. 01 RW. 01	SWASTA	432.400.000,00
2	SD IT TARBIATUL AULAD	Jl.P.H.M.Noor Gang Noor kampung Arab	SWASTA	33.840.000,00
3	SD MUHAMMADIYAH BARABAI	Jl. Ir Pm Noor No 33 Rt 01	SWASTA	43.075.533,00
4	SD MUHAMMADIYAH	Jl. Raya Kasarangan	SWASTA	64.544.478,00
5	SD ISLAM TERPADU AL KHAIR	Jl. Brigjend H. Hasan Baseri	SWASTA	556.925.740,00
6	SMPIT AL-KHAIR BARABAI	Desa Bawan Kec. Barabai	Sekolah Swasta	219.440.000,00
7	SMP ISLAM MUHAJIRIN	Kec. Labuan Amas Utara	Sekolah Swasta	96.148.000,00
JUMLAH				**1.446.373.751,00**

10. Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2025 Rp. 1.546.710.000,00

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	KETERANGAN	JUMLAH
1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp 1.546.710.000,00				
1	Partai Demokrat	Jl.Tangkarau Surapati No.11 RT/RW 11/03 Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kab. HST	Bantuan Keuangan kepada partai politik	281.501.000,00
2	Partai Golongan Karya (Golkar)	Jl. Hevea Baru No. 101 RT. 15 A Kel. Barabai Darat Kec. Barabai Kab. HST	Bantuan Keuangan kepada partai politik	219.516.000,00
3	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Jl. Keramat Manjang No. 4A RT.08 Kel. Barabai Kab. HST	Bantuan Keuangan kepada partai politik	213.323.000,00
4	Partai Amanat Nasional (PAN)	Jl. Sarigading RT.005/002 Kelurahan Barabai Utara Kec. Barabai Kab. HST	Bantuan Keuangan kepada partai politik	196.317.000,00
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Jl. Bulau Sarigading Kel. Barabai Utara Kec. Barabai Kab. HST	Bantuan Keuangan kepada partai politik	190.916.000,00
6	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Jl. Brigjend H. Hasan Baseri Kel. Barabai Barat Kec. Barabai Kabupaten HST	Bantuan Keuangan kepada partai politik	165.836.000,00
7	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Jl. Brigjend H. Hasan Baseri Km. 02 No. 07 Kel. Bukat Kec. Barabai Kabupaten HST	Bantuan Keuangan kepada partai politik	147.103.000,00
8	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Jl. Brigjend H. Hasan Baseri RT.008/003 Kel. Bukat Kec. Barabai Kabupaten HST	Bantuan Keuangan kepada partai politik	132.198.000,00
JUMLAH				**1.546.710.000,00**

11. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD TA 2025 Rp. 3.816.566.450,00

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
Dinas Pendidikan Rp 3.831.726.000,00				
1	KB AL - HIDAYAH	Jl. H. Abd. Muis Ridhani No. 09 RT.008 Barabai	BOSP Reguler	16.800.000,00
2	KB AL - HUSNA	Jl. Kesatria	BOSP Reguler	7.200.000,00
3	KB AL AMIN	Desa Binjai Pemangkih RT. 1 RW. I	BOSP Reguler	16.200.000,00
4	KB AL-HANIF	Jl. H. M. Syarkawi RT. 15 RW. IV No. 109	BOSP Reguler	18.000.000,00
5	KB AL-HUSNA	Jl. Penas TANI IV RT. 1 Desa Kalibaru	BOSP Reguler	10.800.000,00
6	KB AL-JARIAH	JL. SURAPATI RT. 08 RW. IV DESA HAWANG	BOSP Reguler	10.200.000,00
7	KB ANAK BANGSA	Desa Pasting RT. 02 RW. I	BOSP Reguler	5.400.000,00

8	KB ANAK CERIA	Jl. M. Ramli No. 12	BOSP Reguler	12.000.000,00
9	KB ANGGREK	PEMATANG	BOSP Reguler	15.000.000,00
10	KB ANGGREK	Desa kambat Utara	BOSP Reguler	10.200.000,00
11	KB AN-NUR	H.A. SYAFAWI MURAKATA RT. 06 RW. II	BOSP Reguler	13.200.000,00
12	KB Ashobah	Desa Babai	BOSP Reguler	12.600.000,00
13	KB BENAWA CERIA	TANJUNG PURA	BOSP Reguler	28.200.000,00
14	KB Bina Bersama Gayaba	Desa Limpasu	BOSP Reguler	12.600.000,00
15	KB BINTANG KECIL	Jl. Ir. Pangeran H. M. Noor No. 41 Barabai	BOSP Reguler	16.800.000,00
16	KB Bintang Kejora	Jl. Mufakat Mambulang	BOSP Reguler	9.000.000,00
17	KB CEMPAKA	SAMHURANG	BOSP Reguler	20.400.000,00
18	KB Citra Tunas Bangsa	Desa Durian Gantang RT 04 RW 02	BOSP Reguler	12.000.000,00
19	KB GENERASI BERBUDI	Jalan A. Yani RT.002 RW.001 Desa Panggung Haruyan	BOSP Reguler	24.000.000,00
20	KB GUNTUNG CERIA	Desa Haruyan Seberang RT. 7 RW. III	BOSP Reguler	10.800.000,00
21	KB HARAPAN BERSAMA	Barikin RT.001 RW.001	BOSP Reguler	21.600.000,00
22	KB Harapan Bunda	Jl. Gerilya Desa Tabat Padang	BOSP Reguler	10.800.000,00
23	KB ISLAM TERPADU AL-KHAIR	Jl. Cahaya Al Maksum Komp. Pendidikan SIT Al Khair	BOSP Reguler	45.300.960,00
24	KB Jannah	Jl. H. Hasan Basri No. 27	BOSP Reguler	10.800.000,00
25	KB KARTIKA JAYA KOORDINATOR XXXXIV YONIF 6	Jl. Matang Hambawang Rt 13 Rw 07	BOSP Reguler	10.656.000,00
26	KB KARUNIA	JL. MUHAMMAD THAHIR RT. 02 RW. 01 DESA TELUK M	BOSP Reguler	9.600.000,00
27	KB KASIH BUNDA SARI BUNGA	Jl. Desa Ayung RT. 06/RW. 03	BOSP Reguler	6.000.000,00
28	KB KASIH IBU	JL. BRIGJEND. H. HASAN BASERI	BOSP Reguler	17.400.000,00
29	KB KASIH IBU	Desa Tabat RT. 03 RW. 01	BOSP Reguler	27.060.000,00
30	KB KEMAKMURAN	Desa Awang Baru	BOSP Reguler	8.400.000,00
31	KB KENANGA	Jl. Sarigading Rt.05 /Rw.03	BOSP Reguler	10.800.000,00
32	KB LESTARI	JL. H. M. THAHIR RT. 02 RW. I DESA HARUYAN SEBER/	BOSP Reguler	6.000.000,00
33	KB LOKLAGA RIA	Jl. Loklaga Ria RT. 05 RW. III Desa Pengambau Hulu	BOSP Reguler	5.400.000,00
34	KB MARHAMAH	Jl. Keramat Manjang RT. 8 RW. 3 No. 111	BOSP Reguler	10.800.000,00
35	KB Mekar Sari	Desa Mahang Matang Landung	BOSP Reguler	13.200.000,00
36	KB Mukhbita	Jl. Kesatria RT 05 RW 03	BOSP Reguler	9.000.000,00
37	KB MURAKATA	JALAN MERDEKA NO. 1	BOSP Reguler	5.400.000,00
38	KB Nusa Indah	Desa Aluan	BOSP Reguler	8.400.000,00
39	KB PELITA HATI	Jl. Divisi IV Alri RT. 5 RW. 3 Desa Lokbuntar	BOSP Reguler	16.200.000,00
40	KB PERMATA BUNDA	Jl. A. Yani Desa Pangambau Hilir Luar	BOSP Reguler	7.800.000,00
41	KB PERMATA BUNDA	JALAN DESA BULAYAK RT.02 RW.01	BOSP Reguler	7.200.000,00
42	KB Permata Hati 1	Desa Alat	BOSP Reguler	11.400.000,00
43	KB PERMATA INDAH	Jl. Raya Tapuk,Rt.06/ Rw.03	BOSP Reguler	12.000.000,00
44	KB PKK Pihandam	Jl. Raya Limpasu	BOSP Reguler	8.400.000,00
45	KB QURRATA AYUN	JL.DEVISI IV ALRI DESA ANDANG RT.01 RW 01	BOSP Reguler	13.800.000,00
46	KB RAUDATUL ATFAL MUSLIMAT NU	Jl. Divisi IV Alri RT. 1 RW. I Desa Haruyan	BOSP Reguler	9.600.000,00
47	KB Sinar Pagi	Jl. Sarigading	BOSP Reguler	11.400.000,00
48	KB TERPADU AISYIYAH MAWADDAH	Jl. Brigjen H. Hasan Baseri RT. 09 RW. 3 Kompl. PU	BOSP Reguler	46.800.000,00
49	KB TERPADU CERDAS MANDIRI	Jl. Raya Pantai Hambawang Timur RT. 02/II	BOSP Reguler	9.000.000,00

50	KB TRISULA	Jl. Guntur Barat RT. 14/VII	BOSP Reguler	16.800.000,00
51	KB TUNAS BANGSA	Desa Mahang Sungai Hanyar RT.003 RW. 002	BOSP Reguler	11.400.000,00
52	KB TUNAS MERATUS	Jl. Ksatria	BOSP Reguler	7.200.000,00
53	KB. Serunai	Jl. Kesatria	BOSP Reguler	7.800.000,00
54	KB. Wibawa	Jl. Surapati	BOSP Reguler	12.600.000,00
55	PAUD TERPADU MASIRAAN CERIA	Desa Masiraan RT 01 RW 01	BOSP Reguler	12.000.000,00
56	SPS ANAK BANGSA..	Desa Banua Kupang RT. 2 RW. I	BOSP Reguler	10.800.000,00
57	SPS Anggrek	Desa Labunganak	BOSP Reguler	4.200.000,00
58	SPS AS-SALAM	Desa Guha	BOSP Reguler	15.000.000,00
59	SPS BAHAGIA SEJAHTERA	Telang Kec. Batang Alai Utara	BOSP Reguler	9.600.000,00
60	SPS Bina Banua	Desa Ilung Tengah	BOSP Reguler	7.200.000,00
61	SPS CERDAS CERIA	DESA PENGAMBAU HILIR DALAM	BOSP Reguler	9.000.000,00
62	SPS CINTA IBU	JL. SURAPATI DESA ABUNG RT. 07 RW. 03	BOSP Reguler	9.000.000,00
63	SPS FIRDAUS	JL RAYA LIMPASU DESA LIMPASU	BOSP Reguler	7.800.000,00
64	SPS MAWAR	Desa Kayu Bawang RT. 2	BOSP Reguler	12.000.000,00
65	SPS MELATI	Tungkup	BOSP Reguler	12.000.000,00
66	SPS MELATI II	Desa Labunganak Kec. Batang Alai Utara	BOSP Reguler	13.200.000,00
67	SPS Permata Hati 1	Desa Alat	BOSP Reguler	18.000.000,00
68	SPS PERMATA IBUNDA	Desa Pemangkih RT. 3 RW. I	BOSP Reguler	19.800.000,00
69	SPS SAYANG BUNDA	Desa Mundar	BOSP Reguler	24.000.000,00
70	SPS SAYANG BUNDA	Desa Taras Padang	BOSP Reguler	12.600.000,00
71	SPS SEKUNTUM	Desa Karau RT. 01 RW. 01 Kec. Limpasu	BOSP Reguler	13.068.000,00
72	SPS SUKA MAJU	Desa Awang Besar	BOSP Reguler	24.000.000,00
73	SPS TERATAI	Jl. Telaga Sungai Tabuk Desa Mandingin	BOSP Reguler	8.400.000,00
74	TAUD SaQu Al Umm Barabai	Jl. Mesjid Al Umm Komplek Bulau Indah Baru	BOSP Reguler	34.800.000,00
75	TK AYUANG	Jl. Desa Ayuang RT. 02/RW. 01	BOSP Reguler	10.200.000,00
76	TK BINTANG KECIL	Jl.Antasari Komplek Kehakiman RT. 12/4	BOSP Reguler	24.540.000,00
77	TK KEMUNING BARABAI DARAT	Jl. SMP Barabai	BOSP Reguler	4.800.000,00
78	TK MANDINGIN	Jl. Merdeka Desa Mandingin RT.10 RW.02	BOSP Reguler	3.000.000,00
79	TK MANDINGIN 2 BARABAI	Jl. Antasan Desa Mandingi	BOSP Reguler	10.145.000,00
80	TK ADIE DHARMA	Jl. Kesuma Bangsa Birayang	BOSP Reguler	3.595.560,00
81	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL	Jl. Divisi IV Alri RT. 2 RW. 3 Desa Haruyan	BOSP Reguler	46.200.000,00
82	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL	Jl. Telaga Jingah Hulu No. 37 Kel. Pantai Hambawan	BOSP Reguler	28.800.000,00
83	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL	Desa Kedundung RT. 1 RW. I	BOSP Reguler	9.600.000,00
84	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL	Jl. Ir. H. P. M. Noor Barabai	BOSP Reguler	13.200.000,00
85	TK AL - HANIF	Jl.H.M .Syarkawi No.109 RT.015 RW.01 Barabai Utara	BOSP Reguler	13.800.000,00
86	TK AL FAJAR	Desa Banua Asam	BOSP Reguler	16.190.100,00
87	TK AL HUSNA	Jl. Penas Tani RT. 01 RW. I	BOSP Reguler	21.000.000,00
88	TK AL-HAYAT	Jl. Keramat Desa Hulu Rasau	BOSP Reguler	10.800.000,00
89	TK AL-HIDAYAH	Jl. Abdul Muis Ridhani Barabai	BOSP Reguler	62.966.140,00
90	TK AL-HIDAYAH	Desa Tabudarat Hulu RT. 4	BOSP Reguler	14.400.000,00
91	TK AL-HIDAYAH I	Jl. Datu Aria Pandawan	BOSP Reguler	40.800.000,00



92	TK ALHIDAYAH II	Desa Setiap	BOSP Reguler	9.600.000,00
93	TK AL-HUDA	Jl. Setia	BOSP Reguler	10.100.000,00
94	TK AL-HUSNA	TANAH HABANG	BOSP Reguler	7.800.000,00
95	TK AL-IKHLAS	Desa Pajukungan RT. 007 RW. 003	BOSP Reguler	20.400.000,00
96	TK AMANAH	Jl. Devisi IV Alri Desa Andang Kec. Haruyan	BOSP Reguler	11.400.000,00
97	TK AN NISA	Jl. Kesatria Desa Tandilang	BOSP Reguler	9.600.000,00
98	TK ANAK BANGSA	Desa Pasting RT. 02 RW. I	BOSP Reguler	19.800.000,00
99	TK ANGGERIK PUTIH	Desa Sungai Jaranih RT. 003 RW. 002	BOSP Reguler	25.800.000,00
100	TK ANGGREK	ALUAN MATI	BOSP Reguler	11.400.000,00
101	TK ANGGREK	Desa Pematang	BOSP Reguler	10.800.000,00
102	TK ANGGREK MUNGKUR PANJANG	Desa Labunganak	BOSP Reguler	4.200.000,00
103	TK AN-NISA HAWANG	Jl. Surapati Desa Hawang	BOSP Reguler	24.000.000,00
104	TK AN-NUUR	Jl. Suka Maju Desa Banua Hanyar	BOSP Reguler	10.200.000,00
105	TK Anugerah	Desa Batu Panggung	BOSP Reguler	11.400.000,00
106	TK AR RAUDAH	Desa Layuh	BOSP Reguler	5.400.000,00
107	TK AR-RAHIM	Jl. Dangu RT. 4 RW. 2 Desa Panggung	BOSP Reguler	15.000.000,00
108	TK ASSALAM	Jl. Norman Hasyim Desa Aluan Sumur	BOSP Reguler	15.000.000,00
109	TK BERSAMA	Desa Babai	BOSP Reguler	12.000.000,00
110	TK BINA BERSAMA	Jl. Divisi IV Alri RT. 1 RW. I Desa Barikin	BOSP Reguler	20.064.000,00
111	TK BINA BERSAMA GAYABA	Jl. Raya Limpasu Desa Limpasu	BOSP Reguler	10.800.000,00
112	TK BINA HARAPAN	Jl.Gerilya Desa Kias	BOSP Reguler	12.000.000,00
113	TK BINA INSAN I	Jl. Sarigading Desa Banua Budi	BOSP Reguler	9.600.000,00
114	TK BINA INSAN II	Jl. Sarigading RT. 2 Desa Banua Binjai	BOSP Reguler	24.600.000,00
115	TK BINA KARYA	Jl. Gerilya H. Hasan Baseri Desa Paya	BOSP Reguler	12.600.000,00
116	TK BUDI MULIA	Jl. Ulama Desa Sumanggi	BOSP Reguler	16.200.000,00
117	TK BUDI UTAMA	Desa Ilung Pasar Lama	BOSP Reguler	9.000.000,00
118	TK CAHAYA ABADI	Jl. Surapati Desa Rangas	BOSP Reguler	11.400.000,00
119	TK CEMPAKA	Desa Klas Kec. Batang Alai Selatan	BOSP Reguler	9.000.000,00
120	TK CEMPAKA	Panggang marak Rt.03 Kecamatan Labuan Amas Selata	BOSP Reguler	10.200.000,00
121	TK CENDERAWASIH	Jl. Surapati Desa Banua Jingah	BOSP Reguler	13.800.000,00
122	TK CITRA MULIA	Jl. Brigjen H. Hasan Baseri Barabai Barat	BOSP Reguler	9.600.000,00
123	TK DAHLIA	Jl. H. Arjan Desa Pantai Batung	BOSP Reguler	15.600.000,00
124	TK DAHLIA	Desa Mahela	BOSP Reguler	3.600.000,00
125	TK DEWI SARTIKA	Desa Mahang Sungai Hanyar	BOSP Reguler	12.000.000,00
126	TK DHARMA WANITA	Jl. Bina Banua Desa Ilung Tengah	BOSP Reguler	13.800.000,00
127	TK DWI AYU	Desa Kasarangan	BOSP Reguler	8.400.000,00
128	TK DWI SARTIKA	Desa Sungai Buluh	BOSP Reguler	12.600.000,00
129	TK GELATIK	MANGUNANG SEBERANG	BOSP Reguler	16.200.000,00
130	TK GOTONG ROYONG	Desa Banua Kupang RT. 3 RW. 3	BOSP Reguler	9.600.000,00
131	TK HADIKAT	Desa Buluan	BOSP Reguler	12.600.000,00
132	TK HARAPAN BANGSA	Desa Hapulang	BOSP Reguler	18.600.000,00
133	TK HARAPAN BANGSA	Jl. H. Arjan Desa Pantai Batung	BOSP Reguler	12.600.000,00



134	TK HARAPAN BANGSA	Desa Haruyan Dayak	BOSP Reguler	3.000.000,00
135	TK HARAPAN BUNDA	Desa Labunganak	BOSP Reguler	13.200.000,00
136	TK Harapan Bunda	Jl. Kesatria	BOSP Reguler	20.400.000,00
137	TK HARAPAN IBU	Jl. H. Arjan Desa Murung A	BOSP Reguler	17.400.000,00
138	TK HARAPAN IBU	Desa Banua Kupang RT. 1 RW. I	BOSP Reguler	8.400.000,00
139	TK HARAPAN IBU	JL. KESATRIA BATU TANGGA	BOSP Reguler	21.600.000,00
140	TK HARAPAN MASA	Jl. Merdeka Desa Kapar	BOSP Reguler	4.125.000,00
141	TK HARAPAN MASA	JL. AWANG	BOSP Reguler	17.400.000,00
142	TK HAUR KUNING	Jl. Surapati Desa Rangas	BOSP Reguler	4.200.000,00
143	TK HIDUP BARU	LABUAN AMAS SELATAN	BOSP Reguler	25.200.000,00
144	TK IDHATA I	Desa Hapingin	BOSP Reguler	4.200.000,00
145	TK IDHATA II	DESA PALAJAU	BOSP Reguler	15.600.000,00
146	TK IDHATA III PGRI	Desa Pantai Hambawang Barat	BOSP Reguler	17.400.000,00
147	TK IDHATA IV	Desa Telang	BOSP Reguler	10.200.000,00
148	TK IDHATA V	Desa Mahang Sungai Hanyar RT. 002 RW. 003	BOSP Reguler	13.050.000,00
149	TK IDHATA VI	Desa Dangu	BOSP Reguler	7.800.000,00
150	TK INSAN	Desa Labunganak	BOSP Reguler	11.400.000,00
151	TK ISLAM IBNUL AMIN..	Desa Binjai Pemangkih RT. 1 RW. I	BOSP Reguler	89.400.000,00
152	TK ISLAM TERPADU AL-KHAIR	Jl. Cahaya Al Maksum Komp. Pendidikan SIT Al Khair	BOSP Reguler	83.972.230,00
153	TK IT TARBIATUL AULAD	Jl. Ir. P. H. M. Noor Kampung Arab Gang Noor Barab	BOSP Reguler	3.267.000,00
154	TK IZATUNNAFSI	Desa Sungai Harang RT. 01 RW. 01	BOSP Reguler	11.350.000,00
155	TK JAYAPATI ABUNG	Jl. Surapati Desa Abung	BOSP Reguler	12.600.000,00
156	TK JAYAPATI KARAU	Jl. Surapati Desa Karau	BOSP Reguler	16.200.000,00
157	TK KARTIKA V-25	Jl. Bhima Barabai	BOSP Reguler	17.400.000,00
158	TK KARTIKA V-33	Jl. Matang Hambawang Desa Benawa Tengah	BOSP Reguler	29.400.000,00
159	TK KARTINI	Desa Buluan	BOSP Reguler	12.000.000,00
160	TK KASIH BUNDA	Patikalain RT. 01 RW. 01	BOSP Reguler	11.400.000,00
161	TK KASIH IBU KABANG	Jl. Raya Limpasu Desa Kabang	BOSP Reguler	7.200.000,00
162	TK KEMALA BHAYANGKARI 07	Jl. Ir. P. H. M. Noor No. 29 Kel. Barabai Selatan	BOSP Reguler	15.000.000,00
163	TK KEMALA BHAYANGKARI 08	Desa Kambat Utara	BOSP Reguler	20.696.900,00
164	TK KENANGA	Desa Pemangkih Seberang RT. 4 RW. 2	BOSP Reguler	10.800.000,00
165	TK KENANGA	Desa Taal	BOSP Reguler	19.800.000,00
166	TK KENANGA	Jl. Perintis Kemerdekaan Desa Gambah	BOSP Reguler	22.197.000,00
167	TK KERAMAT	Jl. Keramat Manjang RT. 8 RW. 3 Kel. Barabai Barat	BOSP Reguler	19.800.000,00
168	TK KESUMA	Jl. M. Ramli Barabai	BOSP Reguler	27.600.000,00
169	TK LEMBAGA BUDI	Jl. Sarigading Desa Jatuh	BOSP Reguler	15.600.000,00
170	TK MAHANG BARU	Desa Mahang Baru RT. 2 RW. I	BOSP Reguler	9.600.000,00
171	TK MAJU BERSAMA	Rantau Perupuk RT.001 RW.001 Datar Ajab, Hantakan	BOSP Reguler	15.540.000,00
172	TK MARAI CERIA	Batu Tunggal RT. 001 RW.001	BOSP Reguler	13.800.000,00
173	TK MAWAR	Jl. Mualimin RT. 4 RW. II Desa Kayu Bawang	BOSP Reguler	37.611.600,00
174	TK MAWAR	Jl. Penas Tani IV Desa Bakti	BOSP Reguler	10.200.000,00
175	TK MAWAR	Desa Murung Taal	BOSP Reguler	19.200.000,00

176	TK MEKAR BANDANG	Desa Kahakan	BOSP Reguler	7.800.000,00
177	TK MEKAR SARI	Jl.Loklaga Ria	BOSP Reguler	6.600.000,00
178	TK MEKAR SARI	Desa Tanah Habang	BOSP Reguler	6.360.000,00
179	TK MELATI	Desa Awang Besar	BOSP Reguler	9.000.000,00
180	TK MELATI	Desa Pemangkih Seberang	BOSP Reguler	12.000.000,00
181	TK MELATI	DESA PENGAMBAU HILIR DALAM	BOSP Reguler	5.400.000,00
182	TK MELATI	Jl. Raya Limpasu Desa Tapuk	BOSP Reguler	16.200.000,00
183	TK MELATI MARINGGIT	Desa Maringgit	BOSP Reguler	13.200.000,00
184	TK MELATI TUNAS BARU	Desa Bangkal RT. 3 RW. II	BOSP Reguler	12.000.000,00
185	TK MERPATI	Jl. Surapati Desa Banua Jingah	BOSP Reguler	17.626.300,00
186	TK MUARIFIN	Desa Banua Kepayang	BOSP Reguler	15.000.000,00
187	TK MULIA KARATUNGAN	JL. SUNGAI TABUK DESA KARATUNGAN	BOSP Reguler	11.400.000,00
188	TK NOR ASIH	Desa Labuhan	BOSP Reguler	6.000.000,00
189	TK NURRAHMAN	Desa Banua Kepayang	BOSP Reguler	21.744.000,00
190	TK NURUL AMIN	LABUAN AMAS UTARA	BOSP Reguler	5.400.000,00
191	TK NUSA INDAH	Jl. panastani IV Aluan	BOSP Reguler	17.400.000,00
192	TK PAYA BESAR	JL. Swadaya RT. 05 / RW. 02 Paya Besar	BOSP Reguler	19.200.000,00
193	TK Permata Bunda	Desa Bulayak RT 02 RW 01	BOSP Reguler	18.000.000,00
194	TK PERMATA BUNDA HARUYAN	Desa Pengambau Hilir Luar Haruyan	BOSP Reguler	25.044.000,00
195	TK PERMATA HATI 1	Jl. Brigjen H. Hasan Baseri RT. 1 RW. I Desa Alat	BOSP Reguler	22.200.000,00
196	TK PERTIWI	Jl. Brigjen H. Hasan Baseri Barabai	BOSP Reguler	34.152.960,00
197	TK PERTIWI	Jl. Batuah Desa Pandawan	BOSP Reguler	4.800.000,00
198	TK PERTIWI	Jl. Brigjen H. Hasan Baseri RT. 1 RW. I Desa Hanta	BOSP Reguler	25.200.000,00
199	TK PERTIWI	Pantai Hambawang Timur	BOSP Reguler	13.800.000,00
200	TK PERTIWI	Jl. Tanjung Pura Pagat	BOSP Reguler	12.000.000,00
201	TK PGRI II	Desa Telang	BOSP Reguler	6.600.000,00
202	TK PGRI III	Desa Muara Rintis	BOSP Reguler	5.400.000,00
203	TK PKK 2 TAPUK	Jl. Raya Limpasu Desa Tapuk	BOSP Reguler	6.600.000,00
204	TK PKK ABUNG SURAPATI	Jl. Surapati	BOSP Reguler	7.200.000,00
205	TK PKK BATUNG	Desa Muara Rintis	BOSP Reguler	7.800.000,00
206	TK PKK KARATUNGAN..	JL. SURAPATI DESA KARATUNGAN	BOSP Reguler	10.800.000,00
207	TK PKK LIMPASU	Jl. Raya Limpasu	BOSP Reguler	9.000.000,00
208	TK PKK PAUH	JL. SURAPATI RT. 5 RW. I DESA PAUH	BOSP Reguler	16.800.000,00
209	TK PKK PIHANDAM	Jl. Raya Limpasu Desa Limpasu	BOSP Reguler	9.600.000,00
210	TK PKK TAPUK	Jl. Raya Limpasu Desa Tapuk	BOSP Reguler	8.400.000,00
211	TK PUSAKA ABADI	Desa Walangku Kasarangan	BOSP Reguler	8.400.000,00
212	TK RAHMAT	Jl. Jembatan Rahmat RT. 1 Kel. Bukat	BOSP Reguler	4.800.000,00
213	TK RAKAT MUFAKAT	Desa Rantau Keminting RT. 5 RW. 3	BOSP Reguler	18.597.500,00
214	TK RAKAT MUFAKAT	Desa Jamil RT. 05 Kec.. Labuan Amas Selatan	BOSP Reguler	16.800.000,00
215	TK RAUDAH	Jl. Surapati Desa Anduhum	BOSP Reguler	4.800.000,00
216	TK RAUDATUL ATFAL	Jl. Divisi IV Alri RT. 1 RW. I Desa Haruyan	BOSP Reguler	34.200.000,00
217	TK RAUDHA TUSSIBIYAN	Desa Matang Ginalon	BOSP Reguler	11.274.000,00

218	TK ROKHANIYAH MUSLIMAT NU	Jl. Ir. P. H. M. Noor Barabai	BOSP Reguler	66.000.000,00
219	TK ROSE	Jl. Penas Tani IV Desa Bakti	BOSP Reguler	4.800.000,00
220	TK RUHUI	Jl. Brigjen H. Hasan Baseri Barabai	BOSP Reguler	14.400.000,00
221	TK SAYANG IBU	Jl.Gerilya H. Hasan Baseri Desa Cukan Lipai	BOSP Reguler	17.253.900,00
222	TK Sefakat	Desa Jamil	BOSP Reguler	4.800.000,00
223	TK Sehati	Desa Hinas Kanan RT 01 RW 01	BOSP Reguler	9.434.000,00
224	TK SEJAHTERA	Desa Rantau Keminting RT. 3 RW. II	BOSP Reguler	7.200.000,00
225	TK SIBUYUNG	Jl. Tanjung Pura Desa Haliau	BOSP Reguler	13.800.000,00
226	TK SINAR BAKUNG	Desa Paya	BOSP Reguler	10.800.000,00
227	TK SINAR HARAPAN	Desa Haur Gading	BOSP Reguler	24.600.000,00
228	TK SINAR PAGI	Jl. Sarigading Desa Banua Batung RT.003 RW. 002	BOSP Reguler	6.600.000,00
229	TK SINAR SWARGA	Jl. Perintis Kemerdekaan Desa Benawa Tengah	BOSP Reguler	9.000.000,00
230	TK SUKA MAJU	Jl. Gerilya H. Hasan Baseri Desa Lunjuk	BOSP Reguler	21.000.000,00
231	TK SUMBER HARAPAN I	Jl. Merdeka Desa Kapar	BOSP Reguler	24.000.000,00
232	TK SUMBER HARAPAN II	Desa Limbar	BOSP Reguler	5.400.000,00
233	TK SURAPATI	Jl. Surapati RT. 3 RW. 2 Desa Birayang Surapati	BOSP Reguler	16.000.000,00
234	TK SWADAYA	Desa Mahang Matang Landung	BOSP Reguler	8.400.000,00
235	TK TERATAI	Jl. Ulama Desa Birayang	BOSP Reguler	15.599.300,00
236	TK TERATAI	Jl. Telaga Sei. Tabuk	BOSP Reguler	9.000.000,00
237	TK TERPADU AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL MAWA	Jl. Brigjen H. Hasan Baseri Komp. PU Barabai	BOSP Reguler	80.400.000,00
238	TK Terpadu Cerdas Mandiri	Desa Pantai Hambawang Timur	BOSP Reguler	13.800.000,00
239	TK THAHIRIYAH HAMIDIYAH	Jl. M. Thahir RT. 3 RW. I Desa Haruyan Seberang	BOSP Reguler	12.000.000,00
240	TK TRISULA	Jl. Guntur Barat RT. 14 Benawa Tengah Barabai	BOSP Reguler	36.600.000,00
241	TK TUNAS BANGSA	Desa Bakapas	BOSP Reguler	19.200.000,00
242	TK TUNAS BARU	Jln. Kesatria Desa Wawai Kec. Bas Kab HST	BOSP Reguler	5.400.000,00
243	TK TUNAS BUDI	Jl. Merdeka RT. 8 RW. III Desa Lok Besar	BOSP Reguler	13.800.000,00
244	TK TUNAS HARAPAN	Desa Tabudarat Hulu	BOSP Reguler	14.400.000,00
245	TK TUNAS HARAPAN	Jl. Haji Muhammad Taher	BOSP Reguler	17.400.000,00
246	TK TUNAS HARAPAN	Desa Pantai Hambawang Barat	BOSP Reguler	8.400.000,00
247	TK TUNAS HARAPAN 1	Desa Wawai Gardu	BOSP Reguler	8.400.000,00
248	TK TUNAS HARAPAN II	Jl. Merdeka Desa Kapar	BOSP Reguler	14.400.000,00
249	TK TUNAS MEKAR	Jl. Tanjung Pura Desa Pagat	BOSP Reguler	10.800.000,00
250	TK TUNAS MUDA	Desa Muara Rintis	BOSP Reguler	13.800.000,00
251	TK USWATUN HASANAH	Desa Pemangkih RT. 3 RW. I	BOSP Reguler	27.600.000,00

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
252	TPA AL HANIF	Jl. H. M. Syarkawi RT 15 RW IV	BOSP Reguler	7.200.000,00
253	TPA AN-NUR	Jl. H. A. SYAFAWI MURAKATA RT. 6 RW. II DESA BUKA	BOSP Reguler	7.200.000,00
254	TPA BINTANG KECIL 1	Ir. P.H. M. NOOR	BOSP Reguler	1.185.000,00
255	TPA ISLAM TEPADU AL-KHAIR	Jl. Cahaya Al Maksum Komp. Pendidikan SIT Al Khair	BOSP Reguler	6.000.000,00
256	TPA MARHAMAH	Jl. Keramat Manjang RT. 8 RW. 3 No. 111	BOSP Reguler	4.200.000,00
257	TPA MURAKATA	JL. MERDEKA NO 1	BOSP Reguler	6.600.000,00

258	TPA TERPADU AISYIYAH MAWADDAH	Jl. Brigjen H. Hasan Baseri RT. 09 RW. 3 Kompl. PU	BOSP Reguler	6.000.000,00
259	TPA Terpadu Cerdas Mandiri	JL. ASAM RIMBUN	BOSP Reguler	4.800.000,00
260	TPA TRISULA	Jl. Guntur Barat RT. 14/VII	BOSP Reguler	1.800.000,00
Jumlah				**3.816.566.450,00**

12. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan TA 2025 Rp. 3.122.169.017,-

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
Dinas Pendidikan Rp 3.122.169.071,00				
1	PKBM Ikhlas Berjuang	Jln. Mualimin	BOSP Reguler	129.000.000,00
2	PKBM Al Umm	Jl. Mesjid Al Umm Komplek Bulau Indah	BOSP Reguler	432.189.800,00
3	PKBM Satria	JL. Kesatria Birayang	BOSP Reguler	147.879.800,00
4	PKBM AS Syar'iyah	Jln. H. Damanhuri	BOSP Reguler	244.200.000,00
5	PKBM Berkat Usaha	Jl. Penas Tani IV	BOSP Reguler	270.799.471,00
6	PKBM Melati	Brigjend H. Hasan Baseri	BOSP Reguler	211.500.000,00
7	PKBM Sumber Ilmu	Divisi IV ALRI Desa Lokbuntar	BOSP Reguler	271.500.000,00
8	PKBM As Salam	Desa Murung Taal	BOSP Reguler	396.600.000,00
9	PKBM Suka Maju	Desa Tabat, Rt. 03 Rw.01 Kecamatan Labuan Amas Utara	BOSP Reguler	209.100.000,00
10	PKBM Dhiyaul Amin	Desa Pemangkih	BOSP Reguler	300.300.000,00
11	PKBM Serumpun	Jln. Raya Limpasu	BOSP Reguler	342.900.000,00
12	PKBM Anggrek	Jl. Sarigading Desa Kambat Utara	BOSP Reguler	76.200.000,00
13	PKBM Al Umm	Jl. Mesjid Al Umm Komplek Bulau Indah	BOSP Kinerja	45.000.000,00
14	PKBM Dhiyaul Amin	Desa Pemangkih	BOSP Kinerja	45.000.000,00
Jumlah				**3.122.169.071,00**

Lampiran 4

Rincian Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2025

NO.	PIHAK PENERIMA	URAIAN	JUMLAH
1.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Belanja Tidak Terduga Bantuan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial dan Bantuan Satuan Kematian Dinas Sosial PPKB, PP dan PA	292.000.000,00
		Belanja Tidak Terduga Bantuan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial dan Pendampingan Pasien Miskin Rawat Inap, Bantuan Berupa Uang/Barang Untuk Anak Terlantar dan Biaya Pengobatan dan Perawatan Pasien Miskin Dinas Sosial PPKB, PP dan PA	331.595.000,00
		Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial dan Bantuan Satuan Kematian Dinas Sosial PPKB, PP dan PA	306.800.000,00
		Belanja Tidak Terduga Bantuan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial dan Bantuan Satuan Kematian Dinas Sosial PPKB, PP dan PA	225.000.000,00
		Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial dan Bantuan Satuan Kematian Dinas Sosial PPKB, PP dan PA	255.000.000,00
JUMLAH			**1.410.395.000,00**

Lampiran 4

Rincian Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2025

NO.	PIHAK PENERIMA	URAIAN	JUMLAH
1.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Belanja Tidak Terduga Bantuan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial dan Bantuan Satuan Kematian Dinas Sosial PPKB, PP dan PA	292.000.000,00
		Belanja Tidak Terduga Bantuan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial dan Pendampingan Pasien Miskin Rawat Inap, Bantuan Berupa Uang/Barang Untuk Anak Terlantar dan Biaya Pengobatan dan Perawatan Pasien Miskin Dinas Sosial PPKB, PP dan PA	331.595.000,00
		Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial dan Bantuan Satuan Kematian Dinas Sosial PPKB, PP dan PA	306.800.000,00
		Belanja Tidak Terduga Bantuan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial dan Bantuan Satuan Kematian Dinas Sosial PPKB, PP dan PA	225.000.000,00
		Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial dan Bantuan Satuan Kematian Dinas Sosial PPKB, PP dan PA	255.000.000,00
JUMLAH			**1.410.395.000,00**

Lampiran 5

Rincian Saldo Kas BLUD PKM per 31 Desember 2025

No	Nama Puskesmas	Saldo Awal	Pendapatan	Jumlah Pendapatan	Belanja			Total Belanja	Saldo Akhir	Rincian Saldo Akhir	
					Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			RK	Tunai
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9	10	11
1	Barabai	396.487.650,00	2.285.131.716,00	2.681.619.366,00	9.000.000,00	1.732.496.053,00	188.313.201,00	1.929.809.254,00	751.810.112,00	751.810.112,00	-
2	Awang Besar	33.898.714,80	395.107.649,00	429.006.363,80	-	387.084.279,00	-	387.084.279,00	41.922.084,80	41.922.084,80	-
3	Pantai Hambawang	166.575.270,00	1.380.711.016,00	1.547.286.286,00	1.800.000,00	1.126.105.652,00	119.334.650,00	1.247.240.302,00	300.045.984,00	300.045.984,00	-
4	Durian Gantang	162.548.577,00	789.058.160,00	951.606.737,00	-	674.240.525,00	71.502.870,00	745.743.395,00	205.863.342,00	205.863.342,00	-
5	Kasarangan	190.012.462,00	888.119.099,00	1.078.131.561,00	-	726.501.256,00	48.675.000,00	775.176.256,00	302.955.305,00	302.727.782,00	227.523,00
6	Sungai Buluh	50.311.487,00	749.567.511,00	799.878.998,00	2.250.000,00	628.214.728,00	62.998.875,00	693.463.603,00	106.415.395,00	106.415.395,00	-
7	Haruyan	70.111.342,00	1.244.589.379,00	1.314.700.721,00	-	1.067.828.486,00	67.119.650,00	1.134.948.136,00	179.752.585,00	179.752.585,00	-
8	Barikin	110.889.426,00	424.307.678,00	535.197.104,00	-	386.010.237,00	27.528.000,00	413.538.237,00	121.658.867,00	121.658.867,00	-
9	Pagat	45.428.155,00	732.317.118,00	777.745.273,00	-	613.063.790,00	59.851.200,00	672.914.990,00	104.830.283,00	104.830.283,00	-
10	Kalibaru	32.925.606,00	598.409.618,00	631.335.224,00	3.040.000,00	555.738.355,00	18.184.800,00	576.963.155,00	54.372.069,00	54.372.069,00	-
11	Hantakan	36.739.596,00	1.136.719.766,00	1.173.459.362,00	1.800.000,00	1.025.715.157,00	52.394.000,00	1.079.909.157,00	93.550.205,00	93.550.205,00	-
12	Birayang	43.800.717,00	1.544.903.130,00	1.588.703.847,00	3.648.000,00	1.372.972.863,00	51.846.750,00	1.428.467.613,00	160.236.234,00	160.236.234,00	-
13	Kubur Jawa	58.212.429,00	508.249.528,00	566.461.957,00	1.800.000,00	455.489.594,00	6.375.000,00	463.664.594,00	102.797.363,00	102.797.363,00	-
14	Batu Tangga	34.982.753,00	347.854.333,00	382.837.086,00	1.800.000,00	316.963.805,00	20.860.500,00	339.624.305,00	43.212.781,00	43.212.781,00	-
15	Tandilang	39.491.358,00	217.628.224,00	257.119.582,00	-	192.413.258,00	30.414.000,00	222.827.258,00	34.292.324,00	34.292.324,00	-
16	Ilung	93.310.392,00	1.105.265.362,00	1.198.575.754,00	3.600.000,00	906.023.882,00	72.299.000,00	981.922.882,00	216.652.872,00	216.652.872,00	-
17	Limpasu	89.540.343,00	720.411.981,00	809.952.324,00	3.600.000,00	630.063.423,00	72.266.500,00	705.929.923,00	104.022.401,00	104.022.401,00	-
18	Pandawan	159.180.709,00	1.300.909.438,00	1.460.090.147,00	1.824.000,00	1.135.111.207,00	81.750.500,00	1.218.685.707,00	241.404.440,00	241.404.440,00	-
19	Kambat Utara	111.591.306,00	1.076.386.916,00	1.187.978.222,00	3.570.000,00	966.814.826,00	56.397.000,00	1.026.781.826,00	161.196.396,00	161.196.396,00	-
JUMLAH		1.926.038.292,80	17.445.647.622,00	19.371.685.914,80	37.732.000,00	14.898.851.376,00	1.108.111.496,00	16.044.694.872,00	3.326.991.042,80	3.326.763.519,80	227.523,00

Lampiran 5.1

Rincian Saldo Kas Dana BOK PKM per 31 Desember 2025

No	Nama Puskesmas	Pagu	Saldo Awal	Pendapatan	Total pendapatn	Belanja		Total Belanja	Saldo Akhir	Rincian Saldo Akhir	
						Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	Belanja Barang Jasa BOK			RK	Tunai
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12
1	HARUYAN	905.062.000,00	482.348.000,00	422.714.000,00	905.062.000,00	46.048.403,00	334.443.000,00	380.491.403,00	524.570.597,00	524.570.597,00	-
2	BARIKIN	694.584.000,00	224.765.190,00	261.443.610,00	486.208.800,00	27.208.367,00	184.062.200,00	211.270.567,00	274.938.233,00	274.938.233,00	-
3	PAGAT	771.563.000,00	260.121.078,00	279.973.022,00	540.094.100,00	40.999.000,00	211.565.000,00	252.564.000,00	287.530.100,00	287.530.100,00	-
4	KALIBARU	849.518.000,00	228.051.336,00	366.611.264,00	594.662.600,00	45.142.000,00	267.655.500,00	312.797.500,00	281.865.100,00	281.865.100,00	-
5	HANTAKAN	1.168.108.000,00	247.968.500,00	920.139.500,00	1.168.108.000,00	57.735.101,00	696.744.000,00	754.479.101,00	413.628.899,00	413.628.899,00	-
6	BIRAYANG	894.923.000,00	247.524.559,00	647.398.441,00	894.923.000,00	47.555.000,00	386.846.735,00	434.401.735,00	460.521.265,00	460.521.265,00	-
7	KUBUR JAWA	932.497.000,00	379.696.247,00	552.800.753,00	932.497.000,00	49.135.123,00	420.286.755,00	469.421.878,00	463.075.122,00	463.075.122,00	-
8	BATU TANGGA	1.024.396.000,00	493.663.149,00	530.732.851,00	1.024.396.000,00	54.435.000,00	367.442.300,00	421.877.300,00	602.518.700,00	602.518.700,00	-
9	TANDILANG	1.464.978.000,00	720.820.243,00	744.157.757,00	1.464.978.000,00	118.412.799,00	682.192.499,00	800.605.298,00	664.372.702,00	664.372.702,00	-
10	BARABAI	1.072.098.000,00	574.976.312,00	175.492.288,00	750.468.600,00	52.357.897,00	279.519.600,00	331.877.497,00	418.591.103,00	418.591.103,00	-
11	AWANG BESAR	709.791.000,00	212.420.440,00	284.433.260,00	496.853.700,00	37.207.868,00	212.315.440,00	249.523.308,00	247.330.392,00	247.330.392,00	-
12	PANTAI HAMBAWANG	891.384.000,00	307.744.687,00	316.224.113,00	623.968.800,00	47.362.724,00	275.583.500,00	322.946.224,00	301.022.576,00	301.022.576,00	-
13	DURIAN GANTANG	922.783.000,00	362.822.014,00	559.960.986,00	922.783.000,00	60.305.656,00	295.936.500,00	356.242.156,00	566.540.844,00	566.540.844,00	-
14	KASARANGAN	838.064.000,00	470.962.919,00	367.101.081,00	838.064.000,00	44.476.196,00	309.149.368,00	353.625.564,00	484.438.436,00	484.438.436,00	-
15	SUNGAI BULUH	909.105.000,00	468.800.505,00	440.304.495,00	909.105.000,00	56.943.000,00	326.291.000,00	383.234.000,00	525.871.000,00	525.871.000,00	-
16	PANDAWAN	819.740.000,00	249.752.692,00	324.065.308,00	573.818.000,00	43.222.786,00	290.329.128,00	333.551.914,00	240.266.086,00	240.266.086,00	-
17	KAMBAT UTARA	1.094.940.000,00	377.547.196,00	717.392.804,00	1.094.940.000,00	58.183.000,00	419.207.100,00	477.390.100,00	617.549.900,00	617.549.900,00	-
18	ILUNG	921.289.000,00	261.938.390,00	382.963.910,00	644.902.300,00	48.956.000,00	346.583.000,00	395.539.000,00	249.363.300,00	249.363.300,00	-
19	LIMPASU	837.575.000,00	238.644.583,00	598.930.417,00	837.575.000,00	44.507.000,00	349.124.000,00	393.631.000,00	443.944.000,00	443.944.000,00	-
JUMLAH		17.722.398.000,00	6.810.568.040,00	8.892.839.860,00	15.703.407.900,00	980.192.920,00	6.655.276.625,00	7.635.469.545,00	8.067.938.355,00	8.067.938.355,00	-

Lampiran 6

SALDO KAS BOSP Per 31 Desember 2025

SALDO KAS BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

No.	Nama Sekolah	JUMLAH (Rp)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA-NEGERI REGULER		
1	SMPN 1 HULU SUNGAI TENGAH	55.089,00
2	SMPN 2 HULU SUNGAI TENGAH	69.738,00
3	SMPN 3 HULU SUNGAI TENGAH	59.303,00
4	SMPN 4 HULU SUNGAI TENGAH	0,00
5	SMPN 5 HULU SUNGAI TENGAH	20.438,00
6	SMPN 6 HULU SUNGAI TENGAH	0,00
7	SMPN 7 HULU SUNGAI TENGAH	0,00
8	SMPN 8 HULU SUNGAI TENGAH	6.519.903,00
9	SMPN 9 HULU SUNGAI TENGAH	0,00
10	SMPN 10 HULU SUNGAI TENGAH	0,00
11	SMPN 11 HULU SUNGAI TENGAH	26,00
12	SMPN 12 HULU SUNGAI TENGAH	0,00
13	SMPN 13 HULU SUNGAI TENGAH	3.632,00
14	SMPN 14 HULU SUNGAI TENGAH	20.226,00
15	SMPN 15 HULU SUNGAI TENGAH	0,00
16	SMPN 16 HULU SUNGAI TENGAH	0,00
17	SMPN 17 HULU SUNGAI TENGAH	0,00
18	SMPN 18 HULU SUNGAI TENGAH	518.171,00
19	SMPN 19 HULU SUNGAI TENGAH	1.284,00
20	SMPN 20 HULU SUNGAI TENGAH	0,00
21	SMPN 21 HULU SUNGAI TENGAH	32.770,00
22	SMPN 22 HULU SUNGAI TENGAH	146.351,00
23	SMPN 23 HULU SUNGAI TENGAH	1.956.624,00
24	SMPN 24 HULU SUNGAI TENGAH	32.348,00
25	SMPN 25 SATU ATAP HULU SUNGAI TENGAH	0,00
26	SMPN 26 SATU ATAP HULU SUNGAI TENGAH	14.188.500,00
27	SMPN 27 HULU SUNGAI TENGAH	0,00
28	SMPN 28 HULU SUNGAI TENGAH	3.069.023,00
29	SMPN 29 HULU SUNGAI TENGAH	0,00
30	SMPN 30 SATU ATAP HULU SUNGAI TENGAH	120.370,00
31	SMPN 31 SATU ATAP HULU SUNGAI TENGAH	50.785,00
32	SMPN 32 SATU ATAP HULU SUNGAI TENGAH	11.000,00
33	SMPN 33 SATU ATAP HULU SUNGAI TENGAH	0,00
34	SMPN 34 SATU ATAP HULU SUNGAI TENGAH	1.130,00
35	SMPN 35 SATU ATAP HULU SUNGAI TENGAH	64.183,00
(X01)	**Jumlah**	**26.940.894,00**

No.	Nama Sekolah	JUMLAH (Rp)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA-NEGERI KINERJA		
1	SMPN 1 HULU SUNGAI TENGAH	1.044.000,00
2	SMPN 10 HULU SUNGAI TENGAH	0,00
3	SMPN 11 HULU SUNGAI TENGAH	0,00
4	SMPN 13 HULU SUNGAI TENGAH	304.500,00
5	SMPN 14 HULU SUNGAI TENGAH	4.911,00
6	SMPN 24 HULU SUNGAI TENGAH	4.115.961,00
7	SMPN 16 HULU SUNGAI TENGAH	0,00
8	SMPN 18 HULU SUNGAI TENGAH	1.850.400,00
9	SMPN 26 HULU SUNGAI TENGAH	8.730.000,00
10	SMPN 29 HULU SUNGAI TENGAH	0,00
11	SMPN 34 SATU ATAP HULU SUNGAI TENGAH	0,00
12	SMPN 15 HULU SUNGAI TENGAH	0,00
13	SMPN 31 SATU ATAP HULU SUNGAI TENGAH	0,00
14	SMPN 35 SATU ATAP HULU SUNGAI TENGAH	90.343,00
(X02)	**Jumlah**	**16.140.115,00**

No.	Nama Sekolah	JUMLAH (Rp)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA-REGULER		
1	SMPIT AL- KHAIR BARABAI	0,00
2	SMPI MUHAJIRIN	0,00
(X03)	**Jumlah**	**0,00**

No.	Nama Sekolah	JUMLAH (Rp)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA-SWASTA KINERJA		
1	SMPIT AL- KHAIR BARABAI	0,00
(X04)	**Jumlah**	**0,00**

JUMLAH SALDO KAS SMP NEGERI REGULER (X01)	26.940.894,00
JUMLAH SALDO KAS SMP NEGERI KINERJA (X02)	16.140.115,00
JUMLAH SALDO KAS SMP SWASTA REGULER (X03)	0,00
JUMLAH SALDO KAS SMP SWASTA KINERJA (X04)	0,00
JUMLAH TOTAL SALDO KAS SMP NEGERI & SWASTA	**43.081.009,00**

SALDO KAS BOS SEKOLAH DASAR

No.	Nama Sekolah	JUMLAH (Rp)
SEKOLAH DASAR-NEGERI REGULER		
1	SD NEGERI 1 AWANG BESAR	2.691.835,00
2	SD NEGERI 1 AYUANG	0,00
3	SD NEGERI 1 BANUA BUDI	18.366.086,00
4	SD NEGERI 1 BANUA JINGAH	199.184,00
5	SD NEGERI 1 BARABAI BARAT	30.696,00
6	SD NEGERI 1 BARABAI DARAT	11.605,00
7	SD NEGERI 1 BARABAI TIMUR	495.012,00
8	SD NEGERI 1 BENAWA TENGAH	107.029,00
9	SD NEGERI 1 KAYU BAWANG	242,00
10	SD NEGERI 1 MANDINGIN	44.369,00
11	SD NEGERI 1 PAJUKUNGAN	122,00
12	SD NEGERI 2 AYUANG	51.500,00
13	SD NEGERI 2 BANUA BUDI	259.000,00
14	SD NEGERI 2 BANUA JINGAH	261.420,00
15	SD NEGERI 2 BARABAI BARAT	21.700,00
16	SD NEGERI 2 BARABAI DARAT	25.548.024,00
17	SD NEGERI 2 BARABAI TIMUR	47.465,00
18	SD NEGERI 2 BENAWA TENGAH	109.726,00
19	SD NEGERI 2 KAYU BAWANG	85.077,00
20	SD NEGERI 2 MANDINGIN	0,00
21	SD NEGERI 2 PAJUKUNGAN	0,00
22	SD NEGERI 3 AYUANG	0,00
23	SD NEGERI 3 BARABAI DARAT	3.256,00
24	SD NEGERI 3 BARABAI TIMUR	33.709,00
25	SD NEGERI 3 BENAWA TENGAH	10,00
26	SD NEGERI 3 MANDINGIN	0,00
27	SD NEGERI BABAI	0,00
28	SD NEGERI BAKAPAS	0,00
29	SD NEGERI BANUA BINJAI	0,00
30	SD NEGERI BARABAI UTARA	1.006.281,00
31	SD NEGERI GAMBAH	0,00
32	SD NEGERI 1 BIRAYANG	58.399,00
33	SD NEGERI 1 KIAS	55.622,00
34	SD NEGERI 1 LOK BESAR	450.015,00
35	SD NEGERI 1 LUNJUK	12.067,00
36	SD NEGERI 1 PAYA	902,00
37	SD NEGERI 1 RANGAS	2.369,00
38	SD NEGERI 1 TANAH HABANG	24.702,00
39	SD NEGERI 1 WAWAI	387.327,00
40	SD NEGERI 2 BIRAYANG	448.841,00
41	SD NEGERI 2 KIAS	85.883,00
42	SD NEGERI 2 LOK BESAR	175.322,00
43	SD NEGERI 2 LUNJUK	247.000,00
44	SD NEGERI 2 PAYA	1.861.406,00
45	SD NEGERI 2 RANGAS	560,00
46	SD NEGERI 2 TANAH HABANG	0,00
47	SD NEGERI 2 WAWAI	438.982,00
48	SD NEGERI ANDUHUM	302.803,00
49	SD NEGERI BANUA RANTAU	0,00
50	SD NEGERI BIRAYANG SURAPATI	257,00
51	SD NEGERI CUKAN LIPAI	490.100,00
52	SD NEGERI KAPAR	452,00
53	SD NEGERI LABUHAN	0,00
54	SD NEGERI LIMBAR	306.895,00
55	SD NEGERI MAHELA	100.000,00
56	SD NEGERI TIMBUK BAHALANG	0,00
57	SD NEGERI WAWAI GARDU	207.812,00
58	SD NEGERI 1 BATU TANGGA	251.166,00
59	SD NEGERI 2 BATU TANGGA	289.378,00
60	SD NEGERI HINAS KIRI	352.931,00
61	SD NEGERI KECIL BATU PERAHU	16.693.500,00
62	SD NEGERI KECIL DATAR BATUNG	7.500,00
63	SD NEGERI KECIL JUHU	33.834,00
64	SD NEGERI MUARA HUNGI	0,00
65	SD NEGERI NATIH	516.996,00
66	SD NEGERI PEMBAKULAN	33.700,00
67	SD NEGERI SUMBAI	0,00
68	SD NEGERI TANDILANG	0,00
69	SD NEGERI 1 AWANG	0,00
70	SD NEGERI 1 ILUNG PASAR LAMA	324.589,00
71	SD NEGERI 1 LABUNGANAK	34.400,00
72	SD NEGERI 1 MUARA RINTIS	1.005.850,00
73	SD NEGERI 1 TELANG	88.746,00

No.	Nama Sekolah	JUMLAH (Rp)
SEKOLAH DASAR-NEGERI KINERJA		
1	SD NEGERI 1 AWANG BESAR	1.998.961,00
2	SD NEGERI 1 BENAWA TENGAH	30.000,00
3	SD NEGERI 1 AYUANG	0,00
4	SD NEGERI 1 BARABAI TIMUR	0,00
5	SD NEGERI 1 PAJUKUNGAN	161,00
6	SD NEGERI 2 BENAWA TENGAH	2.322.200,00
7	SD NEGERI 2 KAYU BAWANG	0,00
8	SD NEGERI 3 AYUANG	0,00
9	SD NEGERI BANUA RANTAU	0,00
10	SD NEGERI BIRAYANG SURAPATI	161,00
11	SD NEGERI KAPAR	0,00
12	SD NEGERI 2 AWANG	0,00
13	SD NEGERI 2 LABUNGANAK	0,00
14	SD NEGERI 1 ALUAN	0,00
15	SD NEGERI 1 MURUNG A	0,00
16	SD NEGERI 2 BAKTI	275.000,00
17	SD NEGERI LAYUH	0,00
18	SD NEGERI 1 ALAT	0,00
19	SD NEGERI 1 KINDINGAN	0,00
20	SD NEGERI 1 MURUNG B	0,00
21	SD NEGERI 2 ALAT	0,00
22	SD NEGERI 2 KINDINGAN	0,00
23	SD NEGERI 3 KINDINGAN	0,00
24	SD NEGERI 4 HARUYAN DAYAK	0,00
25	SD NEGERI 1 MANGUNANG SEBERANG	0,00
26	SD NEGERI 1 PANGGUNG	0,00
27	SD NEGERI 1 SUNGAI HARANG	0,00
28	SD NEGERI 2 PENGAMBAU HULU	0,00
29	SD NEGERI 5 MANGUNANG SEBERANG	0,00
30	SD NEGERI 6 MANGUNANG SEBERANG	0,00
31	SD NEGERI MANGUNANG	0,00
32	SD NEGERI 1 GUHA	1.604.000,00
33	SD NEGERI 1 TAAL	0,00
34	SD NEGERI 1 TABUDARAT HILIR	19.200,00
35	SD NEGERI 2 BARU	0,00
36	SD NEGERI 2 PANTAI HAMBAWANG BARAT	1.713.000,00
37	SD NEGERI 2 TAAL	7.375.961,00
38	SD NEGERI 2 TABUDARAT HILIR	0,00
39	SD NEGERI 3 GUHA	0,00
40	SD NEGERI 3 PANTAI HAMBAWANG BARAT	0,00
41	SD NEGERI DURIAN GANTANG	0,00
42	SD NEGERI MURUNG TAAL	5.461,00
43	SD NEGERI TARAS PADANG	143.961,00
44	SD NEGERI 1 BINJAI PIRUA	0,00
45	SD NEGERI 1 KASARANGAN	0,00
46	SD NEGERI 2 BINJAI PIRUA	0,00
47	SD NEGERI 2 KASARANGAN	185.000,00
48	SD NEGERI 2 MANTAAS	0,00
49	SD NEGERI 3 SUNGAI BULUH	0,00
50	SD NEGERI 4 BANUA KUPANG	9.961,00
51	SD NEGERI 2 KARATUNGAN	416.810,00
52	SD NEGERI ABUNG SURAPATI	1.598.862,00
53	SD NEGERI PAUH	0,00
54	SD NEGERI 1 BANUA HANYAR	0,00
55	SD NEGERI 1 MAHANG MATANG LANDUNG	1.661,00
56	SD NEGERI 1 SETIAP	0,00
57	SD NEGERI 2 BULUAN	0,00
58	SD NEGERI 2 MAHANG MATANG LANDUNG	0,00
59	SD NEGERI 2 MAHANG SUNGAI HANYAR	20.000,00
60	SD NEGERI 3 SETIAP	1.161,00
61	SD NEGERI MASIRAAN	600,00
(X06)	**JUMLAH**	**17.722.121,00**

No.	Nama Sekolah	JUMLAH (Rp)
74	SD NEGERI 2 AWANG	0,00
75	SD NEGERI 2 ILUNG PASAR LAMA	450,00
76	SD NEGERI 2 LABUNGANAK	0,00
77	SD NEGERI 2 MUARA RINTIS	91.860,00
78	SD NEGERI 2 SUMANGGI	0,00
79	SD NEGERI 2 TELANG	63.500,00
80	SD NEGERI 3 LABUNGANAK	0,00
81	SD NEGERI DANGU	153,00
82	SD NEGERI HAPINGIN	0,00
83	SD NEGERI HAUR GADING	610.600,00

No.	Nama Sekolah	JUMLAH (Rp)
SEKOLAH DASAR-NEGERI REGULER		
84	SD NEGERI ILUNG	78.830,00
85	SD NEGERI MARINGGIT	499.548,00
86	SD NEGERI 1 ALUAN	684.626,00
87	SD NEGERI 1 BAKTI	117,00
88	SD NEGERI 1 MURUNG A	1.283.560,00
89	SD NEGERI 1 PAGAT	386.160,00
90	SD NEGERI 2 ALUAN	22.500,00
91	SD NEGERI 2 BAKTI	217.004,00
92	SD NEGERI 2 KAHAKAN	5.289.450,00
93	SD NEGERI 2 MURUNG A	0,00
94	SD NEGERI 2 PAGAT	0,00
95	SD NEGERI 3 MURUNG A	423.564,00
96	SD NEGERI ALUAN BESAR	0,00
97	SD NEGERI ALUAN MATI	0,00
98	SD NEGERI BARU	1.412.750,00
99	SD NEGERI HALIAU	177.514,00
100	SD NEGERI KAHAKAN KALIBARU	0,00
101	SD NEGERI LAYUH	337,00
102	SD NEGERI PANTAI BATUNG	103.090,00
103	SD NEGERI PAYA BESAR	664.482,00
104	SD NEGERI 1 ALAT	239.080,00
105	SD NEGERI 1 DATAR AJAB	5.262,00
106	SD NEGERI 1 HARUYAN DAYAK	0,00
107	SD NEGERI 1 KINDINGAN	0,00
108	SD NEGERI 1 MURUNG B	898,00
109	SD NEGERI 1 TILAHAN	796.739,00
110	SD NEGERI 2 ALAT	640.419,00
111	SD NEGERI 2 DATAR AJAB	0,00
112	SD NEGERI 2 HARUYAN DAYAK	2.437.210,00
113	SD NEGERI 2 KINDINGAN	108.500,00
114	SD NEGERI 2 MURUNG B	1.276.172,00
115	SD NEGERI 2 TILAHAN	24.946,00
116	SD NEGERI 3 HARUYAN DAYAK	0,00
117	SD NEGERI 3 KINDINGAN	0,00
118	SD NEGERI 3 MURUNG B	0,00
119	SD NEGERI 4 HARUYAN DAYAK	1.987.760,59
120	SD NEGERI 4 KINDINGAN	155.100,00
121	SD NEGERI 4 MURUNG B	34.300,00
122	SD NEGERI BULAYAK	6.500,00
123	SD NEGERI HANTAKAN	1.129.868,00
124	SD NEGERI PASTING	813.324,00
125	SD NEGERI 1 BATU PANGGUNG	3.250,00
126	SD NEGERI 1 MANGUNANG SEBERANG	1.539.783,00
127	SD NEGERI 1 PANGGUNG	821.860,00
128	SD NEGERI 1 SUNGAI HARANG	206.420,00
129	SD NEGERI 1 TELUK MESJID	236.920,00
130	SD NEGERI 2 BARIKIN	1.129.534,00
131	SD NEGERI 2 BATU PANGGUNG	45.040,00
132	SD NEGERI 2 HARUYAN SEBERANG	1.427.828,00
133	SD NEGERI 2 MANGUNANG SEBERANG	1.215.655,00
134	SD NEGERI 2 PANGGUNG	0,00
135	SD NEGERI 2 PENGAMBAU HULU	0,00
136	SD NEGERI 2 SUNGAI HARANG	0,00
137	SD NEGERI 2 TELUK MESJID	0,00
138	SD NEGERI 3 BARIKIN	87.153,00
139	SD NEGERI 3 MANGUNANG SEBERANG	0,00
140	SD NEGERI 4 BARIKIN	0,00
141	SD NEGERI 5 MANGUNANG SEBERANG	0,00
142	SD NEGERI 6 MANGUNANG SEBERANG	582.018,00
143	SD NEGERI ANDANG	86.616,00
144	SD NEGERI HAPULANG	5.876.000,00
145	SD NEGERI MANGUNANG	0,00
146	SD NEGERI PANDANU	4.600,00
147	SD NEGERI PENGAMBAU HILIR DALAM	4.294.500,00
148	SD NEGERI PENGAMBAU HILIR LUAR	22.120,00

No.	Nama Sekolah	JUMLAH (Rp)
SEKOLAH DASAR-SWASTA REGULER		
1	SD IBNUL AMIN	0,00
2	SD IT TARBIATUL AULAD	0,00
3	SD MUHAMMADIYAH BARABAI	0,00
4	SD MUHAMMADIYAH	0,00
5	SD ISLAM TERPADU AL KHAIR	0,00
(X07)	**JUMLAH**	**0,00**

No.	Nama Sekolah	JUMLAH (Rp)
SEKOLAH DASAR-SWASTA KINERJA		
1	SD ISLAM TERPADU AL KHAIR	0,00
(X08)	**JUMLAH**	**0,00**

JUMLAH SALDO KAS SD NEGERI REGULER	(X05)	150.804.113,59
JUMLAH SALDO KAS SD NEGERI KINERJA	(X06)	17.722.121,00
JUMLAH SALDO KAS SD SWASTA REGULER	(X07)	0,00
JUMLAH SALDO KAS SD SWASTA KINERJA	(X07)	0,00
JUMLAH TOTAL SALDO KAS SD NEGERI & SWASTA		**168.526.234,59**

No.	Nama Sekolah	JUMLAH (Rp)
149	SD NEGERI 1 BANUA KEPAYANG	50.000,00
150	SD NEGERI 1 BARU	64.100,00
151	SD NEGERI 1 GUHA	23.000,00
152	SD NEGERI 1 JAMIL	0,00
153	SD NEGERI 1 PANGGANG MARAK	91.300,00
154	SD NEGERI 1 PANTAI HAMBAWANG BARAT	8.993,00
155	SD NEGERI 1 TAAL	2.886.072,00
156	SD NEGERI 1 TABUDARAT HILIR	154.300,00
157	SD NEGERI 2 BANGKAL	100.000,00
158	SD NEGERI 2 BANUA KEPAYANG	29.770,00
159	SD NEGERI 2 BARU	28.230,00
160	SD NEGERI 2 GUHA	56.000,00
161	SD NEGERI 2 JAMIL	675.690,00
162	SD NEGERI 2 MUNDAR	369.702,00
163	SD NEGERI 2 PANGGANG MARAK	649.700,00
164	SD NEGERI 2 PANTAI HAMBAWANG BARAT	0,00
165	SD NEGERI 2 PANTAI HAMBAWANG TIMUR	990.968,00
166	SD NEGERI 2 TAAL	4.398.622,00
167	SD NEGERI 2 TABUDARAT HILIR	46.250,00
168	SD NEGERI 3 GUHA	0,00
169	SD NEGERI 3 PANTAI HAMBAWANG BARAT	157.481,00
170	SD NEGERI DURIAN GANTANG	151.508,00
171	SD NEGERI MURUNG TAAL	52.460,00
172	SD NEGERI SUNGAI JARANIH	175.169,00
173	SD NEGERI SUNGAI RANGAS	405.197,00
174	SD NEGERI TABUDARAT HULU	330,00
175	SD NEGERI TARAS PADANG	9.931.700,00
176	SD NEGERI 1 BANUA KUPANG	0,00
177	SD NEGERI 1 BINJAI PIRUA	5.000,00
178	SD NEGERI 1 KASARANGAN	435.889,00
179	SD NEGERI 1 MANTAAS	0,00
180	SD NEGERI 1 PEMANGKIH	0,00
181	SD NEGERI 1 PEMANGKIH SEBERANG	229,00
182	SD NEGERI 1 SAMHURANG	180.337,00
183	SD NEGERI 1 SUNGAI BULUH	5.153,00
184	SD NEGERI 1 TABAT	7.150,00
185	SD NEGERI 2 BANUA KUPANG	559.778,00
186	SD NEGERI 2 BINJAI PIRUA	2.440.905,00
187	SD NEGERI 2 KASARANGAN	627.624,00
188	SD NEGERI 2 MANTAAS	147.018,00
189	SD NEGERI 2 PEMANGKIH	69.688,00
190	SD NEGERI 2 PEMANGKIH SEBERANG	62.444,00
191	SD NEGERI 2 SAMHURANG	4.882.916,00
192	SD NEGERI 2 SUNGAI BULUH	773,00
193	SD NEGERI 2 TABAT	160.200,00
194	SD NEGERI 3 BANUA KUPANG	556.876,00
195	SD NEGERI 3 SUNGAI BULUH	0,00
196	SD NEGERI 4 BANUA KUPANG	70.910,00
197	SD NEGERI 4 SUNGAI BULUH	6.500,00
198	SD NEGERI BINJAI PEMANGKIH	1.086.003,00
199	SD NEGERI PAHALATAN	0,00
200	SD NEGERI PERUMAHAN	289.000,00
201	SD NEGERI RANTAU BUJUR	330.535,00
202	SD NEGERI RANTAU KEMINTING	258.448,00
203	SD NEGERI TUNGKUP	450,00
204	SD NEGERI 1 ABUNG	103.242,00
205	SD NEGERI 1 KARATUNGAN	0,00
206	SD NEGERI 1 LIMPASU	148,00
207	SD NEGERI 1 TAPUK	0,00
208	SD NEGERI 2 ABUNG	553,00
209	SD NEGERI 2 KARATUNGAN	0,00
210	SD NEGERI 2 LIMPASU	20.000,00
211	SD NEGERI 2 TAPUK	0,00
212	SD NEGERI 3 LIMPASU	25.720,00
213	SD NEGERI 3 TAPUK	0,00
214	SD NEGERI ABUNG SURAPATI	0,00
215	SD NEGERI HAWANG	2.900,00
216	SD NEGERI KABANG	76.020,00
217	SD NEGERI KARAU	8.426,00
218	SD NEGERI PAUH	0,00
219	SD NEGERI 1 BANUA BATUNG	449,00
220	SD NEGERI 1 BANUA HANYAR	1.574,00
221	SD NEGERI 1 BULUAN	16.625,00
222	SD NEGERI 1 HILIR BANUA	13,00
223	SD NEGERI 1 JATUH	14.300,00
224	SD NEGERI 1 MAHANG MATANG LANDUNG	647,00
225	SD NEGERI 1 MAHANG SUNGAI HANYAR	306.950,00
226	SD NEGERI 1 SETIAP	0,00
227	SD NEGERI 2 BANUA BATUNG	747.836,00
228	SD NEGERI 2 BANUA HANYAR	115.604,00
229	SD NEGERI 2 BULUAN	0,00
230	SD NEGERI 2 HILIR BANUA	13.895,00
231	SD NEGERI 2 JATUH	67.078,00
232	SD NEGERI 2 KAYU RABAH	166.909,00
233	SD NEGERI 2 MAHANG MATANG LANDUNG	230,00
234	SD NEGERI 2 MAHANG SUNGAI HANYAR	0,00

No.	Nama Sekolah	JUMLAH (Rp)
235	SD NEGERI 2 SETIAP	114.400,00
236	SD NEGERI 3 KAYU RABAH	0,00
237	SD NEGERI 3 MAHANG MATANG LANDUNG	110.220,00
238	SD NEGERI 3 SETIAP	576.693,00
239	SD NEGERI BANUA ASAM	0,00
240	SD NEGERI BANUA SUPANGGAL	423,00
241	SD NEGERI HULU RASAU	31.500,00
242	SD NEGERI JARANIH	309.590,00
243	SD NEGERI KAMBAT UTARA	234.338,00
244	SD NEGERI MAHANG PUTAT	224,00
245	SD NEGERI MASIRAAN	109.564,00
246	SD NEGERI MATANG GINALUN	36.284,00
247	SD NEGERI PALAJAU	2.266,00
248	SD NEGERI PANDAWAN	0,00
(X05)	**JUMLAH**	**150.804.113,59**

SALDO KAS BOP PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

No.	Nama Sekolah	JUMLAH (Rp)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI - NEGERI REGULER		
1	TK NEGERI 1 BARABAI	0,00
2	TK NEGERI 1 LABUAN AMAS SELATAN	0,00
3	TK NEGERI 2 BARABAI	0,00
4	TK NEGERI 2 BATU BENAWA	0,00
5	TK NEGERI 1 BATANG ALAI SELATAN	0,00
6	TK NEGERI 1 BATU BENAWA	0,00
7	TK NEGERI 1 BATANG ALAI TIMUR	0,00
8	TK NEGERI PEMBINA BARABAI	0,00
9	TK NEGERI 1 LIMPASU	0,00
10	TK NEGERI PEMBINA	0,00
11	TK NEGERI 1 PANDAWAN	0,00
12	TK NEGERI 1 HANTAKAN	0,00
13	TK NEGERI 1 LABUAN AMAS UTARA	0,00
14	TK NEGERI PEMBINA	551.093,00
(X09)	**Jumlah**	**551.093,00**

No.	Nama Sekolah	JUMLAH (Rp)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI - NEGERI KINERJA		
1	TK NEGERI 2 BATU BENAWA	0,00
(X10)	**Jumlah**	**0,00**

JUMLAH TOTAL SALDO KAS PAUD NEGERI REGULER (X09)	551.093,00
JUMLAH TOTAL SALDO KAS PAUD NEGERI KINERJA (X10)	0,00
JUMLAH TOTAL SALDO KAS PAUD SWASTA REGULER (X11)	0,00
JUMLAH TOTAL SALDO KAS PAUD NEGERI & SWASTA	**551.093,00**

Lampiran 7

Daftar Piutang Retribusi dan Perhitungan Penyisihan Piutang Berdasarkan Umur Piutang Tahun 2025

No	Objek Tunggakan	31 Des 2024	Tunggakan 2025	Pembayaran	31 Des 2025	Umur Piutang				Penyisihan Piutang			
						2025	2025	2025	2012 - 2024	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
						X ≤ 1 bulan	1 < X ≤ 3 bulan	3 < X ≤ 12 bulan	X > 12 Bulan	0,50%	10%	50%	100%
1.	**Tunggakan sewa kios/pasar s.d. Tahun 2013**	**83.839.783,00**		**-**	**83.839.783,00**	**-**	**-**	**-**	**83.839.783,00**	**-**	**-**	**-**	**83.839.783,00**
	- Pasar Murakata	2.207.783,00		-	2.207.783,00				2.207.783,00				2.207.783,00
	- Pasar Keramat	81.632.000,00			81.632.000,00				81.632.000,00				81.632.000,00
	- Pasar Birayang	-			-				-				-
	- Pasar Pantai Hambawang	-			-				-				-
2.	**Tunggakan sewa kios/pasar s.d. Tahun 2014**	**10.963.000,00**		**-**	**10.963.000,00**	**-**	**-**	**-**	**10.963.000,00**	**-**	**-**	**-**	**10.963.000,00**
	- Pasar Murakata	378.000,00		-	378.000,00				378.000,00				378.000,00
	- Pasar Keramat	10.585.000,00			10.585.000,00				10.585.000,00				10.585.000,00
	- Pasar Birayang	-		-	-				-				-
	- Pasar Pantai Hambawang								-				-
3	**Tunggakan sewa kios/pasar s.d. Tahun 2015**	**13.403.000,00**		**-**	**13.403.000,00**	**-**	**-**	**-**	**13.403.000,00**	**-**	**-**	**-**	**13.403.000,00**
	- Pasar Murakata	384.000,00		-	384.000,00				384.000,00				384.000,00
	- Pasar Keramat	13.019.000,00		-	13.019.000,00				13.019.000,00				13.019.000,00
	- Pasar Birayang	-		-	-				-				-
	- Pasar Pantai Hambawang	-			-				-				-
4	**Tambahan tunggakan sewa kios/pasar Tahun 2016**	**17.194.000,00**		**-**	**17.194.000,00**	**-**	**-**	**-**	**17.194.000,00**	**-**	**-**	**-**	**17.194.000,00**
	- Pasar Murakata	1.380.000,00			1.380.000,00				1.380.000,00				1.380.000,00
	- Pasar Keramat	15.814.000,00			15.814.000,00				15.814.000,00				15.814.000,00
	- Pasar Birayang	-		-	-				-				-
	- Pasar Pantai Hambawang	-			-				-				-
5	**Tambahan tunggakan sewa kios/pasar Tahun 2017**	**26.941.500,00**	**-**	**1.230.000,00**	**25.711.500,00**	**-**	**-**	**-**	**25.711.500,00**	**-**	**-**	**-**	**25.711.500,00**
	- Pasar Murakata	5.000.000,00		1.230.000,00	3.770.000,00				3.770.000,00				3.770.000,00
	- Pasar Keramat	21.941.500,00			21.941.500,00				21.941.500,00				21.941.500,00
	- Pasar Birayang	-			-				-				-
	- Pasar Pantai Hambawang	-			-				-				-
6	**Tambahan tunggakan sewa kios/pasar Tahun 2018**	**32.565.000,00**		**1.515.000,00**	**31.050.000,00**	**-**	**-**	**-**	**31.050.000,00**	**-**	**-**	**-**	**31.050.000,00**
	- Pasar Murakata	10.580.000,00		1.440.000,00	9.140.000,00				9.140.000,00				9.140.000,00
	- Pasar Keramat	21.985.000,00		75.000,00	21.910.000,00				21.910.000,00				21.910.000,00
	- Pasar Birayang	-			-				-				-
	- Pasar Pantai Hambawang	-			-				-				-
7	**Tambahan tunggakan sewa kios/pasar Tahun 2019**	**276.867.500,00**		**9.390.000,00**	**267.477.500,00**	**-**	**-**	**-**	**267.477.500,00**	**-**	**-**	**-**	**267.477.500,00**
	- Pasar Murakata	11.300.000,00		1.440.000,00	9.860.000,00				9.860.000,00				9.860.000,00
	- Pasar Keramat	265.567.500,00		7.950.000,00	257.617.500,00				257.617.500,00				257.617.500,00
	- Pasar Birayang	-			-				-				-
	- Pasar Pantai Hambawang	-		-	-				-				-
8	**Tambahan tunggakan sewa kios/pasar Tahun 2020**	**373.487.500,00**		**7.995.000,00**	**365.492.500,00**	**-**	**-**	**-**	**365.492.500,00**	**-**	**-**	**-**	**365.492.500,00**
	- Pasar Murakata	18.720.000,00		1.360.000,00	17.360.000,00				17.360.000,00				17.360.000,00
	- Pasar Keramat	354.767.500,00		6.635.000,00	348.132.500,00				348.132.500,00				348.132.500,00
	- Pasar Birayang	-			-				-				-
	- Pasar Pantai Hambawang	-		-	-				-				-
9	**Tambahan tunggakan sewa kios/pasar Tahun 2021**	**469.795.000,00**	**-**	**13.230.000,00**	**456.565.000,00**	**-**	**-**	**-**	**456.565.000,00**	**-**	**-**	**-**	**456.565.000,00**
	- Pasar Murakata	27.420.000,00		4.920.000,00	22.500.000,00				22.500.000,00				22.500.000,00
	- Pasar Keramat	442.375.000,00		8.310.000,00	434.065.000,00				434.065.000,00				434.065.000,00
	- Pasar Birayang	-			-				-				-
	- Pasar Pantai Hambawang	-			-				-				
10	**Tambahan tunggakan sewa kios/pasar Tahun 2022**	**548.655.000,00**		**26.385.000,00**	**522.270.000,00**	**-**	**-**	**-**	**522.270.000,00**	**-**	**-**	**-**	**522.270.000,00**
	- Pasar Murakata	34.950.000,00		11.130.000,00	23.820.000,00				23.820.000,00				23.820.000,00
	- Pasar Keramat	513.705.000,00		15.255.000,00	498.450.000,00				498.450.000,00				498.450.000,00
	- Pasar Birayang	-			-				-				-
	- Pasar Pantai Hambawang	-			-				-	-	-	-	-
11	**Tambahan tunggakan sewa kios/pasar Tahun 2023**	590.770.000,00	**-**	**84.470.000,00**	**506.300.000,00**	**-**	**-**	**-**	**506.300.000,00**	**-**	**-**	**-**	**506.300.000,00**
	- Pasar Murakata	150.725.000,00		50.855.000,00	99.870.000,00				99.870.000,00				99.870.000,00
	- Pasar Keramat	440.045.000,00		33.615.000,00	406.430.000,00				406.430.000,00				406.430.000,00
	- Pasar Birayang		**-**	**-**	-				-				
	- Pasar Pantai Hambawang	-	**-**	-	-				-				
12	**Tambahan tunggakan sewa kios/pasar Tahun 2024**	**715.221.500,00**	**-**	**214.779.500,00**	**500.442.000,00**	**-**	**-**	**-**	**500.442.000,00**	**-**	**-**	**-**	**500.442.000,00**

No	Objek Tunggakan	31 Des 2024	Tunggakan 2025	Pembayaran	31 Des 2025	2025	2025	2025	2012 - 2024	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
						X ≤ 1 bulan	1 < X ≤ 3 bulan	3 < X ≤ 12 bulan	X > 12 Bulan	0,50%	10%	50%	100%
	- Pasar Murakata	294.328.000,00		146.301.000,00	148.027.000,00	-	-	-	148.027.000,00				148.027.000,00
	- Pasar Keramat	417.463.500,00		65.048.500,00	352.415.000,00	-	-	-	352.415.000,00				352.415.000,00
	- Pasar Birayang	-	-		-	-			-				-
	- Pasar Pantai Hambawang	3.430.000,00		3.430.000,00	-	-	-	-	-				-
13	**Tambahan tunggakan sewa kios/pasar Tahun 2025**		**718.004.000,00**	**-**	**718.004.000,00**	**409.520.083,33**	**53.812.166,67**	**254.671.750,00**	**-**	**2.047.600,42**	**5.381.216,67**	**127.335.875,00**	**-**
	- Pasar Murakata		**292.417.000,00**	**-**	**292.417.000,00**	**24.368.083,33**	**48.736.166,67**	**219.312.750,00**	**-**	**121.840,42**	**4.873.616,67**	**109.656.375,00**	**-**
	Januari		24.368.083,33		24.368.083,33			24.368.083,33			-	12.184.041,67	
	Februari		24.368.083,33		24.368.083,33			24.368.083,33			-	12.184.041,67	
	Maret		24.368.083,33		24.368.083,33			24.368.083,33			-	12.184.041,67	
	April		24.368.083,33		24.368.083,33			24.368.083,33			-	12.184.041,67	
	Mei		24.368.083,33		24.368.083,33			24.368.083,33			-	12.184.041,67	
	Juni		24.368.083,33		24.368.083,33			24.368.083,33			-	12.184.041,67	
	Juli		24.368.083,33		24.368.083,33			24.368.083,33			-	12.184.041,67	
	Agustus		24.368.083,33		24.368.083,33			24.368.083,33			-	12.184.041,67	
	September		24.368.083,33		24.368.083,33			24.368.083,33			-	12.184.041,67	
	Oktober		24.368.083,33		24.368.083,33		24.368.083,33				2.436.808,33	-	
	November		24.368.083,33		24.368.083,33		24.368.083,33				2.436.808,33	-	
	Desember		24.368.083,33		24.368.083,33	24.368.083,33				121.840,42	-	-	
	- Pasar Keramat		**425.587.000,00**	**-**	**425.587.000,00**	**385.152.000,00**	**5.076.000,00**	**35.359.000,00**	**-**	**1.925.760,00**	**507.600,00**	**17.679.500,00**	**-**
	Januari		2.155.500,00		2.155.500,00			2.155.500,00			-	1.077.750,00	
	Februari		3.176.000,00		3.176.000,00			3.176.000,00			-	1.588.000,00	
	Maret		3.022.500,00		3.022.500,00			3.022.500,00			-	1.511.250,00	
	April		2.968.000,00		2.968.000,00			2.968.000,00			-	1.484.000,00	
	Mei		2.512.500,00		2.512.500,00			2.512.500,00			-	1.256.250,00	
	Juni		13.482.000,00		13.482.000,00			13.482.000,00			-	6.741.000,00	
	Juli		1.928.500,00		1.928.500,00			1.928.500,00			-	964.250,00	
	Agustus		1.389.000,00		1.389.000,00			1.389.000,00			-	694.500,00	
	September		4.725.000,00		4.725.000,00			4.725.000,00			-	2.362.500,00	
	Oktober		3.525.000,00		3.525.000,00		3.525.000,00				352.500,00	-	
	November		1.551.000,00		1.551.000,00		1.551.000,00				155.100,00	-	
	Desember		385.152.000,00		385.152.000,00	385.152.000,00				1.925.760,00	-	-	
	- Pasar Birayang				-								
	- Pasar Pantai Hambawang		-										
	Jumlah	**3.159.702.783,00**	**718.004.000,00**	**358.994.500,00**	**3.518.712.283,00**	**409.520.083,33**	**53.812.166,67**	**254.671.750,00**	**2.800.708.283,00**	**2.047.600,42**	**5.381.216,67**	**127.335.875,00**	**2.800.708.283,00**

Lampiran 8

REKAP ASET TETAP, ASET LAINNYA DAN ASET LAIN-LAIN PER SKPD PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	ATB	Aset Lain-Lain	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 3+4+5+6+7+8+9+10
1	Dinas Pendidikan	28.237.837.575,00	122.849.591.551,03	441.836.561.799,19	13.456.639.037,58	60.485.490.829,55	1.160.432.335,06	-	9.984.450.536,17	678.011.003.663,58
2a	Dinas Kesehatan	5.481.284.470,00	101.953.309.547,38	123.181.717.619,45	3.903.062.507,30	202.582.099,00	1.714.677.802,00	96.789.000,00	801.320.827,00	237.334.743.872,13
2b	RSUD. H. Damanhuri Barabai	7.684.204.944,00	362.314.711.394,95	259.770.840.417,43	19.038.225.565,00	7.500.000,00	639.760.000,00	174.405.000,00	16.128.824.082,85	665.758.471.404,23
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	179.419.838.370,00	34.412.729.436,45	60.566.233.621,21	2.055.440.123.825,39	-	55.722.422.638,77	2.468.248.499,90	3.618.378.389,88	2.391.647.974.781,60
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	37.592.928.500,99	5.753.877.573,03	-	62.667.963.923,83	31.900.000,00	509.906.719,38	-	-	106.556.576.717,23
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran	464.480.000,00	5.936.373.025,10	1.926.841.200,00	38.789.000,00	-	-	-	402.000.000,00	8.768.483.225,10
6	Dinas Sosial, PP dan Perlindungan Anak	151.400.000,00	8.403.223.487,55	6.930.755.675,16	160.699.000,00	-	-	-	1.029.000,00	15.647.107.162,71
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	91.800.000,00	5.907.724.852,79	2.717.381.540,00	-	-	201.305.000,00	-	33.705.000,00	8.951.916.392,79
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.000.905.000,00	7.588.822.769,01	14.099.035.410,27	5.127.551.113,51	171.876.162,90	75.925.167,00	-	-	29.064.115.622,69
9	Dinas Pengelola Lingkungan Hidup dan Perhubungan	11.362.309.889,00	60.067.616.543,12	23.983.969.325,00	10.437.154.501,58	70.245.330,00	121.766.000,00	414.379.118,00	2.550.000,00	106.459.990.706,70
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	323.431.680,00	8.854.267.931,49	5.235.989.116,00	32.775.000,00	3.491.400,00	12.757.000,00	44.756.667,00	-	14.507.468.794,49
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	203.000.000,00	1.889.511.080,43	4.089.697.000,00	83.047.484,00	-	49.420.000,00	-	59.922.750,00	6.374.598.314,43
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	56.250.000,00	9.349.188.963,38	1.942.435.156,00	314.892.420,00	-	49.996.000,00	85.648.589,00	-	11.798.411.128,38
13	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	452.570.000,00	6.080.346.309,72	9.289.408.979,56	21.310.900,00	-	37.986.000,00	74.435.000,00	-	15.956.057.189,28
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.530.765.000,00	3.614.588.397,99	31.926.316.065,92	208.334.880,00	87.925.780,00	8.291.154.037,00	351.735.926,00	864.498.094,00	46.875.318.180,91
15	Dinas Perpustakaan	505.280.000,00	3.972.697.824,92	15.958.952.500,75	7.500.000,00	1.480.565.579,23	-	-	16.205.000,00	21.941.200.904,90
16	Dinas Pertanian	2.392.195.000,00	18.078.755.270,32	24.249.697.712,65	7.282.825.704,00	43.139.000,00	81.873.190,00	48.400.000,00	1.054.005.548,56	53.230.891.425,53
17	Dinas Perdagangan	26.464.997.497,00	6.778.888.434,88	112.595.152.845,72	1.335.659.089,00	6.246.000,00	650.450.097,58	416.288.740,00	8.504.915.500,00	156.752.598.204,18
18	Sekretariat Daerah	32.623.075.150,00	70.958.419.062,40	95.893.339.957,37	2.657.393.457,44	38.206.300,00	704.453.788,00	523.794.000,00	1.074.179.887,22	204.472.861.602,43
19	Sekretariat DPRD	2.059.768.961,25	10.679.966.393,42	2.922.437.231,00	-	8.495.500,00	-	88.337.500,00	-	15.759.005.585,67
20	Badan Perecanaan Pembangunan, Penelitian dan Bangda	-	4.366.206.072,57	5.652.374.675,67	6.284.100,00	-	-	492.364.000,00	120.300.000,00	10.637.528.848,24
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	4.123.797.187,13	-	187.048.328,00	-	-	-	11.000.000,00	4.321.845.515,13
22	BPKAD (Pengelola Barang)	763.200.000,00	2.114.401.179,49	270.293.000,00	11.772.000,00	-	-	-	53.342.500,00	3.213.008.679,49
23	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	-	4.583.214.112,74	1.947.689.800,00	-	6.234.000,00	95.302.602,00	433.550.000,00	21.250.000,00	7.087.240.514,74
24	Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Daerah	468.630.001,00	3.325.404.760,40	4.379.930.818,97	79.986.150,00	2.931.800,00	99.400.578,00	88.935.000,00	-	8.445.219.108,37
25	Inspektorat	-	4.810.824.205,00	606.147.000,00	70.279.250,00	5.636.100,00	-	-	12.100.000,00	5.504.986.555,00
26	Kecamatan Barabai	2.598.550.500,00	2.681.395.432,56	9.763.146.040,86	5.914.700.854,00	-	-	-	1.912.500,00	20.959.705.327,42
27	Kecamatan Pandawan	60.217.201,14	1.535.206.101,76	1.832.372.600,00	43.861.000,00	786.000,00	-	-	18.407.500,00	3.490.850.402,90
28	Kecamatan Labuan Amas Selatan	784.419.500,00	1.374.261.737,48	1.137.134.776,48	1.335.282.450,00	-	-	-	50.583.500,00	4.681.681.963,96
29	Kecamatan Labuan Amas Utara	268.044.000,00	1.447.530.516,85	2.058.629.710,00	40.831.867,00	1.562.700,00	-	-	69.063.027,00	3.885.661.820,85
30	Kecamatan Haruyan	109.172.440,00	1.657.106.269,20	3.113.704.611,17	13.230.788,00	3.400.000,00	-	5.500.000,00	72.412.500,00	4.974.526.608,37
31	Kecamatan Batu Benawa	287.096.000,00	1.269.967.152,50	2.175.503.274,87	8.144.550,00	2.711.000,00	2.700.000,00	-	2.387.500,00	3.748.509.477,37
32	Kecamatan Hantakan	71.618.500,00	1.328.727.331,60	1.920.687.618,64	245.543.250,00	1.437.000,00	-	-	7.412.500,00	3.575.426.200,24
33	Kecamatan Batang Alai Selatan	500.172.501,00	1.830.124.318,81	2.788.577.151,00	1.379.981.788,63	-	-	-	27.932.500,00	6.526.788.259,44
34	Kecamatan Batang Alai Utara	84.480.000,00	1.308.743.313,23	1.398.195.750,00	107.465.759,81	845.000,00	-	-	213.148.500,00	3.112.878.323,04
35	Kecamatan Batang Alai Timur	307.400.000,00	1.146.089.822,00	1.535.896.527,00	5.000.000,00	2.809.250,00	-	-	42.880.000,00	3.040.075.599,00
36	Kecamatan Limpasu	12.000.000,00	1.453.811.258,00	2.704.474.716,00	8.043.200,00	-	-	-	2.137.500,00	4.180.466.674,00
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	28.800.000,00	2.176.030.606,47	499.985.870,00	17.085.850,00	2.909.606,00	-	-	-	2.724.811.932,47
JUMLAH		345.442.122.680,38	897.977.451.227,15	1.282.901.507.113,34	2.191.688.488.594,07	62.668.926.436,68	70.221.688.954,79	5.807.567.039,90	43.272.254.642,68	4.899.980.006.689,00

Lampiran 9

REKAP MUTASI ASET TETAP PER SKPD PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	Saldo Awal 2025 Audited	PENAMBAHAN ASET TAHUN 2025								Jumlah Penambahan 2025	PENGURANGAN ASET TAHUN 2025								Jumlah Pengurangan 2025	Saldo Akhir Neraca 2025	Akumulasi Penyusutan Per 31 Des 2025	Nilai Buku Aset Tetap Per 31 Desember 2025
			Belanja Modal 2025	Utang Pengadaan Aset Tetap 2025	Utang Retensi 5% Tahun 2025	Kapitalisasi Belanja Barang Jasa	Hibah	Mutasi SKPD Masuk	Reklas Antar KIB	Koreksi Tahun Berjalan		Kekurangan Volume	Pembayaran Utang Pengadaan Aset Tahun 2024	Penghapusan	Ekstrakompatabel	Mutasi SKPD Keluar	Unkapitalisasi Belanja Modal	Reklas Antar KIB	Koreksi Tahun Berjalan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=4+5+6+7+8 +9+10+11	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 13+14+15+16 17+18+19+20	22 = 3+12-21	23	24 =22-23
1	Dinas Pendidikan	600.547.249.831,71	42.776.180.625,00	100.000,00	-	11.922.645.572,00	-	1.772.226.043,69	146.391.850,00	17.669.158.536,97	74.286.702.627,66	138.050.100,00	-	-	472.126.028,00	-	1.641.651.604,00	146.391.850,00	4.409.179.749,96	6.807.399.331,96	668.026.553.127,41	216.738.218.039,79	451.288.335.087,62
2a	Dinas Kesehatan	193.510.461.970,13	33.905.983.267,00	-	-	9.225.826.659,00	-	-	480.160.802,00	202.228.949,00	43.814.199.677,00	161.648.600,00	-	-	22.080.000,00	-	105.193.598,00	480.160.802,00	118.944.602,00	888.027.602,00	236.436.634.045,13	98.260.629.673,05	138.176.004.372,08
2b	RSUD. H. Damanhuri Barabai	499.932.706.096,77	126.575.281.646,00	30.680.426.152,00	-	-	-	1.308.888.650,00	141.308.887.334,63	501.867.900,00	300.375.351.682,63	149.657.700,00	8.160.608.816,00	-	3.390.000,00	-	964.904.026,19	141.406.207.334,63	168.047.581,20	150.852.815.458,02	649.455.242.321,38	208.021.280.176,09	441.433.962.145,29
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.222.341.156.555,57	152.308.513.205,00	126.158.361,00	4.674.084.421,00	5.249.707.592,00	-	-	60.532.329.748,67	2.843.417.507,25	225.734.210.834,92	3.192.930.100,00	4.336.183.097,00	-	800.000,00	-	-	54.984.106.301,67	-	62.514.019.498,67	2.385.561.347.891,82	1.366.365.423.909,79	1.019.195.923.982,03
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100.687.041.567,23	5.741.072.150,00	-	-	490.760.000,00	-	-	-	-	6.231.832.150,00	-	-	-	-	-	362.297.000,00	-	-	362.297.000,00	106.556.576.717,23	48.618.821.430,01	57.937.755.287,22
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran	8.033.610.925,10	332.122.300,00	-	-	-	-	-	-	750.000,00	332.872.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.366.483.225,10	4.011.601.627,00	4.354.881.598,10
6	Dinas Sosial, PP dan Perlindungan Anak	17.746.680.320,40	18.475.950,00	-	-	-	-	-	-	-	18.475.950,00	-	-	-	-	2.064.594.043,69	-	-	54.484.064,00	2.119.078.107,69	15.646.078.162,71	7.202.209.059,55	8.443.869.103,16
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.198.055.344,23	718.388.000,00	-	-	49.474.000,00	-	-	-	-	767.862.000,00	-	-	-	-	-	-	-	47.705.951,44	47.705.951,44	8.918.211.392,79	5.174.922.828,68	3.743.288.564,11
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	27.258.722.859,48	883.228.290,00	-	-	722.043.730,82	-	367.666.667,00	-	12.158.995,90	1.985.097.683,72	-	-	-	-	156.235.000,00	-	-	23.469.920,51	179.704.920,51	29.064.115.622,69	12.125.672.042,86	16.938.443.579,83
9	Dinas Pengelola Lingkungan Hidup dan Perhubungan	97.802.032.125,70	7.595.339.198,00	-	-	-	-	-	1.692.661.200,00	706.488.291,00	9.994.488.689,00	-	-	-	-	57.003.026,00	-	1.692.661.200,00	3.795.000,00	1.753.459.226,00	106.043.061.588,70	66.169.008.658,98	39.874.052.929,72
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.938.100.462,49	154.456.499,00	-	-	-	-	367.666.666,00	-	2.488.500,00	524.611.665,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.462.712.127,49	8.166.284.339,22	6.296.427.788,27
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.190.095.624,43	397.979.940,00	-	-	-	-	-	-	-	397.979.940,00	-	-	-	-	273.400.000,00	-	-	-	273.400.000,00	6.314.675.564,43	2.185.389.773,53	4.129.285.790,90
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.009.753.652,38	551.426.100,00	-	-	89.953.120,00	-	378.380.667,00	-	-	1.019.759.887,00	-	-	295.385.000,00	-	-	2.500.000,00	-	18.866.000,00	316.751.000,00	11.712.762.539,38	6.491.325.673,99	5.221.436.865,39
13	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	15.190.412.685,28	706.891.504,00	-	-	-	-	-	-	2.430.500,00	709.322.004,00	-	-	-	-	-	-	-	18.112.500,00	18.112.500,00	15.881.622.189,28	8.044.137.802,35	7.837.484.386,93
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	38.485.912.378,91	7.482.343.575,00	-	-	247.238.907,00	-	-	7.279.593.722,00	601.500,00	15.009.777.704,00	557.012.200,00	-	-	-	-	-	7.279.593.722,00	-	7.836.605.922,00	45.659.084.160,91	7.270.042.239,64	38.389.041.921,27
15	Dinas Perpustakaan	17.920.797.355,09	3.138.398.822,00	-	-	194.750.850,00	420.000.000,00	-	-	287.610.498,81	4.040.760.170,81	-	-	-	9.687.260,00	-	25.617.361,00	-	1.257.000,00	36.561.621,00	21.924.995.904,90	2.955.780.879,30	18.969.215.025,60
16	Dinas Pertanian	51.738.718.685,97	969.929.001,00	-	-	35.219.190,00	-	-	-	5.506.000,00	1.010.654.191,00	-	-	-	-	604.397.000,00	-	-	16.490.000,00	620.887.000,00	52.128.485.876,97	29.010.368.174,69	23.118.117.702,28
17	Dinas Perdagangan	152.040.126.529,18	4.178.546.400,00	-	-	104.321.135,00	-	-	-	12.677.900,00	4.295.545.435,00	-	-	-	-	-	-	8.504.278.000,00	-	8.504.278.000,00	147.831.393.964,18	34.633.496.219,72	113.197.897.744,46
18	Sekretariat Daerah	189.763.882.934,71	15.977.039.553,00	-	-	96.347.778,00	-	468.235.000,00	-	3.110.000,00	16.544.732.331,00	-	-	295.385.000,00	-	2.874.963.650,00	150.005.785,00	-	113.373.115,50	3.433.727.550,50	202.874.887.715,21	64.101.001.129,61	138.773.886.585,60
19	Sekretariat DPRD	16.552.505.697,67	585.680.888,00	-	-	-	-	-	-	3.830.500,00	589.511.388,00	-	-	1.451.176.000,00	-	-	665.500,00	-	19.507.500,00	1.471.349.000,00	15.670.668.085,67	7.988.694.549,02	7.681.973.536,65
20	Badan Perecanaan Pembangunan, Penelitian dan Bangda	9.764.053.848,24	260.811.000,00	-	-	-	-	-	82.695.000,00	-	343.506.000,00	-	-	-	-	-	-	82.695.000,00	-	82.695.000,00	10.024.864.848,24	4.942.525.147,07	5.082.339.701,17
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.782.665.421,13	976.368.444,00	-	-	-	-	573.525.650,00	-	-	1.549.894.094,00	-	-	-	-	10.714.000,00	-	11.000.000,00	-	21.714.000,00	4.310.845.515,13	2.818.577.899,18	1.492.267.615,95
22	BPKAD (Pengelola Barang)	2.953.128.627,35	-	-	-	-	-	565.981.202,14	-	-	565.981.202,14	-	-	-	-	359.443.650,00	-	-	-	359.443.650,00	3.159.666.179,49	2.204.097.933,77	955.568.245,72
23	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	5.779.674.113,22	667.391.000,00	-	-	95.302.602,00	-	156.000.000,00	-	3.770.000,00	922.463.602,00	-	-	-	-	32.016.000,00	-	-	37.681.200,48	69.697.200,48	6.632.440.514,74	4.294.483.150,46	2.337.957.364,28
24	Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Daerah	7.629.504.530,37	224.963.700,00	-	-	99.400.578,00	-	426.190.000,00	-	2.931.800,00	753.486.078,00	-	-	-	-	12.500.000,00	-	-	14.206.500,00	26.706.500,00	8.356.284.108,37	4.702.317.237,80	3.653.966.870,57
25	Inspektorat	5.122.264.145,00	295.218.060,00	-	-	70.279.250,00	-	-	-	5.125.100,00	370.622.410,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.492.886.555,00	2.549.415.110,19	2.943.471.444,81
26	Kecamatan Barabai	20.774.871.727,42	75.551.100,00	-	-	-	-	282.200.000,00	-	-	357.751.100,00	-	-	-	430.000,00	173.500.000,00	-	-	900.000,00	174.830.000,00	20.957.792.827,42	6.078.299.684,20	14.879.493.143,22
27	Kecamatan Pandawan	3.479.323.402,90	15.318.000,00	-	-	-	-	-	-	786.000,00	16.104.000,00	-	-	-	-	-	-	-	22.984.500,00	22.984.500,00	3.472.442.902,90	1.763.575.082,49	1.708.867.820,41
28	Kecamatan Labuan Amas Selatan	4.589.269.281,52	61.415.794,00	-	-	-	-	156.000.000,00	-	1.870.000,00	219.285.794,00	-	-	-	-	156.000.000,00	1.867.344,00	-	19.589.267,56	177.456.611,56	4.631.098.463,96	2.107.460.397,41	2.523.638.066,55
29	Kecamatan Labuan Amas Utara	3.812.594.093,85	-	-	-	-	-	-	-	5.267.700,00	5.267.700,00	-	-	-	-	-	-	-	1.263.000,00	1.263.000,00	3.816.598.793,85	1.828.404.487,93	1.988.194.305,92
30	Kecamatan Haruyan	4.916.012.411,42	9.476.000,00	-	-	-	-	-	-	5.878.840,00	15.354.840,00	-	-	-	-	-	-	-	34.753.143,05	34.753.143,05	4.896.614.108,37	2.200.256.137,42	2.696.357.970,95
31	Kecamatan Batu Benawa	3.640.216.257,37	107.811.720,00	-	-	-	-	-	-	2.544.000,00	110.355.720,00	-	-	-	-	-	-	-	4.450.000,00	4.450.000,00	3.746.121.977,37	1.809.905.790,91	1.936.216.186,46
32	Kecamatan Hantakan	3.540.129.506,24	44.310.000,00	-	-	-	-	-	-	7.574.194,00	51.884.194,00	-	-	-	-	-	7.500.000,00	-	16.500.000,00	24.000.000,00	3.568.013.700,24	1.869.612.187,83	1.698.401.512,41
33	Kecamatan Batang Alai Selatan	6.164.028.360,44	294.938.484,00	-	-	39.888.915,00	-	-	-	-	334.827.399,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.498.855.759,44	2.869.173.298,97	3.629.682.460,47
34	Kecamatan Batang Alai Utara	2.601.318.023,04	189.255.000,00	-	-	-	-	273.400.000,00	-	845.000,00	463.500.000,00	-	-	-	-	156.000.000,00	-	-	9.088.200,00	165.088.200,00	2.899.729.823,04	1.785.377.687,27	1.114.352.135,77
35	Kecamatan Batang Alai Timur	2.994.001.349,00	1.875.000,00	-	-	-	-	-	-	1.319.250,00	3.194.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.997.195.599,00	1.354.182.522,75	1.643.013.076,25
36	Kecamatan Limpasu	4.000.557.974,00	182.602.500,00	-	-	-	-	-	-	1.168.700,00	183.771.200,00	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	4.178.329.174,00	1.721.848.518,20	2.456.480.655,80
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.517.185.001,61	243.154.501,00	-	-	-	-	-	-	3.159.606,00	246.314.107,00	-	-	-	-	38.687.176,14	-	-	-	38.687.176,14	2.724.811.932,47	1.384.741.425,45	1.340.070.507,02
	JUMLAH	4.385.948.821.676,55	408.647.737.216,00	30.806.684.513,00	4.674.084.421,00	28.733.159.878,82	420.000.000,00	7.096.360.545,83	211.522.719.657,30	22.296.565.768,93	714.197.312.000,88	4.199.298.700,00	12.496.791.913,00	2.041.946.000,00	508.513.288,00	6.969.453.545,83	3.262.202.218,19	214.587.094.210,30	5.180.648.795,70	249.245.948.671,02	4.850.900.185.006,42	2.251.818.561.926,18	2.599.081.623.080,24

Lampiran 9.a

REKAPITULASI MUTASI ASET TETAP - TANAH PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	Saldo Awal 2025 Audited	PENAMBAHAN ASET TAHUN 2025						PENGURANGAN ASET TAHUN 2024						Saldo Akhir Neraca 2025
			Belanja Modal 2025	Kapitalisasi Belanja Barang Jasa	Hibah	Mutasi SKPD Masuk	Reklas Antar KIB	Jumlah Penambahan 2025	Unkapitalisasi Belanja Modal	Penghapusan	Mutasi SKPD Keluar	Reklas Antar KIB	Koreksi Tahun Berjalan	Jumlah Pengurangan 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 4+5+6+7+8	10	11	12	13	14	15 = 10+11+12+13+14	16 = 3+9-15
1	Dinas Pendidikan	27.760.689.075,00	417.264.000,00	59.884.500,00	-	-	-	477.148.500,00	-	-	-	-	-	-	28.237.837.575,00
2a	Dinas Kesehatan	5.481.284.470,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.481.284.470,00
2b	RSUD. H. Damanhuri Barabai	7.684.204.944,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.684.204.944,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	178.405.764.370,00	1.014.074.000,00	-	-	-	-	1.014.074.000,00	-	-	-	-	-	-	179.419.838.370,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	37.592.928.500,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.592.928.500,99
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran	464.480.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	464.480.000,00
6	Dinas Sosial, PP dan Perlindungan Anak	151.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151.400.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	91.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.800.000,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.000.905.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.905.000,00
9	Dinas Pengelola Lingkungan Hidup dan Perhubungan	9.412.275.889,00	1.950.034.000,00	-	-	-	-	1.950.034.000,00	-	-	-	-	-	-	11.362.309.889,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	323.431.680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	323.431.680,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	203.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203.000.000,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	56.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.250.000,00
13	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	452.570.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	452.570.000,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.530.765.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.530.765.000,00
15	Dinas Perpustakaan	505.280.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505.280.000,00
16	Dinas Pertanian	2.392.195.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.392.195.000,00
17	Dinas Perdagangan	26.464.997.497,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.464.997.497,00
18	Sekretariat Daerah	32.623.075.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.623.075.150,00
19	Sekretariat DPRD	2.059.768.961,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.059.768.961,25
20	Badan Perecanaan Pembangunan, Penelitian dan Bangda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	BPKAD (Pengelola Barang)	763.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763.200.000,00
23	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Daerah	468.630.001,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	468.630.001,00
25	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Kecamatan Barabai	2.598.550.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.598.550.500,00
27	Kecamatan Pandawan	60.217.201,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.217.201,14
28	Kecamatan Labuan Amas Selatan	784.419.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	784.419.500,00
29	Kecamatan Labuan Amas Utara	268.044.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268.044.000,00
30	Kecamatan Haruyan	109.172.440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.172.440,00
31	Kecamatan Batu Benawa	287.096.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287.096.000,00
32	Kecamatan Hantakan	71.618.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.618.500,00
33	Kecamatan Batang Alai Selatan	500.172.501,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.172.501,00
34	Kecamatan Batang Alai Utara	84.480.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.480.000,00
35	Kecamatan Batang Alai Timur	307.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307.400.000,00
36	Kecamatan Limpasu	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000,00
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	28.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.800.000,00
JUMLAH		342.000.866.180,38	3.381.372.000,00	59.884.500,00	-	-	-	3.441.256.500,00	-	-	-	-		-	345.442.122.680,38

Lampiran 9.b

REKAPITULASI MUTASI ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	Saldo Awal 2025 Audited	PENAMBAHAN ASET TAHUN 2025							Jumlah Penambahan 2025	PENGURANGAN ASET TAHUN 2024							Jumlah Pengurangan 2025	Saldo Akhir Neraca 2025
			Belanja Modal 2025	Utang Pengadaan Aset Tahun 2025	Kapitalisasi Belanja Barang Jasa	Hibah	Mutasi SKPD Masuk	Reklas Antar KIB	Koreksi Tahun Berjalan		Penghapusan	Ekstrakompatabel	Pembayaran Utang Pengadaan Aset Tahun 2024	Mutasi SKPD Keluar	Unkapitalisasi Belanja Modal	Reklas Antar KIB	Koreksi Tahun Berjalan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4+5+6+7 +8+9+10	12	13	14	15	16	17	18	19 = 12+13+14+15 +16+17+18	20 = 3+11-19
1	Dinas Pendidikan	109.081.348.227,66	14.326.000.508,00	-	4.788.416.683,00	-	-	121.654.050,00	1.042.581.731,00	20.278.652.972,00	-	472.126.028,00	-	-	1.612.099.404,00	24.737.800,00	4.401.446.416,63	6.510.409.648,63	122.849.591.551,03
2a	Dinas Kesehatan	87.751.080.313,38	12.738.199.434,00	-	1.722.720.000,00	-	-	-	24.100.000,00	14.485.019.434,00	-	22.080.000,00	-	-	105.193.598,00	36.572.000,00	118.944.602,00	282.790.200,00	101.953.309.547,38
2b	RSUD. H. Damanhuri Barabai	237.398.945.074,34	76.347.412.467,00	1.736.264.152,00	-	-	1.308.888.650,00	49.042.093.950,00	404.547.900,00	128.839.207.119,00	-	3.390.000,00	2.689.779.191,00	-	964.904.026,19	97.320.000,00	168.047.581,20	3.923.440.798,39	362.314.711.394,95
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	29.035.253.344,45	5.189.576.092,00	-	-	-	-	188.700.000,00	-	5.378.276.092,00	-	800.000,00	-	-	-	-	-	800.000,00	34.412.729.436,45
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.777.284.423,03	976.928.150,00	-	-	-	-	-	-	976.928.150,00	-	-	-	-	335.000,00	-	-	335.000,00	5.753.877.573,03
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran	5.604.250.725,10	332.122.300,00	-	-	-	-	-	-	332.122.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.936.373.025,10
6	Dinas Sosial, PP dan Perlindungan Anak	8.731.599.601,55	18.475.950,00	-	-	-	-	-	-	18.475.950,00	-	-	-	292.368.000,00	-	-	54.484.064,00	346.852.064,00	8.403.223.487,55
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.435.058.804,23	520.372.000,00	-	-	-	-	-	-	520.372.000,00	-	-	-	-	-	-	47.705.951,44	47.705.951,44	5.907.724.852,79
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	6.979.161.712,52	421.699.310,00	-	-	-	367.666.667,00	-	-	789.365.977,00	-	-	-	156.235.000,00	-	-	23.469.920,51	179.704.920,51	7.588.822.769,01
9	Dinas Pengelola Lingkungan Hidup dan Perhubungan	55.474.997.610,12	5.645.305.198,00	-	-	-	-	-	700.772.961,00	6.346.078.159,00	-	-	-	57.003.026,00	-	1.692.661.200,00	3.795.000,00	1.753.459.226,00	60.067.616.543,12
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.332.144.766,49	154.456.499,00	-	-	-	367.666.666,00	-	-	522.123.165,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.854.267.931,49
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.764.931.140,43	397.979.940,00	-	-	-	-	-	-	397.979.940,00	-	-	-	273.400.000,00	-	-	-	273.400.000,00	1.889.511.080,43
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.784.693.196,38	502.866.100,00	-	-	-	378.380.667,00	-	-	881.246.767,00	295.385.000,00	-	-	-	2.500.000,00	-	18.866.000,00	316.751.000,00	9.349.188.963,38
13	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	5.391.567.305,72	706.891.504,00	-	-	-	-	-	-	706.891.504,00	-	-	-	-	-	-	18.112.500,00	18.112.500,00	6.080.346.309,72
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3.612.638.397,99	1.950.000,00	-	-	-	-	-	-	1.950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.614.588.397,99
15	Dinas Perpustakaan	2.508.559.874,92	1.080.699.571,00	-	-	420.000.000,00	-	-	-	1.500.699.571,00	-	9.687.260,00	-	-	25.617.361,00	-	1.257.000,00	36.561.621,00	3.972.697.824,92
16	Dinas Pertanian	17.729.713.269,32	969.929.001,00	-	-	-	-	-	-	969.929.001,00	-	-	-	604.397.000,00	-	-	16.490.000,00	620.887.000,00	18.078.755.270,32
17	Dinas Perdagangan	5.896.072.934,88	882.815.500,00	-	-	-	-	-	-	882.815.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.778.888.434,88
18	Sekretariat Daerah	57.946.872.059,90	15.977.039.553,00	-	-	-	468.235.000,00	-	-	16.445.274.553,00	295.385.000,00	-	-	2.874.963.650,00	150.005.785,00	-	113.373.115,50	3.433.727.550,50	70.958.419.062,40
19	Sekretariat DPRD	11.565.634.505,42	570.469.688,00	-	-	-	-	-	-	570.469.688,00	1.451.176.000,00	-	-	-	665.500,00	-	4.296.300,00	1.456.137.800,00	10.679.966.393,42
20	Badan Perecanaan Pembangunan, Penelitian dan Bangda	4.105.395.072,57	178.116.000,00	-	-	-	-	82.695.000,00	-	260.811.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.366.206.072,57
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.595.617.093,13	976.368.444,00	-	-	-	573.525.650,00	-	-	1.549.894.094,00	-	-	-	10.714.000,00	-	11.000.000,00	-	21.714.000,00	4.123.797.187,13
22	BPKAD (Pengelola Barang)	1.907.863.627,35	-	-	-	-	565.981.202,14	-	-	565.981.202,14	-	-	-	359.443.650,00	-	-	-	359.443.650,00	2.114.401.179,49
23	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	3.829.520.313,22	667.391.000,00	-	-	-	156.000.000,00	-	-	823.391.000,00	-	-	-	32.016.000,00	-	-	37.681.200,48	69.697.200,48	4.583.214.112,74
24	Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Daerah	2.700.957.560,40	224.963.700,00	-	-	-	426.190.000,00	-	-	651.153.700,00	-	-	-	12.500.000,00	-	-	14.206.500,00	26.706.500,00	3.325.404.760,40
25	Inspektorat	4.515.606.145,00	295.218.060,00	-	-	-	-	-	-	295.218.060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.810.824.205,00
26	Kecamatan Barabai	2.508.432.332,56	65.593.100,00	-	-	-	282.200.000,00	-	-	347.793.100,00	-	430.000,00	-	173.500.000,00	-	-	900.000,00	174.830.000,00	2.681.395.432,56
27	Kecamatan Pandawan	1.542.872.601,76	15.318.000,00	-	-	-	-	-	-	15.318.000,00	-	-	-	-	-	-	22.984.500,00	22.984.500,00	1.535.206.101,76
28	Kecamatan Labuan Amas Selatan	1.345.876.005,04	49.655.000,00	-	-	-	156.000.000,00	-	-	205.655.000,00	-	-	-	156.000.000,00	1.680.000,00	-	19.589.267,56	177.269.267,56	1.374.261.737,48
29	Kecamatan Labuan Amas Utara	1.448.793.516,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.263.000,00	1.263.000,00	1.447.530.516,85
30	Kecamatan Haruyan	1.680.284.572,25	9.476.000,00	-	-	-	-	-	2.098.840,00	11.574.840,00	-	-	-	-	-	-	34.753.143,05	34.753.143,05	1.657.106.269,20
31	Kecamatan Batu Benawa	1.166.605.432,50	107.811.720,00	-	-	-	-	-	-	107.811.720,00	-	-	-	-	-	-	4.450.000,00	4.450.000,00	1.269.967.152,50
32	Kecamatan Hantakan	1.306.291.387,60	44.310.000,00	-	-	-	-	-	2.125.944,00	46.435.944,00	-	-	-	-	7.500.000,00	-	16.500.000,00	24.000.000,00	1.328.727.331,60
33	Kecamatan Batang Alai Selatan	1.666.704.568,81	163.419.750,00	-	-	-	-	-	-	163.419.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.830.124.318,81
34	Kecamatan Batang Alai Utara	1.011.176.513,23	189.255.000,00	-	-	-	273.400.000,00	-	-	462.655.000,00	-	-	-	156.000.000,00	-	-	9.088.200,00	165.088.200,00	1.308.743.313,23
35	Kecamatan Batang Alai Timur	1.144.214.822,00	1.875.000,00	-	-	-	-	-	-	1.875.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.146.089.822,00
36	Kecamatan Limpasu	1.284.083.258,00	175.728.000,00	-	-	-	-	-	-	175.728.000,00	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	1.453.811.258,00
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.976.927.781,61	237.790.001,00	-	-	-	-	-	-	237.790.001,00	-	-	-	38.687.176,14	-	-	-	38.687.176,14	2.176.030.606,47
	JUMLAH	711.539.029.891,71	141.163.477.540,00	1.736.264.152,00	6.511.136.683,00	420.000.000,00	5.324.134.502,14	49.435.143.000,00	2.176.227.376,00	206.766.383.253,14	2.041.946.000,00	508.513.288,00	2.689.779.191,00	5.197.227.502,14	2.870.500.674,19	1.862.291.000,00	5.157.704.262,37	20.327.961.917,70	897.977.451.227,15

Lampiran 9.c

REKAPITULASI MUTASI ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	Saldo Awal 2025 Audited	PENAMBAHAN ASET TAHUN 2025								Jumlah Penambahan 2025	PENGURANGAN ASET TAHUN 2025							Jumlah Pengurangan 2025	Saldo Akhir Neraca 2025
			Belanja Modal 2025	Utang Retensi 5% Tahun 2025	Utang Pengadaan Aset Tetap	Hibah	Kapitalisasi Belanja Barang Jasa	Mutasi SKPD Masuk	Reklas Antar KIB	Koreksi Tahun Berjalan		Pembayaran Utang Pengadaan Aset Tahun 2024	Unkapitalisasi dari Belanja Modal	Penghapusan	Mutasi SKPD Keluar	Reklas Antar KIB	Koreksi Tahun Berjalan	Kekurangan Volume		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 4+5+6+7+8+9 +8+9+10+11	12	13	14	15	16	17	18	18 = 12+13 +14+15+16+17+18	19 = 3 + 11 - 18
1	Dinas Pendidikan	405.762.426.448,55	27.241.946.577,00	-	100.000,00	-	3.904.839.096,00	1.772.226.043,69	-	3.300.807.067,28	36.219.918.783,97	-	-	-	-	-	7.733.333,33	138.050.100,00	145.783.433,33	441.836.561.799,19
2a	Dinas Kesehatan	95.165.852.921,45	21.117.995.441,00	-	-	-	7.503.106.659,00	-	-	-	28.621.102.100,00	-	-	-	-	443.588.802,00	-	161.648.600,00	605.237.402,00	123.181.717.619,45
2b	RSUD. H. Damanhuri Barabai	147.420.629.605,80	47.442.446.502,00	-	28.944.162.000,00	-	-	-	90.450.212.984,63	97.320.000,00	166.934.141.486,63	3.575.598.625,00	-	-	-	50.858.674.350,00	-	149.657.700,00	54.583.930.675,00	259.770.840.417,43
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	51.350.515.525,39	3.582.480.649,00	-	126.158.361,00	-	292.624.900,00	-	5.713.650.332,82	-	9.714.914.242,82	445.597.347,00	-	-	-	-	-	53.598.800,00	499.196.147,00	60.566.233.621,21
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran	1.926.841.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.926.841.200,00
6	Dinas Sosial, PP dan Perlindungan Anak	8.702.981.718,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.772.226.043,69	-	-	-	1.772.226.043,69	6.930.755.675,16
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.469.891.540,00	198.016.000,00	-	-	-	49.474.000,00	-	-	-	247.490.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.717.381.540,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	12.945.122.199,45	461.528.980,00	-	-	-	692.384.230,82	-	-	-	1.153.913.210,82	-	-	-	-	-	-	-	-	14.099.035.410,27
9	Dinas Pengelola Lingkungan Hidup dan Perhubungan	23.983.969.325,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.983.969.325,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.235.989.116,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.235.989.116,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.089.697.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.089.697.000,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.893.875.156,00	48.560.000,00	-	-	-	-	-	-	-	48.560.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.942.435.156,00
13	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	9.289.408.979,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.289.408.979,56
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	32.233.408.090,92	7.480.393.575,00	-	-	-	49.120.322,00	-	-	-	7.529.513.897,00	-	-	-	-	7.279.593.722,00	-	557.012.200,00	7.836.605.922,00	31.926.316.065,92
15	Dinas Perpustakaan	13.872.109.650,75	1.892.092.000,00	-	-	-	194.750.850,00	-	-	-	2.086.842.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.958.952.500,75
16	Dinas Pertanian	24.249.697.712,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.249.697.712,65
17	Dinas Perdagangan	117.699.378.810,72	3.295.730.900,00	-	-	-	104.321.135,00	-	-	-	3.400.052.035,00	-	-	-	-	8.504.278.000,00	-	-	8.504.278.000,00	112.595.152.845,72
18	Sekretariat Daerah	95.893.339.957,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.893.339.957,37
19	Sekretariat DPRD	2.922.437.231,00	15.211.200,00	-	-	-	-	-	-	-	15.211.200,00	-	-	-	-	-	15.211.200,00	-	15.211.200,00	2.922.437.231,00
20	Badan Perecanaan Pembangunan, Penelitian dan Bangda	5.652.374.675,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.652.374.675,67
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	BPKAD (Pengelola Barang)	270.293.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270.293.000,00
23	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	1.947.689.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.947.689.800,00
24	Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Daerah	4.379.930.818,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.379.930.818,97
25	Inspektorat	606.147.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606.147.000,00
26	Kecamatan Barabai	9.763.146.040,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.763.146.040,86
27	Kecamatan Pandawan	1.832.372.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.832.372.600,00
28	Kecamatan Labuan Amas Selatan	1.137.134.776,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.137.134.776,48
29	Kecamatan Labuan Amas Utara	2.058.629.710,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.058.629.710,00
30	Kecamatan Haruyan	3.113.704.611,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.113.704.611,17
31	Kecamatan Batu Benawa	2.175.503.274,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.175.503.274,87
32	Kecamatan Hantakan	1.920.687.618,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.920.687.618,64
33	Kecamatan Batang Alai Selatan	2.788.577.151,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.788.577.151,00
34	Kecamatan Batang Alai Utara	1.398.195.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.398.195.750,00
35	Kecamatan Batang Alai Timur	1.535.896.527,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.535.896.527,00
36	Kecamatan Limpasu	2.704.474.716,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.704.474.716,00
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	499.985.870,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	499.985.870,00
JUMLAH		1.100.892.316.130,12	112.776.401.824,00	-	29.070.420.361,00	-	12.790.621.192,82	1.772.226.043,69	96.163.863.317,45	3.398.127.067,28	255.971.659.806,24	4.021.195.972,00	-	-	1.772.226.043,69	67.086.134.874,00	22.944.533,33	1.059.967.400,00	73.962.468.823,02	1.282.901.507.113,34

Lampiran 9.d

REKAPITULASI MUTASI ASET TETAP - JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	f	PENAMBAHAN ASET TAHUN 2025						Jumlah Penambahan 2025	PENGURANGAN ASET TAHUN 2025							Saldo Akhir Neraca 2025
			Belanja Modal 2025	Utang Retensi 5% Tahun 2025	Utang Pengadaan Aset Tetap	Kapitalisasi Belanja Barang Jasa	Reklas Antar KIB	Koreksi Tahun Berjalan		Penghapusan	Pembayaran Utang Retensi 5% Tahun 2024	Unkapitalisasi dari Belanja Modal	Reklas Antar KIB	Koreksi Tahun Berjalan	Kekurangan Volume	Jumlah Pengurangan 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9	11	12	13	14	15	16	16=11+12+13+14+15+16	16 = 3+10-16
1	Dinas Pendidikan	10.687.589.910,04	-	-	-	-	-	2.769.049.127,54	2.769.049.127,54	-	-	-	-	-	-	-	13.456.639.037,58
2a	Dinas Kesehatan	3.754.901.265,30	49.788.392,00	-	-	-	36.572.000,00	61.800.850,00	148.161.242,00	-	-	-	-	-	-	-	3.903.062.507,30
2b	RSUD. H. Damanhuri Barabai	16.716.258.488,00	2.785.422.677,00	-	-	-	1.431.775.400,00	-	4.217.198.077,00	-	1.895.231.000,00	-	-	-	-	1.895.231.000,00	19.038.225.565,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.913.293.449.888,29	142.333.682.464,00	4.674.084.421,00	-	4.957.082.692,00	21.725.039.935,85	2.843.417.507,25	176.533.307.020,10	-	3.890.585.750,00	-	27.356.716.033,00	-	3.139.331.300,00	34.386.633.083,00	2.055.440.123.825,39
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	57.969.634.923,83	4.764.144.000,00	-	-	296.147.000,00	-	-	5.060.291.000,00	-	-	361.962.000,00	-	-	-	361.962.000,00	62.667.963.923,83
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran	38.039.000,00	-	-	-	-	-	750.000,00	750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	38.789.000,00
6	Dinas Sosial, PP dan Perlindungan Anak	160.699.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.699.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	5.121.251.113,51	-	-	-	-	-	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.127.551.113,51
9	Dinas Pengelola Lingkungan Hidup dan Pemhubungan	8.744.493.301,58	-	-	-	-	1.692.661.200,00	-	1.692.661.200,00	-	-	-	-	-	-	-	10.437.154.501,58
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32.000.000,00	-	-	-	-	-	775.000,00	775.000,00	-	-	-	-	-	-	-	32.775.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	83.047.484,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.047.484,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	274.935.300,00	-	-	-	39.957.120,00	-	-	39.957.120,00	-	-	-	-	-	-	-	314.892.420,00
13	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	18.880.400,00	-	-	-	-	-	2.430.500,00	2.430.500,00	-	-	-	-	-	-	-	21.310.900,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	208.334.880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208.334.880,00
15	Dinas Perpustakaan	-	-	-	-	-	-	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000,00
16	Dinas Pertanian	7.277.995.704,00	-	-	-	-	-	4.830.000,00	4.830.000,00	-	-	-	-	-	-	-	7.282.825.704,00
17	Dinas Perdagangan	1.323.591.189,00	-	-	-	-	-	12.067.900,00	12.067.900,00	-	-	-	-	-	-	-	1.335.659.089,00
18	Sekretariat Daerah	2.657.393.457,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.657.393.457,44
19	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Badan Perecanaan Pembangunan, Penelitian dan Bangda	6.284.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.284.100,00
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	187.048.328,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.048.328,00
22	BPKAD (Pengelola Barang)	11.772.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.772.000,00
23	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Daerah	79.986.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.986.150,00
25	Inspektorat	-	-	-	-	70.279.250,00	-	-	70.279.250,00	-	-	-	-	-	-	-	70.279.250,00
26	Kecamatan Barabai	5.904.742.854,00	9.958.000,00	-	-	-	-	-	9.958.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.914.700.854,00
27	Kecamatan Pandawan	43.861.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.861.000,00
28	Kecamatan Labuan Amas Selatan	1.321.839.000,00	11.760.794,00	-	-	-	-	1.870.000,00	13.630.794,00	-	-	187.344,00	-	-	-	187.344,00	1.335.282.450,00
29	Kecamatan Labuan Amas Utara	37.126.867,00	-	-	-	-	-	3.705.000,00	3.705.000,00	-	-	-	-	-	-	-	40.831.867,00
30	Kecamatan Haruyan	10.350.788,00	-	-	-	-	-	2.880.000,00	2.880.000,00	-	-	-	-	-	-	-	13.230.788,00
31	Kecamatan Batu Benawa	8.144.550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.144.550,00
32	Kecamatan Hantakan	241.532.000,00	-	-	-	-	-	4.011.250,00	4.011.250,00	-	-	-	-	-	-	-	245.543.250,00
33	Kecamatan Batang Alai Selatan	1.208.574.139,63	131.518.734,00	-	-	39.888.915,00	-	-	171.407.649,00	-	-	-	-	-	-	-	1.379.981.788,63
34	Kecamatan Batang Alai Utara	107.465.759,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.465.759,81
35	Kecamatan Batang Alai Timur	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00
36	Kecamatan Limpasu	-	6.874.500,00	-	-	-	-	1.168.700,00	8.043.200,00	-	-	-	-	-	-	-	8.043.200,00
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.471.350,00	5.364.500,00	-	-	-	-	1.250.000,00	6.614.500,00	-	-	-	-	-	-	-	17.085.850,00
JUMLAH		2.037.546.694.191,43	150.098.514.061,00	4.674.084.421,00	-	5.403.354.977,00	24.886.048.535,85	5.723.805.834,79	190.785.807.829,64	-	5.785.816.750,00	362.149.344,00	27.356.716.033,00	-	3.139.331.300,00	36.644.013.427,00	2.191.688.488.594,07

Lampiran 9.e

REKAPITULASI MUTASI ASET TETAP - ASET TETAP LAINNYA PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	Saldo Awal 2025 Audited	PENAMBAHAN ASET TAHUN 2025					Jumlah Penambahan 2025	PENGURANGAN ASET TAHUN 2025				Jumlah Pengurangan 2025	Saldo Akhir Neraca 2025
			Belanja Modal 2025	Kapitalisasi Belanja Barang Jasa	Hibah	Reklas Antar KIB	Koreksi Tahun Berjalan		Penghapusan	Unkapitalisasi Belanja Modal	Reklas Antar KIB	Koreksi Tahun Berjalan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+5+6+7+8	10	11	12	13	14 = 10+11+12+13	14 = 3+9-14
1	Dinas Pendidikan	46.181.541.835,40	790.969.540,00	3.082.727.293,00	-	24.737.800,00	10.556.720.611,15	14.455.155.244,15	-	29.552.200,00	121.654.050,00	-	151.206.250,00	60.485.490.829,55
2a	Dinas Kesehatan	86.254.000,00	-	-	-	-	116.328.099,00	116.328.099,00	-	-	-	-	-	202.582.099,00
2b	RSUD. H. Damanhuri Barabai	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-	188.700.000,00	-	-	-	-	188.700.000,00	-	-	188.700.000,00	-	188.700.000,00	-
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	31.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.900.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Sosial, PP dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	166.017.167,00	-	-	-	-	5.858.995,90	5.858.995,90	-	-	-	-	-	171.876.162,90
9	Dinas Pengelola Lingkungan Hidup dan Perhubungan	64.530.000,00	-	-	-	-	5.715.330,00	5.715.330,00	-	-	-	-	-	70.245.330,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.777.900,00	-	-	-	-	1.713.500,00	1.713.500,00	-	-	-	-	-	3.491.400,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	87.324.280,00	-	-	-	-	601.500,00	601.500,00	-	-	-	-	-	87.925.780,00
15	Dinas Perpustakaan	1.034.847.829,42	165.607.251,00	-	-	-	280.110.498,81	445.717.749,81	-	-	-	-	-	1.480.565.579,23
16	Dinas Pertanian	42.463.000,00	-	-	-	-	676.000,00	676.000,00	-	-	-	-	-	43.139.000,00
17	Dinas Perdagangan	5.636.000,00	-	-	-	-	610.000,00	610.000,00	-	-	-	-	-	6.246.000,00
18	Sekretariat Daerah	35.096.300,00	-	-	-	-	3.110.000,00	3.110.000,00	-	-	-	-	-	38.206.300,00
19	Sekretariat DPRD	4.665.000,00	-	-	-	-	3.830.500,00	3.830.500,00	-	-	-	-	-	8.495.500,00
20	Badan Perecanaan Pembangunan, Penelitian dan Bangda	-	82.695.000,00	-	-	-	-	82.695.000,00	-	-	82.695.000,00	-	82.695.000,00	-
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	BPKAD (Pengelola Barang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	2.464.000,00	-	-	-	-	3.770.000,00	3.770.000,00	-	-	-	-	-	6.234.000,00
24	Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Daerah	-	-	-	-	-	2.931.800,00	2.931.800,00	-	-	-	-	-	2.931.800,00
25	Inspektorat	511.000,00	-	-	-	-	5.125.100,00	5.125.100,00	-	-	-	-	-	5.636.100,00
26	Kecamatan Barabai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Kecamatan Pandawan	-	-	-	-	-	786.000,00	786.000,00	-	-	-	-	-	786.000,00
28	Kecamatan Labuan Amas Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kecamatan Labuan Amas Utara	-	-	-	-	-	1.562.700,00	1.562.700,00	-	-	-	-	-	1.562.700,00
30	Kecamatan Haruyan	2.500.000,00	-	-	-	-	900.000,00	900.000,00	-	-	-	-	-	3.400.000,00
31	Kecamatan Batu Benawa	167.000,00	-	-	-	-	2.544.000,00	2.544.000,00	-	-	-	-	-	2.711.000,00
32	Kecamatan Hantakan	-	-	-	-	-	1.437.000,00	1.437.000,00	-	-	-	-	-	1.437.000,00
33	Kecamatan Batang Alai Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Kecamatan Batang Alai Utara	-	-	-	-	-	845.000,00	845.000,00	-	-	-	-	-	845.000,00
35	Kecamatan Batang Alai Timur	1.490.000,00	-	-	-	-	1.319.250,00	1.319.250,00	-	-	-	-	-	2.809.250,00
36	Kecamatan Limpasu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.000.000,00	-	-	-	-	1.909.606,00	1.909.606,00	-	-	-	-	-	2.909.606,00
JUMLAH		47.757.685.311,82	1.227.971.791,00	3.082.727.293,00	-	24.737.800,00	10.998.405.490,86	15.333.842.374,86	-	29.552.200,00	393.049.050,00	-	422.601.250,00	62.668.926.436,68

Lampiran 9.f

REKAPITULASI MUTASI ASET TETAP - KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	Saldo Awal 2025 Audited	PENAMBAHAN ASET TAHUN 2025					PENGURANGAN ASET TAHUN 2025			Saldo Akhir Neraca 2025
			Belanja Modal 2025	Kapitalisasi Belanja Barang Jasa	Reklas Antar KIB	Koreksi Tahun Berjalan	Jumlah Penambahan 2025	Reklas Antar KIB	Koreksi Tahun Berjalan	Jumlah Pengurangan 2025	
	2	3	4	5	6	7	8 = 4+5+6+7	9	10	11 = 9+10	12 = 3+8-11
1	Dinas Pendidikan	1.073.654.335,06	-	86.778.000,00	-	-	86.778.000,00	-	-	-	1.160.432.335,06
2a	Dinas Kesehatan	1.271.089.000,00	-	-	443.588.802,00	-	443.588.802,00	-	-	-	1.714.677.802,00
2b	RSUD. H. Damanhuri Barabai	90.705.167.984,63	-	-	384.805.000,00	-	384.805.000,00	90.450.212.984,63	-	90.450.212.984,63	639.760.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	50.256.173.427,44	-	-	32.904.939.480,00	-	32.904.939.480,00	27.438.690.268,67	-	27.438.690.268,67	55.722.422.638,77
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	315.293.719,38	-	194.613.000,00	-	-	194.613.000,00	-	-	-	509.906.719,38
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Sosial, PP dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	201.305.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	201.305.000,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	46.265.667,00	-	29.659.500,00	-	-	29.659.500,00	-	-	-	75.925.167,00
9	Dinas Pengelola Lingkungan Hidup dan Perhubungan	121.766.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	121.766.000,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.757.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.757.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	49.420.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	49.420.000,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	49.996.000,00	-	-	49.996.000,00	-	-	-	49.996.000,00
13	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	37.986.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	37.986.000,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	813.441.730,00	-	198.118.585,00	7.279.593.722,00	-	7.477.712.307,00	-	-	-	8.291.154.037,00
15	Dinas Perpustakaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Pertanian	46.654.000,00	-	35.219.190,00	-	-	35.219.190,00	-	-	-	81.873.190,00
17	Dinas Perdagangan	650.450.097,58	-	-	-	-	-	-	-	-	650.450.097,58
18	Sekretariat Daerah	608.106.010,00	-	96.347.778,00	-	-	96.347.778,00	-	-	-	704.453.788,00
19	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Badan Perecanaan Pembangunan, Penelitian dan Bangda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	BPKAD (Pengelola Barang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	-	-	95.302.602,00	-	-	95.302.602,00	-	-	-	95.302.602,00
24	Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Daerah	-	-	99.400.578,00	-	-	99.400.578,00	-	-	-	99.400.578,00
25	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Kecamatan Barabai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Kecamatan Pandawan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Kecamatan Labuan Amas Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kecamatan Labuan Amas Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Kecamatan Haruyan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Kecamatan Batu Benawa	2.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700.000,00
32	Kecamatan Hantakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Kecamatan Batang Alai Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Kecamatan Batang Alai Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Kecamatan Batang Alai Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Kecamatan Limpasu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		146.212.229.971,09	-	885.435.233,00	41.012.927.004,00	-	41.898.362.237,00	117.888.903.253,30	-	117.888.903.253,30	70.221.688.954,79

Lampiran 9.g

Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Per SKPD Tahun 2025

No.	SKPD	Uraian	No. Kontrak	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
1	**Dinas Pendidikan**	Perencanaan Asrama Siswa SD/SMP (2014)		APBD	16.811.563,16
		Perencanaan Asrama Siswa SD/SMP (2014) (SDIT IBNUL AMIN PEMANGKIH)	425/02/SPK/RENC.3/ABT.10/SAR/DIK/ 2013	APBD	16.811.563,16
		Perencanaan Asrama Siswa SD/SMP (2014)		APBD	16.811.563,16
		Perencanaan Pembangunan Pagar SMP (2015) APBD 2014	425/02/SPK/RENC/ABT.08.03/SAR/DIK /2014	APBD	11.500.000,00
		UKS (2015) APBD 2014	425/02/SPK/RENC/ABT.02.02/SAR/DIK /2014	APBD	4.780.000,00
		Perencanaan Pembangunan Pagar SMP (2015) APBD 2014	425/02/SPK/RENC/ABT.08.02/SAR/DIK /2014	APBD	11.500.000,00
		Perencanaan Pembangunan Pagar SD (2015) APBD 2014	425/02/SPK/RENC/ABT.07.06/SAR/DIK /2014	APBD	7.085.715,43
		Perencanaan Pembangunan Pagar SD (2015) APBD 2014	425/02/SPK/RENC/ABT.07.03/SAR/DIK /2014	APBD	7.085.714,00
		Perencanaan Pembangunan Pagar Sekolah SD/SMP Tahun 2016 (Wilayah 1)	425/02/SPK/RENC/ABT.04/SAR/DIK/20 15-4	APBD	6.215.000,00
		Perencanaan Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Parkir SD/SMP Tahun 2016	425/02/SPK/RENC/ABT.08/SAR/DIK/20 15-4	APBD	5.811.667,00
		Perencanaan Pembangunan Pagar Sekolah SD/SMP Tahun 2016 (Wilayah 2)	425/02/SPK/RENC/ABT.05/SAR/DIK/20 15-7	APBD	6.201.250,00
		APBD II TA. 2017, Perencanaan Rehabilitasi SD	425/02/SPK/RENC/K.01/SD/DIK/2017-4	APBD	8.822.000,00
		APBD II TA. 2017, Perencanaan Rehabilitasi SD	425/02/SPK/RENC/K.01/SD/DIK/2017-3	APBD	8.822.000,00
		APBD II TA. 2017, Perencanaan Rehabilitasi SD	425/02/SPK/RENC/K.01/SD/DIK/2017-5	APBD	8.822.000,00
		APBD Kab. HST TA. 2017, Perencanaan Prasarana Sekolah SMP	425/02/SS/RENC/K.01/DIK/2017-24	APBD	5.028.600,00
		APBD Kab. HST TA. 2017, Perencanaan Prasarana Sekolah SMP	425/02/SS/RENC/K.01/DIK/2017-35	APBD	5.028.600,00
		APBD Kab. HST TA. 2017, Perencanaan Prasarana Sekolah SMP	425/02/SS/RENC/K.01/DIK/2017-8	APBD	5.028.600,00
		APBD Kab. HST TA. 2017, Perencanaan Prasarana Sekolah SMP	425/02/SS/RENC/K.01/DIK/2017-15	APBD	5.028.600,00
		APBD Kab. HST TA. 2017, Perencanaan Prasarana Sekolah SMP	425/02/SS/RENC/K.01/DIK/2017-19	APBD	5.028.600,00
		APBD Kab. HST TA. 2017, Perencanaan Prasarana Sekolah SMP	425/02/SS/RENC/K.01/DIK/2017-26	APBD	5.028.600,00
		APBD Kab. HST TA. 2017, Perencanaan Prasarana Sekolah SMP	425/02/SS/RENC/K.01/DIK/2017-27	APBD	5.028.600,00
		APBD Kab. HST TA. 2017, Perencanaan Prasarana Sekolah SMP	425/02/SS/RENC/K.01/DIK/2017-33	APBD	5.028.600,00
		APBD Kab. HST TA. 2017, Perencanaan Prasarana Sekolah SMP	425/02/SS/RENC/K.01/DIK/2017-1	APBD	5.027.600,00
		APBD Kab. HST TA. 2017, Perencanaan Prasarana Sekolah SMP	425/02/SS/RENC/K.01/DIK/2017-12	APBD	5.028.600,00
		APBD Kab. HST TA. 2017, Perencanaan Prasarana Sekolah SMP	425/02/SS/RENC/K.01/DIK/2017-13	APBD	5.028.600,00
		APBD Kab. HST TA. 2017, Perencanaan Prasarana Sekolah SMP	425/02/SS/RENC/K.01/DIK/2017-16	APBD	5.028.600,00
		APBD Kab. HST TA. 2017, Perencanaan Prasarana Sekolah SMP	425/02/SS/RENC/K.01/DIK/2017-17	APBD	5.028.600,00
		APBD Kab. HST TA. 2017, Perencanaan Prasarana Sekolah SMP	425/02/SS/RENC/K.01/DIK/2017-25	APBD	5.028.600,00
		APBD Kab. HST TA. 2017, Perencanaan Prasarana Sekolah SMP	425/02/SS/RENC/K.01/DIK/2017-28	APBD	5.028.600,00
		APBD Kab. HST TA. 2017, Perencanaan Prasarana Sekolah SMP	425/02/SS/RENC/K.01/DIK/2017-29	APBD	5.028.600,00
		APBD Kab. HST TA. 2017, Perencanaan Prasarana Sekolah SMP	425/02/SS/RENC/K.01/DIK/2017-34	APBD	5.028.600,00
		APBD Kab. HST TA. 2017, Perencanaan Prasarana Sekolah SMP	425/02/SS/RENC/K.01/DIK/2017-7	APBD	5.028.600,00
		APBD Kab. HST TA. 2017, Perencanaan Prasarana Sekolah SMP	425/02/SS/RENC/K.01/DIK/2017-23	APBD	5.028.600,00
		APBD Kab. HST TA. 2017, Perencanaan Prasarana Sekolah SMP	425/02/SS/RENC/K.01/DIK/2017-30	APBD	5.028.600,00
		APBD Kab. HST TA. 2017, Perencanaan Prasarana Sekolah SMP	425/02/SS/RENC/K.01/DIK/2017-31	APBD	5.028.600,00
		APBD Kab. HST TA. 2017	425/02/SS/RENC/K.01/DIK/2017-4	APBD	5.028.600,00
		APBD Kab. HST TA. 2017	425/02/SS/RENC/K.01/DIK/2017-9	APBD	5.028.600,00
		APBD Kab. HST TA. 2017, Perencanaan Prasarana Sekolah SMP	425/02/SS/RENC/K.01/DIK/2017-21	APBD	5.028.600,00

No.	SKPD	Uraian	No. Kontrak	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
		APBD Kab. HST TA. 2017, Perencanaan Prasarana Sekolah SMP	425/02/SS/RENC/K.01/DIK/2017-14	APBD	5.028.600,00
		APBD Kab. HST TA. 2017	425/02/SS/RENC/K.01/DIK/2017-6	APBD	5.028.600,00
		APBD Kab. HST TA. 2017, Perencanaan Prasarana Sekolah SMP	425/02/SS/RENC/K.01/DIK/2017-18	APBD	5.028.600,00
		APBD Kab. HST TA. 2017, Perencanaan Prasarana Sekolah SMP	425/02/SS/RENC/K.01/DIK/2017-22	APBD	5.028.600,00
		APBD Kab. HST TA. 2017, Perencanaan Prasarana Sekolah SMP	425/02/SS/RENC/K.01/DIK/2017-32	APBD	5.028.600,00
		APBD Kab. HST TA. 2017, Perencanaan Prasarana Sekolah SMP	425/02/SS/RENC/K.01/DIK/2017-5	APBD	5.028.600,00
		APBD Kab. HST TA. 2017	425/02/SS/RENC/K.01/DIK/2017-10	APBD	5.028.600,00
		APBD Kab. HST TA. 2017, Perencanaan Prasarana Sekolah SMP	425/02/SS/RENC/K.01/DIK/2017-20	APBD	5.028.600,00
		APBD Kab. HST TA. 2017, Perencanaan Prasarana Sekolah SMP	425/02/SS/RENC/K.01/DIK/2017-2	APBD	5.028.600,00
		APBD Kab. HST TA. 2017, Perencanaan Prasarana Sekolah SMP	425/02/SS/RENC/K.01/DIK/2017-3	APBD	5.028.600,00
		APBD Kab. HST TA. 2017, Perencanaan Prasarana Sekolah SMP	425/02/SS/RENC/K.01/DIK/2017-11	APBD	5.028.600,00
		APBD. Kab. HST TA. 2017, Perencanaan Prasarana Sekolah SD	425/02/SS/RENC/K.07/DIK/2017-65	APBD	2.372.500,00
		APBD. Kab. HST TA. 2017	425/02/SS/RENC/K.07/DIK/2017-8	APBD	2.372.500,00
		APBD. Kab. HST TA. 2017, Perencanaan Prasarana Sekolah SD	425/02/SS/RENC/K.07/DIK/2017-42	APBD	2.372.500,00
		APBD. Kab. HST TA. 2017, Perencanaan Prasarana Sekolah SD	425/02/SS/RENC/K.07/DIK/2017-6	APBD	2.372.500,00
		APBD. Kab. HST TA. 2017, Perencanaan Prasarana Sekolah SD	425/02/SS/RENC/K.07/DIK/2017-7	APBD	2.372.500,00
		APBD. Kab. HST TA. 2017	425/02/SS/RENC/K.07/DIK/2017-5	APBD	2.372.500,00
		APBD. Kab. HST TA. 2017, Perencanaan Prasarana Sekolah SD	425/02/SS/RENC/K.07/DIK/2017-41	APBD	2.372.500,00
		APBD. Kab. HST TA. 2017, Perencanaan Prasarana Sekolah SD	425/02/SS/RENC/K.07/DIK/2017	APBD	123.843.400,00
		APBD. Kab. HST TA. 2017, Perencanaan Prasarana Sekolah SD	425/02/SS/RENC/K.07/DIK/2017	APBD	495.373.600,00
		APBD-Perubahan Kab. HST TA. 2017, Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor	425/03/PA/P.03/Sekr.1/DIK/2017	APBD	48.455.000,00
		Review Perencanaan Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitary SD	640/06/PPK/P.11/SD/DIK/2019.1	APBD	2.383.000,00
		APBD TA. 2019, Review Perencanaan Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitary SD	640/06/PPK/P.11/SD/DIK/2019.3	APBD	2.383.000,00
		APBD TA. 2019, Review Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan	640/06/PPK/P.02/Set/DIK/2019	APBD	24.475.000,00
		APBD KAB. HST TA. 2020	640/06/PPK/P.08/SD/DIK/2020.7	APBD	3.355.000,00
		APBD KAB. HST TA. 2020	04554/1.01.01.01/2020.4	APBD	3.966.000,00
		APBD KAB. HST TA.	04554/1.01.01.01/2020.6	APBD	3.966.000,00
		APBD KAB. HST TA. 2020	04633/1.01.01.01/2020.3	APBD	21.766.800,00
		Perencanaan Teknis Pembangunan Pagar SDN PALAJAU	640/06/KPA/P.55/SD/DIK/2022	APBD	7.000.000,00
		Perencanaan Teknis Pembangunan Pagar SDN PANTAI BATUNG	640/06/KPA/P.55/SD/DIK/2022	APBD	7.000.000,00
		Perencanaan Teknis Rehabilitasi Laboratorium Komputer SDN 1 Barabai Timur	63.07/02.0/000341/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PPR2/1	APBD	86.778.000,00
2	**Dinas Kesehatan**	PERENCANAAN REGOL, HALAMAN, GEDUNG DINKES		APBD	225.425.000,00
		PENGADAAN JASA KONSULTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG GUDANG FARMASI	01/REN/DOK/PA/DINKES/2014	APBD	170.320.000,00
		PERENCANAAN DED AKPER MURAKATA BARABAI	02/REN-DED Akper/PA/DINKES/2014	APBD	142.292.000,00
		Perencanaan Pembangunan jembatan PKM Kalibaru	03/PPK/Perenc-jemb pusk kb/IV/2017	APBD	11.825.000,00
		Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Pustu Wil. 1	03/PPK/Perenc-rumdin1/XI/2017	APBD	47.610.000,00
		Perencanaan Pembangunan dan rehab Pustu Wil. 4	03/PPK/Perenc-pustu4/XI/2017	APBD	49.530.000,00
		Perencanaan Tekhnis rehab puskesmas Sei. Buluh dan Pusk. Haruyan	03/PPK/Perenc-sgblh,hryn/XI/2017	APBD	49.370.000,00
		Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Pustu Wil. 2	03/PPK/Perenc-rumdin2/XI/2017	APBD	46.180.000,00
		Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Pustu wil. 3	03/PPK/Perenc-rumdin3/XI/2017	APBD	48.100.000,00
		Perencanaan Pembangunan PKM Rawat Inap Limpasu	01/PPK/PRENC-LPS/XI/2017	APBD	49.757.000,00
		Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Pustu Wil. 4	03/PPK/Perenc-rumdin4/XI/2017	APBD	49.190.000,00
		Perencanaan Teknis pembangunan/relokasi PKM Barabai	03/PPK/perenc BRB/XI/2017	APBD	49.450.000,00
		Perencanaan rehabilitasi Puskesmas Pandawan	03/PPK/Perenc rehab pdwn/XI/2017	APBD	47.320.000,00

No.	SKPD	Uraian	No. Kontrak	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
		Perencanaan Teknis Pembangunan/relokasi PKM Barikin	03/PPK/Perenc-barikin/XI/2017	APBD	49.260.000,00
		Perencanaan Pembangunan dan rehab pustu Wil. 3	03/PPK/perenc-pustu3/XI/2017	APBD	48.240.000,00
		Perencanaan rehabilitasi PKM Kalibaru	03/PPK/Perenc-rehab kb/XI/2017	APBD	47.370.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan PKM Kasarangan Menjadi PKM Rawat Inap	03/PPK/Perenc-ksrngn/XI/2017	APBD	49.270.000,00
		Perencanaan Pembangunan dan Rehab Pustu Wil. 1	03/PPK/Perenc-pustu1/XI/2017	APBD	46.700.000,00
		Perencanaan Pembangunan dan Rehab Pustu Wil. 2	03/PPK/Perenc-pustu2/XI/2017	APBD	43.880.000,00
		Relokasi Puskesmas Pembantu Mantaas	11-18/PPK-YANKES/KES/2025	APBD	443.588.802,00
3	**Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**	Jasa Konsultansi Jaringan Pengairan		APBD	44.990.000,00
		Pembangunan Jembatan, Inspeksi Kondisi Jembatan		APBD	51.140.000,00
		Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Pembangunan Jalan dan Jembatan) Survey dan Inspeksi Kondisi Jalan Usaha Tani		APBD	44.935.000,00
		Pembangunan Jalan, Inspeksi Kondisi Jalan		APBD	71.160.000,00
		Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jalan haruyan-Haruyan seberang 1	620/02-29/PPK-KPJL/DPU/2014	APBD	98.810.000,00
		- Perencanaan Pembangunan Jembatan Hevea	620/01-26/PPK-KPJB/DPU/2015	APBD	93.350.000,00
		- Perencanaan Pembangunan dan Pelebaran Jalan DAK IPD, Ruas Jalan Kias - Paya	620/03-52/PPK-KPJL/DPU/2016	APBD	47.498.000,00
		- Perencanaan Pembangunan Jembatan Gantung	620/02-35/PPK-KPJB/DPU/2016	APBD	130.092.000,00
		- Perencanaan Pembangunan Jembatan dengan Konstruksi Baja Bailey	620/02-30/PPK-KPJB/DPU/2016	APBD	145.753.000,00
		Waringin - Rimba	620/02-28/PPK-KPJL/DPU/2016	APBD	1.315.807.920,00
		Nateh - Pihandam	620/02-30/PPK-KPJL/DPU/2016	APBD	1.378.891.065,00
		Jembatan Taal - Mangunang Dengan Konstruksi Beton (Box Culvert)	620/02-10/PPK-KPJB-DAK SPP/DPU/2016	APBD	34.870.000,00
		- Perencanaan Dinding Penahan Tanah (DPT) Pada Ruas Jalan Simpang Pabaan - Kundan	620/03-16/PPK-KRPJL/DPU/2016	APBD	49.445.000,00
		- Perencanaan Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan	620/03-67/PPK-KRPJB/DPU/2016	APBD	48.746.000,00
		- Perencanaan Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan	620/03-68/PPK-KRPJB/DPU/2016	APBD	48.762.000,00
		- Perencanaan Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan	620/03-69/PPK-KRPJB/DPU/2016	APBD	48.548.000,00
		- Perencanaan Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan	620/03-70/PPK-KRPJB/DPU/2016	APBD	48.719.000,00
		- Perencanaan Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan	620/03-71/PPK-KRPJB/DPU/2016	APBD	48.448.000,00
		- Perencanaan Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan	620/03-72/PPK-KRPJB/DPU/2016	APBD	48.630.000,00
		- Perencanaan Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan	620/03-73/PPK-KRPJB/DPU/2016	APBD	48.625.000,00
		- Perencanaan Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan	620/03-74/PPK-KRPJB/DPU/2016	APBD	48.647.000,00
		- Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan SMP	620/03-75/PPK-KRPJB/DPU/2016	APBD	48.312.000,00
		Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jalan	620/02-57/PPK-KPJL/DPU/2016	APBD	90.987.000,00
		Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jalan	620/02-58/PPK-KPJL/DPU/2016	APBD	79.344.000,00
		Perencanaan Jembatan Baja dan Jembatan Bailey (Sungai Rangas - Pantai Hambawang, Desa Samhurang, Desa Hinas Kiri)	620/02-38/PPK-KPJB/DPU/2016	APBD	75.053.000,00
		- Perencanaan Jembatan Beton (Tabat - Pahalatan, Simpang Banua Kepayang - Sei Jaranih 01)	620/02-39/PPK-KPJB/DPU/2016	APBD	86.671.000,00
		Perencanaan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten	620/02-8/PPK-KRPJL/DPU/2016	APBD	80.781.000,00
		Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan Kabupaten	620/02-10/PPK-KRPJL/DPU/2016	APBD	73.134.000,00
		Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan Kabupaten (DAK Reguler SPP)	620/02-11/PPK-KRPJL-DAU/DPU/2016	APBD	86.776.000,00
		Jembatan Taal - Mangunang 04	620/02-10/PPK-KPJB-DAK SPP/DPU/2016	APBD	246.658.927,00
		Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Walangsi - Pagat	620/01-1/PPK-KPBJL/DPU-PR/2017	APBD	347.033.000,00
		Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Walangsi	620/01-1/PPK-KPBJB/DPU-PR/2017	APBD	489.042.000,00
		Sungai Rangas - Pantai Hambawang Barat 03	620/02-7/PPK-KPTJB/DPU-PR/2017	APBD	1.199.751.500,00
		Jembatan Intangan - Simpang Tanah Habang 01	620/02-14/PPK-KPTJB/DPU-PR/2017	APBD	802.434.000,00
		Jembatan Tanah Habang - Gempa	620/02-12/PPK-KPTJB/DPU-PR/2017	APBD	810.941.000,00
		Jembatan Gantung Pemangkih 01	620/02-17/PPK-KPTJB/DPU-PR/2017	APBD	646.681.700,00
		Jembatan Gantung Pemangkih 02	620/02-18/PPK-KPTJB/DPU-PR/2017	APBD	860.939.400,00
		Jembatan Simpang Kayu Rabah - Panggang Ramba 01	620/02-46/PPK-KPTJB/DPU-PR/2017	APBD	360.714.900,00
		Jembatan Simpang Belanti - Tungkup 02	620/04-138/PPK-KPTJB/DPU-PR/2017	APBD	155.692.000,00

No.	SKPD	Uraian	No. Kontrak	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
		Jembatan Simpang Belanti - Tungkup 04	620/04-139/PPK-KPTJB/DPU-PR/2017	APBD	183.218.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Kapasitas Jalan (DAK T.A. 2018), Ruas Jalan Pelajau Hilir - Mahang Matang Landung (Segmen 1), Tembok Bahalang - Ayuang, Banua Binjai - Kambat Utara (Segmen 2)	620/04-32/PPK-KPTJL/DPU-PR/2017	APBD	49.385.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Kapasitas Jalan (TA. 2018), Ruas Jalan Pengambau Hilir - Pengambau Dalam (Segmen 2) (063), Pagat - Aluan Besar (145), Simpang Buluan - Mahang Karang Jawa (127), Banua Binjai - Pelajau Hilir (085), Rasau - Banua Sepanggal (16	620/04-33/PPK-KPTJL/DPU-PR/2017	APBD	47.956.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Kapasitas Jalan (TA. 2018), Ruas Jalan Tri Kesuma - Durian Punggal (073), Jl. Telaga (404), Bangkal - Kayu Bawang (166), Batu Tangga - Tandilang (Segmen 2) (041), Banua Sungai - Rantau Keminting (Segmen 1) (201)	620/04-34/PPK-KPTJL/DPU-PR/2017	APBD	47.714.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan (TA. 2018), Ruas Jalan Simpang Tungkup - Simpang Walangku (Segmen 2) (124), Balimau - Sei Kamis, Ilung Tengah - Awang (Segmen 1) (158)	620/04-37/PPK-KPTJL/DPU-PR/2017	APBD	47.685.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan (TA. 2018), Ruas Jalan Sungai Buluh - Kayu Rabah (Segmen 1) (117), Jln. Lorong Said Alwi, Hinas Kiri - Kiyu (Segmen 1) (226)	620/04-38/PPK-KPTJL/DPU-PR/2017	APBD	47.824.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan (TA. 2018), Ruas Jalan Batu Tangga - Nateh (Segmen 1) (187), Simpang Taras - Simpang Mahang Matang Landung (248)	620/04-39/PPK-KPTJL/DPU-PR/2017	APBD	47.824.000,00
		Perencanaan Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten	620/04-5/PPK-KRPJL/DPU-PR/2017	APBD	48.768.000,00
		Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan Kabupaten	620/04-6/PPK-KRPJL/DPU-PR/2017	APBD	48.768.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Jembatan dengan Konstruksi Beton/ Baja (TA. 2018)	620/04-155/PPK-KPTJB/DPU-PR/2017	APBD	49.794.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Jembatan dengan Konstruksi Beton/ Baja (TA. 2018)	620/04-156/PPK-KPTJB/DPU-PR/2017	APBD	49.794.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Jembatan Konstruksi Baja Girder/ Baja Konvensional (TA. 2018)	620/04-166/PPK-KPTJB/DPU-PR/2017	APBD	48.558.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Jembatan Dengan Konstruksi Baja Girder/Baja Konvensional (TA. 2018), Lokasi Jembatan Pantai Hambawang Timur/ Pantai Hambawang Barat	620/04-167/PPK-KPTJB/DPU-PR/2017	APBD	48.745.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Jembatan Konstruksi Baja Girder/ Baja Konvensional (TA. 2018)	620/04-168/PPK-KPTJB/DPU-PR/2017	APBD	31.885.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Jembatan Gantung (TA. 2018)	620/04-169/PPK-KPTJB/DPU-PR/2017	APBD	49.086.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Jembatan Gantung (TA. 2018)	620/04-170/PPK-KPTJB/DPU-PR/2017	APBD	49.086.000,00
		Paket 36	620/04-35/PPK-KPTJL/DPU-PR/2017	APBD	47.630.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan (TA. 2018), Ruas Jalan Mahang Sungai Hanyar - Walatung, Mandingin - Banua Jingah (014), Sungai Rangas - Pantai Hambawang Barat (Segmen 3) (200)	620/04-36/PPK-KPTJL/DPU-PR/2017	APBD	47.725.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan (TA. 2018), Ruas Jalan Hinas Kanan - Pantai Mangkiling (Segmen 4) (197), Patikalain - Papagaran (Segmen 1) (174)	620/04-40/PPK-KPTJL/DPU-PR/2017	APBD	47.769.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan (TA. 2018), Ruas Jalan Datar Ajab - Tandilang (Segmen 2) (185), Banua Jingah - Tuhuran	620/04-41/PPK-KPTJL/DPU-PR/2017	APBD	47.669.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan (TA. 2018), Ruas Jalan Atiran - Batu Perahu	620/04-42/PPK-KPTJL/DPU-PR/2017	APBD	48.376.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan (TA. 2018), Ruas Jalan Batu Perahu - Aing Bantai Datar Tarap	620/04-43/PPK-KPTJL/DPU-PR/2017	APBD	48.376.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan (TA. 2018), Ruas Jalan Aing Bantai Datar Tarap (Simpang Pasumpitan) - Mangga Jaya	620/04-44/PPK-KPTJL/DPU-PR/2017	APBD	49.126.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan (TA. 2018), Ruas Jalan Aing Bantai Datar Tarap - Pasumpitan - Juhu	620/04-45/PPK-KPTJL/DPU-PR/2017	APBD	49.126.000,00
		Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan (TA. 2018)	620/04-8/PPK-KRPJB/DPU-PR/2017	APBD	37.257.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Jembatan dengan Konstruksi Beton/ Baja (TA. 2018)	620/04-157/PPK-KPTJB/DPU-PR/2017	APBD	49.794.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Jembatan dengan Konstruksi Beton/ Baja (TA. 2018)	620/04-158/PPK-KPTJB/DPU-PR/2017	APBD	48.359.000,00

No.	SKPD	Uraian	No. Kontrak	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
		Perencanaan Teknis Peningkatan Jembatan dengan Konstruksi Beton/ Baja (TA. 2018)	620/04-159/PPK-KPTJB/DPU-PR/2017	APBD	49.794.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Jembatan dengan Konstruksi Beton/ Baja (TA. 2018)	620/04-160/PPK-KPTJB/DPU-PR/2017	APBD	49.794.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Jembatan dengan Konstruksi Beton/ Baja (TA. 2018)	620/04-161/PPK-KPTJB/DPU-PR/2017	APBD	48.006.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Jembatan dengan Konstruksi Beton/ Baja (TA. 2018)	620/04-162/PPK-KPTJB/DPU-PR/2017	APBD	47.840.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Jembatan Konstruksi Baja Girder/ Baja Konvensional (TA. 2018)	620/04-163/PPK-KPTJB/DPU-PR/2017	APBD	49.269.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Jembatan Konstruksi Baja Girder/ Baja Konvensional (TA. 2018), Lokasi Jembatan Desa Panggang Marak	620/04-164/PPK-KPTJB/DPU-PR/2017	APBD	49.065.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Jembatan Konstruksi Baja Girder/ Baja Konvensional (TA. 2018), Lokasi Jembatan Desa Samhurang	620/04-165/PPK-KPTJB/DPU-PR/2017	APBD	47.355.000,00
		Patikalain - Papagaran (Balai Ramang) (Segmen 1)	620/02-9/PPK-KPTJL/DPU-PR/2018	APBD	779.183.000,00
		Hinas Kiri - Kiyu (Segmen 1)	620/02-10/PPK-KPTJL/DPU-PR/2018	APBD	716.098.000,00
		Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah	620/04-8/PPK-KRPJB/DPU-PR/2018	APBD	44.658.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Kapasitas Jalan (DAK TA. 2019) Pantai Hambawang Timur - Pasar Pantai Hambawang (112), Barabai Darat - Kayu Bawang (Segmen 2) (075) dan Batali - Murung Taal (074)	620/04-21/PPK-KPTJL/DPU-PR/2018	APBD	48.518.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Kapasitas Jalan (DAU TA. 2019) Pagat - Aluan Besar (Segmen 2) (145) Trikesuma - Durian Punggal (Segmen2) (073) Lingkar Simpang Walangsi - Bukat (252)	620/04-24/PPK-KPTJL/DPU-PR/2018	APBD	46.552.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Kapasitas Jalan (DAU TA.2019) Jalan Pasar Karet (425), Nateh - Pembakulan (224) dan Hinas Kiri - Kiyu (Segmen 2) (226)	620/04-25/PPK-KPTJL/DPU-PR/2018	APBD	46.775.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Kapasitas Jalan (DAU TA. 2019) Banua Sungai - Rantau Keminting (Segmen 2) (201), Banua Asam - Simpang Pajukungan (110) dan Telang - Abung (Segmen 2)	620/04-27/PPK-KPTJL/DPU-PR/2018	APBD	47.462.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan (TA. 2019) Tambulihin - Badalungga (212) Cukan Lipai - Intangan (098) Hinas Kanan - Datar Ajab (172)	620/04-31/PPK-KPTJL/DPU-PR/2018	APBD	47.737.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan (TA. 2019) Rantau Keminting - Taras (Kubah Datu Dayan) Ilung Tengah - Awang (Segmen 2 (158) Simpang Sungai Buluh - Simpang Belanti	620/04-32/PPK-KPTJL/DPU-PR/2018	APBD	46.700.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan (DAU TA. 2019) Pengambau Hilir - Pengambau Dalam (063), Barabai Darat - Kalibaru (053) dan Kambat Utara - Kayu Rabah (004)	620/04-33/PPK-KPTJL/DPU-PR/2018	APBD	47.391.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Jembatan Gantung (TA. 2019) Jembatan Samhurang Binjai Pemangkih, Jembatan Pemangkih, dan Jembatan Jaranih	620/04-36/PPK-KPTJB/DPU-PR/2018	APBD	48.080.000,00
		Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan Kabupaten (TA. 2019) Jln Sarigading (411), Jl. Keramat Manjang (409), Jl. Ir. P. H. M. Noor (405), dan Bukat - Lingkar Kapar Kias (253)	620/04-5/PPK-KRPJL/DPU-PR/2018	APBD	48.323.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan (TA. 2019) Ilung - Lok Besar (020), Durian Gantang Hulu - Taras (Segmen 1) (077), dan Simpang Telang - Pulau Damar (254)	620/04-29/PPK-KPTJL/DPU-PR/2018	APBD	48.364.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan (TA. 2019) Muara Pemangkih - Tabat (093), Karau - Kalubut (026), dan Kalibaru - Layuh (147)	620/04-30/PPK-KPTJL/DPU-PR/2018	APBD	48.518.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Jembatan dengan Konstruksi Beton/Baja (TA. 2019) Tersebar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah	620/04-31/PPK-KPTJB/DPU-PR/2018	APBD	47.638.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Jembatan dengan Konstruksi Beton/Baja (TA. 2019) Tersebar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah	620/04-32/PPK-KPTJB/DPU-PR/2018	APBD	46.647.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Jembatan dengan Konstruksi Beton/Baja (TA. 2019) Tersebar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah	620/04-35/PPK-KPTJB/DPU-PR/2018	APBD	48.172.000,00
		Perencanaan Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten (TA. 2019) Jln Samping Lapangan Teknis Birayang Jln. Said Ismail (Panggang Ramba)	620/04-6/PPK-KRPJL/DPU-PR/2018	APBD	48.727.000,00

No.	SKPD	Uraian	No. Kontrak	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
		Perencanaan Teknis Peningkatan Kapasitas Jalan (DAK TA. 2019) Ilung - Birayang (021), Birayang - Batu Tangga (Segmen 3) (039), dan Mandingin - Kias (046)	620/04-22/PPK-KPTJL/DPU-PR/2018	APBD	48.850.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Kapasitas Jalan (DAU TA. 2019) Kambat Selatan - Karantina (090), Kapar - Simpang Kahakan (Segmen 3) (044), dan Jamil - Perumahan (115)	620/04-23/PPK-KPTJL/DPU-PR/2018	APBD	48.480.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Kapasitas Jalan (DAU TA. 2019)	620/04-26/PPK-KPTJL/DPU-PR/2018	APBD	48.023.000,00
		Penyelidikan Tanah Untuk Mengetahui Daya Dukung Tanah Jembatan Kalibaru - Layuh (02) dan Jembatan Birayang - Kalibaru (02)	620/04-23/PPK-KPTJB/DPU-PR/2018	APBD	48.887.000,00
		Penyelidikan Tanah Untuk Mengetahui Daya Dukung Tanah Jembatan Murung B - Simpang Pabaan dan Jembatan Masugian - Buntu (01)	620/04-24/PPK-KPTJB/DPU-PR/2018	APBD	49.448.000,00
		Penyelidikan Tanah Untuk Mengetahui Daya Dukung Tanah Jembatan Pemangkih dan Jembatan Jaranih - Durian Gantang	620/04-25/PPK-KPTJB/DPU-PR/2018	APBD	50.218.000,00
		Penyelidikan Tanah Untuk Mengetahui Daya Dukung Tanah Jembatan Banua Binjai - Kambat Utara (03) dan Jembatan Wawai - Cinta Puri (01)	620/04-26/PPK-KPTJB/DPU-PR/2018	APBD	49.893.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Jembatan Konstruksi Baja Girder/ Baja Konvensional (TA. 2019) Jembatan Murung B - Simpang Pabaan dan Jembatan Masugian - Buntu 2	620/04-27/PPK-KPTJB/DPU-PR/2018	APBD	46.799.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Jembatan Konstruksi Baja Girder/Baja Konvensional (TA. 2019) Jembatan Banua Binjai - Kambat Utara (03) dan Jembatan Wawai - Cinta Puri (01)	620/04-28/PPK-KPTJB/DPU-PR/2018	APBD	46.733.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Jembatan Konstruksi Baja Girder/Baja Konvensional (TA. 2019) Jembatan Kalibaru - Layuh (02) dan Jembatan Birayang - Kalibaru (02)	620/04-29/PPK-KPTJB/DPU-PR/2018	APBD	46.841.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Jembatan Konstruksi Baja Girder/ Baja Konvensional (TA. 2019) Jembatan Pagat - Kahakan 01 Jembatan Wawai - Cinta Puri	620/04-30/PPK-KPTJB/DPU-PR/2018	APBD	48.793.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Jembatan dengan Konstruksi Beton/Baja (TA. 2019) Tersebar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah	620/04-33/PPK-KPTJB/DPU-PR/2018	APBD	48.067.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Jembatan dengan Konstruksi Beton/Baja (TA. 2019) Tersebar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah	620/04-34/PPK-KPTJB/DPU-PR/2018	APBD	46.636.000,00
		DED Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Manjurung Kec. Hantakan	610-4.02/PPK-RPJIPA/JK/DPUPR/2019	APBD	51.800.000,00
		Perencanaan Teknis Kegiatan Rehabilitasi Groundsil Desa Teluk Mesjidi	610-2.02/PPK-PRBPPS/JK/DPUPR/2019	APBD	49.200.000,00
		Perencanaan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Primer Ruas 9	640/02-03/PPK.PL-REN.DR/CKPR/DPUPR/2019	APBD	78.512.000,00
		Perencanaan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Primer Ruas 10	640/02-04/PPK.PL-REN.DR/CKPR/DPUPR/2019	APBD	78.419.000,00
		Perencanaan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Primer Ruas 11	640/02-05/PPK.PL-REN.DR/CKPR/DPUPR/2019	APBD	73.777.000,00
		Perencanaan Teknis Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Perdesaan 1	640/02-06/PPK.PL-REN.AB/CKPR/DPUPR/2019	APBD	88.643.000,00
		Perencanaan Teknis Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Perdesaan 2	640/02-07/PPK.PL-REN.AB/CKPR/DPUPR/2019	APBD	88.737.000,00
		Perencanaan Teknis Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Perdesaan 3	640/02-04/PPK.PL-REN.AM/CKPR/DPUPR/2019	APBD	88.489.000,00
		Review Perencanaan Teknis Pembangunan/Peningkatan Trotoar Lapangan Dwi Warna	640/02-05/PPK.PL-REN.TR/CKPR/DPUPR/2019	APBD	49.032.000,00
		Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Ruang Serbaguna Kecamatan Batang Alai Selatan	640/02-03/PPK.PL-RENC.BG/CKPR/DPUPR/2019	APBD	98.719.500,00
		Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Ruang Serbaguna Kecamatan Batu Benawa	640/02-04/PPK.PL-RENC.BG/CKPR/DPUPR/2019	APBD	98.879.000,00
		Perencanaan Teknis Kegiatan Pemb. Konst. Perkuatan Tebing Sungai	610-3.04/PPK-PTTB/JK/DPUPR/2019	APBD	68.953.000,00
		Perencanaan Teknis Kegiatan Pemb. Konst. Perkuatan Tebing Sungai - Paket 2	610-4.04/PPK-PTTB/JK/DPUPR/2019	APBD	69.850.000,00
		Perencanaan Teknis Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Konstruksi Jaringan Irigasi dan Pintu Air	610-6.04/PPK-RPJIPA/JK/DPUPR/2019	APBD	48.042.000,00
		Perencanaan Teknis Pembangunan jembatan untuk usaha tani	610-2.04/PPK-PJP/JK/DPUPR/2019	APBD	88.742.000,00

No.	SKPD	Uraian	No. Kontrak	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
		Inventarisir data Jembatan Untuk Usaha Tani Bidang SDA	610-3.04/PPK-PJP/JK/DPUPR/2019	APBD	64.845.000,00
		PAKET 79 (TUJUH PULUH SEMBILAN) Perencanaan Teknis Peningkatan Jembatan Gantung Tahun Anggaran 2020	620/03-79/PPK-KPTJB/DPU-PR/2019	APBD	49.857.000,00
		Perencanaan Teknis Jembatan gantung Lks Pekerjaan Jembatan Jaranih	620/03-78/PPK-KPTJB/DPU-PR/2019	APBD	49.857.000,00
		PAKET 21 KONSULTANSI PERENCANAAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS JALAN TAHUN ANGGARAN 2020	620/03-21/PPK-KPTJL/DPU-PR/2019	APBD	71.285.500,00
		PAKET 22 KONSULTANSI PERENCANAAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS JALAN TAHUN ANGGARAN 2020	620/03-22/PPK-KPTJL/DPU-PR/2019	APBD	73.736.300,00
		PAKET 23 (DUA PULUH TIGA) KONSULTANSI PERENCANAAN TEKNIS PENINGKATAN JALAN TAHUN ANGGARAN 2020	620/03-23/PPK-KPTJL/DPU-PR/2019	APBD	74.019.000,00
		PAKET 25 KONSULTANSI PERENCANAAN TEKNIS PENINGKATAN JALAN TAHUN ANGGARAN 2020	620/03-25/PPK-KPTJL/DPU-PR/2019	APBD	70.402.750,00
		Perencanaan Teknis Pemeliharaan/ Rehabilitasi Berkala Jalan dan Jembatan Kabupaten Tahun Anggaran 2020	620/03-33/PPK-KRPJL/DPUPR/2019	APBD	71.419.920,00
		Perencanaan Teknis Pemeliharaan/ Rehabilitasi Berkala Jalan dan Jembatan Kabupaten Tahun Anggaran 2020	620/03-34/PPK-KRPJL/DPUPR/2019	APBD	73.865.000,00
		Perencanaan Teknis Pemeliharaan/ Rehabilitasi Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten Tahun Anggaran 2020	620/03-35/PPK-KRPJL/DPUPR/2019	APBD	71.309.920,00
		Perencanaan Teknis Pemeliharaan/ Rehabilitasi Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten Tahun Anggaran 2020	620/03-36/PPK-KRPJL/DPUPR/2019	APBD	68.854.500,00
		Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jembatan Konstruksi Beton/ Baja Tahun Anggaran 2020	620/03-73/PPK-KPTJB/DPU-PR/2019	APBD	50.160.000,00
		Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jembatan Konstruksi Beton/ Baja Tahun Anggaran 2020	620/03-75/PPK-KPTJB/DPU-PR/2019	APBD	50.316.750,00
		Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jembatan Konstruksi Beton/ Baja Tahun Anggaran 2020	620/03-76/PPK-KPTJB/DPU-PR/2019	APBD	50.151.750,00
		Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jembatan Konstruksi Beton/ Baja Tahun Anggaran 2020	620/03-77/PPK-KPTJB/DPU-PR/2019	APBD	50.138.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Jembatan Konstruksi Beton/Bj TA 2020	620/03-74/PPK-KPTJB/DPU-PR/2019	APBD	50.316.750,00
		Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jembatan Konstruksi Beton/ Baja Tahun Anggaran 2020	620/03-72/PPK-KPTJB/DPU-PR/2019	APBD	49.805.250,00
		Perencanaan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Drainase	640/02-03/PPK.PL-REN.DRAIN/CKPR/DPUPR/2020	APBD	95.854.000,00
		Rvw Dsn Prncnn Tkns Rhblts&Pmlhrn Brkl Jl Kb P8	620/02-8/PPK-KRPBJL/DPU-PR/2020	APBD	65.807.500,00
		Review Desain Prncnn Tkns Pnngktn Jl Pkt 5	620/02-5/PPK-KPTJL/DPU-PR/2020	APBD	64.964.200,00
		Knsltns Prncnn Tkns Rhblts&Pmlhrn Brkls Jl Kb P7	620/02-4/ PPK-KPTJL/DPU-PR/2020 (1)	APBD	37.269.098,00
		Pk Rvw Dsn Prncnn Tkns Pngktn Jmb Knstrks Bj Grdr/Bj Knvsnl/Btn/Bj/TA 2020 P4	620/02-4/PPK-KPTJB/DPU-PR/2020	APBD	43.120.000,00
		Knsltns Prncnn Tkns Rhblts&Pmlhrrn Brkl Jmb Kab Pkt 10, Trsbr di Wlyh Kab HST	No.620/02-10/PPK-KRPBJB/ DPU-PR/2020	APBD	48.600.700,00
		Knsltns Prncnn Tkns Rhblts&Pmlhrn Brkls Jmb Kb P9,Lks Pek:Trsbr di Wly Kab HST	No.620/02-9/PPK-KRPBJB/DPU-PR/ 2020	APBD	48.867.500,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan/Rehabilitasi Drainase	640/02-04/PPK.PL-REN.DRAIN/CKPR/DPUPR/2020	APBD	97.344.000,00
		Konsultansi Prncnn Tkns Pmb Jmb Pkt 3,Lks Pek:Riitan Manirising	620/02-3/PPK-KPBJB/DPU-PR/2020	APBD	53.100.000,00
		Perencanaan Teknis Pmb Jembatan Usaha Tani	610-04.1/KONTRAK/PPK-PJP/JK/DPUPR/2020	APBD	79.566.850,00
		Knstrks Prktn Tbg Sungai	610-04.1/KONTRAK/PPK-PTS/JK/DPUPR/2020	APBD	83.621.162,00
		Pmbyrn 100% Pek Prncnn tkns Prktn Tbg Tgl Ds Awg Kc BAU,Kontrak No.610-04.2/KONTRAK/PPK-PTS/JK/DPUPR/2020,Tgl 28-10-2020,Nilai Kontrak Rp.79.651.000		APBD	82.409.097,00
		Knsltns Prncnn Tkns Pngktn Kpsts Jl TA 2021 Pkt 3	620/02-3/PPK-KPTJL/DPU-PR/2020	APBD	73.486.600,00
		Knsltns Prncnn Tkns Rhblts&Pmlhrn Rtn Jl Kab Pkt 7	620/02-7/PPK-KRPRJL/DPU-PR/2020	APBD	72.325.800,00
		Knsltns Prncnn Tkns Pngktn Jmb Knstrks Bj Grdr/Bj Knvnsnl/Btn/Bj TA 2021 Pkt 5	620/02-5/PPK-KPTJB/DPU-PR/ 2020	APBD	44.110.000,00

No.	SKPD	Uraian	No. Kontrak	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
		Prncnn Pnglln Sumber Daya Air (RP2I)	610-04.6/KONTRAK/PPK-RPJI/JK/DPUPR/2020	APBD	95.611.000,00
		Pmb Knstrks Prktn Tbg Sungai-Pkt 2	610-04.3/KONTRAK/PPK-PTS/JK/DPUPR/2020	APBD	102.581.741,00
		Knsltns Prncnn Tkns Rhblts&Pmlhrn Brkl Jl Kab Pkt 7	620/02-7/PPK-KRPBJL/DPU-PR/2020	APBD	74.657.000,00
		Knsltns Prncnn Tkns Pnktn Jmb Knstks Bj Grdr/Bj/ Knvnsnl/Btn/Bj TA 2021 P7,Lks Pk:Jmb Bn Bnj-Kmbt U 01,Jmb Bt Tg-Nth 05, Jmb Kndn-Ambh 08,Jmb Jrnh	620/02-7/PPK-KPTJB/DPU-PR/ 2020	APBD	74.272.000,00
		Knsltns Prncnn Tkns Pnktn Jmb Knstks Bj Grdr/Bj/ Knvnsnl /Btn/Bj TA 2021 P8,Lks Pk:Jmb Nth-Pmbkln 01,Jmb Bt Pgg-Pngmb Hl,Jmb Bt Pgg-Msgn	620/02-8/PPK-KPTJB/DPU-PR/ 2020	APBD	74.085.000,00
		Knsltns Prncnn Tkns Pnktn Jmb Knstks Bj Grdr/Bj/ Knvnsnl /Btn/Bj TA 2021 P2	620/02-2/PPK-KPTJB/DPU-PR/ 2020	APBD	74.180.100,00
		Perencanaan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Primer Ruas 12	640/02-02/PPK.PL-REN.DRAIN/CKPR/DPUPR/2020	APBD	97.570.000,00
		Prncnn Tkns Pngmbgn SPAM 1	640/02-01/PPK.PL-REN.PPSPAR/CKPR/DPUPR/2021	APBD	89.210.000,00
		Prncnn Tkns Saluran Drainse	640/02/PPK/PL.REN-PP.DRAIN/CKPR/DPUPR/2021	APBD	99.425.000,00
		Krntn-S.Ky Rbh,S Rgs-Pnt Hmbwg Brt,Krt-Hplg& Dg-S Wrngn	620/02-10/PPK-SRKJL/DPU-PR/2021	APBD	90.310.000,00
		Prncn Tkns Keg Pmlhrn (O&P) Daerah Irigasi Rawa	610-02.1/SPK/PPK-OPJIR/JK/DPUPR/2021	APBD	87.890.000,00
		Pek Rknstrks Jl P3,Lks Pek:Hinas Kanan-Datar Ajab (172) dikapitalisasi ke Reg No 000162	620/02-3/PPK-SRKJL/DPU-PR/2023	APBD	2.827.585.084,00
		Rehabilitasi Drainase Desa Palajau Kec. Pandawan	640/02/5PPK-PRDPLJ/ CKPR-PUPR/2023	APBD	204.113.212,00
		Rehabilitasi Drainase Desa Matang Ginalon Kec. Pandawan	640/02/5PPK-PRDPLJ/ CKPR-PUPR/2023	APBD	204.113.212,00
		Survey Kondisi Jalan dan Jembatan di Kab. Hulu Sungai Tengah	620/02-1/JK-PRC/PPK-SSKJJ/DPUPR/2024	APBD	392.854.000,00
		Pembayaran 30% Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ds. Muara Rintis Kec. BAU		APBD	91.245.300,00
		Konsultansi Perencanaan Teknis Penggantian Jembatan Paket 1 : Jembatan Gantung Kundan, Jembatan Gantung Batu Tangga Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000202	620/02-18/JK-PRC/PPK-SPBJL/DPUPR/2025	APBD	93.165.000,00
		Konsultansi Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan Paket 1 Ruas : Simpang Intangan - Ugut (266)	620/02-1/JK-PRC/PPK-SRKJL/DPUPR/2025	APBD	46.662.500,00
		Konsultansi Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan Paket 7 Ruas : Muara Pamangkih - Tabat (093)	620/02-7/JK-PRC/PPK-SRKJL/DPUPR/2025	APBD	46.889.000,00
		Konsultansi Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan Paket 2 Ruas : Pihandam - Nateh (231)	620/02-2/JK-PRC/PPK-SRKJL/DPUPR/2025	APBD	46.615.000,00
		Konsultansi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 3 : Penanganan Longsor Badan Jalan Ruas Banua Kepayang - Taal	620/02-3/JK-PRC/PPK-SPBJL/DPUPR/2025	APBD	46.850.000,00
		Konsultansi Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan Paket 8 Ruas : Pambakulan - Muara Hungi, Muara Hungi - Datar Batung Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000238	620/SWA.08/SPB.02/PPK-SPBJB/DPUPR/2025	APBD	93.754.000,00
		Konsultansi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 5 Ruas :Kalibaru -Layuh (147)	620/02-5/JK-PRC/PPK-SPBJL/DPUPR/2025	APBD	30.871.667,00
		Konsultansi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 5 Ruas :Wake - Kalibaru (Segmen 2) (207)	620/02-5/JK-PRC/PPK-SPBJL/DPUPR/2025	APBD	30.871.666,00
		Pembayaran 100% Perencanaan Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lok.Kab.HST (Aset Tetapnya masih di Kemen PU)	610-05.2/SPK/PPK-PRTIR/JK/DPUPR/2025	APBD	98.076.000,00
		Konsultansi Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan Paket 6 Ruas : Mahang matang landung - paku, Paku - Belanti Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000237	620/SWA.03/SPB.02/PPK- SPRJL/DPU-PR/2025	APBD	93.556.000,00
		Konsultansi Perencanaan Teknis Pelebaran Jalan Menuju Standar Limpasu - Pihandam (151)	620/02-1/JK-PRC/PPK-SLSJL/DPUPR/2025	APBD	46.606.000,00
		Penelitian Pek Jasa Penelitian Penyelidikan Tanah (Soil Investigation) Paket 1 Ruas : Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000246	620/SWA.04/SPB/PPK- SPRJL/DPU-PR/2025	APBD	297.690.000,00
		DED JARINGAN AIR MINUM PUSKESMAS HANTAKAN Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000073	640/02/RENC-SPAM1/CKPR-DPUPR/2025	APBD	98.604.000,00
		PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000088	600/01/DPUPR/2025	APBD	83.353.000,00
		PENYUSUNAN STUDI KEBERFUNGSIAN PAMSIMAS KAB HST Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000079	640/02/RENC-SPAM3/CKPRDPUPR/2025	APBD	99.724.000,00

No.	SKPD	Uraian	No. Kontrak	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
		PENYUSUNAN STUDI KEBERFUNGSIAN SPAM BUKAN JARINGAN PERPIPAAN KAB HST Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000081	640/02/RISPALD/CKPR-DPUPR/2025	APBD	99.613.000,00
		PERENCANAAN TEKNIS PENINGKATAN/REHABILITASI RUMAH DINAS EKS. RUMDIN TELKOM Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000459	640/02/RENC-TELKOM/CKPR-DPUPR/2025	APBD	89.127.000,00
		Konsultansi Perencanaan Teknis Penggantian Jembatan Paket 2 : Jembatan Paku - Belanti Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000203	620/02-2/JK-PRC/PPK-SGTJB/DPUPR/2025	APBD	93.208.000,00
		DOKUMEN LINGKUNGAN PEMBANGUNAN TPS-T Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000077	640/02/RENC-DOKTPST/CKPR-DPUPR/2025	APBD	97.753.000,00
		Konsultan Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Paket 2 Ruas : Maringgit - Simpang Padang Panjang	620/02-2/JK-PRC/PPK-SBGJL/DPUPR/2025	APBD	46.639.500,00
		PERENCANAAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPS-T) Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000087	640/02/RENC-TPST/CKPR-DPUPR/2025	APBD	189.447.000,00
		Konsultansi Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Paket 1 Ruas : Jembatan Tubau, jembatan gantung batu tunggal Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000204	620/02-1/JK-PRC/PPK-SBGJB/DPUPR/2025	APBD	93.160.000,00
		PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000090	640/02/RISPALD/CKPR-DPUPR/2025	APBD	125.029.500,00
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan Paket 1 Ruas : Jalan dan Jembatan di Kab. Hulu Sungai Tengah Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000186	620/02-1/JK-PRC/PPK-SSKJJ/DPUPR/2025	APBD	46.787.000,00
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan Paket 2 Ruas : Jalan dan Jembatan di Kab. Hulu Sungai Tengah Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000189	620/02-2/JK-PRC/PPK-SSKJJ/DPUPR/2025	APBD	46.787.000,00
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan Paket 3 Ruas : Jalan dan Jembatan di Kab. Hulu Sungai Tengah Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000191	620/02-3/JK-PRC/PPK-SSKJJ/DPUPR/2025	APBD	46.787.000,00
		Perencanaan teknis pembangunan gudang dan laboratorium uji mutu konstruksi Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000100	600/01/DPUPR/2025	APBD	99.670.452,00
		PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000089	640/02/RISPALD/CKPR-DPUPR/2025	APBD	208.382.500,00
		Konsultansi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 20 Ruas : Kambat Utara - Kayu Rabah Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000297	620/02-20/JK-PRC/PPK-SPBJL/DPUPR/2025	APBD	55.220.000,00
		PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN TUGU BATAS KAB HST-KAB HSS Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000078	640/02/RENC-TGBHSS/CKPRDPUPR/2025	APBD	88.383.000,00
		REVIU PERENCANAAN LANDFILL TPA TELANG Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000072	640/02/RENC-LANDFILL/CKPR-DPUPR/2025	APBD	49.553.000,00
		Konsultansi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 17 Ruas : Barabai - Matang Birik (006), Bulayak - Kampung Baru (101) Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000283	620/02-17/JK-PRC/PPK-SPBJL/DPUPR/2025	APBD	93.547.000,00
		Konsultansi Perencanaan Teknis Pelebaran Jalan Menuju Standar Paket 3 Ruas : Mandingin - Kias (046), Rangas - Abung Wijaya (036) Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000195	620/02-3/JK-PRC/PPK-SLSJL/DPUPR/2025	APBD	93.792.000,00
		Penelitian Pek Jasa Penelitian Penyelidikan Tanah (Soil Investigation) Paket 2 Ruas : Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000247	620/16-2/SWA/PPK-SRKJL/DPUPR/2025	APBD	197.050.000,00
		Konsultansi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 15 Ruas : Pagat - Timbuk Lama (193)	620/02-15/JK-PRC/PPK-SPBJL/DPUPR/2025	APBD	46.759.500,00
		Konsultansi Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan Paket 9 Ruas : Ilung - Hapingin (018), Ilung Tengah - Awang (158) Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000241	620/02-9/JK-PRC/PPK-SRKJL/DPUPR/2025	APBD	91.976.000,00
		Konsultansi Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan Paket 10 Ruas : Simpang Pasat - Parum Timur (030), Ilung - Lok Besar (020) Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000242	620/02-10/JK-PRC/PPK-SRKJL/DPUPR/2025	APBD	92.087.000,00
		Konsultansi Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan Paket 11 Ruas : Simpang Pabaan - Kundan, Durian Gantang Hilir - Taras Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000243	620/02-11/JK-PRC/PPK-SRKJL/DPUPR/2025	APBD	92.169.000,00
		Perencanaan tknis pembgunn/prkuatn/rhblts jaringan irigasi Lok.Kab.HST Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000126	610-05.3/Kontrak/PPK-PRTIR/JK/DPUPR/2025	APBD	364.695.000,00

No.	SKPD	Uraian	No. Kontrak	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
		Konsultansi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 18 Ruas : Ilung Tengah - Awang (158) Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000295	620/02-18/JK-PRC/PPK-SPBJL/DPUPR/2025	APBD	55.179.000,00
		Konsultansi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 19 Ruas : Batu Tangga - Tandilang (041) dan Barabai - Matang Birik (Segmen 1) Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000296	620/02-19/JK-PRC/PPK-SPBJL/DPUPR/2025	APBD	55.152.000,00
		Konsultansi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 16 Ruas : Dangu - Pandanu (135), Taal - Mangunang (069) Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000280	620/02-16/JK-PRC/PPK-SPBJL/DPUPR/2025	APBD	93.206.000,00
		Konsultansi Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan Paket 13 Ruas : Birayang - Batu Tangga (039), Batu Tangga - Tandilang (041) Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000245	620/02-13/JK-PRC/PPK-SRKJL/DPUPR/2025	APBD	93.152.000,00
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan Paket 4 Ruas : Jalan dan Jembatan di Kab. Hulu Sungai Tengah Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000188	620/02-4/JK-PRC/PPK-SSKJJ/DPUPR/2025	APBD	93.614.000,00
		Rehabilitasi Gedung Kantor	600/02/RHBPU/DPUPR/2025	APBD	194.958.000,00
		Jasa konsultansi Pengawasan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000452	640/02/PWS-RHBPU/DPUPR/2025		39.278.687,00
		Konsultansi Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Paket 3 Ruas : Jembatan Aluan Mati Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000205	620/02-3/JK-PRC/PPK-SBGJB/DPUPR/2025	APBD	93.222.000,00
		Konsultansi Perencanaan Teknis Penggantian Jembatan Paket 5 : Jembatan Simpang Bukat Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000214	620/02-5/JK-PRC/PPK-SGTJB/DPUPR/2025	APBD	93.231.000,00
		Konsultansi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 13 Ruas : Simpang Hilir Banua - Timbuk Hanyar (106), Simpang Jatuh - Babai (105) Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000281	620/02-13/JK-PRC/PPK-SPBJL/DPUPR/2025	APBD	93.865.000,00
		pengawasan teknis Keg.Rhbltsi jrgan irigasi permukaan Kab.HST Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000046	610-05.1/SPK/JK/PPK-RJIP/DPUPR/2025	APBD	64.370.475,00
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan Paket 3 Ruas : Jalan dan Jembatan di Kab. Hulu Sungai Tengah Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000192	620/02-3/JK-PRC/PPK-SSKJJ/DPUPR/2025	APBD	46.787.000,00
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan Paket 2 Ruas : Jalan dan Jembatan di Kab. Hulu Sungai Tengah Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000190	620/02-2/JK-PRC/PPK-SSKJJ/DPUPR/2025	APBD	46.787.000,00
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan Paket 1 Jalan dan Jembatan di Kab. Hulu Sungai Tengah Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000187	620/02-1/JK-PRC/PPK-SSKJJ/DPUPR/2025	APBD	46.787.000,00
		Konsultansi Perencanaan Teknis Penggantian Jembatan Paket 6 : Jembatan Kindingan - Pancur Bungur, Jembatan Sumanggi, Jembatan Telang - Pulau Damar Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000215	620/02-6/JK-PRC/PPK-SGTJB/DPUPR/2025	APBD	93.927.000,00
		Perencanaan tknis Keg.pmbgunn Knstruksi prkuatn tebing sungai Kab.HST Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000122	610-05.2/SPK/PPK-PBPT/JK/DPUPR/2025	APBD	190.529.000,00
		Konsultansi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 14 Ruas : Banua Kupang - Masiraan (238), Banua Asam - Simpang Pajukungan (110) Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000282	620/02-14/JK-PRC/PPK-SPBJL/DPUPR/2025	APBD	93.884.000,00
		Konsultansi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jembatan Paket 2 Ruas : Bulayak - Timan, Timan - Patikalain Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000199	620/02-2/JK-PRC/PPK-SPBJB/DPUPR/2025	APBD	93.847.000,00
		PERENCANAAN TEKNIS PENINGKATAN/REHABILITASI SEKRETARIAT BALAKAR DESA DURIAN GANTANG Pengadaan Nomor : 25.08.05.01.2026.000082	640/02/RENC-BLKR/CKPR-DPUPR/2025	APBD	72.814.000,00
		Konsultansi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas : Barabai Darat - Kayu Bawang Segmen 1 (075)	620/02-1/JK-PRC/PPK-SPBJL/DPUPR/2025		29.147.057,00
		Konsultansi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 6 Ruas : Perumahan - Pemangkih Seberang (119)	620/02-6/JK-PRC/PPK-SPBJL/DPUPR/2025		46.877.000,00
		Konsultansi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 6 Ruas : Perumahan - Keruing (120)	620/02-6/JK-PRC/PPK-SPBJL/DPUPR/2025		46.877.000,00
		Penggantian Jembatan Paket 1 : Balimau - Sungai Kamis	620/05-1/PK/PPK-SGTJB/DPUPR/2025		2.599.314.600,00
		Rekontruksi Jalan Paket 1 : haur gading - kalubut	620/05-1/PK/PPK-SRKJL/DPUPR/2025		2.316.512.700,00

No.	SKPD	Uraian	No. Kontrak	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
		Konsultansi Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan Paket 3 Ruas : haur gading - kalubut (152)	620/02-3/JK-PRC/PPK-SRKJL/DPUPR/2025		46.603.000,00
		Penggantian Jembatan Paket 1 : Jembatan Balimau - Sungai Kamis	620/05-1/PK/PPK-SGTJB/DPUPR/2025		2.028.028.574,00
		Perencanaan Berkala Jalan Paket 4 Penanganan Longsor badan jalan ruas Sungai Buluh - mantaas, Birayang - batu tangga	620/02-4/JK-PRC/PPK-SPBJL/DPUPR/2025		92.723.000,00
		Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 10 Ruas : Pagat - Aluan Besar (145)	620/05-10/PK/PPK-SPBJL/DPUPR/2025		1.291.914.294,00
		Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 10 Ruas : Barabai Darat - Kalibaru (053)	620/05-10/PK/PPK-SPBJL/DPUPR/2025		1.898.011.206,00
		Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 16 Ruas : Barabai Darat - Kayu Bawang	620/02-16/PK/PPK-SPBJL/DPUPR/2025		1.215.387.900,00
		Konsultansi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 7 Ruas : Danggung - Parum Timur (161)	620/02-7/JK-PRC/PPK-SPBJL/DPUPR/2025		55.085.000,00
		Konsultansi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 8 Ruas : Hilir Banua - Pasat (107)	620/02-8/JK-PRC/PPK-SPBJL/DPUPR/2025		55.018.000,00
		Konsultansi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 12 Ruas : Suka Maju - Mahang Matang Landung	620/02-12/JK-PRC/PPK-SPBJL/DPUPR/2025		55.204.000,00
		Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 12 Ruas : Tri Kesuma - Durian Punggal Segmen 2 (073)			527.665.800,00
		Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 12 Ruas : Suka Maju - Mahang Matang Landung (111)			665.742.900,00
		Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 13 Ruas : Danggung - Parum Timur (161)			618.222.434,00
		Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 13 Ruas : Hilir Banua - Pasat (107)			1.065.895.366,00
		Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 15 Ruas : Perumahan - Keruing (120)			461.458.860,00
		Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 15 Ruas : Perumahan - Pemangkih Seberang (119)			905.544.840,00
		Rekonstruksi Jalan Paket 1 : haur gading - kalubut			1.751.167.776,00
		Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 10 Ruas : Pagat - Aluan Besar (145)			1.094.892.436,00
		Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 10 Ruas : Barabai Darat - Kalibaru (053)			1.608.557.257,00
		Penggantian Jembatan Paket 1 : Jembatan Balimau - Sungai Kamis			1.756.573.484,00
		Konsultansi Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan Paket 12 Ruas : Pagat - Aluan Besar (145), Pagat - Kahakan (054)			93.139.000,00
		Konsultansi Pengawasan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 6 Ruas : Barabai Darat - Kayu Bawang (075)			24.225.351,00
		Konsultansi Pengawasan Teknis Penggantian Jembatan paket 1 Ruas : Jembatan Balimau - Sungai Kamis			93.897.000,00
		Konsultansi Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan Paket 1 Ruas : Haur Gading - Kalubut (152)			74.943.361,00
		Konsultansi Pengawasan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 10 Ruas : Suka Maju - Mahang Matang Landung (111)			12.628.645,00
		Konsultansi Pengawasan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 10 Ruas : Tri Kesuma - Durian Punggal Segmen 2 (073)			12.628.645,00
		Konsultansi Pengawasan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 8 Ruas : Perumahan - Pemangkih Seberang (119)			25.245.500,00
		Konsultansi Pengawasan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 8 Ruas : Perumahan - Keruing (120)			25.245.500,00
		Konsultansi Pengawasan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 7 Ruas : Barabai Darat - Kalibaru (053)			25.852.500,00
		Konsultansi Pengawasan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 7 Ruas : Pagat - Aluan Besar (145)			25.852.500,00
		Rekontruksi Jalan Paket 1 : haur gading - kalubut			1.600.555.842,00
		Penggantian Jembatan Paket 1 : Jembatan Balimau - Sungai Kamis			77.145.362,00
		Konsultansi Pengawasan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 11 Ruas : Danggung - Parum Timur (161)			25.018.500,00
		Konsultansi Pengawasan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 11 Ruas : Hilir Banua - Pasat (107)			25.018.500,00
		Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 10 Ruas : Pagat - Aluan Besar (145)			504.155.812,00
		Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 10 Ruas : Barabai Darat - Kalibaru (053)			740.678.685,00

No.	SKPD	Uraian	No. Kontrak	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
		Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 12 Ruas : Tri Kesuma - Durian Punggal Segmen 2 (073)			532.546.709,00
		Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 12 Ruas : Suka Maju - Mahang Matang Landung (111)			671.901.022,00
		Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 15 Ruas : Perumahan - Keruing (120)			180.630.380,00
		Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 15 Ruas : Perumahan - Pemangkih Seberang (119)			354.460.435,00
4	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	Jasa Appraisal Pengadaan Tanah utk Kantor Kel Brb Utara, Puskesmas Pdwn, Puskesmas Barikin		APBD	49.288.000,00
		Perencanaan Teknis Pembangunan dan Peningkatan RTP Kawasan Permukiman Kumuh	640/05/PPK/PL.RENC/PERKIM/2018	APBD	50.677.000,00
		Perencanaan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Drainase Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh	640/15/PPK/PL.RENC/PERKIM/2019	APBD	13.040.985,38
		Perencanaan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh	640/25/PPK/PL.RENC/PERKIM/2019	APBD	36.670.220,00
		Perencanaan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Lingkungan	640/09/PPK/PL.RENC/PERKIM/2021	APBD	49.434.000,00
		Perencanaan Teknis Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan	640/03/PPK/PL.RENC/PERKIM2021	APBD	49.464.000,00
		Perencanaan Teknis Pembangunan / Peningkatan Jalan Setapak	620/02/PPK/PL.RENC/PERKIM/2022	APBD	31.308.800,00
		Perencanaan Teknis Pembangunan/Peningkatan Jalan Setapak (5 Lokasi)	640/04/PPK/PL.RENC/PERKIM/2021	APBD	35.410.714,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Perumahan Zona 2 TA2026	620/01/SPK-RENC.P/PERKIM/202	APBD	94.808.000,00
		Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Perumahan Zona 1 TA 2026	620/04/SPK-RENC.P/PERKIM/2025	APBD	99.805.000,00
5	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan DED Gedung Badan Penanggulangan Bencana Daerah HST (Gedung Kantor, Gudang Logistik, Gedung Posdalops) atas kontrak/SP Nomor:027/04/PK.06-8995441/PPK-BPBD/2017 tgl 15 Juni 2017 nilai kontrak Rp. 198.165.000,-	027/04/PK.06-8995441/PPK-BPBD/2017	APBD	39.633.000,00
		Pembayaran 100% Pekerjaan DED Gedung Badan Penanggulangan Bencana Daerah HST (Gedung Kantor, Gudang Logistik, Gedung Posdalops) atas kontrak/SP Nomor:027/04/PK.06-8995441/PPK-BPBD/2017 tgl 15 Juni 2017 nilai kontrak Rp. 198.165.000,-	027/04/PK.06-8995441/PPK-BPBD/2017	APBD	161.672.000,00
6	**Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**	Pembayaran 85% dari Nilai Kontrak Konsultan Perencanaan (Rehab Gedung Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan) sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) 06-25928870/PA/DKP-KAN/2020 tanggal 18 Nopember 2020 dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp.13.750.000,-	06-25928870/PA/DKP-KAN/2020	APBD	13.750.000,00
		Pembayaran 85% dari Nilai Kontrak Perencanaan Pembuatan Tambatan Perahu, Speedboat dan Airboat sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) 05-26603888/PA/DKP-KAN/2020 tanggal 18 Nopember 2020 dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp.14.179.000,-	05-26603888/PA/DKP-KAN/2020	APBD	14.805.667,00
		Pembayaran 85% dari Nilai Kontrak Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Pemasukan dan Pengeluaran Balai Benih Ikan Cukan Lipai sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) 07-26585031/PA/DKP-KAN/2020 tanggal 18 Nopember 2020 dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp.11.950.000	07-26585031/PA/DKP-KAN/2020	APBD	11.950.000,00
		Pembayaran 85% dari Nilai Kontrak Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Kolam atau Bak Induk/Calon Induk sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) 08-26584964/PA/DKP-KAN/2020 tanggal 18 Nopember 2020 dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp.5.760.000,-	08-26584964/PA/DKP-KAN/2020	APBD	5.760.000,00
		Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pos Pengawasan Sumber Daya Perikanan	523/ 586 - KAN/ DKPP 2025	APBD	29.659.500,00
7	**Dinas Pengelola Lingkungan Hidup dan Perhubungan**	Perencanaan Tugu simpang 3 Mandingin	03/REN.TG.MANDINGIN/PPK/BPLH/2014	APBD	24.683.000,00
		Dokumen/Buku Perencanaan Jalan Operasional TPA Telang		APBD	34.400.000,00
		Perencanaan Kantor UPT TPA Telang		APBD	14.300.000,00
		Pembayaran 100% atas Pekerjaan Perencanaan Pembangunan TPST/ Bank Sampah sesuai SPK No : 003/SP-TPST1/ PPK/ DLHP/2018, tgl 03 Desember 23018, sebesar Rp.9.713.000	003/SP-TPST1/ PPK/ DLHP/2018	APBD	9.713.000,00

No.	SKPD	Uraian	No. Kontrak	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
		Pembayaran 100% atas Pekerjaan Perencanaan Pembangunan TPST/ Bank Sampah Simpang Tiga Bawan (Tugu Burung Anggang) sesuai SPK No : 003/SP-TPST2/PPK/DLHP/2018, tgl 11 Desember 2018, sebesar Rp.9.770.000	003/SP-TPST2/PPK/DLHP/2018	APBD	9.770.000,00
		ekerjaan Perencanaan Pembuatan Regol dan Pemasangan Paving Block Gedung Kantor	03/02.22.PRC-PRPPB/PPK/DLHP/2019	APBD	28.900.000,00
8	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	PEMBAYARAN 100% ATAS PEKERJAAN KONSULTAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG PENDUKUNG BARU BERDASARKAN SPK NOMOR : 03/PPK/disdukcapil-gdg pdkg/V/2019 TANGGAL 31 MEI 2019 SEBESAR Rp. 11.997.000,- (DITAMBAH GANTI UANG PERSEDIAAN KE-12 (DUA BELAS) Rp.760.000,-)	03/PPK/disdukcapil-gdg pdkg/V/2019	APBD	12.757.000,00
9	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	Pembayaran 100% pekerjaan Perencanaan Teknis Pasar Desa dan pembayaran Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)Pasar Desa Rp.900.000,- dan Honorarium Pejabat Pengadaan sebesar Rp.450.000,-	02/PA/BPMPD.Prc/2016	APBD	49.420.000,00
10	**Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja**	Perencanaan Gedung PKH	03/RENC.KONS/PA-DISNAKERTRANSOS/2012	APBD	24.106.000,00
		Perencanaan Pantry dan Arsip Kantor	003/NAKERTRANSOS/RENCANA-TU/2012	APBD	13.880.000,00
11	**Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata**	PERENCANAAN MASTER PLAN SPORT CENTER	426/02/PPK/RENC/PMPSC/DISPORAPAR/2017	APBD	123.565.860,00
		Perencanaan Teknis Pemasangan Atap Kanopi Stadion Murakata Barabai	PL.17/03/PA-DISPORAPAR/X/2018	APBD	19.932.000,00
		Perencanaan Teknis Pembangunan Pagar Lapangan Pelajar	PL.13/03/PA-DISPORAPAR/X/2018	APBD	20.515.000,00
		Perencanaan Teknis Rehabilitasi Lapangan Volly Ball	PL.22/03/PA-DISPORAPAR/X/2018	APBD	8.877.000,00
		Perencanaan teknis pembangunan tribun lapangan tenis murakata		APBD	14.953.500,00
		Review perencanaan gedung olahraga		APBD	48.945.600,00
		Pembangunan Kolam Renang	07/PPK-51032136/DISPORAPAR/2024	APBD	576.652.770,00
		PBYRN 83% UTK PKJN RHB SARPAS OW BATU BENAWA SSI SPK DGN CV. SULTAN BORNEO PERSADA NO:07/PPK-54825507/DISPORAPAR/2025 01 AGST 2025 RP. 4.259.964.820 & SPK ADD NO:07.A/PPK-54825507/DISPORAPAR/2025 08 AGST 2025 RP. 4.376.191.299	07/PPK-34825507/DISPORAPAR/2025	APBD	3.512.429.891,00
		PBYRN 94,66% UTK PKJN PNNTSN GOR MDGN SSI SPK DGN CV. MARCOPOLO NO:07/PPK-54882005/DISPORAPAR/2025 31 JULI 2025 RP. 3.935.183.129 & SPK ADD NO:07.A/PPK-54882005/DISPORAPAR/2025 26 SEPT 2025 RP. 4.312.028.228	SPK ADD NO.97.A/PPK	APBD	3.965.282.416,00
12	**Dinas Pertanian**	PERENC. GUDANG ILUNG	03/PRC.PG/PPK/BPP/2017	APBD	9.442.000,00
		Perencanaan Pagar BP Kec. BAS	03/PRC.PG/PPK/BPP/2017	APBD	9.442.000,00
		Perencana Rehab/Perbaikan Puskeswan dan Pos IB Tahun 2019 pada Dinas Pertanian Kab. HST	05/PPK/PSPKH-PRC/DIPERTA/2019	APBD	27.770.000,00
		Pekerjaan Perencanaan Rehab Pagar dan Pintu Aula Dinas Pertanian Kab. HST		APBD	35.219.190,00
13	**Dinas Perdagangan**	Pantai Hambawang	900/10/PT.PPH/DAGKOP-UMKM/2010	APBD	49.800.000,00
		Perencanaan Teknis Pasar Walangku	004/RENC-II/PA/DAGKOP-UMKM/2010	APBD	49.445.000,00
		Pasar Keramat	900/02.RENC.P.15/DPP-KUMKM/2011	APBD	49.300.000,00
		Perencanaan Teknis Pasar Keramat (Agribisnis dan SPBU)	900/02-RENC.P.10/DPP-KUMKM/2011.	APBD	49.180.000,00
		Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Arsip	03/PRC.GA/PPK/DPP-KUMKM/2014	APBD	5.000.000,00
		Perencanaan Rehabilitasi Pasar apam Pasar Keramat	050/PRC.PA/PPK/DPP-KUMKM/2014	APBD	49.450.000,00
		Perencanaan Teknis Pembangunan Kantor UPT Kemetroligian pd Keg. Pembangunan Gedung Kantor	03/PRC.PGK/PPK/DPP-KUMKM/2016	APBD	48.909.000,00
		(Pembayaran 100% Pek. Perencanaan Teknis Rehabilitasi Pasar Murakata sesuai kontrak/SPK dg CV. POLA ARSITEK KONSULTAN No. 03/PPK/SPK/RENC/K.12/DISDAG/2017 tgl 01 Nop 2017 Nilai Kontrak Rp. 49.845.000,-)	03/PPK/SPK/RENC/K.12/DISDAG/2017	APBD	50.070.000,00

No.	SKPD	Uraian	No. Kontrak	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
		(Pembayaran 100% Pek. Perencanaan Teknis Rehabilitasi Pasar Birayang sesuai Kontrak/SPK dg CV. DIGDAYA MAHARDIKA No. 03/PPK/SPK/RENC/K.11/DISDAG/2017 tgl 01 Nop 2017 Nilai Kontrak Rp. 49.550.000,-)	03/PPK/SPK/RENC/K.11/DISDAG/2017	APBD	49.775.000,00
		(Pembayaran 100% Pek. Perencanaan Teknis Rehabilitasi Pasar Pantai Hambawang sesuai Kontrak/SPK dg CV. POLA ARSITEK KONSULTAN No. 03/PPK/SPK/RENC/K.10/DISDAG/2017 tgl 01 Nop 2017 Nilai KontrakRp. 49.695.000,-)	03/PPK/SPK/RENC/K.10/DISDAG/2017	APBD	51.180.000,00
		Pembayaran 100% pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Pengadaan Pintu Pasar Agrobisnid Modern	03/PPK/P.04/DISDAG/2018	APBD	14.285.000,00
		Perencanaan Teknis Pasar Desa (Pasar Mu'ui dan Mangunang)	900/02-RENC.P.16/DPP-KUMKM/2011	APBD	34.750.000,00
		Perencanaan Teknis Pasar Desa (Pasar Sungai Buluh dan Pasar Rantau Kaminting)	900/02-RENC.P.17/DPP-KUMKM/2011	APBD	38.830.000,00
		Perencanaan Teknis Rehabilitasi WC Pasar	03/PRC.WC/PPK/DPP-KUMKM/2016	APBD	33.895.000,00
		Perencanaan Teknis Pembangunan Rumah Kemasan	530/02-KSL-01.IND/PPK-4349315/DISDAG/2023	APBD	47.581.097,50
		Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Air Bersih		APBD	29.000.000,00
14	**Sekretariat Daerah**	Perencanaan Teknis Desain Lampu PJU No SP2D : 3670/12031-LS/2012	027/SPK-02/P.PJU/PPK/31.01/SETDA/2012	APBD	46.500.000,00
		Rencana Pengadaan Tanah Pembangunan Pelebaran Jalan Ruas Barikin-Lok Laga Sekretariat Daerah Kab. HST		APBD	5.762.650,00
		Pembayaran 100% Perencanaan Rehab Mess Pemkab HST di Banjarmasin	07/SPK/02.42/ASET/2013	APBD	48.117.000,00
		Perencanaan Teknis Rehab Asrama Putra Mahasiswa Murakata Banjarbaru	03/01.07.01/PA-III/SETDA/2016	APBD	44.889.000,00
		Perencanaan Teknis Rehab Rumah Jabatan Sekda	03/01.02.40/PA-III/SETDA/2016	APBD	49.954.000,00
		Perencanaan Teknis Rehab Rumah Jabatan WKDH	03/02.02.40/PA-III/SETDA/2016	APBD	19.945.000,00
		Honor Pokja ULP Perencanaan Gedung Kantor Terpadu	027/SPK-02/P.PJU/PPK/31.01/SETDA/2012	APBD	1.620.000,00
		Perencanaan Teknis Bangunan Gedung Kantor Terpadu	07/05.02.42/PA-III/SETDA/2017	APBD	232.856.000,00
		Perencanaan teknis rehab bangunan gedung pendopo	07/05.02.42/PA-III/SETDA/2017	APBD	49.180.000,00
		Perencanaan Teknis Pemasangan Waterprofing plat dak kantor bupati	03-06.02.42/PA/SETDA/2018	APBD	15.604.360,00
		Perencanaan Teknis Rehabilitasi Gedung PKK	03-02.02.42/PPK/SETDA/2019	APBD	93.678.000,00
		Perencanaan Teknis Pembangunan Gudang Aset Setda	04/KPA-60782924/SETDA/2025	APBD	96.347.778,00
15	**Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Daerah**	PEMBAYRAN 100% UNTUK PEKERJAAN JASA KONSULTAN PERENCANAAN KONSTRUKSI GEDUNG KANTOR BKPSDMD YANG DILAKSAKAN OLEH CV. INDO BORNEO CONSULTANA DENGAN NOMOR KOTRAK 800/624/BKPSDMD/2025 TANGGAL 14 NOPEMBER 2025 SENILAI RP. 99.400.578,00	800/624/BKPSDMD/2025	APBD	99.400.578,00
16	**Kecamatan Batu Benawa**	Pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Ringan Ruang Pelayanan APBD 2014 (Gagal Pembangunan Karena Dananya dipangkas)	PL. 01/03./PPK Kec. Batu Benawa/XII/2014	APBD	2.700.000,00
17	**RSUD. H. Damanhuri Barabai**	Perencanaan Pembangunan HCU (DAU) 2024	02/REN-HCU/PPK/RSUD/2024	APBD	189.973.000,00
		Perencanaan Pembangunan Rawat INAP KRIS (APBD 2024)		APBD	64.982.000,00
		Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Jiwa & NAPZA (BLUD 2025)	02/PR-JN/PPK/RSUD/2025	APBD	192.088.000,00
		Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Ruangan Hemodialisa (Baru dan Lama) (BLUD 2025)	02/PR-HD/PPK/RSUD/2025	APBD	192.717.000,00
18	**Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah**	Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor	973/JKK.04/001/2025	APBD	95.302.602,00
19	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	Perencanaan Teknis Konstruksi Baliho Permanen	63.07/01.0/000008/2.16.2.21.2.20.01.0000/PPR/11/20	APBD	49.996.000,00
JUMLAH					**70.221.688.954,79**

Lampiran 9.h

Rekapitulasi Kontrak dengan Utang Retensi Tahun 2025 Per SKPD

No	Jenis	Nomor Kontrak	Uraian	Nilai Perolehan
1	Bangunan Gedung Kantor	SP AMD-01 No.610-05.1A/Kontrak/PPK-OPS/DPUPR/2025 tgl 9-10-2025	Pembangunan Fasilitas UPTD/Workshop Bid.SDA Lok.Kab.HST	47.069.982,00
2	Bangunan Gedung Kantor	ADD-02 NO. 640/02.B/RTH2/CKPR-DPUPR/2025 TGL 12-12-2025	Peningkatan/Rehabilitasi RTH Lapangan Dwi Warna	79.088.379,00
Jumlah Bangunan Gedung Kantor				**126.158.361,00**
1	Jalan Jaringan dan Irigasi	ADD-1 NO. 640/05/PRDDRG/CKPR-DPUPR/2025 TGL 10-12-2025	Peningkatan/Rehabilitasi Drainase Desa Durian Gantang	23.724.569,00
2	Jalan Jaringan dan Irigasi	SP No.610-05.1/SPK/PPK-PBPT/DPUPR/2025 tgl 27-8-2025	Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Perkuatan Tebing Ds.Hantakan Blkg SD Kec.Hantakan,Lok.Ds.Hantakan Kec.Hantakan	15.619.450,00
3	Jalan Jaringan dan Irigasi	SPK No.610-05.2.1A/SPK/PPK-PBPT/DPUPR/2025 tgl 1-12-2025	Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Perkuatan Tebing Sungai Garitan Ds.Pajukungan RT.03&05,Lok.Ds.Pajukungan Kec.Brb	19.952.300,00
4	Jalan Jaringan dan Irigasi	SPK ADD-01 No.610-05a.1/SPK/PPK-PJIP/DPUPR/2025 tgl 10-12-2025	Peningkatan Jaringan Irigasi Desa Pandanu Kec. Haruyan	5.382.853,00
5	Jalan Jaringan dan Irigasi	620/06-6/PK/PPK-SPBJL/DPUPR/2025 12/09/2025	Retensi 5% Pemeliharaan Berkala Jalan paket 6 Jln. Telaga (404)	49.259.000,00
6	Jalan Jaringan dan Irigasi	620/06-7/PK/PPK-SPBJL/DPUPR/2025 19/09/2025	Retensi 5% (Blm dbayar) Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 7 Jln. Ir. P. H. M. Noor (405)	42.891.700,00
7	Jalan Jaringan dan Irigasi	620/05-9/PK/PPK-SPBJL/DPUPR/2025 26/08/2025	Retensi 5% (blm dbayar) Pemeliharaan Berkala Jalan paket 9 Lingkar Simpang Walangsi - Bukat (252)	57.257.500,00
8	Jalan Jaringan dan Irigasi	620/05-9/PK/PPK-SPBJL/DPUPR/2025 26/08/2025	Retensi 5% (blm dbayar) Pemeliharaan Berkala Jalan paket 9 Jln. Kemasan (410)	28.628.750,00
9	Jalan Jaringan dan Irigasi	620/05-9/PK/PPK-SPBJL/DPUPR/2025 26/08/2025	Retensi 5% (blm dbayar) Pemeliharaan Berkala Jalan paket 9 Jln. Ulama (408)	28.628.750,00
10	Jalan Jaringan dan Irigasi	620/06-3/PK/PPK-SPBJL/DPUPR/2025 27/09/2025	Retensi 5% Pemeliharaan Berkala Jalan paket 3 Buluan - simp pandawan (128)	56.823.993,00
11	Jalan Jaringan dan Irigasi	620/06-3/PK/PPK-SPBJL/DPUPR/2025 27/09/2025	Retensi 5% Pemeliharaan Berkala Jalan paket 3 Simpang Pandawan - Mahang (092)	56.823.992,00
12	Jalan Jaringan dan Irigasi	620/06-8/PK/PPK-SRKJL/DPUPR/2025 31/10/2025	Retensi 5% Rekonstruksi Jalan Paket 8 Banua Jingah - Ilung (015)	104.479.700,00
13	Jalan Jaringan dan Irigasi	620/06-1/PK/PPK-SLSJL/DPUPR/2025 26/11/2025	Retensi 5% pelebaran Jalan Menuju Standar paket 1 Batu Tangga - Nateh Segmen 1 (187)	124.994.300,00
14	Jalan Jaringan dan Irigasi	620/05-2/PK/PPK-SLSJL/DPUPR/2025 20/10/2025	Retensi 5% Pelebaran Jalan Menuju Standar Paket 2 pagat - kahakan	69.774.100,00
15	Jalan Jaringan dan Irigasi	620/06-3/PK/PPK-SLSJL/DPUPR/2025 26/09/2025	Retensi 5% pelebaran Jalan Menuju Standar paket 3 timbuk hanyar - bakapas	47.548.800,00
16	Jalan Jaringan dan Irigasi	620/15-2/SWA/PPK-SBGJL/DPUPR/2025 11/11/2025	Retensi 5% (blm dbayar) Pembangunan Jalan Paket 2 Andang - Pengambau Hilir Dalam	148.185.370,00
17	Jalan Jaringan dan Irigasi	620/06-2/PK/PPK-SBGJB/DPUPR/2025 27/10/2025	Retensi 5% Pembangunan Jembatan Paket 2 Jembatan Gantung Batu Kijang	43.246.969,00
18	Jalan Jaringan dan Irigasi	620/06-1/PK/PPK-SBGJB/DPUPR/2025 02/12/2025	Retensi 5% Pembangunan Jembatan Paket 1 jembatan bakti	295.365.400,00
19	Jalan Jaringan dan Irigasi	620/06-3/PK/PPK-SBGJB/DPUPR/2025 22/12/2025	Retensi 5% (blm dbayar) Pembangunan Jembatan Paket 3 Jembatan Gantung Hantakan	43.810.550,00
20	Jalan Jaringan dan Irigasi	620/05-2/PK/PPK-SGTJB/DPUPR/2025 01/10/2025	Retensi 5% (blm dbayar) Penggantian Jembatan paket 2 jembatan mantaas	122.137.950,00
21	Jalan Jaringan dan Irigasi	620/05-8/PK/PPK-SPBJL/DPUPR/2025 21/11/2025	Retensi 5% (blm dbayar) Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 8 Bangkal - Kayu Bawang Segmen 1 (166)	239.386.800,00
22	Jalan Jaringan dan Irigasi	620/02-1/PK/PPK-SPBJL/DPUPR/2025 27/08/2025	Retensi 5% (blm dbayar) Pemeliharaan Berkala Jalan Tri Kesuma - Durian Punggal (073)	130.491.800,00
23	Jalan Jaringan dan Irigasi	620/02-1/PK/PPK-SPBJL/DPUPR/2025 27/08/2025	Retensi 5% (blm dbayar) Pemeliharaan Berkala Jalan Batali - Murung Taal Segmen 1 (074)	130.491.800,00
24	Jalan Jaringan dan Irigasi	620/06-4/PK/PPK-SPBJL/DPUPR/2025 24/10/2025	Retensi 5% (blm dbayar) Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 4 Durian gantang hilir - taras	109.112.350,00
25	Jalan Jaringan dan Irigasi	620/06-5/PK/PPK-SPBJL/DPUPR/2025 03/10/2025	Retensi 5% Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 5 Dangu - Simpang Waringin Segmen 1 (134)	101.355.000,00
26	Jalan Jaringan dan Irigasi	620/06-6/PK/PPK-SRKJL/DPUPR/2025 03/12/2025	Retensi 5% (blm dbayar) Rekonstruksi Jalan Paket 6 Birayang - Batu Tangga	140.911.750,00
27	Jalan Jaringan dan Irigasi	620/05-2/PK/PPK-SRKJL/DPUPR/2025 01/09/2025	Retensi 5% (blm dbayar) Rekonstruksi Jalan Paket 2 simpang pajukungan - timbuk baru (130)	81.387.500,00
28	Jalan Jaringan dan Irigasi	620/05-2/PK/PPK-SRKJL/DPUPR/2025 01/09/2025	Retensi 5% (blm dbayar) Rekonstruksi Jalan Paket 2 banua sungai - rantau keminting (201)	81.367.500,00
29	Jalan Jaringan dan Irigasi	620/06-7/PK/PPK-SRKJL/DPUPR/2025 03/12/2025	Retensi 5% Rekonstruksi Jalan Paket 7 Bulayak - Timan (102)	65.896.425,00
30	Jalan Jaringan dan Irigasi	620/06-7/PK/PPK-SRKJL/DPUPR/2025 03/12/2025	Retensi 5% Rekonstruksi Jalan Paket 7 Hantakan - Arangani (056)	65.896.425,00
31	Jalan Jaringan dan Irigasi	620/06-13/PK/PPK-SRKJL/DPUPR/2025 22/12/2025	Retensi 5% (blm dibayar) Rekonstruksi Jalan Paket 13 Ruas: Murung B. - Simpang Pabaan (103)	190.579.950,00
32	Jalan Jaringan dan Irigasi	620/06-14/PK/PPK-SPBJL/DPUPR/2025 22/12/2025	Retensi 5% (blm dbayar) Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 14 Ruas : Pengambau Hilir - Waringin (208)	291.887.650,00

33	Jalan Jaringan dan Irigasi	620/05-11/PK/PPK-SPBJL/DPUPR/2025 28/11/2025	Retensi 5% (blm dbayar) Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 11 Ilung - Birayang	523.008.900,00
34	Jalan Jaringan dan Irigasi	620/06-17/PK/PPK-SPBJL/DPUPR/2025 20/12/2025	Retensi 5% Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 17 Guha - Awang Besar	210.000.650,00
35	Jalan Jaringan dan Irigasi	620/02-2/PK/PPK-SPBJL/DPUPR/2025 18/07/2025	Retensi 5% (blm dbayra) Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 2 Ruas : Aluan Besar - Paya (049)	181.450.300,00
36	Jalan Jaringan dan Irigasi	620/05-4/PK/PPK-SRKJL/DPUPR/2025 10/10/2025	Retensi 5% Rekonstruksi Jalan Paket 4 Batu Panggung - Pengambau Hulu	147.004.450,00
37	Jalan Jaringan dan Irigasi	620/05-12/PK/PPK-SRKJL/DPUPR/2025 07/07/2025	Retensi 5% (blm dbayar) Rekonstruksi Jalan Paket 12 Ruas : Sungai Rangas - Pantai Hambawang Barat (200)	47.950.400,00
38	Jalan Jaringan dan Irigasi	620/05-9/PK/PPK-SRKJL/DPUPR/2025 07/07/2025	Retensi 5% (blm dibayar) Rekonstruksi Jalan Paket 9 Kindingan - Pancur Bungur (175)	92.158.150,00
39	Jalan Jaringan dan Irigasi	620/06-3/PK/PPK-SRKJL/DPUPR/2025 06/10/2025	Retensi 5% Rekonstruksi Jalan paket 3 karatau-ipil awang	164.454.700,00
40	Jalan Jaringan dan Irigasi	620/06-5/PK/PPK-SRKJL/DPUPR/2025 26/09/2025	Retensi 5% (blm dbayar) Rekonstruksi Jalan Paket 5 Tabat - Pahalatan (094)	147.380.700,00
41	Jalan Jaringan dan Irigasi	620/16-10/SWA/PPK-SRKJL/DPUPR/2025 14/08/2025	Retensi 5% Rekonstruksi Jalan Paket 10 Ruas : Kiyu - penitiranggang	62.925.360,00
42	Jalan Jaringan dan Irigasi	620/15-11/PK/PPK-SRKJL/DPUPR/2025 27/05/2025	Retensi 5% Rekonstruksi Jalan Paket 11 Ruas : Awang Baru - Kambat	84.449.865,00
Jumlah Jalan Jaringan dan Irigasi				**4.674.084.421,00**
Jumlah Keseluruhan				**4.800.242.782,00**

Lampiran 9.i

REKAPITULASI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PER SKPD PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	Saldo Awal 2025 Audited	Penambahan Tahun 2025				Pengurangan Tahun 2025					Saldo Akhir Neraca 2025
			Beban Penyusutan 2025	Mutasi SKPD Masuk	Koreksi Tahun Berjalan	Jumlah Penambahan 2025	Aset Tetap Kondisi Rusak Berat	Penghapusan	Mutasi SKPD Keluar	Koreksi Tahun Berjalan	Jumlah Pengurangan 2025	
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 3+7-12
1	Dinas Pendidikan	207.418.959.042,66	17.915.895.004,29	0,00	21.472.407.955,37	39.388.302.959,66	0,00	0,00	0,00	30.069.043.962,53	30.069.043.962,53	216.738.218.039,79
2a	Dinas Kesehatan	91.228.636.027,84	8.542.573.147,16	0,00	762.155.668,22	9.304.728.815,38	0,00	0,00	0,00	2.272.735.170,17	2.272.735.170,17	98.260.629.673,05
2b	RSUD. H. Damanhuri Barabai	160.199.524.619,15	38.087.232.239,00	1.275.334.650,00	8.459.188.667,94	47.821.755.556,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.021.280.176,09
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.447.352.264.670,44	43.695.359.213,99	0,00	931.264.643,33	44.626.623.857,32	0,00	0,00	0,00	125.613.464.617,97	125.613.464.617,97	1.366.365.423.909,79
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	44.396.956.638,14	4.283.342.345,72	0,00	252.175.743,55	4.535.518.089,27	0,00	0,00	0,00	313.653.297,40	313.653.297,40	48.618.821.430,01
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran	3.473.100.391,17	508.992.679,01	0,00	29.508.556,82	538.501.235,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011.601.627,00
6	Dinas Sosial, PP dan Perlindungan Anak	7.010.426.775,55	888.022.429,00	0,00	10.774.617,69	898.797.046,69	0,00	0,00	658.815.537,00	48.199.225,69	707.014.762,69	7.202.209.059,55
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.685.022.946,23	380.864.991,00	0,00	109.034.891,45	489.899.882,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.174.922.828,68
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	11.221.030.594,22	811.756.917,00	52.523.809,00	61.436.881,91	925.717.607,91	0,00	0,00	0,00	21.076.159,27	21.076.159,27	12.125.672.042,86
9	Dinas Pengelola Lingkungan Hidup dan Perhubungan	61.986.644.154,87	2.787.956.980,02	0,00	1.451.410.550,09	4.239.367.530,11	0,00	0,00	57.003.026,00	0,00	57.003.026,00	66.169.008.658,98
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.088.586.040,41	729.808.792,00	275.750.001,00	72.139.505,80	1.077.698.298,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.166.284.339,22
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.032.607.032,46	222.686.720,00	0,00	17.974.592,07	240.661.312,07	0,00	0,00	87.878.571,00	0,00	87.878.571,00	2.185.389.773,53
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.928.683.443,38	818.100.535,00	63.237.809,00	681.303.886,61	1.562.642.230,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.491.325.673,99
13	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	7.617.828.038,72	720.038.561,00	0,00	734.209,35	720.772.770,35	0,00	0,00	0,00	294.463.006,72	294.463.006,72	8.044.137.802,35
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	6.300.738.793,99	896.915.577,00	0,00	72.387.868,65	969.303.445,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270.042.239,64
15	Dinas Perpustakaan	2.910.866.111,94	682.226.595,00	0,00	8.982.601,36	691.209.196,36	0,00	646.294.429,00	0,00	0,00	646.294.429,00	2.955.780.879,30
16	Dinas Pertanian	27.272.069.241,14	1.397.925.722,00	0,00	944.770.211,55	2.342.695.933,55	0,00	0,00	604.397.000,00	0,00	604.397.000,00	29.010.368.174,69
17	Dinas Perdagangan	31.828.752.471,88	2.509.583.331,00	0,00	8.799.438.416,84	11.309.021.747,84	8.504.278.000,00	0,00	0,00	0,00	8.504.278.000,00	34.633.496.219,72
18	Sekretariat Daerah	59.659.030.771,92	6.701.063.163,12	468.235.000,00	300.629.506,81	7.469.927.669,93	0,00	295.385.000,00	2.223.835.440,00	508.736.872,24	3.027.957.312,24	64.101.001.129,61
19	Sekretariat DPRD	7.929.824.881,45	1.201.308.620,00	0,00	99.079.694,91	1.300.388.314,91	0,00	1.192.037.430,00	0,00	49.481.217,34	1.241.518.647,34	7.988.694.549,02
20	Badan Perecanaan Pembangunan, Penelitian dan Bangda	4.607.861.859,64	309.224.112,00	0,00	25.439.175,43	334.663.287,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942.525.147,07
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.031.711.742,13	252.454.020,00	516.295.817,00	18.116.320,05	786.866.157,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818.577.899,18
22	BPKAD (Pengelola Barang)	1.947.674.328,00	14.829.318,00	0,00	241.594.287,77	256.423.605,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204.097.933,77
23	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	3.857.665.776,22	302.429.349,00	123.984.000,00	34.643.399,83	461.056.748,83	0,00	0,00	0,00	24.239.374,59	24.239.374,59	4.294.483.150,46
24	Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Daerah	3.665.450.894,40	230.324.276,00	345.010.953,00	488.237.628,51	1.063.572.857,51	0,00	0,00	12.500.000,00	14.206.514,11	26.706.514,11	4.702.317.237,80
25	Inspektorat	1.931.058.338,99	587.177.057,00	0,00	31.179.714,20	618.356.771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549.415.110,19
26	Kecamatan Barabai	5.172.958.989,09	943.076.631,00	63.830.953,00	71.933.111,11	1.078.840.695,11	0,00	0,00	173.500.000,00	0,00	173.500.000,00	6.078.299.684,20
27	Kecamatan Pandawan	1.725.307.530,21	90.664.181,62	0,00	21.809.075,16	112.473.256,78	0,00	0,00	0,00	74.205.704,50	74.205.704,50	1.763.575.082,49
28	Kecamatan Labuan Amas Selatan	1.902.931.366,04	179.163.821,00	156.000.000,00	25.365.210,37	360.529.031,37	0,00	0,00	156.000.000,00	0,00	156.000.000,00	2.107.460.397,41
29	Kecamatan Labuan Amas Utara	1.662.199.718,85	141.867.393,00	0,00	24.337.376,08	166.204.769,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828.404.487,93
30	Kecamatan Haruyan	2.050.968.848,25	169.689.127,00	0,00	12.252.463,65	181.941.590,65	0,00	0,00	0,00	32.654.301,48	32.654.301,48	2.200.256.137,42
31	Kecamatan Batu Benawa	1.889.406.904,98	132.099.856,00	0,00	50.958,72	132.150.814,72	0,00	0,00	0,00	211.651.928,79	211.651.928,79	1.809.905.790,91
32	Kecamatan Hantakan	1.768.735.388,61	121.939.450,00	0,00	1.403.937,29	123.343.387,29	0,00	0,00	0,00	22.466.588,07	22.466.588,07	1.869.612.187,83
33	Kecamatan Batang Alai Selatan	2.781.579.977,97	317.627.879,00	0,00	6.593.319,59	324.221.198,59	0,00	0,00	0,00	236.627.877,59	236.627.877,59	2.869.173.298,97
34	Kecamatan Batang Alai Utara	1.852.860.885,23	172.754.612,00	39.057.143,00	52.507,51	211.864.262,51	0,00	0,00	156.000.000,00	123.347.460,47	279.347.460,47	1.785.377.687,27
35	Kecamatan Batang Alai Timur	1.271.048.134,00	57.761.814,00	0,00	25.372.574,75	83.134.388,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.182.522,75
36	Kecamatan Limpasu	1.565.540.106,00	122.908.467,00	0,00	33.399.945,20	156.308.412,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721.848.518,20
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.129.129.467,61	239.018.826,00	0,00	55.280.307,98	294.299.133,98	0,00	0,00	38.687.176,14	0,00	38.687.176,14	1.384.741.425,45
JUMLAH		2.239.355.642.943,78	138.166.663.751,93	3.379.260.135,00	45.653.859.983,53	187.199.783.870,47	8.504.278.000,00	2.133.716.859,00	4.168.616.750,14	159.930.253.278,93	174.736.864.888,08	2.251.818.561.926,18

Lampiran 10

REKAPITULASI MUTASI ASET LAINNYA - ASET TIDAK BERWUJUD PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	Saldo Awal 2025 Audited Aset Tidak Berwujud	PENAMBAHAN				Saldo Neraca Per 31 Des 2025
			Belanja Modal 2025	Utang Pengadaan Aset Tahun 2025	Kapitalisasi Belanja Barang Jasa	Reklas dari Aset Tetap	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3+4+5+6+8
1	Dinas Pendidikan	-	-	-	-	-	-
2a	Dinas Kesehatan	96.789.000,00	-	-	-	-	96.789.000,00
2b	RSUD. H. Damanhuri Barabai	174.405.000,00	-	-	-	-	174.405.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.674.618.499,90	-	-	793.630.000,00	-	2.468.248.499,90
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	-
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Sosial, PP dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Pengelola Lingkungan Hidup dan Perhubungan	414.379.118,00	-	-	-	-	414.379.118,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	44.756.667,00	-	-	-	-	44.756.667,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	85.648.589,00	-	85.648.589,00
13	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	74.435.000,00	-	-	-	-	74.435.000,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-	-	-	351.735.926,00	-	351.735.926,00
15	Dinas Perpustakaan	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Pertanian	48.400.000,00	-	-	-	-	48.400.000,00
17	Dinas Perdagangan	39.850.000,00	-	-	376.438.740,00	-	416.288.740,00
18	Sekretariat Daerah	523.794.000,00	-	-	-	-	523.794.000,00
19	Sekretariat DPRD	88.337.500,00	-	-	-	-	88.337.500,00
20	Badan Perecanaan Pembangunan, Penelitian dan Bangda	443.064.000,00	49.300.000,00	-	-	-	492.364.000,00
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-
22	BPKAD (Pengelola Barang)	-	-	-	-	-	-
23	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	433.550.000,00	-	-	-	-	433.550.000,00
24	Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Daerah	88.935.000,00	-	-	-	-	88.935.000,00
25	Inspektorat	-	-	-	-	-	-
26	Kecamatan Barabai	-	-	-	-	-	-
27	Kecamatan Pandawan	-	-	-	-	-	-
28	Kecamatan Labuan Amas Selatan	-	-	-	-	-	-
29	Kecamatan Labuan Amas Utara	-	-	-	-	-	-
30	Kecamatan Haruyan	5.500.000,00	-	-	-	-	5.500.000,00
31	Kecamatan Batu Benawa	-	-	-	-	-	-
32	Kecamatan Hantakan	-	-	-	-	-	-
33	Kecamatan Batang Alai Selatan	-	-	-	-	-	-
34	Kecamatan Batang Alai Utara	-	-	-	-	-	-
35	Kecamatan Batang Alai Timur	-	-	-	-	-	-
36	Kecamatan Limpasu	-	-	-	-	-	-
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		4.150.813.784,90	49.300.000,00	-	1.607.453.255,00	-	5.807.567.039,90

Lampiran 11

REKAPITULASI MUTASI ASET LAINNYA - ASET LAIN-LAIN PER 31 DESEMBER 2025

No	SKPD	Saldo Awal 2025 Audited Aset Lain-Lain	Reklas dari Aset Tetap	Mutasi SKPD Masuk	Koreksi Tahun Berjalan	Reklas dari LHP 2025	Pengembalian Temuan LHP Tehun 2024	Mutasi SKPD Keluar	Hibah	Saldo Neraca Per 31 Des 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10=4+5+6+7-8-9-10
1	Dinas Pendidikan	10.370.184.016,73	-	-	39.039.000,00	1.912.500,00	426.684.980,56	-	-	9.984.450.536,17
2a	Dinas Kesehatan	625.997.233,00	-	-	547.504,00	174.776.090,00	-	-	-	801.320.827,00
2b	RSUD. H. Damanhuri Barabai	10.829.792.299,57	-	-	-	7.338.923.735,85	2.039.891.952,57	-	-	16.128.824.082,85
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.768.870.100,27	-	-	-	3.069.706.000,00	1.220.197.710,39	-	-	3.618.378.389,88
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran	402.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	402.000.000,00
6	Dinas Sosial, PP dan Perlindungan Anak	116.511.000,00	-	-	-	425.000,00	-	115.907.000,00	-	1.029.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	33.705.000,00	-	-	-	-	-	-	-	33.705.000,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Pengelola Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-	-	-	-	2.550.000,00	-	-	-	2.550.000,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	59.922.750,00	-	-	-	59.922.750,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	336.421.313,86	-	-	-	602.748.094,00	74.671.313,86	-	-	864.498.094,00
15	Dinas Perpustakaan	-	-	-	-	16.205.000,00	-	-	-	16.205.000,00
16	Dinas Pertanian	1.054.005.548,56	-	-	-	-	-	-	-	1.054.005.548,56
17	Dinas Perdagangan	39.242.000,00	8.504.278.000,00	-	-	637.500,00	39.242.000,00	-	-	8.504.915.500,00
18	Sekretariat Daerah	1.059.587.387,22	-	-	-	14.592.500,00	-	-	-	1.074.179.887,22
19	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Badan Perecanaan Pembangunan, Penelitian dan Bangda	106.835.000,00	-	-	-	13.465.000,00	-	-	-	120.300.000,00
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	11.000.000,00	-	-	-	-	-	-	11.000.000,00
22	BPKAD (Pengelola Barang)	12.500.000,00	-	-	-	40.842.500,00	-	-	-	53.342.500,00
23	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	32.250.000,00	-	-	-	-	-	11.000.000,00	-	21.250.000,00
24	Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Inspektorat	8.625.000,00	-	-	-	3.475.000,00	-	-	-	12.100.000,00
26	Kecamatan Barabai	-	-	-	-	1.912.500,00	-	-	-	1.912.500,00
27	Kecamatan Pandawan	16.495.000,00	-	-	-	1.912.500,00	-	-	-	18.407.500,00
28	Kecamatan Labuan Amas Selatan	48.671.000,00	-	-	-	1.912.500,00	-	-	-	50.583.500,00
29	Kecamatan Labuan Amas Utara	63.428.027,00	-	-	3.510.000,00	2.125.000,00	-	-	-	69.063.027,00
30	Kecamatan Haruyan	70.500.000,00	-	-	-	1.912.500,00	-	-	-	72.412.500,00
31	Kecamatan Batu Benawa	-	-	-	-	2.387.500,00	-	-	-	2.387.500,00
32	Kecamatan Hantakan	5.500.000,00	-	-	-	1.912.500,00	-	-	-	7.412.500,00
33	Kecamatan Batang Alai Selatan	26.020.000,00	-	-	-	1.912.500,00	-	-	-	27.932.500,00
34	Kecamatan Batang Alai Utara	210.236.000,00	-	-	1.000.000,00	1.912.500,00	-	-	-	213.148.500,00
35	Kecamatan Batang Alai Timur	36.930.000,00	-	-	-	5.950.000,00	-	-	-	42.880.000,00
36	Kecamatan Limpasu	-	-	-	-	2.137.500,00	-	-	-	2.137.500,00
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		27.274.305.926,21	8.515.278.000,00	-	44.096.504,00	11.366.169.169,85	3.800.687.957,38	126.907.000,00	-	43.272.254.642,68

Lampiran 12

REKAPITULASI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PER SKPD PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	Saldo Awal 2025 Audited	Penambahan Tahun 2025				Pengurangan Tahun 2025					Saldo Akhir Neraca 2025
			Beban Penyusutan 2025	Mutasi SKPD Masuk	Koreksi Tahun Berjalan	Jumlah Penambahan 2025	Aset Tetap Kondisi Rusak Berat	Penghapusan	Mutasi SKPD Keluar	Koreksi Tahun Berjalan	Jumlah Pengurangan 2025	
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 3+7-12
1	Dinas Pendidikan	207.418.959.042,66	17.915.895.004,29	0,00	21.472.407.955,37	39.388.302.959,66	0,00	0,00	0,00	30.069.043.962,53	30.069.043.962,53	216.738.218.039,79
2a	Dinas Kesehatan	91.228.636.027,84	8.542.573.147,16	0,00	762.155.668,22	9.304.728.815,38	0,00	0,00	0,00	2.272.735.170,17	2.272.735.170,17	98.260.629.673,05
2b	RSUD. H. Damanhuri Barabai	160.199.524.619,15	38.087.232.239,00	1.275.334.650,00	8.459.188.667,94	47.821.755.556,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.021.280.176,09
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.447.352.264.670,44	43.695.359.213,99	0,00	931.264.643,33	44.626.623.857,32	0,00	0,00	0,00	125.613.464.617,97	125.613.464.617,97	1.366.365.423.909,79
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	44.396.956.638,14	4.283.342.345,72	0,00	252.175.743,55	4.535.518.089,27	0,00	0,00	0,00	313.653.297,40	313.653.297,40	48.618.821.430,01
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran	3.473.100.391,17	508.992.679,01	0,00	29.508.556,82	538.501.235,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011.601.627,00
6	Dinas Sosial, PP dan Perlindungan Anak	7.010.426.775,55	888.022.429,00	0,00	10.774.617,69	898.797.046,69	0,00	0,00	658.815.537,00	48.199.225,69	707.014.762,69	7.202.209.059,55
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.685.022.946,23	380.864.991,00	0,00	109.034.891,45	489.899.882,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.174.922.828,68
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	11.221.030.594,22	811.756.917,00	52.523.809,00	61.436.881,91	925.717.607,91	0,00	0,00	0,00	21.076.159,27	21.076.159,27	12.125.672.042,86
9	Dinas Pengelola Lingkungan Hidup dan Perhubungan	61.986.644.154,87	2.787.956.980,02	0,00	1.451.410.550,09	4.239.367.530,11	0,00	0,00	57.003.026,00	0,00	57.003.026,00	66.169.008.658,98
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.088.586.040,41	729.808.792,00	275.750.001,00	72.139.505,80	1.077.698.298,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.166.284.339,22
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.032.607.032,46	222.686.720,00	0,00	17.974.592,07	240.661.312,07	0,00	0,00	87.878.571,00	0,00	87.878.571,00	2.185.389.773,53
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.928.683.443,38	818.100.535,00	63.237.809,00	681.303.886,61	1.562.642.230,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.491.325.673,99
13	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	7.617.828.038,72	720.038.561,00	0,00	734.209,35	720.772.770,35	0,00	0,00	0,00	294.463.006,72	294.463.006,72	8.044.137.802,35
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	6.300.738.793,99	896.915.577,00	0,00	72.387.868,65	969.303.445,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270.042.239,64
15	Dinas Perpustakaan	2.910.866.111,94	682.226.595,00	0,00	8.982.601,36	691.209.196,36	0,00	646.294.429,00	0,00	0,00	646.294.429,00	2.955.780.879,30
16	Dinas Pertanian	27.272.069.241,14	1.397.925.722,00	0,00	944.770.211,55	2.342.695.933,55	0,00	0,00	604.397.000,00	0,00	604.397.000,00	29.010.368.174,69
17	Dinas Perdagangan	31.828.752.471,88	2.509.583.331,00	0,00	8.799.438.416,84	11.309.021.747,84	8.504.278.000,00	0,00	0,00	0,00	8.504.278.000,00	34.633.496.219,72
18	Sekretariat Daerah	59.659.030.771,92	6.701.063.163,12	468.235.000,00	300.629.506,81	7.469.927.669,93	0,00	295.385.000,00	2.223.835.440,00	508.736.872,24	3.027.957.312,24	64.101.001.129,61
19	Sekretariat DPRD	7.929.824.881,45	1.201.308.620,00	0,00	99.079.694,91	1.300.388.314,91	0,00	1.192.037.430,00	0,00	49.481.217,34	1.241.518.647,34	7.988.694.549,02
20	Badan Perecanaan Pembangunan, Penelitian dan Bangda	4.607.861.859,64	309.224.112,00	0,00	25.439.175,43	334.663.287,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942.525.147,07
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.031.711.742,13	252.454.020,00	516.295.817,00	18.116.320,05	786.866.157,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818.577.899,18
22	BPKAD (Pengelola Barang)	1.947.674.328,00	14.829.318,00	0,00	241.594.287,77	256.423.605,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204.097.933,77
23	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	3.857.665.776,22	302.429.349,00	123.984.000,00	34.643.399,83	461.056.748,83	0,00	0,00	0,00	24.239.374,59	24.239.374,59	4.294.483.150,46
24	Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Daerah	3.665.450.894,40	230.324.276,00	345.010.953,00	488.237.628,51	1.063.572.857,51	0,00	0,00	12.500.000,00	14.206.514,11	26.706.514,11	4.702.317.237,80
25	Inspektorat	1.931.058.338,99	587.177.057,00	0,00	31.179.714,20	618.356.771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549.415.110,19
26	Kecamatan Barabai	5.172.958.989,09	943.076.631,00	63.830.953,00	71.933.111,11	1.078.840.695,11	0,00	0,00	173.500.000,00	0,00	173.500.000,00	6.078.299.684,20
27	Kecamatan Pandawan	1.725.307.530,21	90.664.181,62	0,00	21.809.075,16	112.473.256,78	0,00	0,00	0,00	74.205.704,50	74.205.704,50	1.763.575.082,49
28	Kecamatan Labuan Amas Selatan	1.902.931.366,04	179.163.821,00	156.000.000,00	25.365.210,37	360.529.031,37	0,00	0,00	156.000.000,00	0,00	156.000.000,00	2.107.460.397,41
29	Kecamatan Labuan Amas Utara	1.662.199.718,85	141.867.393,00	0,00	24.337.376,08	166.204.769,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828.404.487,93
30	Kecamatan Haruyan	2.050.968.848,25	169.689.127,00	0,00	12.252.463,65	181.941.590,65	0,00	0,00	0,00	32.654.301,48	32.654.301,48	2.200.256.137,42
31	Kecamatan Batu Benawa	1.889.406.904,98	132.099.856,00	0,00	50.958,72	132.150.814,72	0,00	0,00	0,00	211.651.928,79	211.651.928,79	1.809.905.790,91
32	Kecamatan Hantakan	1.768.735.388,61	121.939.450,00	0,00	1.403.937,29	123.343.387,29	0,00	0,00	0,00	22.466.588,07	22.466.588,07	1.869.612.187,83
33	Kecamatan Batang Alai Selatan	2.781.579.977,97	317.627.879,00	0,00	6.593.319,59	324.221.198,59	0,00	0,00	0,00	236.627.877,59	236.627.877,59	2.869.173.298,97
34	Kecamatan Batang Alai Utara	1.852.860.885,23	172.754.612,00	39.057.143,00	52.507,51	211.864.262,51	0,00	0,00	156.000.000,00	123.347.460,47	279.347.460,47	1.785.377.687,27
35	Kecamatan Batang Alai Timur	1.271.048.134,00	57.761.814,00	0,00	25.372.574,75	83.134.388,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.182.522,75
36	Kecamatan Limpasu	1.565.540.106,00	122.908.467,00	0,00	33.399.945,20	156.308.412,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721.848.518,20
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.129.129.467,61	239.018.826,00	0,00	55.280.307,98	294.299.133,98	0,00	0,00	38.687.176,14	0,00	38.687.176,14	1.384.741.425,45
JUMLAH		2.239.355.642.943,78	138.166.663.751,93	3.379.260.135,00	45.653.859.983,53	187.199.783.870,47	8.504.278.000,00	2.133.716.859,00	4.168.616.750,14	159.930.253.278,93	174.736.864.888,08	2.251.818.561.926,18

Lampiran 13

DATA TUNGGAKAN PETERNAK SAPI PROGRAM DANA BERGULIR PER 31 DESEMBER 2025

No	Nama Peternak	Alamat	Nilai Tunggakan Per 31 Des 2021	Realisasi 2022	Nilai Tunggakan Per 31 Des 2022	Realisasi 2023	Nilai Tuggakan Per 31 Des 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Nilai Tuggakan Per 31 Des 2025	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
1	Suhaimi	Desa Tanah Habang	3.150.000,00	-	3.150.000,00	-	3.150.000,00	-	-	3.150.000,00	Meninggal Dunia
2	Hasyim/Mahran	Desa Tanah Habang	3.560.000,00	-	3.560.000,00	-	3.560.000,00	-	-	3.560.000,00	Meninggal Dunia
3	Anwar	Desa Cukan Lipai	13.650.000,00	-	13.650.000,00	-	13.650.000,00	-	-	13.650.000,00	Telah Dikonfirmasi
4	Rusli	Desa Paya	34.600.000,00	-	34.600.000,00	-	34.600.000,00	-	-	34.600.000,00	Meninggal Dunia
5	Abdul Samad	Desa Lunjuk	6.850.000,00	-	6.850.000,00	-	6.850.000,00	-	-	6.850.000,00	Meninggal Dunia
6	Insan	Desa Lunjuk	17.650.000,00	-	17.650.000,00	-	17.650.000,00	361.136,00	-	17.288.864,00	Telah Dikonfirmasi
7	Syahbana	Desa Lunjuk	7.300.000,00	-	7.300.000,00	-	7.300.000,00	-	-	7.300.000,00	Domisili Tidak Diketahui
8	Masdul Iman	Desa Lunjuk	3.300.000,00	-	3.300.000,00	657.500,00	2.642.500,00	-	-	2.642.500,00	Meninggal Dunia
9	Tajudin	Desa Lunjuk	9.500.000,00	-	9.500.000,00	-	9.500.000,00	-	-	9.500.000,00	Domisili Tidak Diketahui
10	Ardiansyah	Desa Lunjuk	2.100.000,00	-	2.100.000,00	-	2.100.000,00	-	-	2.100.000,00	Telah Dikonfirmasi
11	Ismail	Desa Lunjuk	2.250.000,00	-	2.250.000,00	-	2.250.000,00	-	-	2.250.000,00	Domisili Tidak Diketahui
12	Abdul Hadi	Kel. Birayang	10.058.000,00	-	10.058.000,00	-	10.058.000,00	-	-	10.058.000,00	Domisili Tidak Diketahui
13	Matran	Desa Kias/Paya	28.583.000,00	1.677.395,00	26.905.605,00	-	26.905.605,00	-	-	26.905.605,00	Domisili Tidak Diketahui
14	Jaji	Desa Aluan	6.847.500,00	-	6.847.500,00	-	6.847.500,00	-	-	6.847.500,00	Meninggal Dunia
15	M.Sani	Desa Mahang Sei Hanyar	5.755.000,00	-	5.755.000,00	-	5.755.000,00	-	-	5.755.000,00	Domisili Tidak Diketahui
16	Fahriansyah	Desa Banua Hanyar	1.500.000,00	-	1.500.000,00	297.500,00	1.202.500,00	-	-	1.202.500,00	Meninggal Dunia
17	Wahyudi	Desa Rantau Keminting	13.700.000,00	-	13.700.000,00	-	13.700.000,00	-	-	13.700.000,00	Telah Dikonfirmasi
18	Muhairi Saleh	Desa Rantau Keminting	13.200.000,00	-	13.200.000,00	-	13.200.000,00	-	-	13.200.000,00	Meninggal Dunia
19	Syaipullah	Desa Rantau Keminting	26.550.000,00	-	26.550.000,00	-	26.550.000,00	-	-	26.550.000,00	Domisili Tidak Diketahui
20	H. Ali Pandi	Desa Rantau Keminting	-	-	-	-	-	-	-		Telah Dikonfirmasi (Telah disetorkan berdasarkan STS
21	Hasan – Asul	Desa Kedundung	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00	Meninggal Dunia
22	Juni – Pahruji	Desa Kedundung	-	-	-	-	-	-	-		Telah Dikonfirmasi
23	Hamzah – Sayahdan	Desa Kedundung	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00	Meninggal Dunia
24	Tajudin AS	Desa Kedundung	15.950.000,00	-	15.950.000,00	-	15.950.000,00	-	-	15.950.000,00	Domisili Tidak Diketahui
25	Hidayat	Desa Kedundung	7.000.000,00	-	7.000.000,00	-	7.000.000,00	-	-	7.000.000,00	Meninggal Dunia
26	Ramli	Desa Kedundung	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	Telah Dikonfirmasi
27	Daransyah	Desa Kedundung	5.900.000,00	5.891.699,00	8.301,00	-	8.301,00	-	-	8.301,00	Meninggal Dunia
28	Raswan – Yanto	Desa Haruyan Seberang	8.800.000,00	-	8.800.000,00	-	8.800.000,00	-	-	8.800.000,00	Domisili Tidak Diketahui
29	Tisnayadi – Yanto	Desa Haruyan Seberang	2.100.000,00	-	2.100.000,00	-	2.100.000,00	-	-	2.100.000,00	Domisili Tidak Diketahui
30	Yusuf	Barabai/Gambah	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	Domisili Tidak Diketahui
31	Yanto	Barabai/Gambah	14.254.000,00	-	14.254.000,00	-	14.254.000,00	-	-	14.254.000,00	Domisili Tidak Diketahui
32	H. Ruspannor	Kel. Birayang	8.000.000,00	-	8.000.000,00	1.597.500,00	6.402.500,00	-	-	6.402.500,00	Meninggal Dunia
Jumlah			**298.107.500,00**	**7.569.094,00**	**290.538.406,00**	**2.552.500,00**	**287.985.906,00**	**361.136,00**	**0,00**	**287.624.770,00**	